PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2045

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
(BAPPERIDA)

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2045

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJPK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

3. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
6. Arah Pembangunan adalah tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan daerah.
7. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
8. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
9. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
10. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
12. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN

Pasal 2

(1) RPJPK berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah berdasarkan kondisi, potensi permasalahan dan kebutuhan

nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Daerah.

(2) RPJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMK yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.

(3) RPJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN
Pasal 3

(1) Sistematika RPJPK memuat antara lain:
   a. BAB I : PENDAHULUAN
   b. BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA
   c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
   d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
   e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
   f. BAB VI : PENUTUP

(2) Ketentuan mengenai RPJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPK.

(2) Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPK mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka RPJMK yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPK paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Hal yang berkaitan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Qanun ini bersifat asumtif, sehingga apabila terjadi perubahan terhadap target tersebut, maka perubahan tersebut dituangkan dalam Rancangan Qanun tentang RPJMK untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRK.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 29 April 2025 M
1 Dzulqaidah 1446 H

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 29 April 2025 M
1 Dzulqaidah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

TEUKU REZA FAHLEVI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH: (1/27/2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) Aceh Jaya Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Aceh. Dengan demikian dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup besar bagi penyusunan RPJMK (lima tahunan) dan RKPK (tahunan).

Penyusunan RPJPK Aceh Jaya tahun 2025-2045 lebih menekankan pada pendekatan makro, holistik dan fleksibel, agar dapat mengantisipasi berbagai dampak dari berlangsungnya pembangunan Kabupaten Aceh Jaya. Karena itu, proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, sehingga upaya yang dilakukan oleh setiap pelaku pembangunan dapat bersinergi, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak menuju cita-cita Kabupaten Aceh Jaya.

Pelaksanaan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 terbagi dalam 4 (empat) periode yaitu:

1. Periode Kesatu Tahun 2025-2029;
2. Periode Kedua Tahun 2030-2034;
3. Periode Ketiga Tahun 2035-2039; dan
4. Periode Keempat Tahun 2040-2045.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPK dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada RPJMK yaitu 5 (lima) tahunan dan melalui RKPK setiap tahunnya.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPK dilakukan oleh setiap SKPK yang dikoordinir oleh Bapperida.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Hal ini dimaksudkan bahwa target-target yang tercantum dalam Qanun tentang RPJPK ini bersifat asumtif terhadap kondisi 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan selanjutnya memproyeksikan target tersebut sampai dengan tahun 2045 sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi obyektif yang berkembang. Atas dasar hal tersebut, maka dimungkinkan terjadi perubahan target dengan alasan yang jelas dan terukur serta dituangkan dalam Rancangan Qanun tentang RPJMK untuk mendapat persetujuan dan penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 85

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanna wa ta'ala, atas Rahmat dan Karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) Aceh Jaya Tahun 2025-2045 telah selesai disusun. Salawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yaitu Rasul yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, kebodohan dan tidak berilmu pengetahuan ke jalan yang benar serta berperadaban mulia.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) Aceh Jaya Tahun 2025-2045 merupakan landasan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan selama 20 tahun kedepan. Dokumen ini memuat rumusan visi dan misi Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan isu strategis pembangunan daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gagasan strategis dalam perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 guna mencapai Aceh Jaya Istimewa dan Berjaya. Dokumen ini terdiri atas enam bab yang terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, Visi Misi Daerah, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, serta Penutup.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Dokumen ini tentunya tidak luput dari kekurangan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen RPJPK Aceh Jaya kedepannya. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Aceh Jaya dan kami mendorong partisipasi semua pihak untuk turut aktif mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045.

Calang, 29 April 2025
BUPATI ACEH JAYA

SAFWANDI, S.Sos.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR SINGKATAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 8
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya 11
1.4 Maksud dan Tujuan 13
1.5 Sistematika Penulisan 13

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA 17

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 17
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 17
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 17
2.1.1.2 Topografi 18
2.1.1.3 Geologi 20
2.1.1.4 Hidrologi 24
2.1.1.5 Klimatologi 26
2.1.1.6 Penggunaan Lahan 28
2.1.1.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 29
2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana 30
2.1.1.9 Ketahanan Energi 31
2.1.1.10 Ketahanan Air 32
2.1.1.11 Demografi 32
2.1.1.12 Potensi Pengembangan Wilayah 37

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 37
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 37
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 37
2.2.1.2 Laju Inflasi 39
2.2.1.3 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita 39
2.2.1.4 Ketimpangan Pendapatan 41
2.2.1.5 Kemiskinan 42
2.2.1.6 Pengangguran 44
2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia 45

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya 47
2.2.2.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 47
2.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah 48
2.2.2.3 Angka Kematian Ibu (AKI) 49
2.2.2.4 Angka Kematian Bayi (AKB) 49
2.2.2.5 Stunting 50
2.2.2.6 Usia Harapan Hidup 51
2.2.2.7 Indeks Keluarga Sehat 52
2.2.2.8 Indeks Perlindungan Anak 53
2.2.2.9 Indeks Ketimpangan Gender 53
2.2.2.10 Indeks Pembangunan Gender 54
2.3 Aspek Daya Saing 55
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah 55
2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 55
2.3.1.2 PDRB Per Kapita 56
2.3.1.3 Produksi dan Produktivitas Pertanian 56
2.3.1.4 Produksi Perkebunan 59
2.3.1.5 Populasi Peternakan 60
2.3.1.6 Produksi Perikanan 62
2.3.1.7 Sarana Perdagangan 62
2.3.1.8 Perkembangan Industri 64
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) 65
2.3.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 65
2.3.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) 66
2.3.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM) 66
2.3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 67
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah 68
2.3.3.1 Pengairan/Irigasi 68
2.3.3.2 Energi 70
2.3.3.3 Telekomunikasi 71
2.3.3.4 Infrastruktur Kesehatan 71
2.3.3.5 Jaringan Jalan dan Jembatan 73
2.3.3.6 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 76
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi 77
2.3.4.1 Indeks Rasa Aman (Angka Kriminalitas) 77
2.3.4.2 Indeks Daya Saing Daerah 77
2.3.4.3 Indeks Daya Saing Investasi (IDSI) 79
2.3.4.4 Penyelenggaraan Kehidupan Beragama 80
2.3.4.5 Penyelenggaraan Pendidikan Dayah 82
2.3.4.6 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB 83
2.3.4.7 Rasio Pembiayaan Perbankan Terhadap PDRB 84
2.3.4.8 Rasio Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB 84

2.4 Aspek Pelayanan Umum 85
2.4.1 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar 85
2.4.1.1 Pendidikan 85
2.4.1.2 Kesehatan 88
2.4.1.3 Pekerjaan Umum 90
2.4.1.4 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 91
2.4.1.5 Sosial 92
2.4.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar 93
2.4.2.1 Ketenagakerjaan 93
2.4.2.2 Pangan 94
2.4.2.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak 95
2.4.2.4 Lingkungan Hidup 95
2.4.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 96
2.4.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong 97
2.4.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 98
2.4.2.8 Perhubungan 98
2.4.2.9 Komunikasi dan Informatika 99
2.4.2.10 Statistik 100
2.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM) 100
2.4.2.12 Penanaman Modal 101
2.4.2.13 Perpustakaan dan Kearsipan 102
2.4.3.14 Seni Budaya dan Olahraga 103
2.4.3 Layanan Urusan Pilihan 104
2.4.3.1 Pertanian 104
2.4.3.2 Kelautan dan Perikanan 105
2.4.3.3 Pariwisata 106
2.4.3.4 Perdagangan 108
2.4.3.5 Perindustrian 109
2.4.3.6. Kehutanan 109
2.4.4 Urusan Penunjang 110
2.4.4.1 Perencanaan Pembangunan 110
2.4.4.2 Keuangan 111
2.4.4.3 Kepegawaian 112
2.4.4.4 Indeks Inovasi Daerah 114
2.4.4.5 Indeks Pelayanan Publik 114
2.5 Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 115
2.5.1 Kinerja Makro Pembangunan Aceh Jaya 116
A. Pertumbuhan Ekonomi 116
B. Pendapatan Per Kapita 116
C. Kemiskinan 116
D. Indeks Pembangunan Manusia 117

2.5.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Sasaran Pembangunan 117
2.5.3 Kesimpulan dan Rekomendasi Terhadap RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 118
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Saranan Prasarana Pelayanan Publik..... 119
2.6.1 Proyeksi Jumlah Penduduk..... 119
2.6.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 119
2.6.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur..... 120
2.6.4 Kepadatan Penduduk..... 120
2.6.5 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar 121
2.6.5.1 Proyeksi Kebutuhan Perumahan 121
2.6.5.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum 121
2.6.5.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik 122
2.6.5.4 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan 122
2.6.5.5 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan 123
2.6.5.6 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan 123
2.6.5.7 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 124
2.7 KLHS RPJPK Aceh Jaya 133
2.8 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah..... 137
2.8.1 Perwujudan Struktur Ruang 137
2.8.1.1 Perwujudan Sistem Pusat Permukiman 137
2.8.1.2 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana 137
2.8.1.2.1 Sistem Jaringan Transportasi 138
2.8.1.2.2 Sistem Jaringan Energi 138
2.8.1.2.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi 139
2.8.1.2.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air 139
2.8.1.2.5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 140
2.8.2 Perwujudan Pola Ruang 141
2.8.2.1 Perwujudan Kawasan Lindung 141
2.8.2.2 Perwujudan Kawasan Budidaya 142
2.8.3 Perwujudan Kawasan Strategis 144
2.8.4 Indikasi Kerja Pembangunan Berdasarkan RTRW 145
2.8.5 Perencanaan Sektoral..... 204
2.8.5.1 Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020-2045 204
2.8.5.2 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2038 206
2.8.5.3 Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021-2041 207
2.8.5.4 Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 209

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 211

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 211
3.2 Isu Strategis 231
3.2.1 Isu Strategis Global 231
3.2.2 Isu Strategis Nasional 234
3.2.3. isu Strategis provinsi Aceh 240
3.2.4 Isu Strategis Aceh Jaya 245

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH 251

4.1 Visi 251
4.2 Misi 255

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH 259

5.1 Arah Kebijakan Daerah 259
5.1.1 Arah Kebijakan Tahap I Tahun 2025-2029: Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan 259
5.1.2 Arah Kebijakan Tahap II Tahun 2030-2034: Percepatan Transformasi Pembangunan 261
5.1.3 Arah Kebijakan Tahap III Tahun 2035-2039: Pemantapan Transformasi Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing 262
5.1.4 Arah Kebijakan Tahap IV Tahun 2040-2045: Perwujudan Aceh Jaya Istimewa dan Berjaya Bersama Indoensia Emas 264
5.2 Sasaran Pokok 271
5.2.1 Arah Pembangunan Daerah 271
5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi 273
5.2.3 Indikator Utama Pembangunan 300

BAB VI PENUTUP 365

6.1 Kaidah Pelaksanaan 365
6.2 Pembiayaan Pembangunan 369

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Gampong Menurut Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 17
Tabel 2.2 Ketinggian Setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya 19
Tabel 2.3 Kemiringan Lereng Setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya 19
Tabel 2.4 Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Aceh Jaya 24
Tabel 2.5 Daerah Aliran Sunga (DAS) di Kabupaten Aceh Jaya 25
Tabel 2.6 Sebaran Wilayah Sungai (WS) di Kabupaten Aceh Jaya 26
Tabel 2.7 Rerata Curah Hujan, Hari Hujan dan Kecepatan Angin di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2021 27
Tabel 2.8 Rerata Suhu Udara, Tekanan Udara, dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017- 2021 28
Tabel 2.9 Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044 28
Tabel 2.10 Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Penyediaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 29
Tabel 2.11 Perkembangan Konsumsi Listrik Per Kapita Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019-2023 32
Tabel 2.12 Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023 34
Tabel 2.13 Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 35
Tabel 2.14 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2006-2023 (Persen) 38
Tabel 2.15 Perkembangan Laju Inflasi Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2014-2023 (Persen) 39
Tabel 2.16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Jenis Kelamin di Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2010-2023 47
Tabel 2.17 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2010-2023 47
Tabel 2.18 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2010-2023 48
Tabel 2.19 Perkembangan Jumlah Stunting di Aceh Jaya Tahun 2005-2023 50
Tabel 2.20 Perkembangan Usia Harapan Hidup di Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2010-2023 51
Tabel 2.21 Perkembangan Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2010-2023 52
Tabel 2.22 Perkembangan Nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021-2023 53
Tabel 2.23 Capaian Nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2021-2023 53
Tabel 2.24 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2018-2023 54

Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Gender di Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2010-2023 54
Tabel 2.26 Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023 (Ton) 58
Tabel 2.27 Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023 (Ton) 59
Tabel 2.28 Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 60
Tabel 2.29 Populasi Ternak Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 (ekor) 61
Tabel 2.30 Populasi Ternak Unggas Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 (ekor) 61
Tabel 2.31 Rencana Pengembangan Jaringan Sumberdaya Air 69
Tabel 2.32 Luas Irigasi Menurut Kondisi di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019-2022 69
Tabel 2.33 Perkembangan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2023 72
Tabel 2.34 Panjang Jalan Kabupaten Aceh Jaya Menurut Kondisi Jalan Tahun 2006-2024 74
Tabel 2.35 Panjang Jembatan Kabupaten Aceh Jaya Menurut Kondisi Tahun 2014-2024 75
Tabel 2.36 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tahun 2019-2023 78
Tabel 2.37 Indeks Daya Saing Investasi (IDSI) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022-2023 79
Tabel 2.38 Perkembangan Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Jaya 81
Tabel 2.39 Perkembangan Capaian Indikator Syariat Islam di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023 82
Tabel 2.40 Jumlah Pondok Pesantren, Santri, dan Tenaga Pendidik Di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023 82
Tabel 2.41 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2023 83
Tabel 2.42 Perkembangan Pembiayaan Perbankan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023 84
Tabel 2.43 Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019-2023 85
Tabel 2.44 Perkembangan Murid, Guru, dan Rasio Guru-Murid SD di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010-2023 87
Tabel 2.45 Perkembangan Murid, Guru, dan Rasio Guru-Murid SMP di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010-2023 87
Tabel 2.46 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 91
Tabel 2.47 Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 92
Tabel 2.48 Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023 93

Tabel 2.49 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2010-2023 95
Tabel 2.50 Perkembangan IKA, IKU, IKL, dan IKLH Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016-2023 96
Tabel 2.51 Jumlah Mobilitas Orang yang melalui Terminal dan Pelabuhan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023 99
Tabel 2.52 Perkembangan Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007-2023 99
Tabel 2.53 Realisasi Pelayanan Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023 100
Tabel 2.54 Jumlah Koperasi di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015-2023 101
Tabel 2.55 Perkembangan Realisasi Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016-2023 101
Tabel 2.56 Pelayanan Umum Bidang Perpustakaan Kabupaten Aceh Jaya 102
Tabel 2.57 Perkembangan Capaian Indikator Seni Budaya Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023 103
Tabel 2.58 Perkembangan Capaian Indikator Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023 104
Tabel 2.59 Perkembangan Tempat Wisata di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015-2023 106
Tabel 2.60 Perkembangan Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015-2023 107
Tabel 2.61 Perkembangan PNS Menurut Golongan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023 113
Table 2.62 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021-2023 113
Tabel 2.63 Perkembangan Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020-2023 114
Tabel 2.64 Perkembangan Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022-2023 115
Tabel 2.65 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Hingga Tahun 2045 119
Tabel 2.66 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin Hingga Tahun 2045 120
Tabel 2.67 Proyeksi Proporsi Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan Hingga Tahun 2045 120
Tabel 2.68 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Hingga Tahun 2045 121
Tabel 2.69 Proyeksi Kebutuhan Rumah 121
Tabel 2.70 Proyeksi Kebutuhan Air Minum 121
Tabel 2.71 Proyeksi Kebutuhan Listrik 122
Tabel 2.72 Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten Aceh Jaya Hingga 2045 122
Tabel 2.73 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan 123
Tabel 2.74 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan 124
Tabel 2.75 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 124
Tabel 2.76 Tabel Indikasi Program Utama RTRW Aceh Jaya Tahun 2024-2044 145

Tabel 2.77 *Road Map* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020-2045 204
Tabel 2.78 *Road Map* Pengendalian Kualitas Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 – 2045 205
Tabel 2.79 Jenis Industri Unggulan Kabupaten Aceh Jaya 207
Tabel 3.1 Permasalahan Pembangunan Tingkat Daerah dan Nasional Periode 2005-2025 212
Tabel 4.1 Sandingan Visi RPJPN, RPJPA dan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 252
Tabel 4.2 Perbandingan Antara Capaian Visi Nasional, Aceh dan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 253
Tabel 4.3 Perbandingan Antara Misi Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 256
Tabel 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Jaya Berdasarkan Misi dan Periode Pembangunan 265
Tabel 5.2 Penyelarasan Arah pembangunan Daerah dalam RPJPK Aceh Jaya dengan RPJPA dan RPJPN Tahun 2025-2045 271
Tabel 5.3 Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 273
Tabel 5.4 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 301
Tabel 5.5 Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 352

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya 13
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Jaya 18
Gambar 2.2 Perkembangan Nilai Indeks Resiko Bencana Aceh dan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015-2023 31
Gambar 2.3 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Bersih/Air Minum Layak 32
Gambar 2.4 Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023 33
Gambar 2.5 Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023 34
Gambar 2.6 Perkembangan Rasio Ketergantungan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023 36
Gambar 2.7 Struktur Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 37
Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023. 38
Gambar 2.9 Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tahun 2015-2023 40
Gambar 2.10 Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Makanan dan Non Makanan) di Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tahun 2015-2023 (Rp.) 41
Gambar 2.11 Ketimpangan Pendapatan Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2005-2023 42
Gambar 2.12 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Aceh Jaya Tahun 2005-2023 42
Gambar 2.13 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Aceh Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2005-2023 43
Gambar 2.14 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2005-2023 44
Gambar 2.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tahun 2011-2023 44
Gambar 2.16 Jumlah Pengangguran Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2023 45
Gambar 2.17 Indeks Pembangunan Manusia Aceh Jaya dan Aceh Tahun 2010-2023 46
Gambar 2.18 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) 49
Gambar 2.19 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) 50
Gambar 2.20 Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010-2023. 55
Gambar 2.21 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tahun 2010-2023 56
Gambar 2.22 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023 57
Gambar 2.23 Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023 (Ton/ha) 58
Gambar 2.24 Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2023 (Ton) 62

Gambar 2.25 Perkembangan Sarana Perdagangan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2023 63
Gambar 2.26 Perkembangan Jumlah Pedagang Besar, Menengah dan Kecil di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2023 63
Gambar 2.27 Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Besar di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019-2023 64
Gambar 2.28 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2023 65
Gambar 2.29 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2023 66
Gambar 2.30 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2023 67
Gambar 2.31 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023 68
Gambar 2.32 Perkembangan Rasio Prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2023 73
Gambar 2.33 Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2023 77
Gambar 2.34 Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tahun 2022 79
Gambar 2.35 Dimensi Indeks Pembangunan Syariah (IPS) Aceh Jaya Tahun 2024 80
Gambar 2.36 Perkembangan Angka Melek Al-Quran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023 81
Gambar 2.37 Perkembangan Jumlah SD dan SMP di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010-2023 86
Gambar 2.38 Perkembangan Tenaga Kesehatan dan Medis di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016-2023 (orang) 89
Gambar 2.39 Perkembangan Rasio Tenaga Kesehatan dan Medis di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016-2023 90
Gambar 2.40 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Air dan Air Bersih di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023..... 91
Gambar 2.41 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan dan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023..... 94
Gambar 2.42 Perkembangan Data Akta Kelahiran dan Akta Kematian Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2023..... 96
Gambar 2.43 Perkembangan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2023..... 97
Gambar 2.44 Indeks Desa Membangun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023..... 97
Gambar 2.45 Realisasi Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015-2023..... 98
Gambar 2.46 Jumlah SKPK dan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019-2023..... 103
Gambar 2.47 Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010-2023..... 105

Gambar 2.48 Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019-2023 106
Gambar 2.49 Perkembangan Jumlah Wisatawan yang Berkunjung di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023 108
Gambar 2.50 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Dalam PDRB Kab. Aceh Jaya Tahun 2010-2023 108
Gambar 2.51 Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010-2023 109
Gambar 2.52 Perkembangan Pendapatan Daerah Aceh Jaya Tahun 2005-2023 (PAD, Dana Perimbangan, dan Pembiayaan) 111
Gambar 2.53 Perkembangan Belanja Daerah Aceh Jaya Tahun 2005-2022 112

DAFTAR SINGKATAN

AKI	:	Angka Kematian Ibu
AKB	:	Angka Kematian Bayi
APIP	:	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
APBA	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
APBK	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
CAT	:	Cekungan Air Tanah
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
GRK	:	Gas Rumah Kaca
HLS	:	Harapan Lama Sekolah
IDG	:	Indeks Pemberdayaan Gender
IDM	:	Indesk Desa Membangun
IDSD	:	Indeks Daya Saing Daerah
IDSDB	:	Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan
IE	:	Indonesia Emas
IKA	:	Indeks Kualitas Air
IKL	:	Indeks Kualitas Lahan
IKP	:	Indeks Ketahanan Pangan
IKS	:	Indeks Keluarga Sehat
IKU	:	Indeks Kualitas Udara
IKLH	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPS	:	Indeks Pembangunan Syariat
IUP	:	Indikator Utama Pembangunan
KLHS	:	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kwh	:	kilowatt hour
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PDRB ADHB	:	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB ADHK	:	Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Konstan
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMA	:	Penanaman Modal Asing

PPH	:	Pola Pangan Harapan
RLS	:	Rata-rata lama Sekolah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJP	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPA	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
UHH	:	Umur Harapan Hidup
UUPA	:	Undang-Undang Pemerintahan Aceh

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara horizon waktu, perencanaan pembangunan meliputi jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (lima tahun), dan tahunan. Perencanaan pembangunan jangka panjang dikenal dengan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan RPJPD ini sangat penting karena akan menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan lainnya sehingga akan terbentuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah ini juga dimaksudkan untuk pencapaian peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam jangka panjang sesuai dengan amanat konstitusi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, RPJPD ini juga akan mampu meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari untuk memenuhi kebutuhan generasi di masa yang akan datang. Dokumen ini juga akan memberikan hak yang lebih besar bagi masyarakat di daerah ini untuk melaksanakan dan meningkatkan nilai-nilai sosial budaya yang sudah ada selama ini. Penyusunan RPJPD ini juga perlu mengintegrasikan kemajuan ilmu pengetahun, teknologi informasi, dan intelektualitas masyarakat yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tanpa ada dokumen RPJPD ini semua target yang ingin dicapai akan sangat susah karena tidak ada pedoman yang terarah, terstruktur, terpadu, terukur, dan adaptif terhadap kemajuan pembangunan daerah.

Agar pencapaian semua yang diharapkan dalam dokumen RPJPD ini dapat dicapai maka beberapa azas pelaksanaan pembangunan daerah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pertama, RPJPD ini harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat di daerah ini karena hakekat pembangunan tersebut adalah bagi kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di daerah. Kedua, demokratis, bahwa pembangunan daerah harus menjamin nilai-nilai demokrasi agar semua hak masyarakat baik sebagai objek maupun subjek pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Ketiga, berkeadilan, bahwa RPJPD ini harus memasukkan faktor keadilan bagi seluruh masyarakat, lintas level, lintas wilayah dan lintas waktu sehingga masyarakat merasa memiliki akan pelaksanaan pembangunan daerah ini.

Keempat, integral, bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan ini harus terpadu dan saling melengkapi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga semua aspek pelaksanaan pembangunan mencapai target secara efektif dan efisien. Kelima, harmonisasi dengan semua dokumen perencanaan dan penerima manfaat dari hasil pelaksanaan pembangunan daerah sehingga semua masyarakat menerima manfaat yang paling optimal dan mampu meningkatkan peran serta masyarakat yang semakin membaik. Dengan harmonisasi ini akan menimbulkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan daerah antarwilayah dan antarmasyarakat. Keenam, perencanaan pembangunan harus

transparan dan akuntabel untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap semua kegiatan pembangunan daerah sehingga hasil pembangunan daerah menjadi lebih baik lagi dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bersifat terbuka dalam tatakelola pelaksanaan RPJPD Aceh Jaya dan berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada saat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Ketujuh, perencanaan pembangunan harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin hak-hak generasi di masa yang akan datang terhadap semua aspek lingkungan yang menjadi hak milik semua warga daerah pada masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kedelapan, pelaksanaan pembangunan dari hasil perencanaan tersebut harus lebih efektif, efisien, dan tuntas sehingga alokasi dana daerah menjadi lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat terbesar bagi daerah.

Dokumen RPJPD ini akan menjadi dokumen yang sangat penting karena melingkupi waktu yang sangat panjang sehingga akan memberikan kondisi dinamis dari waktu ke waktu. Selain itu, dokumen RPJPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga posisi RPJPD ini sangat strategis dan sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan selama 20 tahun mendatang. Agar kesinambungan dan keselarasan pembangunan dapat dicapai maka calon kepala daerah harus menggunakan RPJPD ini sebagai acuan dalam menyusun visi dan misi sesuai dengan tema masing-masing periode RPJPD ini.

Pembangunan Aceh Jaya selama periode RPJPD tahun 2005-2025 sudah menunjukkan perubahan yang berarti dalam berbagai aspek pembangunan baik itu dalam bidang infrastruktur, ekonomi maupun kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya pada awal periode tahun 2005 melambat sebesar -33,89% sebagai dampak dari bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh khususnya Aceh Jaya pada tahun 2004. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya terus menunjukkan tren yang positif hingga mendekati akhir periode RPJPD. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya tercatat sebesar 4,15% lebih rendah 0,8 poin dari Provinsi Aceh yang berhasil tumbuh 4,23%.

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Jaya tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2005 Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Jaya sebesar 13,58% turun menjadi 2,88% pada tahun 2023. Nilai capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Jaya ini lebih baik dari capaian Provinsi Aceh yaitu sebesar 5,75% pada tahun 2023.

Selain itu, tingkat kemiskinan Aceh Jaya juga menunjukkan tren yang terus menurun dari tahun 2005 sampai tahun 2023 sama seperti yang dialami Provinsi Aceh. Pada tahun 2005, tingkat kemiskinan Aceh Jaya sebesar 30,65% turun menjadi 12,42% pada tahun 2023. Penurunan tingkat kemiskinan ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya yaitu alokasi anggaran infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat yang lebih besar dianggarkan melalui dana otonomi khusus dan sumber dana lainnya.

Adapun Indek Pembangunan Manusia Aceh Jaya pada awal periode RPJPD tahun 2005 sebesar 66,80 meningkat menjadi 72,44 pada tahun 2023. Peningkatan nilai indek ini disebabkan karena semakin baiknya perekonomian daerah dan layanan dasar masyarakat

yang semakin membaik. Capaian Indek Pembangunan Manusia Aceh Jaya tahun 2023 ini masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Aceh yaitu sebesar 74,70.

Indeks Gini atau ketimpangan pendapatan di Aceh Jaya tahun 2005 tercatat sebesar 0,249 dan pada tahun 2023 sebesar 0,267. Ketimpangan pendapatan di Aceh Jaya pada periode RPJPD tahun 2025-2025 masih dalam kategori ketimpangan rendah sama seperti Provinsi Aceh. Ketimpangan rendah ini menunjukkan bahwa secara umum distribusi pendapatan dalam masyarakat Aceh Jaya hampir merata.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

A. Persiapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang meliputi:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan orientasi RPJPD Tahun 2025-2045;
3. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045;
4. Analisa data evaluasi hasil RPJPD periode sebelumya;
5. Inventaris data informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
6. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

B. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Rumusan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 mencakup:
   a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
   b. Analisis tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik;
   c. Analisis permasalahan pembangunan daerah;
   d. Penelahaan dokumen rencana pembangunan terkait lainnya;
   e. Analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
   f. Visi dan misi daerah; dan
   g. Arah kebijakan dan sasaran pokok daerah.
2. Berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RTRW, serta memperhatikan rekomendasi KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, dan dokumen perencanaan lainnya.
3. Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 disusun melalui tahapan sebagai berikut:
   a. Pembahasan bersama antara Tim Penyusun RPJPD dengan Perangkat Daerah terhadap rancangan awal RPJPD untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
   b. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah;
   c. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai berita acara kesepakatan pembahasan Ranwal RPJPD dengan Perangkat Daerah paling lambat pada Minggu Keempat Bulan Desember Tahun 2023;
   d. Pelaksanaan forum konsultasi publik yang membahas rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah disempurnakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan Januari Tahun 2024;

e. Perumusan berita acara kesepakatan konsultasi publik yang ditanda tangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan;
f. Pemerintah Daerah dapat melakukan pembahasan dan menyepakati Rancangan Awal RPJPD bersama DPRK;
g. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 bersama DPRK, dilaksanakan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
    1) Kepala Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan atas pembahasan rancangan awal dengan DPRK;
    2) Kepala Daerah menyampaikan rancangan awal RPJPD kepada DPRK untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan awal bersama. Rancangan awal disampaikan paling lambat Minggu Pertama Bulan Januari Tahun 2024;
    3) Kesepakatan awal bersama DPRK mencakup kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan;
    4) Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan periode pertama yang disepakati dengan dengan DPRK menjadi dasar dalam perumusan rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2024-2029;
    5) Pembahasan dan penyepakatan terhadap rancangan awal RPJPD dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima oleh DPRK;
    6) Hasil pembahasan bersama rancangan awal RPJPD, dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan DPRK;
    7) Rancangan awal RPJPD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan;
    8) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5), tidak tercapai kesepakatan, maka dianggap DPRK telah menyetujui dan Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya;

C. Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045

1. Gubernur atau Bupati/Walikota mengajukan rancangan awal RPJPD kepada Menteri Dalam Negeri atau gubernur untuk dikonsultasikan;
2. Gubernur mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045;
3. Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD Kabupaten/Kota kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat (GWPP) dan diselaraskan dengan RPJPA Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045;
4. Konsultasi dapat dilakukan apabila dokumen telah diterima secara lengkap, terdiri atas:
    a. Surat permohonan konsultasi;
    b. Rancangan awal RPJPD;
    c. Hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya;
    d. Nota kesepakatan rancangan Awal RPJPD; dan

e. Formulir penyelarasan RPJPD dengan RPJPA.

5. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap permasalahan, isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam rancangan awal RPJPD;
6. Masukan hasil konsultasi disampaikan kepada gubernur dalam bentuk Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada kabupaten/kota dalam bentuk Surat GWPP/Kepala Bappeda Provinsi;
7. Konsultasi rancangan awal RPJPD Provinsi/Kab/Kota dilaksanakan paling lambat pada Minggu Keempat Januari Tahun 2024.

D. Penyusunan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045

1. Kepala Daerah menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan masukan yang telah dilakukan pada tahapan konsultasi rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045;
2. Penyempurnaan rancangan awal RPJPD menjadi Rancangan RPJPD, dilaksanakan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan April Tahun 2024.

E. Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045

1. Kepala Bappeda mengajukan rancangan RPJPD kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah guna memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD;
2. Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD;
3. Musrenbang RPJPD sedapat mungkin melibatkan pemangku kepentingan seperti dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRK, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan lainnya;
4. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang;
5. Musrenbang RPJPD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan April Tahun 2024;
6. Musrenbang RPJPD Provinsi dilaksanakan paling lambat pada Minggu Keempat Bulan April Tahun 2024.

F. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045

1. Perumusan rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD;
2. Perumusan rancangan akhir RPJPD dilaksanakan paling lambat Minggu Kedua Bulan Mei 2024.

G. Review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045

1. Rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045 direviu oleh APIP paling lambat awal Minggu Ketiga Bulan Mei 2024;
2. Mekanisme dan tatacara Reviu APIP RPJPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
3. Hasil review APIP terhadap rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045 disampaikan ke Bappeda paling lambat Minggu Ketiga Bulan Juni 2024.

H. Penyampaian Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 kepada DPRK

1. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 kepada DPRK untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRK dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045;
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Ketiga Bulan Mei Tahun 2024;
4. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat Bulan Mei Tahun 2024.

I. Pembahasan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045

1. Rancangan peraturan daerah dibahas untuk memperoleh persetujuan bersama DPRK dan Kepala Daerah;
2. Pembahasan dan persetujuan bersama RPJPD Provinsi, dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat Bulan Juni Tahun 2024;
3. Pembahasan dan persetujuan bersama RPJPD Kabupaten/Kota, dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama Bulan Juli Tahun 2024;
4. Rancangan peraturan daerah dan rancangan akhir RPJPD Provinsi disempurnakan sesuai persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada poin 2, dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat Bulan Juni Tahun 2024.
5. Rancangan peraturan daerah dan rancangan akhir RPJPD Kabupaten/Kota disempurnakan sesuai persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada poin 3, dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama Bulan Juli Tahun 2024.

J. Evaluasi Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045

1. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keselarasan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, serta kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk dievaluasi;

3. Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dievaluasi;
4. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan setelah Kepala Daerah menyerahkan surat permohonan yang disertai dengan dokumen, terdiri atas:
   a. Naskah persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRK terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
   b. Rancangan Perda tentang RPJPD;
   c. Laporan KLHS;
   d. Hasil reviu APIP terhadap rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045; dan
   e. Berita acara kesepakatan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045
5. Hasil evaluasi disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri dan kepada kabupaten/kota dalam bentuk keputusan gubernur;
6. Evaluasi RPJPD Provinsi, dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat Bulan Juli Tahun 2024.
7. Evaluasi RPJPD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama Bulan Agustus Tahun 2024.

K. Penetapan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 disempurnakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
2. Rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Sekretaris daerah;
3. Sekretaris Daerah menugaskan biro/bagian yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah;
4. Sekretaris Daerah melalui biro/bagian yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 kepada Kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman;
5. Kepala Bappeda menyampaikan kepada Kepala Daerah rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah dibubuhi paraf persetujuan;
6. Penyelesaian penyempurnaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah, pembubuhan paraf persetujuan rancangan peraturan daerah RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama Bulan Agustus Tahun 2024;
7. Penyelesaian penyempurnaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah, pembubuhan paraf persetujuan rancangan peraturan daerah RPJPD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat Bulan Agustus Tahun 2024;

8. Kepala Daerah menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

Untuk menghasilkan dokumen RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 yang berkualitas, selaras dan sinkron dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPA Tahun 2025-2045 serta menampung aspirasi masyarakat, sudah dilakukan upaya-upaya yang melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunannya, yaitu:

1. Penyusunan SK Tim Penyusun RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045
2. Mengikuti FGD Ranwal RPJP Aceh Tahun 2025-2045 pada tanggal 29-30 Agustus 2023 di Kyriad Muraya Hotel
3. Melakukan Kick Off Meeting Penyusunan Rancangan Awal RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dengan para pemangku kepentingan pada tanggal 7 September 2023
4. FGD Penyusunan ranwal RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dengan SKPK tanggal 27 November 2023;
5. Sinkronisasi Visi, Misi, Arah kebijakan antara RPJPN dan RPJPA dengan RPJPD kabupaten/kota Tanggal 29–30 November 2023 di Takengon
6. FGD Finalisasi penyusunan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dengan Tenaga Ahli pada tanggal 15 Desember 2023
7. Melakukan konsultasi draft ranwal RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dengan Pj. Bupati Aceh Jaya pada tanggal 16 Desember 2023
8. Melakukan FGD pra konsultasi publik RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dengan Tenaga Ahli dan SKPK pada tanggal 18 Desember 2023
9. Melakukan forum konsultasi publik RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dengan para pemangku kepentingan pada tanggal 28 Desember 2023
10. Mengikuti pembahasan dengan Bappeda Aceh untuk membahas pembangunan kewilayahan dan sinkronisasi antara Ranwal RPJPA 2025-2045 dengan RPJPD Aceh Jaya Tahun 2025-2045 pada tanggal 2-3 Januari 2024 di Bappeda Aceh
11. Melakukan desk penyesuaian arah kebijakan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dengan SKPK pada tanggal 31 Januari 2024
12. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPS Aceh Jaya terkait ketersediaan data indikator RPJP Aceh Jaya Tahun 2025-2045 pada tanggal 1 Februari 2024
13. Mengikuti desk konsultasi dan penyelarasan RPJPN dan RPJPA dengan RPJPD Aceh Jaya tanggal 5-7 Februari 2024 di Bappeda Aceh
14. Melakukan Musrenbang RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 pada tanggal 23 April 2024

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sebagai suatu dokumen perencanaan yang strategis dan melingkupi jangka panjang maka aspek legal formal dan legal standing penyusunan dokumen ini harus dimasukkan sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di masa yang akan datang. Dasar hukum ini disusun sesuai dengan hirarki peraturan perundangan yang berlaku secara runut dan sistematis. Dasar hukum penyusunan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesi tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
l. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

m. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
n. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
r. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
s. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;
t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
y. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

z. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023;
aa. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/sj, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 tanggal 10 Januari 2024.
bb. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan lembaran Aceh Nomor 68);
cc. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040 (Lembaran Aceh Tahun 2020 Nomor 1);
dd. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
ee. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
ff. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya 2024-2044 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 1).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

1.3.1. Keterkaitan dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, menyatakan bahwa penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. Selanjutnya, untuk menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi dan sinergi antara RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, maka RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 wajib memperhatikan hal hal sebagai berikut:

a. Periode RPJPK Aceh Jaya mengikuti periode RPJPN Tahun 2025-2045.
b. Memastikan 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.
c. Memastikan keselarasan muatan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dengan arah kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

1.3.2. Keterkaitan dengan RTRW

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tanggal 10 Januari 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terdapat tiga aspek penyelarasan yang meliputi:

a. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan pola ruang pada sektor unggulan/potensi daerah;
b. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan struktur ruang mendukung pertumbuhan sektor unggulan/potensi daerah; dan
c. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan kawasan strategis nasional dan daerah dengan fokus pada pengembangan kawasan strategis yang mendukung ekonomi, sosial budaya, daya tampung dan daya dukung lingkungan, dan sebagainya.

1.3.3. Keterkaitan dengan Dokumen KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang wajib disusun untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah (RPJPD) dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RTRW, RPJP dan RPJM serta kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. KLHS RPJPD menjadi bahan masukan dalam persiapan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 terutama dalam perumusan visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator utama pembangunan daerah.

1.3.4. Keterkaitan dengan Hasil Evaluasi RPJPK Periode Sebelumnya

RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan erat dengan hasil evaluasi RPJPK Aceh Jaya periode sebelumnya karena hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan dan perencanaan pembangunan jangka panjang ke depan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah, mengidentifikasi hambatan, tantangan dan faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah pada RPJPK periode sebelumnya.

1.3.5. Keterkaitan dengan RPJMK

RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMK Aceh Jaya terutama dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator utama pembangunan daerah lima tahunan.

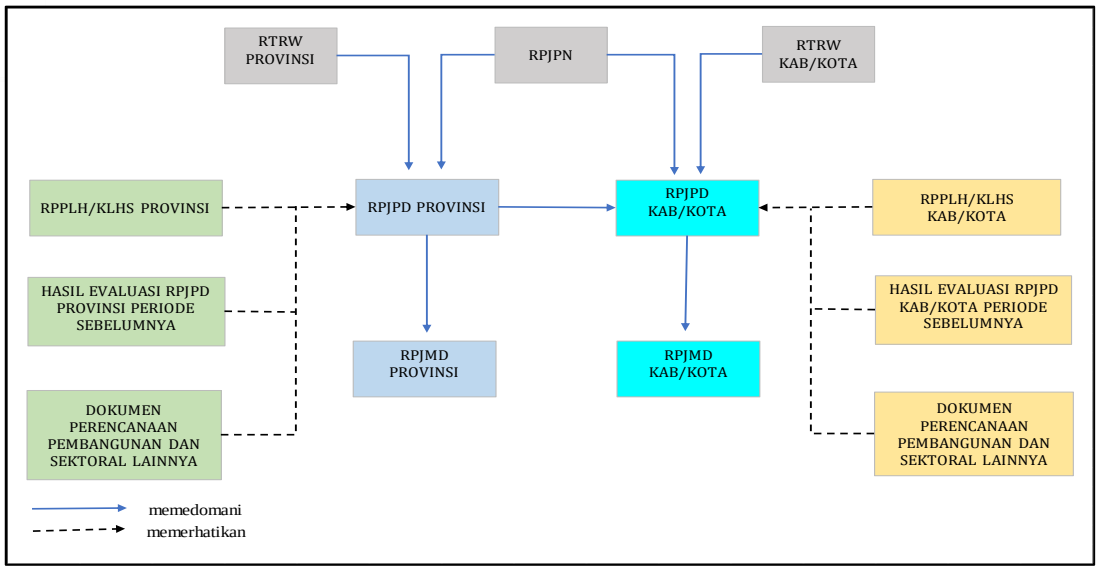

Sumber: Inmendagri No 1 Tahun 2024

Gambar 1. Bagan Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 yaitu sebagai arahan dan acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pembangunan Kabupaten Aceh Jaya sehingga capaian pembangunan daerah menjadi lebih jelas, terarah, dan integratif. Melalui maksud tersebut maka visi, misi, dan arah pembangunan yang sudah disepakati bersama dapat dicapai dengan lebih optimal.

Selanjutnya, tujuan penyusunan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 adalah:

a. Menjamin pencapaian koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas pembangunan daerah baik antarruang, antarwilayah, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintahan daerah.
b. Menjamin kesinambungan pembangunan sekaligus konsistensi antarwaktu dalam kurun yang panjang.
c. Optimalisasi peran dan fungsi semua pemangku kebijakan dan pelaksanaan pembangunan baik sebagai subjek maupun objek pembangunan daerah.
d. Menjamin alokasi sumberdaya secara lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran dengan hasil yang lebih mumpuni dan berkelanjutan.
e. Menjaga konsistensi dan keserasian RPJMD terhadap RPJPD untuk semua periode dalam RPJPD ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Menguraikan pengertian ringkas tentang RPJPK, proses penyusunan RPJPK, alasan mengapa tentang RPJPK disusun, dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menguraikan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPK pada khususnya sesuai dengan peraturan perundangan dan produk hukum terkait.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPK dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Menguraikan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan yang mencakup RPJPN, RPJP Aceh, dan RTRW Kabupaten Aceh Jaya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menguraikan secara jelas maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPK.

1.5. Sistematika Penulisan

Menguraikan sistematika penulisan masing-masing bab dalam RPJPK.

Bab II Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Menguraikan dan menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana yang dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang relevan

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menguraikan dan menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat yang meliputi capaian indikator kinerja urusan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga yang dilengkapi dengan tabel dan grafik.

2.3. Aspek Daya Saing

Mengemukakan pengantar analisis dan menjelaskan capaian indikator kinerja urusan kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia yang dilengkapi dengan tabel dan grafik.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Mengemukakan pengantar analisis dan menjelaskan capaian indikator kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pelayanan wajib dan urusan layanan pilihan yang dilengkapi dengan tabel dan grafik.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPK Aceh Jaya Tahun 2005-2025

Mengemukakan pengantar analisis dan menjelaskan capaian indikator kinerja urusan kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia yang dilengkapi dengan tabel dan grafik.

2.6 Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini setidaknya memuat tren demografi dan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menguraikan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dan menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka Panjang daerah.

3.2. Isu Strategis

Menguraikan isu-isu strategis yang terpenting yang harus menjadi perhatian dan memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah

Bab IV Visi dan Misi Daerah

4.1. Visi

Bagian ini menyajikan secara jelas visi daerah yang menggambarkan cita-cita yang ingin diwujudkan selama 20 (dua puluh) tahun sampai tahun 2045 akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

4.2. Misi

Menguraikan secara jelas dan sistematis misi yang telah dirumuskan untuk pencapaian visi dan sasaran pokok.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan lima tahunan selama 4 (empat) periode RPJPK. Arah kebijakan pembangunan menguraikan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok.

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Ke I (2025-2029)
5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Ke II (2030-2034)
5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Ke III (2035-2039)
5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Ke IV (2040-2045)

5.2. Sasaran Pokok

Menguraikan sasaran pokok pembangunan lima tahunan selama 4 (empat) periode RPJPK.

Bab VI Penutup

Memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanan dan pendanaan, sistem intensif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen resiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik dan pembiayaan pembangunan sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Aceh Jaya salah satu kabupaten yang terletak di wilayah pantai pesisir Barat Selatan Aceh. Kabupaten Aceh Jaya merupakan pemekaran dari kabupaten induk (Aceh Barat) yang terbentuk berdasarkan Undang–undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kebupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Kabupaten dengan ibukota Calang ini pada awal pembentukannya terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Teunom, Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoiniet, dan Jaya. Selanjutnya, berdasarkan Qanun Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Pasie Raya dalam Kabupaten Aceh Jaya, kecamatan baru bertambah 3 (tiga) Kecamatan. Dengan demikian, Kabupaten Aceh Jaya memiliki 9 (Sembilan) Kecamatan, 21 Kemukiman dan 172 Gampong (Tabel 2.1).

Luas wilayah Kabupaten Aceh Jaya mencapai 3.872,23 km^2, atau setara 6,81 persen dari keseluruhan wilayah Aceh. Secara geografis, Kabupaten Aceh Jaya terletak antara 04°21’-05°15 Lintang Utara (LU) dan 95°16’-96°3’ Bujur Timur (BT) yang berbatasan wilayah dengan 3 (tiga) kabupaten (Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Barat). Adapun batas wilayah Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia dan Kabupaten Aceh Barat
- Sebelah Timur: Kabupaten Aceh Barat
- Sebelah Barat: Samudera Hindia

Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Jumlah Gampong Menurut Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Gampong
Jaya	Lamno	45.336,96	34
Indra Jaya	Kuta Bahagia	30.272,98	14
Sampoiniet	Lhok Kruet	45,712,80	19
Darul Hikmah	Pajar	39.559,61	19
Setia Bakti	Lageun	46.989,71	13
Krueng Sabee	Krueng Sabee	68.786,83	17
Panga	Keude Panga	53.522,51	20
Teunom	Teunom	19.412,07	22

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Gampong
Pasie Raya	Tuwie Kareung	37.629,46	14
Total		**387.223**	**172**

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044

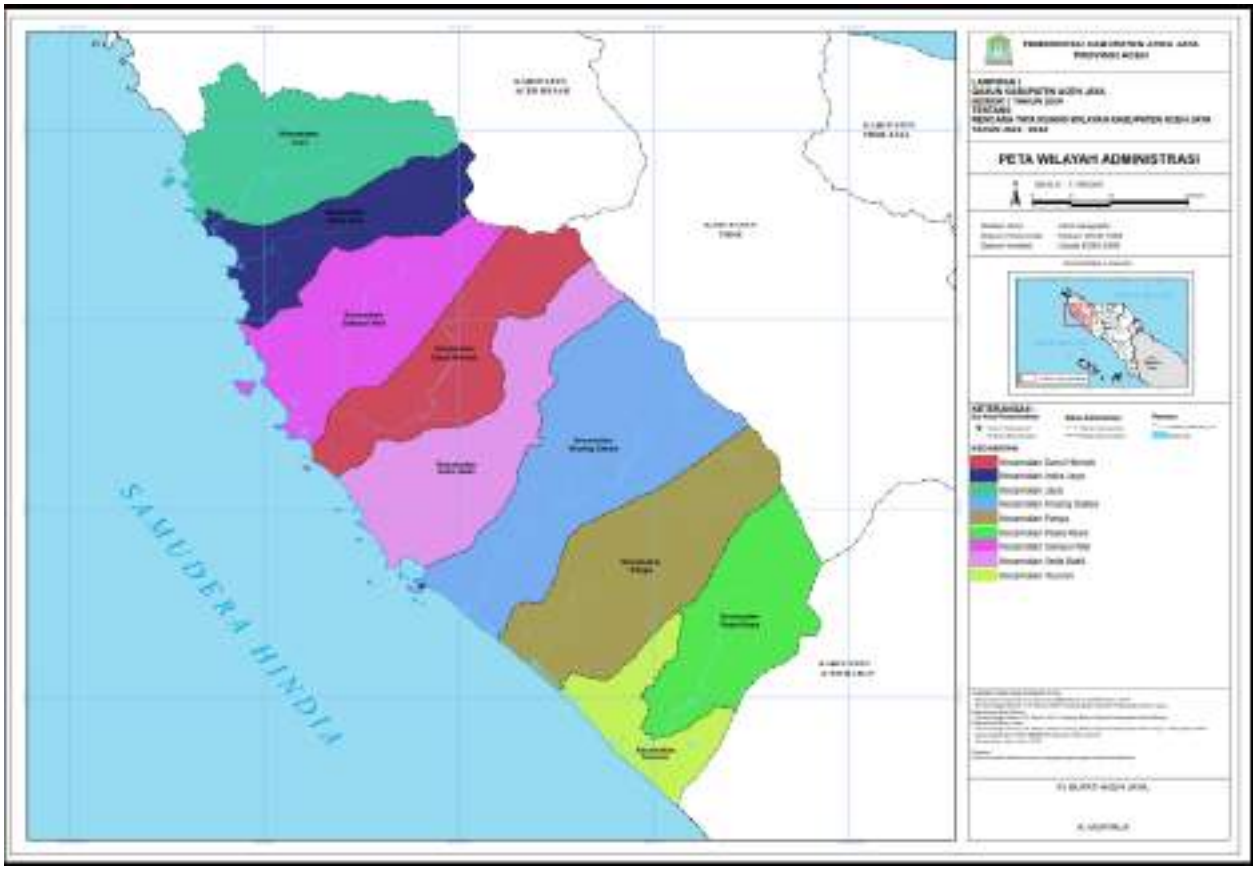

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Jaya

2.1.1.2 Topografi

Secara georafis, kondisi Kabupaten Aceh Jaya berbatasan dengan laut. Topografi wilayah Aceh Jaya memiliki daratan yang berbukit-bukit, tebing terjal, dan kemiringan yang tajam yang dialiri sungai besar dan kecil. Kabupaten Aceh Jaya berada pada ketinggian antara 0 – 1.700 diatas permukaan laut. Topografi keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya mayoritas berada di ketinggian 0-100 mdpl seluas 138.483,43 ha. Selanjutnya wilayah yang berada di ketinggian 300-600 mdpl seluas 82,514,19 ha. Dari sisi ketinggian lahan, Kecamatan Sampoiniet dan Kecamatan Darul Hikmah termasuk yang memiliki ketinggian > 4.000 mdpl.

Tabel 2.2. Ketinggian Setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya

Kecamatan	Ketinggian (mdpl)						Jumlah Total (mdpl)
	0-100	100-300	300-600	600-1000	1000-1300	>1300	
Jaya	9.067,68	8.290,40	11.337,91	11.434,24	3.320,04	1.886,70	45.336,96
Indra Jaya	6.191,49	5.634,16	6.411,48	7.758,13	2.913,09	1.364,64	30.272,98
Sampoi Niet	15.507,92	7.407,58	8.012,39	8.143,07	2.188,81	4.453,03	45.712,79
Darul Hikmah	10.991,06	7.182,86	4.747,36	5.300,44	6.678,82	4.659,07	39.559,62
Setia Bakti	21.906,18	9.120,08	2.235,39	7.180,15	5.450,65	1.097,27	46.989,71
Krueng Sabee	24.548,09	16.059,97	18.568,33	7.481,27	2.127,11	2,07	68.786,83
Panga	15.845,58	15.083,90	18.593,20	3.726,49	273,35	-	53.522,52
Teunom	19.235,76	176,30	-	-	-	-	19.412,06
Pasie Raya	15.189,68	6.742,31	12.608,14	2.833,53	255,81	-	37.629,47
Aceh Jaya	**138.483,43**	**75.697,55**	**82.514,19**	**53.857,31**	**23.207,67**	**13.462,79**	**387.223**

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044

Berdasarkan kelerengannya, Kabupaten Aceh Jaya di dominasi lereng curam (24-45%) seluas 121.738,65 ha atau 31,44%. Selanjutnya lereng datar (0-8%) dengan luasan sebesar 81.820,97 ha atau 21,13% dari luas lahan keseluruhan. Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Aceh Jaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kemiringan Lereng Setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya

Kecamatan	Kelerengan					Jumlah Total (%)
	0-8% (Datar)	8-15% (landai)	15-25% (Agak Curam)	24-45% (Curam)	>45% (Sangat Curam)	
Jaya	1.369,43	2.297,42	5.351,61	18.085,89	18.232,61	45.336,96
Indra Jaya	2.541,22	2.613,64	6.185,39	11.051,31	7.881,43	30.272,98
Sampoi Niet	9.206,15	3.995,94	8.224,30	15.217,61	9.068,78	45.712,78
Darul Hikmah	6.816,44	2.919,00	6.867,54	15.600,11	7.356,55	39.559,64
Setia Bakti	11.095,80	6.973,08	10.851,84	13.748,64	4.320,36	46.989,71
Krueng Sabee	11.620,86	10.788,17	18.074,99	22.736,11	5.566,69	68.786,81
Panga	9.784,60	8.568,34	13.817,47	16.391,58	4.960,52	53.522,51
Teunom	17.202,71	1.410,62	590,23	204,42	4,09	19.412,07
Pasie Raya	12.183,75	6.388,91	6.792,03	8.703,00	3.561,78	37.629,47

Kecamatan	Kelerengan					Jumlah Total (%)
	0-8% (Datar)	8-15% (landai)	15-25% (Agak Curam)	24-45% (Curam)	>45% (Sangat Curam)	
Aceh Jaya	**81.820,97**	**45.955,12**	**76.755,39**	**121.738,65**	**60.952,80**	**387.222,94**

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044

.

2.1.1.3 Geologi

Ditinjau dari kondisi geologi, keadaan geologi Kabupaten Aceh Jaya umumnya ditempati oleh berbagai jenis batuan. Data geologi dan jenis batuan ini diperlukan untuk mengetahui kondisi fisik secara umum, terutama pada batuan dasar yang akan menjadi tumpuan dan sumber daya alam wilayah Kabupaten Aceh Jaya, serta beberapa kemungkinan bencana yang bisa timbul akibat kondisi geologinya atau lebih dikenal dengan bencana alam aspek geologi. Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya diantaranya sebagai berikut:

1. *Aluvium (Qh)*, merupakan endapan sungai dan endapan tepi pantai, terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lumpur dan lempung. Endapan tepi pantai berupa gosong pasir pantai, pasir berwarna hitam.
2. *Bentaro Volcanic,* berupa batuan basal warna abu-abu kehitaman, kompak, bagian permukaan sebagian sudah lapuk. Sebaran satuan batuan ini membentuk perbukitan terjal.
3. *Lamno Limestone Formation / Formasi Batugamping Lamno (Mull)*, berupa batugamping klastik, berwarna hitam, keras dan pejal, pada umumnya termalihkan, dijumpai urat kalsit. Batuan ini dijumpai di bagian timur-laut dari daerah inventarisasi (Kecamatan Jaya), membentuk perbukitan terjal (Ge Gueruthe).
4. *Formasi Lamno* (*Mullr*), berupa batugamping bak terumbu. Batuan ini dijumpai di bagian timurlaut dari daerah inven- tarisasi, termasuk ke dalam Kecamatan Jaya, berwarna abu-abu sampai hitam, keras dan pejal, dijumpai urat kalsit, membentuk perbukitan terjal.
5. *Lhoong Formation,* disusun oleh mikrokristalin karbonat (mikrit), menunjukkan tekstur klastik, terbreksikan,kemas terbuka, tepilah sedang, berbutir halus hingga berukuran 1,5 mm, bentuk butir menyudut tanggung-membulat, disusun oleh fragmen – fragmen fosil dan *mudstone* didalam masa dasar mikrokristalin karbonat.
6. *Raba Limestone Formation (Murl)*, berupa batugamping berwarna putih kusam-kelabu, kecoklatan, berbutir sedang kasar, berlapis, berongga. Sebaran batuan ini membentuk areal perbukitan terjal.
7. *Sikuleh Batolith*, berupa batugamping masif, umumnya sudah mengalami rekristalisasi menyerupai terumbu, pejal, keras, berwarna hitam, mengalami marmerisasi.
8. *Teunom Limestone Formation / Formasi Batugamping Teunom (Mutlr)*, berupa batugamping masif, umumnya sudah mengalami rekristalisasi menyerupai terumbu, pejal, keras, berwarna hitam, mengalami marmerisasi oleh Batolit Sikuleh. Batuan ini

dijumpai di Alue Cue, bagian tenggara dari daerah inventarisasi, termasuk ke dalam Kecamatan Setia Bakti, membentuk perbukitan terjal disekitar Batolit Sikuleh, membujur berarah baratlaut – tenggara.

9. *Tangla Formation/Formasi Tangla (Tlt)*, berupa batulempung berwarna putih kekuningan sampai coklat kemerahan, sebagian berwarna abu-abu kecoklatan berbintik putih, lembek sampai keras, mudah hancur, setempat bersisipan dengan batunapal dan batupasir. Batuan ini dijumpai membentuk perbukitan yang ditumbuhi tanaman karet di daerah Suak Beukah, Kecamatan Sampoiniet.
10. *Geumpang Formation,* terdiri dari satuan batupasir, kerakal, kerikil dan lempung yang tak terbedakan.
11. *Formasi Tangla, Fasies Vulkanik (Tltv),* berupa batupasir lempungan, warna segar hijau dan warna lapuk coklat kemerahan, getas dan rapuh. Batulempung berwarna putih sampai kuning kecoklatan serta abu-abu berbintik putih. Batuan tersebut merupakan lapukan batuan gunungapi menengah hingga mafik.
12. *Calang Volcanic Formation / Formasi Batuan Gunungapi Calang (Tmvc)*, berupa batuan terobosan, dijumpai kontak batuan antara diorit (warna abu-abu) dengan batugamping (pejal, keras dan kompak, warna hitam, dijumpai urat kuarsa), dijumpai miner- alisasi logam (besi dan pirit), tersingkap di Ge Lawang, Desa Iejereungeh, Kecamatan Sampoi Niet. Dijumpai juga retas berwarna segar abu-abu berbintik putih.
13. *Unga Diorite / Diorit Unga (Tmiu)*, merupakan batuan tero- bosan berupa stok diorit/granodiorit, berwarna abu-abu, kompak, keras, tersingkap di daerah Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet membentuk bukit dengan ketinggian ± 50 m, sedangkan di daerah Kuala Crakmo batuan ini mengalami mineralisasi dengan dijumpainya mineral pirit, membentuk bukit dengan ketinggian ± 25 m.
14. *Kueh Formation/Formasi Kueh (Tmk)*, merupakan batulanau, batulempung berwarna putih, lunak.
15. *Formasi Tutut (QTt)*, berupa batulempung berwarna putih abu-abu, kuning kecoklatan dan hitam, lembek dan liat jika terkena air.

Adapun jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan klasifikasi tanah nasional dikelompokkan menjadi 8 jenis yaitu *Aluvial, Gleisol, Kambisol, Mediteran, Oksisol, Organosol, Padsolik, dan Regosol*. Adapun sifat dan karakteristik jenis-jenis tersebut sebagai berikut:

1. *Aluvial* adalah jenis tanah-tanah muda, yang belum mempunyai perkembangan struktur, dicirikan oleh susunan horizon A-C. Tanah terbentuk dari endapan aluvium pada *landform aluvial* dan *fluvio marin*. Jenis tanah yang dijumpai diklasifikasikan kedalam macam tanah *Aluvial Gleik* dan *Aluvial Eutrik* yang setara dengan *Typic Fluvaquents* dan *Udifluvents*.
2. *Gleisol* adalah jenis tanah-tanah yang sudah mempunyai perkembangan struktur, dicirikan oleh susunan horizon A-Bg-C, mempunyai horison bawah permukaan kambik dengan ciri hidromorfik pada kedalaman ≤ 50 cm. Tanah terbentuk dari endapan aluvium sungai pada *landform* aluvial dan fluvio-marin. Pada tingkat macam, tanah ini

menurunkan *Gleisol Fluvik, Gleisol Eutrik* dan *Gleisol Distrik*. Sifat-sifat tanah tersebut sebagai berikut:

- *Gleisol Fluvik* setara dengan *Fluvaquentic Endoaquepts* (Soil Survey Staff, 2014). Penampang tanah dalam, drainase terhambat, tekstur agak halus, terdapat perlapisan bahan endapan berbeda (sifat fluvik). Reaksi tanah masam, kapasitas tukar kation sedang dan kejenuhan basa tinggi. Kadar C organik dan N total sedang. Kadar P_2O_5 dan K_2O total rendah sampai sedang.

3. *Kambisol* adalah tanah-tanah yang sudah mempunyai perkembangan struktur, yang ditunjukkan oleh susunan horison A-Bw-C pada tanah berdrainase baik, atau horison A-Bg-C pada tanah berdrainase terhambat. Tanah ini terbentuk dari bahan induk beberapa jenis bahan induk yaitu endapan aluvium pada *landform* aluvial, dari batupasir, serpih, batusabak pada *landform* tektonik, batugamping pada *landform* karst, dan dari batuan vulkanik tua pada *landform* vulkan. Jenis tanah ini menurunkan macam tanah *Kambisol Litik, Kambisol Gleik, Kambisol Kromik, Kambisol Eutrik* dan *Kambisol Distrik.*
4. *Mediteran* termasuk tanah-tanah yang sudah mempunyai perkembangan struktur cukup kuat, dicirikan oleh horison B argilik atau kandik, dengan susunan horison A-Bt-C dan mempunyai kejenuhan basa tinggi (>35%). Tanah terbentuk dari bahan induk batugamping pada *landform* karst. Jenis tanah ini menurunkan macam tanah *Mediteran Haplik* dengan sifat-sifat sebagai berikut:
   - *Mediteran Haplik* setara dengan *Typic Hapludalfs* (Soil Survey Staff, 2014). Tanah berkembang dari bahan induk batugamping pada *landform* karst. Penampang tanah dalam, drainase baik, dan tekstur halus. Reaksi tanah netral, kapasitas tukar kation tinggi, dan kejenuhan basa tinggi. Kandungan C organik dan N total rendah sampai sedang. Kandungan P_2O_5 total dan K_2O total rendah sampai sedang.
5. *Oksisol* adalah tanah-tanah yang sudah mempunyai perkembangan sangat lanjut, dicirikan oleh terbentuknya horison B oksik atau kandik dengan susunan horison A-Bo-C. Struktur remah sampai gumpal halus di horison B. Tanah terbentuk dari bahan induk granit, granodiorit, diorit dan gabro pada *landform* intrusi vulkan. Jenis tanah ini menurunkan macam tanah *Oksisol Kandik* dan *Oksisol Haplik*, dengan sifat-sifat sebagai berikut :
   - *Oksisol Kandik* setara dengan *Typic Kandiudox* (Soil Survey Staff, 2014). Penampang tanah sangat dalam, drainase baik, warna coklat terang, dan tekstur halus. Reaksi tanah masam, kapasitas tukar kation liat rendah (<16 cmol(+)/kg liat), dan kejenuhan basa sangat rendah. Kandungan C organik dan N total rendah, demikian juga kandungan P_2O_5 total dan K_2O total tergolong rendah.
   - *Oksisol Haplik* setara dengan *Typic Hapludox* (Soil Survey Staff, 2014). Penampang tanah sangat dalam, drainase baik dan tekstur halus. Reaksi tanah masam, kapasitas tukar kation liat rendah (<16 cmol(+)/kg liat), dan kejenuhan basa sangat rendah. Kandungan C organik dan N total rendah, demikian juga kandungan P_2O_5 total dan K_2O total tergolong rendah.
6. *Organosol* atau tanah gambut adalah tanah-tanah yang terbentuk dari endapan bahan organik, yang merupakan hasil proses akumulasi sisa-sisa tumbuhan/vegetasi yang telah

melapuk pada suatu daerah cekungan. Pada kondisi anaerob tingkat dekomposisi bahan organik berjalan lambat, sehingga terjadi penumpukan bahan organik yang makin tebal, dan dapat membentuk suatu kubah (*dome*). Gambut di daerah ini tergolong gambut topogen air tawar dan kubah gambut. Jenis tanah ini menurunkan macam tanah *Organosol Fibrik, Organosol Hemik* dan *Organosol Saprik* dengan sifat-sifat berikut:

- *Organosol Fibrik* setara dengan *Typic Haplofibrists* (Soil Survey Staff, 2014). Tanah mempunyai ketebalan sedang (100-<200 cm) dan berada diatas substratum tanah mineral bertekstur agak halus, drainase terhambat, kematangan fibrik (kadar serat >60%), pH sangat masam, KTK tanah tinggi dan kejenuhan basa sangat rendah.
- *Organosol Hemik* setara dengan *Typic/Terric/Fluvaquentic Haplohemists* (Soil Survey Staff, 2014). Tanah mempunyai ketebalan bervariasi dari dangkal (<100 cm), sedang (100-<200 cm) sampai sangat dalam (300-<500 cm) dan berada diatas substratum tanah mineral bertekstur agak halus, drainase terhambat, kematangan hemik (kadar serat 18-60%), pH sangat masam, KTK tanah tinggi dan kejenuhan basa rendah.
- *Organosol Saprik* setara dengan *Typic Haplosaprists* (Soil Survey Staff, 2014). Tanah mempunyai ketebalan bervariasi dari dangkal (<100 cm) sampai sangat dalam (300-<500 cm) dan berada diatas substratum tanah mineral bertekstur agak halus, drainase terhambat, kematangan saprik (kadar serat <17%), pH sangat masam, KTK tanah tinggi dan kejenuhan basa rendah

7. *Padsolik* adalah tanah-tanah yang sudah mempunyai tingkat perkembangan struktur cukup kuat, yang dicirikan oleh terbentuknya horison penciri B argilik, dengan susunan horison A-Bt-C. Tanah terbentuk dari bahan induk batupasir, batuliat/serpih dan batusabak pada *landform* tektonik. Jenis tanah ini hanya menurunkan macam tanah *Podsolik Ortoksik, Podsolik Kromik* dan *Podsolik Haplik* dengan sifat-sifat sebagai berikut:
   - *Podsolik Ortoksik* setara dengan *Typic Kanhapludults* (Soil Survey Staff, 2014). Tanah ini terbentuk dari batuan andesit-basalt pada *landform* vulkan. Penampang tanah dalam, drainase baik, dan tekstur halus. Reaksi tanah masam, kapasitas tukar kation (liat) rendah dan kejenuhan basa juga rendah. Kandungan C organik dan N total rendah, kandungan P_2O_5 total dan K_2O total rendah.
   - *Podsolik Kromik* setara dengan *Typic Hapludults* (Soil Survey Staff, 2014). Tanah ini terbentuk dari batupasir pada *landform* tektonik dan dari batuan vulkan dasit dan andesit-basalt pada *landform* vulkan. Penampang tanah dalam, warna coklat kuat/terang di horison B, drainase baik, dan tekstur halus. Reaksi tanah masam, kapasitas tukar kation rendah dan kejenuhan basa juga rendah. Kandungan C organik dan N total rendah, kandungan P_2O_5 total dan K_2O total rendah.
   - *Podsolik Haplik* setara dengan *Typic Hapludults* (Soil Survey Staff, 2014). Tanah ini terbentuk dari batupasir dan batuliat/serpih pada *landform* dataran dan perbukitan tektonik. Penampang tanah dalam, warna coklat kuat di horison B, drainase baik, dan tekstur halus. Reaksi tanah masam, kapasitas tukar kation rendah dan kejenuhan basa juga rendah. Kandungan C organik dan N total rendah, kandungan P_2O_5 total dan K_2O total rendah.

8. *Regosol* adalah tanah-tanah yang belum mempunyai perkembangan struktur, dicirikan oleh tekstur kasar dan susunan horizon A-C. Tanah terbentuk dari bahan induk endapan pasir marin. Tanah ini menurunkan macam tanah *Regosol Gleik* dan *Regosol Eutrik* yang setara dengan *Typic Psammaquents* dan *Typic Udipsamments* (Soil Survey Staff, 2014). Sifat- sifat tanah tersebut adalah sebagai berikut:
   - *Regosol Eutrik* mempunyai penampang dalam, tekstur kasar (pasir berlempung, pasir) berkerikil, dan drainase cepat. Reaksi tanah netral, kapasitas tukar kation rendah, dan kejenuhan basa tinggi. Kadar C organik dan N-total rendah, kadar P_2O_5 dan K_2O total juga rendah.
   - *Regosol Gleik* mempunyai penampang dalam dan memperlihatkan sifat hidromorfik berwarna kelabu di lapisan bawah, tekstur agak kasar (pasir berlempung), dan drainase agak cepat. Reaksi tanah netral, kapasitas tukar kation rendah, dan kejenuhan basa rendah.

2.1.1.4 Hidrologi

Kabupaten Aceh Jaya memiliki potensi sumberdaya air yang melimpah. Potensi sumberdaya ini sangat bermanfaat dan berdaya guna dalam mendorong berbagai kegiatan aktivitas ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang berbagai kegiatan, seperti pertanian, industri rumah tangga, dan lainnya. Disisi lainnya, potensi sumberdaya air yang berasal dari sungai, harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, mengingat dalam waktu tertentu (curah hujan tinggi), sering terjadi banjir.

1. Cekungan Air Tanah

Cekungan Air Tanah (CAT) merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologik, tempat semua kejadian hidrogeologik seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Sedangkan air tanah yaitu air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Agar ketersediaan air tanah dapat terus berkelanjutan maka pengelolaan air tanah mulai dari pengambilan kebijakan, penyusunan strategi dan rencana pengelolaan serta pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah harus mengacu ke Peta Cekungan Air Tanah (CAT).

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, sebagian Kabupaten Aceh Jaya yaitu Kecamatan Teunom, Kecamatan Pasie Raya, dan Kecamatan Panga masuk dalam bagian Cekungan Air Tanah (CAT) dalam kategori CAT Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Adapun Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Aceh Jaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Aceh Jaya

No	Kecamatan	Luas CAT (Ha)
1	Kec. Panga	1.800,47
2	Kec. Teunom	14.049,54

No	Kecamatan	Luas CAT (Ha)
3	Kec. Pasie Raya	6,29
Kab. Aceh Jaya		**15.856,30**

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044

2. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan area daratan yang terdiri dari sungai dan anak sungainya yang secara alami mempunyai fungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut. Batas di darat adalah pemisah topografis, dan batas di laut mencakup area perairan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan. Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai daerah tangkapan air mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan kebutuhan air bagi manusia. Lebih dari itu, DAS berperan penting dalam menjaga lingkungan termasuk menjaga kualitas air, mencegah banjir dan kekeringan saat musim hujan dan kemarau, mengurangi aliran massa (tanah) dari hulu ke hilir. Terdapat 19 DAS di Kabupaten Aceh Jaya yang berada di 9 Kecamatan. Adapun DAS di Kabupaten Aceh Jaya selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Daerah Aliran Sunga (DAS) di Kabupaten Aceh Jaya

Nama DAS	Kecamatan									Luas (Ha)
	Darul Hikmah	Indra Jaya	Jaya	Krueng Sabee	Panga	Pasie Raya	Sampoi Niet	Setia Bakti	Teunom	
BABAH AWE		3.408,81					84,23			3.493,03
CRA MONG							5.802,92			5.802,92
EUNGGANG								9,17		9,17
GEUPE			404,43							404,43
INONG				84,61	23.475,85				285,03	23.845,49
KEUEH	31,34									31,34
KRUENG ACEH		11,64	169,56							181,19
LAMBESO		14.083,44	44.505,00				747,99			59.336,43
LE ITEM	298,96			2.337,13				32.596,50		35.232,58
LIGAN	3.794,89	179,60					25.219,46			29.193,95
NO		166,91					2.407,19			2.574,10
PATEK	24.108,55						6.469,28	863,50		31.441,33
PLENG								6,98		6,98
PULAU KLUANG			17,91							17,91
REUSAM								20,53		20,53
SABE				48.552,88	7.717,03			3.183,18		59.453,09
TEUNOM	11.325,88	42,57		17.812,21	22.329,64	29.700,33	1.848,63	10.309,86	15.519,32	108.888,43
UNGA		12.380,02	240,06				3.133,10			15.753,18
WOYLA						7.929,14			3.607,71	11.536,85
Jumlah Total	**39.559,61**	**30.272,98**	**45.336,96**	**68.786,83**	**53.522,52**	**37.629,46**	**45.712,80**	**46.989,71**	**19.412,06**	**387.222,94**

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044

3. Wilayah Sungai

Wilayah Sungai (WS) merupakan kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang

dari atau sama dengan 2.000 km^2. Berdasarkan kewenangannya terdapat 2 wilayah sungai di kabupaten Aceh Jaya, yaitu:

1. Wilayah Sungai Strategis Nasional, menjadi wilayah sungai yang memiliki nilai strategis dan memiliki cakupan pengairan yang luas mencakup Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya, Wilayah sungai ini adalah WS Woyla-Batee yang meliputi Kecamatan Teunom dan Kecamatan Pasie Raya di Kabupaten Aceh Jaya seluas 11.536,85 Ha.
2. Wilayah Sungai Strategis Kabupaten/Kota, merupakan sungai yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Aceh Jaya. Wilayah sungai ini adalah WS Teunom-Lambesoi yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya seluas 375.686,09 Ha.

Sebaran Wilayah Sungai di Kabupaten Aceh Jaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Sebaran Wilayah Sungai (WS) di Kabupaten Aceh Jaya

No	Kecamatan	Luas Wilayah Sungai (Ha)		Luas (Ha)
		Teunom - Lambeusoi	Woyla - Batee	
1	Jaya	45.336,96	-	45.336,96
2	Indra Jaya	30.272,98	-	30.272,98
3	Samponiet	45.712,80	-	45.712,80
4	Darul Hikmah	39.559,61	-	39.559,61
5	Setia Bakti	46.989,71	-	46.989,71
6	Krueng Sabee	68.786,83	-	68.786,83
7	Panga	53.522,52	-	53.522,52
8	Teunom	15.804,35	3.607,71	19.412,06
9	Pasie Raya	29.700,33	7.929,14	37.629,46
Kab. Aceh Jaya		**375.686,09**	**11.536,85**	**387.222,94**

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044

2.1.1.5 Klimatologi

Suhu udara rata-rata di wilayah Kabupaten Aceh Jaya dari tahun 2017-2021 adalah berkisar antara 18,8-34 derajat celcius dan kelembaban antara 85-93 persen. Hari hujan rata-rata perbulan 15 hari dengan rata-rata curah hujan perbulan 321,3 mm^3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Rerata Curah Hujan, Hari Hujan dan Kecepatan Angin di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017*-2021**

Bulan	Rerata Curah Hujan (mm)	Rerata Hari Hujan (hari)	Rerata Kecepatan Angin (m/s)
Januari	322,00	12	4,28
Februari	159,48	10	4,76
Maret	316,88	15	5,16
April	371,38	17	4,24
Mei	210,86	16	3,48
Juni	146,04	11	3,62
Juli	402,2	11	3,92
Agustus	326,98	15	3,68
September	227,22	15	3,68
Oktober	546,36	19	3,84
November	437,06	21	4,24
Desember	388,76	19	4,26
Rerata	**321,26**	**15**	**4.1**

**) data awal; **) data termutakhir*
Sumber: Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dien, 2022

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt Fergusson, wilayah Aceh termasuk pada tipe iklim tropis dengan suhu berada di kisaran 22-33 derajat celcius. Wilayah Aceh Jaya beriklim tropis (hangat dan lembab) dan dikenal 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi bulan September sampai Februari, sedangkan musim kemarau biasanya berlangsung antara bulan Maret sampai Agustus. Suhu udara maksimum bulanan di Kabupaten Aceh Jaya adalah 34 derajat celcius dan suhu minimum berkisar antara 18,8 derajat celcius, kelembaban relatif tinggi yakni antara 85-93% dengan kecepatan angin 1,9-19,4 knots. Sedangkan tekanan udara rata-rata berkisar antara 1.009,8 mb. Curah hujan yang terjadi pada tiap tahun sangat bervariasi, dengan curah hujan harian maksimum terjadi di bulan Oktober dan curah hujan minimum terjadi pada bulan Juni.

Pada Wilayah Sungai Teunom Lambesoe karakteristik musim penghujan di Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

- Curah Hujan 1500-2000 mm/th di Kecamatan Jaya
- Curah Hujan 2000-2500 mm/th di Kecamatan Jaya
- Curah Hujan 2500-3000 mm/th di Kecamatan Jaya, Sampoiniet
- Curah Hujan 3000-3500 mm/th di Kecamatan Jaya, Sampoiniet, Setia Bakti, dan Krueng Sabee
- Curah Hujan 3500-4000 mm/th di Kecamatan Setia Bakti, dan Krueng Sabee, Panga, dan Teunom

Tabel 2.8. Rerata Suhu Udara, Tekanan Udara, dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017*- 2021**

No.	Bulan	Suhu Udara	Tekanan Udara	Kelembaban Udara
		(⁰C)	(mb)	(%)
1.	Januari	26,62	1009,5	88,8
2.	Februari	27,14	1010,1	88,2
3.	Maret	27,14	1009,8	88,0
4.	April	27,02	1009,7	89,8
5.	Mei	27,16	1009,2	90,0
6.	Juni	26,9	1009,8	87,2
7.	Juli	26,44	1009,8	87,6
8.	Agustus	26,5	1009,9	88,2
9.	September	26,42	1010,2	88,6
10.	Oktober	26,16	1010,3	90,2
11.	November	26,22	1009,6	91,4
12	Desember	26,44	1009,9	90,4

**) data awal; **) data termutakhir*
Sumber: Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dien, 2022

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044, pengggunaan lahan di Kabupaten Aceh Jaya masih di dominasi oleh hutan lindung yang luasannya mencapai 167.676,38 Ha atau sebesar 43,30 persen, hutan produksi terbatas sebesar 70.078,99 Ha atau 18,10 persen, kawasan perkebunan sebesar 64.872,12 Ha atau 16,75 persen, Kawasan hortikultura sebesar 26.804,68 Ha atau sebesar 6,92%, dan kawasan tanaman pangan sebesar 20.239,82 Ha atau sebesar 5,23 persen. Sedangkan sisanya untuk area peruntukan lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Jaya secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024- 2044

Rencana Pola Ruang	Luas
Badan Air	2.521,02
Cagar Alam	33,79
Kawasan Cagar Budaya	30,08
Kawasan Ekosistem Mangrove	670,32
Kawasan Hortikultura	26.804,68

Rencana Pola Ruang	Luas
Kawasan Hutan Lindung	167.676,38
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	70.078,99
Kawasan Hutan Produksi Tetap	14.084,30
Kawasan Pariwisata	533,21
Kawasan Perikanan Budi Daya	1.282,74
Kawasan Perkebunan	64.872,12
Kawasan Perlindungan Setempat	5.772,93
Kawasan Permukiman Perdesaan	6.145,12
Kawasan Permukiman Perkotaan	3.494,06
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	26,27
Kawasan Peruntukan Industri	782,41
Kawasan Peternakan	1.472,44
Kawasan Tanaman Pangan	20.239,82
Kawasan Transportasi	25,27
Suaka Pesisir	73,03
Taman Pulau Kecil	603,96
Grand Total	**387.222,94**

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044

2.1.1.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Kabupaten Aceh Jaya memiliki ekosistem jasa penyedia pangan yang rendah. Selain didominasi oleh ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Janthoi - Gunung Leuser mencapai 315.863,61 Ha atau 81,57 persen, rendahnya penyedia pangan di Aceh Jaya karena terbatasnya dataran *alluvial* dan *aluvialmarine* yang luasnya hanya 6.2505,88 Ha, atau 16,14 persen dari total Kabupaten Aceh Jaya, di samping juga material ekoregion-nya tersusun dari pergunungan struktural yang curam.

Tabel 2.10. Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Penyediaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023

No	Kecamatan	Indeks									
		Pangan (P1)		Air Bersih (P2)		Serat (Fiber) (P3)		Bahan Bakar (Fuel), Kayu Dan Fosil (P4)		Sumber Daya Genetik (P5)	
		Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas
1	Darul Hikmah	1,57	Sangat Rendah	2,02	Rendah	3,48	Tinggi	3,01	Sedang	3,10	Sedang
2	Indra Jaya	1,52	Sangat Rendah	1,96	Rendah	3,81	Tinggi	3,11	Sedang	3,27	Sedang

No	Kecamatan	Indeks									
		Pangan (P1)		Air Bersih (P2)		Serat (Fiber) (P3)		Bahan Bakar (Fuel), Kayu Dan Fosil (P4)		Sumber Daya Genetik (P5)	
		Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas
3	Jaya	1,59	Sangat Rendah	1,98	Rendah	3,71	Tinggi	3,07	Sedang	3,19	Sedang
4	Krueng Sabee	1,55	Sangat Rendah	2,05	Rendah	3,59	Tinggi	2,91	Sedang	3,19	Sedang
5	Panga	1,83	Rendah	2,30	Rendah	3,86	Tinggi	3,28	Sedang	3,45	Tinggi
6	Pasie Raya	1,99	Rendah	2,64	Redang	3,85	Tinggi	3,53	Tinggi	3,59	Tinggi
7	Sampoiniet	1,60	Sangat Rendah	2,03	Rendah	3,46	Tinggi	3,01	Sedang	3,05	Sedang
8	Setia Bakti	1,61	Sangat Rendah	2,02	Rendah	3,45	Tinggi	2,97	Sedang	3,01	Sedang
9	Teunom	2,36	Sedang	2,31	Rendah	3,19	Sedang	3,54	Tinggi	2,82	Sedang
Kabupaten Aceh Jaya		1,70	Sangat Rendah	2,12	Rendah	3,60	Tinggi	3,11	Sedang	3,18	Sedang

Sumber: KLHS RPJPK Aceh Jaya 2025-2045

Sementara itu, pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam RTRW Aceh Jaya diarahkan melalui pengembangan kawasan mangrove sebagai kawasan konservasi dan pusat pendidikan lingkungan disertai pengembangan wisata alam dan buatan; pengembangan kawasan konservasi penyu dan buaya sebagai pusat perlindungan ekosistem flora/fauna disertai pengembangan wisata alam; dan pengembangan kawasan pulau-pulau kecil sebagai pertahanan, keamanan dan kawasan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat berbasis perikanan dan kepariwisataan yang mendukung keberkelanjutan ekosistem.

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki indeks risiko bencana kategori tinggi, dimana pada tahun 2023 indeks risiko bencana Kabupaten Aceh Jaya berada pada angka 166,09. Sesuai dengan karakteristik Kabupaten Aceh Jaya, daerah rawan bencana gerakan tanah di Kabupaten Aceh Jaya tersebar di setiap kecamatan. Beberapa kecamatan merupakan kecamatan rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain dengan rincian yaitu:

- **Gempa**

  Jumlah Kecamatan, Mukim, Gampong dan jumlah penduduk rawan bencana gempa yaitu: 9 Kecamatan; 21 Mukim; 172 Gampong; 94,622 Jiwa; dan Rumah 23.852 Unit;

- **Tsunami**
  Jumlah Kecamatan, Mukim, Gampong dan Jumlah Penduduk Rawan Bencana Tsunami yaitu: 8 Kecamatan; 16 Mukim; 73 Gampong; 45.374 jiwa;
- **Banjir**
  Jumlah Kecamatan, Mukim, Gampong dan Jumlah Penduduk Rawan Bencana banjir yaitu 9 Kecamatan; 19 Mukim; 125 Gampong; dan 56.606 Jiwa yang terancam.
- **Tanah Longsor**
  Jumlah kecamatan, mukim, gampong dan jumlah penduduk rawan terhadap bencana longsor adalah 9 Kecamatan, 15 Mukim; 62 Gampong; dan 23.022 jiwa.
- **Angin Puting Beliung**
  Jumlah kecamatan, mukim, gampong dan jumlah penduduk rawan terhadap bencana Angin Putting Beliung adalah 7 Kecamatan; 12 Mukim; 26 Gampong; dan 19.902 Jiwa
- **Kebakaran Lahan (Rumah)**
  Jumlah kecamatan, mukim, gampong dan jumlah penduduk rawan terhadap bencana Kebakaran Lahan adalah 8 Kecamatan; 7 Mukim; 53 gampong; dan 10.505 Jiwa

Perkembangan nilai indeks resiko bencana Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.2.

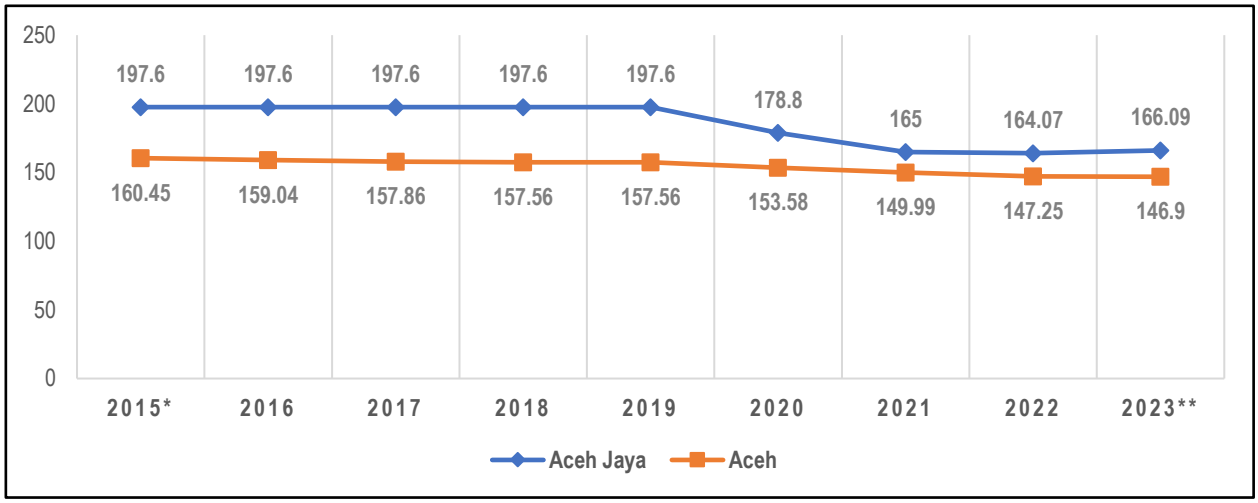

**) data awal; **) data termutakhir*
Sumber: IRBI, 2024

Gambar 2.2. Perkembangan Nilai Indeks Resiko Bencana Aceh dan Aceh Jaya Tahun 2015-2023

2.1.1.9 Ketahanan Energi

Pembangunan daerah, pertambahan penduduk dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin intensif dalam penggunaan energi menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan energi. Ketahanan energi sendiri didefinisikan sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. Ketahanan energi merupakan komponen penting dalam produksi barang dan jasa. Salah satu pasokan energi yang penting yaitu energi listrik. Perkembangan kebutuhan konsumsi listrik Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Perkembangan Konsumsi Listrik Per Kapita Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Listrik Terjual (kWh)	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
2019*	92.892	65.101.212	710
2020	93.159	127.558.463	1.369
2021	94.418	77.134.999	817
2022	96.028	133.805.154	1.393
2023	99.717	79.920.655	801

**) data awal*
Sumber: Aceh Jaya Dalam Angka 2024, acehbaratkab.bps.go.id (diolah)

2.1.1.10 Ketahanan Air

Ketahanan air adalah keterpenuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya resiko yang berkaitan dengan air. Dalam Jaknas Sumber Daya Air, ketahanan air paling sedikit diukur melalui a) akses terhadap air minum yang aman, merata, terjangkau, dan yang terlayani 100%; b) akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata mencapai 100%. Perkembangan ketahanan air Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015-2023 yang diukur melalui rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dapat dilihat pada Gambar 2.3.

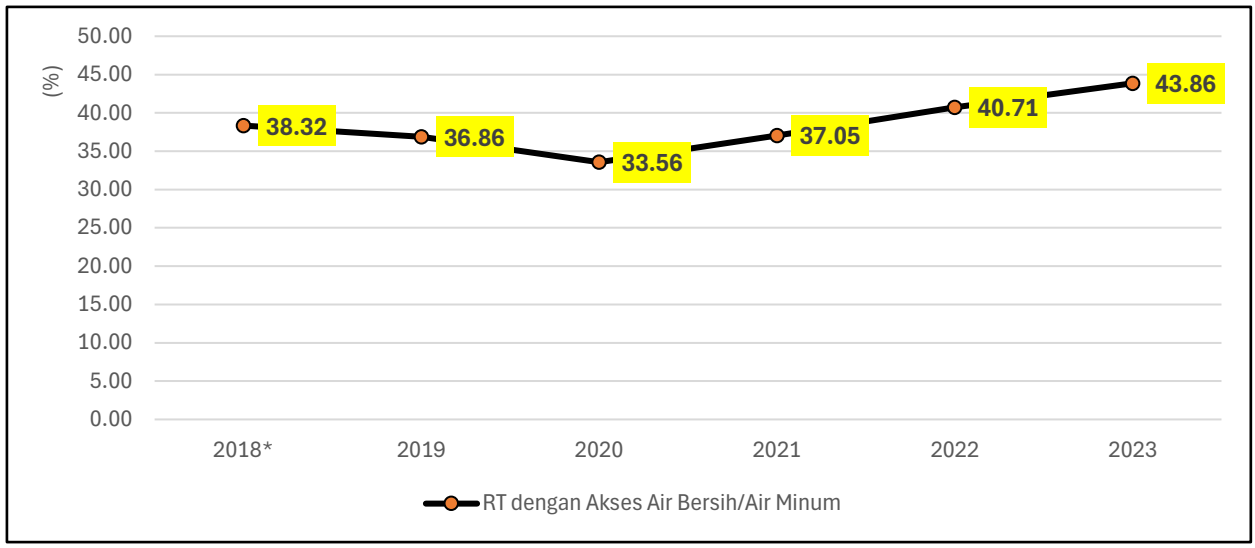

**) data awal*
Sumber: PUPR Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.3. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Bersih/Air Minum

2.1.1.11 Demografi

Potensi penduduk yang terus meningkat akan menghambat pembangunan jika tidak diikuti dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Dalam kaitan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

terus berupaya mendayagunakan potensi penduduk secara optimal agar berkontribusi signifikan dalam mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian wilayah. Kurun waktu 2006-2023, perkembangan penduduk Kabupaten Aceh Jaya cenderung berfluktuatif, meskipun menuju ke arah peningkatan. Penurunan jumlah penduduk yang drastis terjadi pada tahun 2010 dan peningkatan yang drastis terjadi pada tahun 2007. Tahun 2006, tercatat penduduk yang mendiami di Kabupaten Aceh Jaya berjumlah 61.018 jiwa. Akhir tahun 2023, populasi penduduk yang mendiami Kabupaten Aceh Jaya telah mencapai 99.717jiwa. Selama 18 (delapan belas) tahun terakhir, penduduk yang mendiami di Kabupaten Aceh Jaya telah bertambah sebanyak 39.057 jiwa. Perkembangan penduduk Kabupaten Aceh Jaya kurun waktu 2006-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

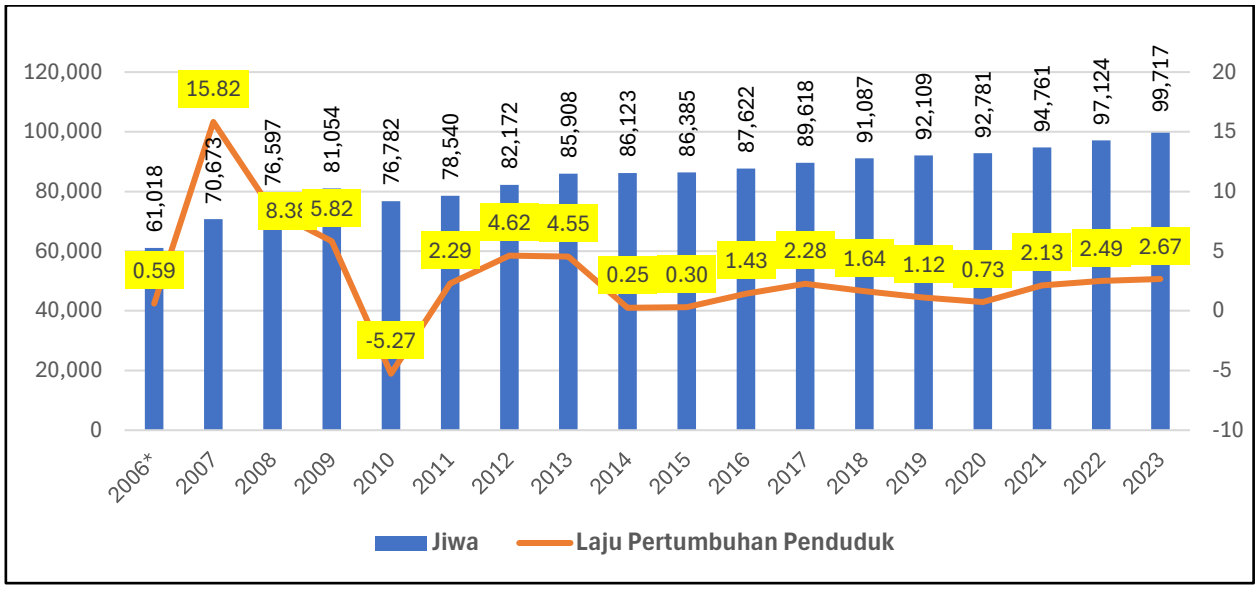

**) data awal*
Sumber: Disdukcapil Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023

Potensi penduduk laki-laki masih mendominasi dalam struktur penduduk menurut jenis kelamin di Aceh Jaya. Kurun waktu 2006-2023 adanya kecenderungan komposisi penduduk laki-Laki yang hampir berimbang dengan penduduk perempuan. Tahun 2006, proporsi penduduk laki-laki sebanyak 52,05 persen dan proporsi perempuan sebanyak 47,95 persen. Proporsi penduduk laki-laki terus meningkat menjadi 53,33 persen pada tahun 2010, dan perempuan hanya sebanyak 46,67 persen. Akhir tahun 2023, proporsi penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Proporsi penduduk laki-laki sebanyak 50,63 persen dari keseluruhan penduduk Aceh Jaya. Adapun proporsi penduduk perempuan sebanyak 49,37persen. Kecenderungan ini mulai terjadi dan terlihat dari rata-rata pertumbuhan penduduk perempuan (3,10 persen) lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk laki-laki (2,73 persen) selama periode 2006-2023. Perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk per jenis kelamin di Kabupaten Aceh Jaya selama periode 2006-2023 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.5.

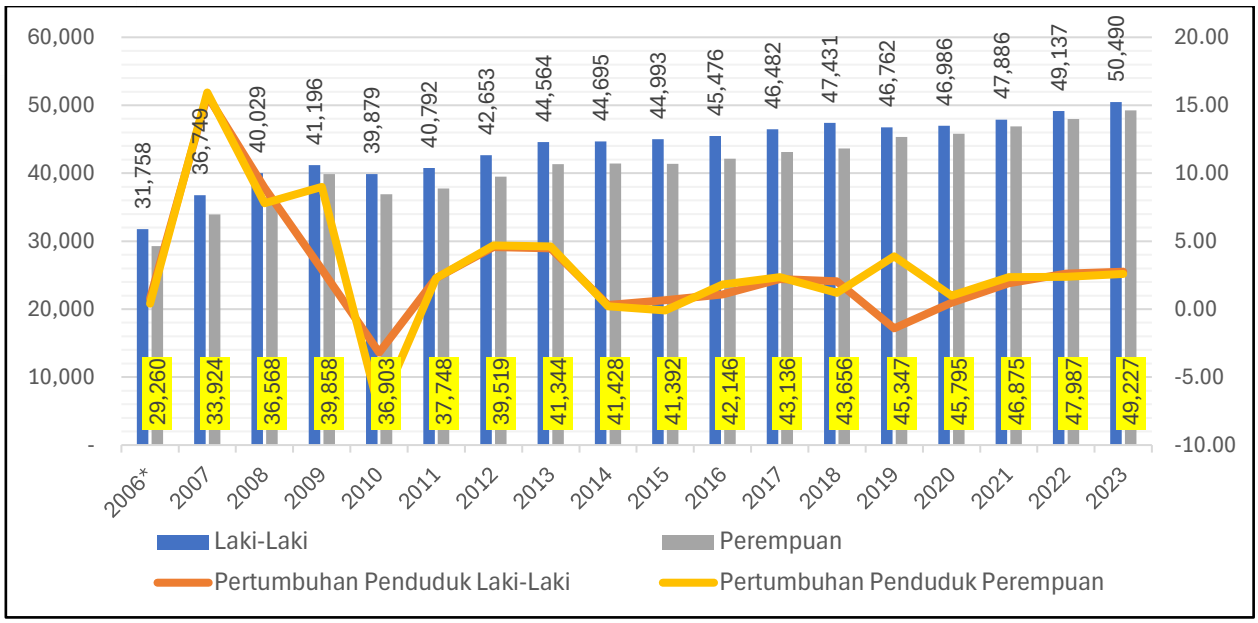

**) data awal*
Sumber: Disdukcapil Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.5. Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023

Sebaran penduduk di Kabupaten Aceh Jaya relatif merata antarwilayah. Hingga akhir tahun 2023, tiga kecamatan memiliki populasi penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Krueng Sabe, Jaya, dan Teunom. Populasi penduduk di tiga kecamatan ini mencapai 49,85 persen dari total penduduk Aceh Jaya. Sebaran penduduk ini relatif mengalami perubahan pasca di awal pemekaran kecamatan. Tahun 2011, tercatat populasi penduduk di tiga kecamatan tersebut setara 51,12 persen dari keseluruhan penduduk Aceh Jaya. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam jangka panjang ke depan akan mengarahkan penyediaan fasilitas publik yang layak dan optimalisasi sumberdaya ekonomi di kecamatan lainnya untuk menekan agar tidak terjadinya disparitas dalam distribusi penduduk antarwilayah. Kecamatan lainnya seperti Darul Hikmah, Indra Jaya, dan Pasie Raya diarahkan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menetap.

Tabel 2.12. Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023

Kecamatan	2006*		2010		2015		2023	
	Jumlah (jiwa)	Distribusi (%)	Jumlah (jiwa)	Distribusi (%)	Jumlah (jiwa)	Distribusi (%)	Jumlah (jiwa)	Distribusi (%)
Jaya	16.407	26,89	19.428	25,30	15.699	18,17	16.075	16,12
Indra Jaya	NA	NA	NA	NA	6.461	7,48	7.662	7,68
Samponiet	10.255	16,81	11.959	15,58	7.007	8,11	8.476	8,50
Darul Hikmah	NA	NA	NA	NA	6.445	7,46	7.380	7,40
Setia Bakti	5.197	8,52	7.512	9,78	8.448	9,78	9.818	9,85
Krueng Sabee	8.612	14,11	14.247	18,56	15.712	18,19	19.129	19,18
Panga	5.362	8,79	6.546	8,53	7.355	8,51	9.233	9,26

Kecamatan	2006*		2010		2015		2023	
	Jumlah (jiwa)	Distribusi (%)	Jumlah (jiwa)	Distribusi (%)	Jumlah (jiwa)	Distribusi (%)	Jumlah (jiwa)	Distribusi (%)
Teunom	15.185	24,89	17.090	22,26	12.745	14,75	14.505	14,55
Pasie Raya	NA	NA	NA	NA	6.513	7,54	7.439	7,46
Jumlah	61.018	100	76.782	100	86.385	100	99.717	100

**) data awal*
Sumber: Disdukcapil Kab. Aceh Jaya, 2024
Ket. NA = gabung dalam kecamatan induk

Kepadatan penduduk yang tercermin dari rata-rata penduduk per wilayah di Kabupaten Aceh Jaya tergolong masih rendah, meskipun adanya kecenderungan bertambah selama periode 2006-2023. Rata-rata penduduk per wilayah di Kabupaten Aceh Jaya juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penduduk Aceh. Pada tahun 2023 kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Jaya sebesar 25,75 jiwa per km^2. Dari sembilan kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Teunom memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 62,66 jiwa per km^2, sebaliknya Kecamatan Panga memiliki kepadatan penduduk paling rendah yaitu sebesar 17,24 jiwa per km^2. Jumlah penduduk, distribusi, laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2023 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Distribusi Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk per km^2
Jaya	16.075	16,12	1,57	104,39	35,46
Indra Jaya	7.662	7,68	1,51	105,14	25,32
Sampoiniet	8.476	8,5	3,47	103,80	18,54
Darul Hikmah	7.380	7,4	1,99	104,66	18,66
Setia Bakti	9.818	9,85	3,77	104,97	20,89
Krueng Sabee	19.129	19,18	3,08	101,21	27,81
Panga	9.233	9,26	2,25	99,63	17,24
Teunom	14.505	14,55	2,95	100,57	62,66
Pasie Raya	7.439	7,46	2,95	100,62	21,98
Aceh Jaya	**99.717**	**100**	**2,67**	**100,57**	**25,75**

Sumber: BPS Aceh Jaya, 2024

Berdasarkan Angka Beban Tanggungan (*Depedency Ratio*) penduduknya selama kurun waktu 2006-2023, Kabupaten Aceh Jaya memiliki angka ketergantungan yang cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2006, Kabupaten Aceh Jaya memiliki angka

ketergantungan dengan rasio sebesar 49,50, artinya bahwa rata-rata dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 49-50 penduduk tidak produktif. Angka tersebut meningkat pada tahun 2011 yang mencapai rasio 60,47 dan menurun pada tahun 2023 yang sebesar 49,70. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Aceh Jaya yang produktif, disamping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung paling kurang 49 orang yang tidak produktif. Membaiknya angka beban ketergantungan diikuti juga dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (<15 tahun), meskipun adanya kecenderungan peningkatan penduduk lansia. Proporsi penduduk produktif yang masih lebih banyak dibandingkan proporsi penduduk tua serta penurunan penduduk usia remaja, berimplikasi positif terhadap perubahan angka beban tanggungan. Perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2006-2023 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.6.

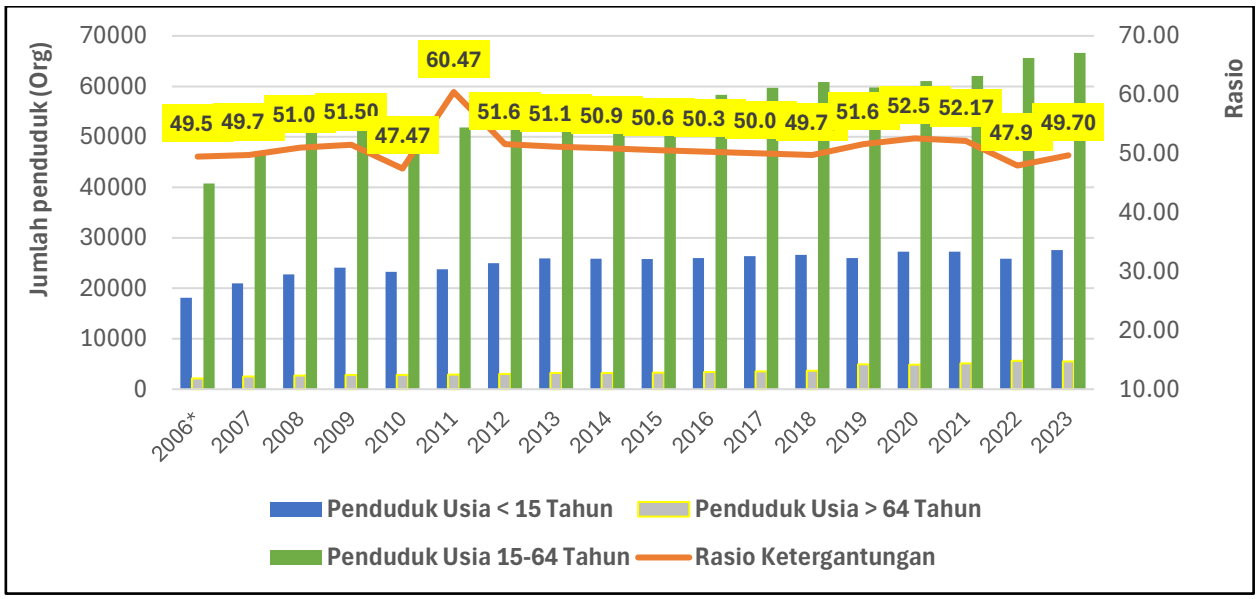

**) data awal*
Sumber: Disdukcapil Kab. Aceh Jaya, 2024 (diolah)

Gambar 2.6. Perkembangan Rasio Ketergantungan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023

Dilihat berdasarkan struktur penduduknya, penduduk berumur produktif mendominasi dalam struktur penduduk Kabupaten Aceh Jaya dalam kurun waktu 18 (delapan belas) tahun terakhir. Tahun 2006, populasi penduduk usia produktif mencapai 40.735 Jiwa atau sekitar 66,76 persen dari total penduduk Kabupaten Aceh Jaya. Kedua terbesar merupakan penduduk usia 0-14 tahun yang sebanyak 18.131 jiwa (29,71 persen). Adapun penduduk usia lansia (tidak produktif) sedikitnya 2.152 jiwa (3,53 persen). Dalam perkembangannya sampai tahun 2023, penduduk usia produktif di Kabupaten Aceh Jaya telah mencapai 66.610 jiwa (66,80 persen), penduduk lansia sebanyak 5.515 jiwa (5,53 persen), dan penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 27.592 jiwa (27,67 persen). Struktur penduduk Kabupaten Aceh Jaya tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.7.

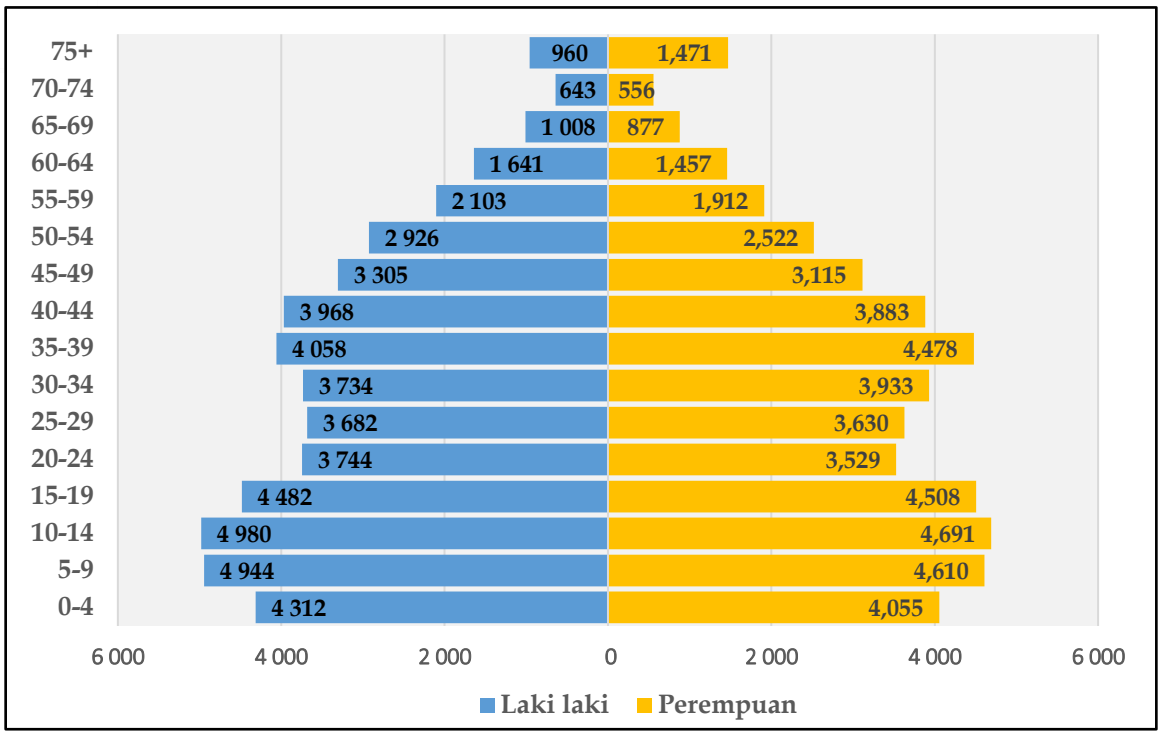

Sumber: Disdukcapil Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.7. Struktur Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023

2.1.1.12 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044, Kabupaten Aceh Jaya mempunyai potensi pengembangan wilayah yang meliputi struktur ruang dan pola ruang wilayah serta pengembangan kawasan strategis kabupaten.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah indikator penting dalam kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin baik kesejahteraannya. Gambar 2.8 menunjukkan perkembangan mengenai pertumbuhan ekonomi di Aceh Jaya dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya di tahun 2007 di mana laju pertumbuhan ekonomi telah mengalami peningkatan secara signifikan mencapai 11 persen. Namun setelah tahun 2007, laju pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya mengalami penurunan di rentang 2 persen hingga 5 persen. Di tahun 2020, Aceh Jaya dilanda pandemi COVID-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun minus mencapai -0,62 persen.

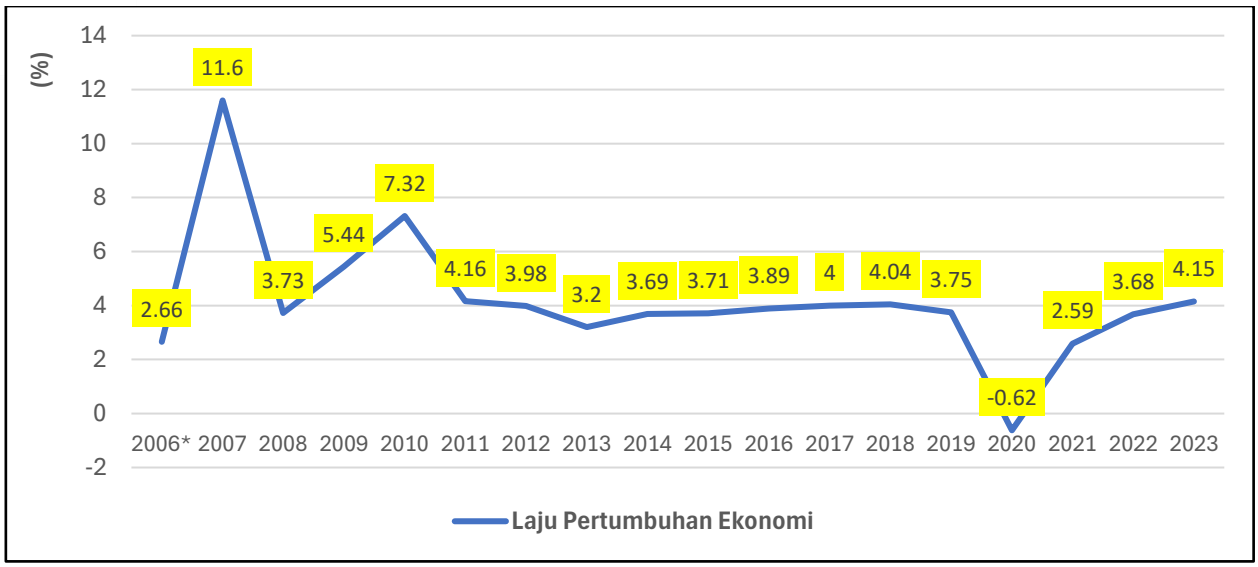

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023

Jika dilihat dari perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya terhadap Aceh dan Nasional, laju pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya berada di atas Aceh namun di bawah Nasional. Pada Tabel 2.14 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya dari tahun 2006 hingga tahun 2016 berada diatas Aceh, akan tetapi di tahun 2017 hingga tahun 2023 tercatat Aceh Jaya berada di bawah Aceh dan Nasional. Secara gambaran umum bahwa Aceh Jaya hanya mengalami posisi negatif pertumbuhan ekonomi sebanyak dua kali (2005 dan 2020).

Tabel 2.14. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2006-2023 (Persen)

Tahun	Aceh Jaya	Aceh	Nasional
2006*	2,66	1,56	5,5
2007	11,6	-2,36	6,3
2008	3,73	-5,24	6,1
2009	5,44	-5,51	4,5
2010	7,32	1,29	6,1
2011	4,16	3,28	6,16
2012	3,98	3,85	6,16
2013	3,2	2,61	5,74
2014	3,69	1,55	5,21
2015	3,71	-0,73	4,88
2016	3,89	3,29	5,03
2017	4	4,18	5,07
2018	4,04	4,61	5,17
2019	3,75	4,14	5,02
2020	-0.62	-0.37	-2.07

Tahun	Aceh Jaya	Aceh	Nasional
2021	2.59	2.79	3.7
2022	3.68	4.21	5.31
2023	4,15	4,23	5,05

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

2.2.1.2 Laju Inflasi

Indikator inflasi menjadi sorotan penting dalam aspek kesejahteraan. Tingkat inflasi di Kabupaten Aceh Jaya mengikuti laju inflasi dari kabupaten terdekat yaitu Kota Meulaboh Tabel 2.15 memperlihatkan perbandingan laju inflasi di Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional. Data inflasi di Aceh Jaya tercatat pada tahun 2014 sebesar 8.2 persen. Posisi inflasi Aceh Jaya masih sangat tinggi dibandingkan Aceh dan Nasional. Selain itu, peningkatan persentase inflasi Aceh Jaya sangat tinggi dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan inflasi ini karena geografis Aceh Jaya yang jauh dari sentra produksi serta adanya perubahan harga minyak yang berefek kepada peningkatan biaya transportasi. Tahun 2023 tercatat inflasi Aceh Jaya sebesar 1,42 persen.

Tabel 2.15. Perkembangan Laju Inflasi Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2014-2023 (Persen)

Tahun	Aceh Jaya	Aceh	Nasional
2014*	8,2	8,09	8,36
2015	0,58	1,53	3,35
2016	3,77	3,95	3,02
2017	4,76	4,25	3,61
2018	0,96	1,84	3,13
2019	4,28	1,69	2,72
2020	4,24	3,59	1,68
2021	2,07	2,24	1,87
2022	6,56	5,89	5,51
2023	1,42	1,53	2,61

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

2.2.1.3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dapat dilihat melalui perkembangan pendapatan. Pendapatan masyarakat dapat didekati dengan pengeluaran masyarakat. Pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp.746.404,-. Angka tersebut jauh lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Provinsi Aceh yang sebesar Rp. 752.159,-. Selama kurun waktu delapan tahun terakhir (2015-2023), rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya maupun Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Aceh Jaya sebesar Rp. 1.286.279,-. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Aceh yang sebesar Rp.

1.225.976,-. Perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dan Provinsi Aceh selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.9.

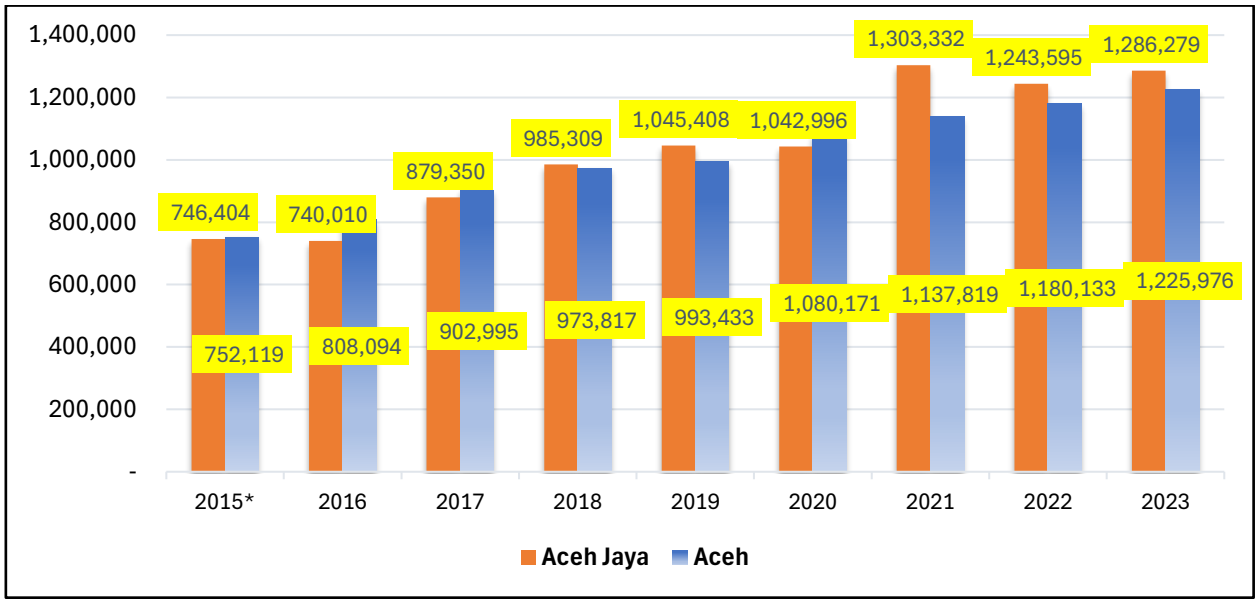

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Gambar 2.9. Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tahun 2015-2023 (Rp.)

Dilihat dari pola konsumsinya, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dan Provinsi Aceh untuk makanan cenderung lebih tinggi dari non makanan. Pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 461.265,-. Angka ini lebih tinggi dari Provinsi Aceh yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan sebesar Rp. 415.354,-. Rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya unuk Kabupaten Aceh Jaya dan Provinsi Aceh. Pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan di Kabupaten Aceh Jaya meningkat menjadi sebesar Rp. 745.984,- dan Provinsi Aceh meningkat menjadi sebesar Rp. 702.547,-.

Sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita untuk non makanan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 lebih rendah dari Provinsi Aceh meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2015, rata-rata pengeluaran per kapita non makanan Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 285.139,-. dan Provinsi Aceh sebesar Rp. 336.765,-. Tahun 2023, rata-rata pengeluaran per kapita non makanan Kabupaten Aceh Jaya meningkat menjadi sebesar Rp. 540.295,- lebih tinggi dari Provinsi Aceh yang sebesar Rp. 523.429,-. Pola pengeluaran konsumsi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya yang cenderung mengalami peningkatan untuk non-makanan dipandang sangat positif dalam jangka panjang ke depan. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan diharapkan ke depan taraf hidup masyarakat lebih sejahtera. Perkembangan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk

kelompok makanan dan non makanan di Kabupaten Aceh Jaya dan Provinsi Aceh selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.10.

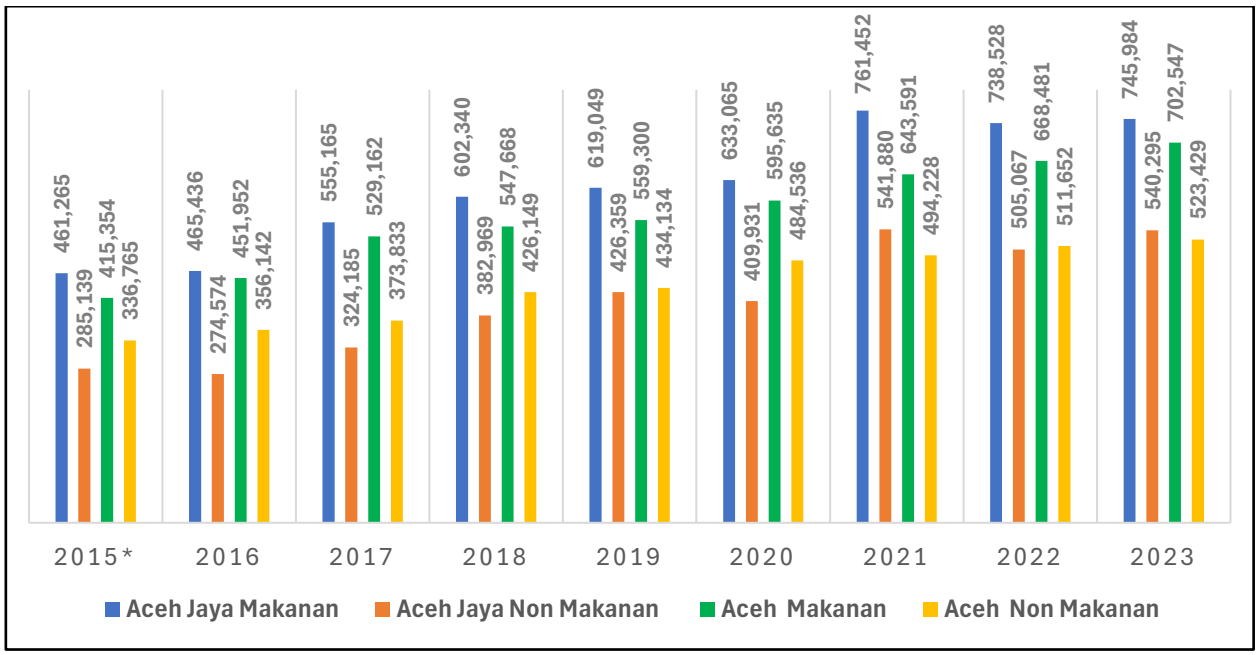

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Gambar 2.10. Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Makanan dan Non Makanan) di Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tahun 2015-2023 (Rp.)

2.2.1.4 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan diartikan sebagai ketidakmerataan pendapatan dalam masyarakat. Salah satu pengukuran ketimpangan yang paling umum adalah Indek Gini. Indek Gini mempunyai rentang yakni 0 hingga 1. Posisi 0 menunjukkan tidak ada ketimpangan/merata sedangkan 1 menunjukkan ketimpangan. Gambar 2.11 menunjukkan perbandingan ketimpangan dalam Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional. Kondisi ketimpangan di Aceh Jaya berada di bawah Aceh dan Nasional. Namun di tahun 2021 hingga 2023 terlihat ketimpangan telah mengalami peningkatan di 0.3 dan hampir menyentuh dengan Aceh. Secara umum bahwa perkembangan ketimpangan di Aceh Jaya masuk dalam kategori sedang.

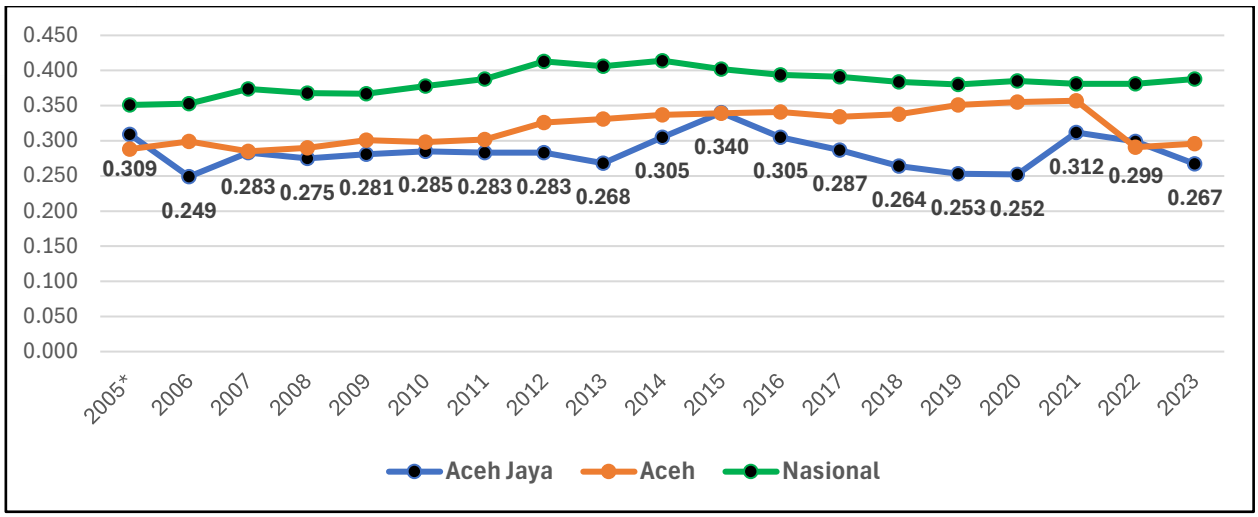

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Gambar 2.11. Ketimpangan Pendapatan Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2005-2023

2.2.1.5 Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang paling sering dihadapi dalam Pembangunan, khususnya dalam masalah kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Aceh Jaya berada di rentang 12 ribuan jiwa atau sekitar 12,42%. Penurunan jumlah pendudukan miskin masih lambat dari tahun 2005 hingga di tahun 2023. Sementara itu, garis kemiskinan telah mengalami peningkatan yang signifikan dari dari tahun ke tahun. Di tahun 2005, batas garis kemiskinan sebesar 180 ribuan, di tahun 2010 telah meningkat menjadi 270 ribuan, dan di tahun 2023 sekitar 500 ribuan. Kondisi peningkatan garis kemiskinan menjadi tantangan dalam menangani masalah kemiskinan. Perkembangan kemiskinan di Aceh Jaya disajikan dalam Gambar 2.12.

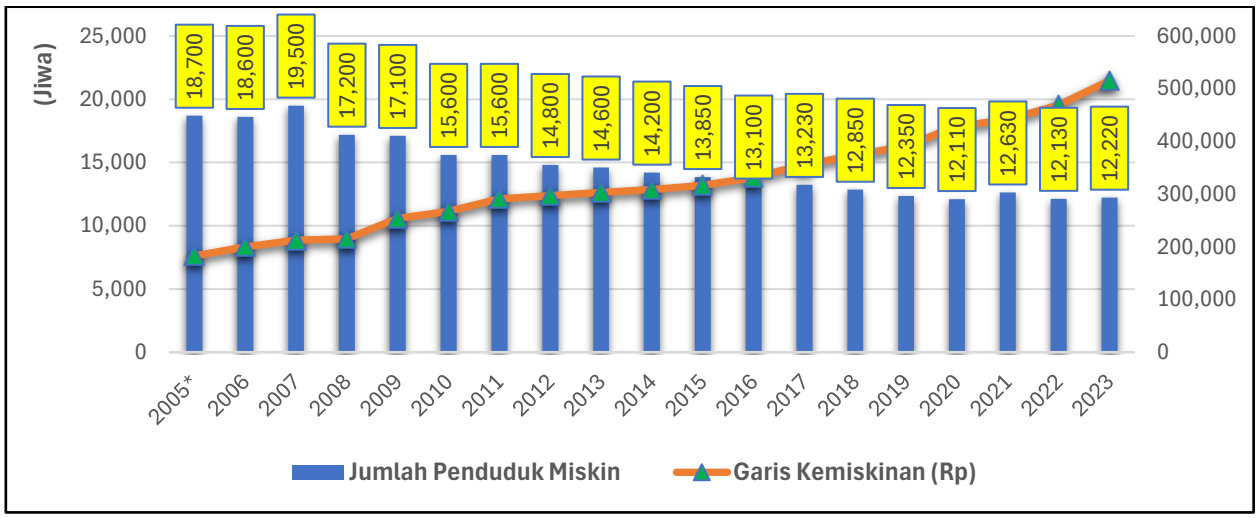

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Gambar 2.12. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Aceh Jaya Tahun 2005-2023

Gambar 2.13 dan Gambar 2.14 memperlihatkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Terlihat indeks kemiskinan di Aceh Jaya masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan Aceh maupun Nasional. Meski setiap tahun kemiskinan di Aceh Jaya mengalami penurunan secara perlahan dan berada di bawah kemiskinan Aceh (dari tahun 2012 hingga tahun 2023), indeks kemiskinan di Aceh Jaya tergolong tinggi di atas 10 persen. Permasalahan yang juga terlihat dapat indeks keparahan kemiskinan.

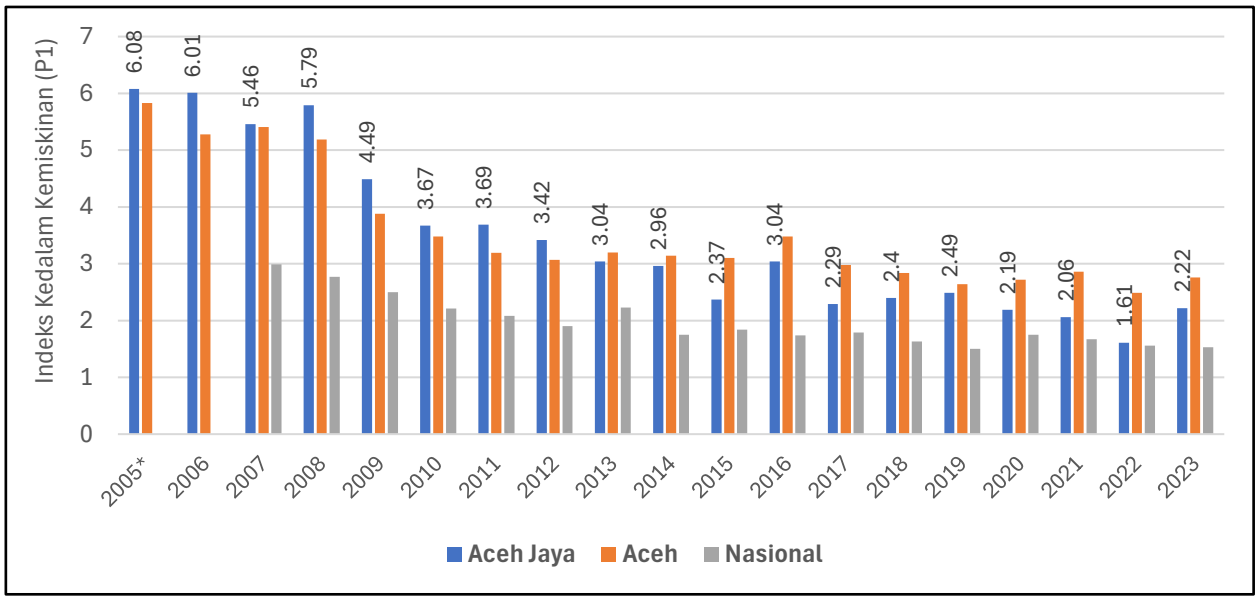

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Gambar 2.13. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Aceh Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2005–2023

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Aceh Jaya menunjukkan penurunan bersamaan dengan Aceh. Pada tahun 2023, indeks keparahan Aceh Jaya berada di bawah Aceh. Perkembangan ketiga data (Aceh Jaya, Aceh, Nasional) terlihat memiliki tren penurunan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada Gambar 2.14 terlihat Nasional mempunyai indeks keparahan yang sangat rendah dibandingkan dengan Aceh Jaya dan Aceh. Dalam skala daerah terlihat indeks keparahan Aceh Jaya lebih baik dibandingkan dengan Aceh. Aceh Jaya dan Nasional mempunyai indeks keparahan di bawah 0,6.

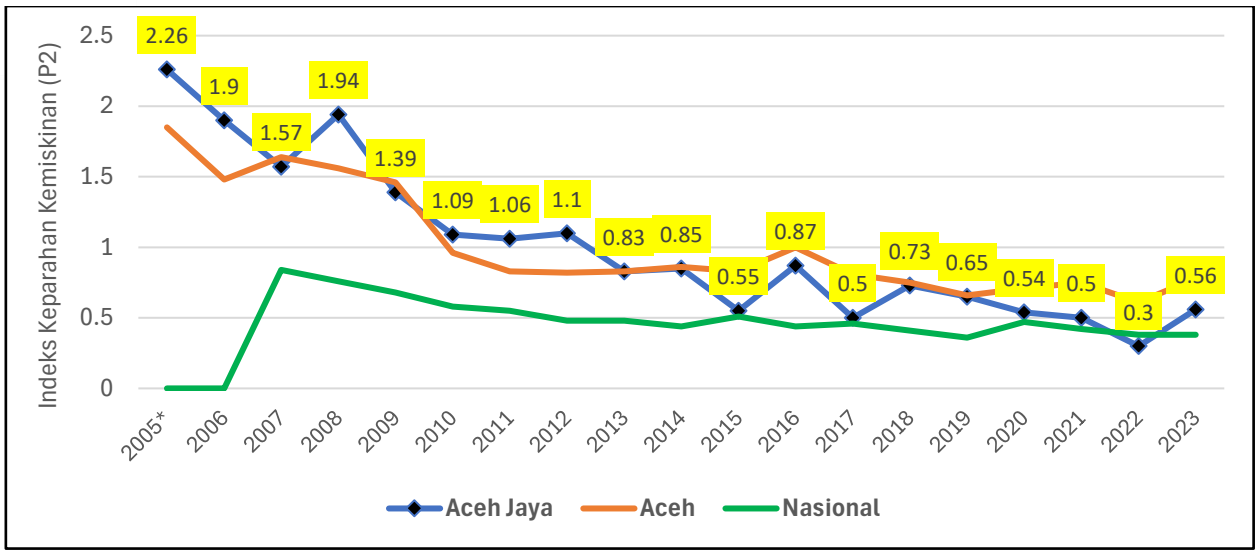

*) data awal
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Gambar 2.14. Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2005–2023

2.2.1.6 Pengangguran

Tingkat pengangguran di Aceh Jaya secara umum berfluktuasi. Pada tahun 2011 tercatat tingkat pengangguran mencapai 6,29 persen, kemudian terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2013 dan menurun hingga di bawah 3 persen di tahun 2023.. Perkembangan tingkat pengangguran di Aceh Jaya dan Provinsi Aceh rentang waktu tahun 2011 hingga 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.15.

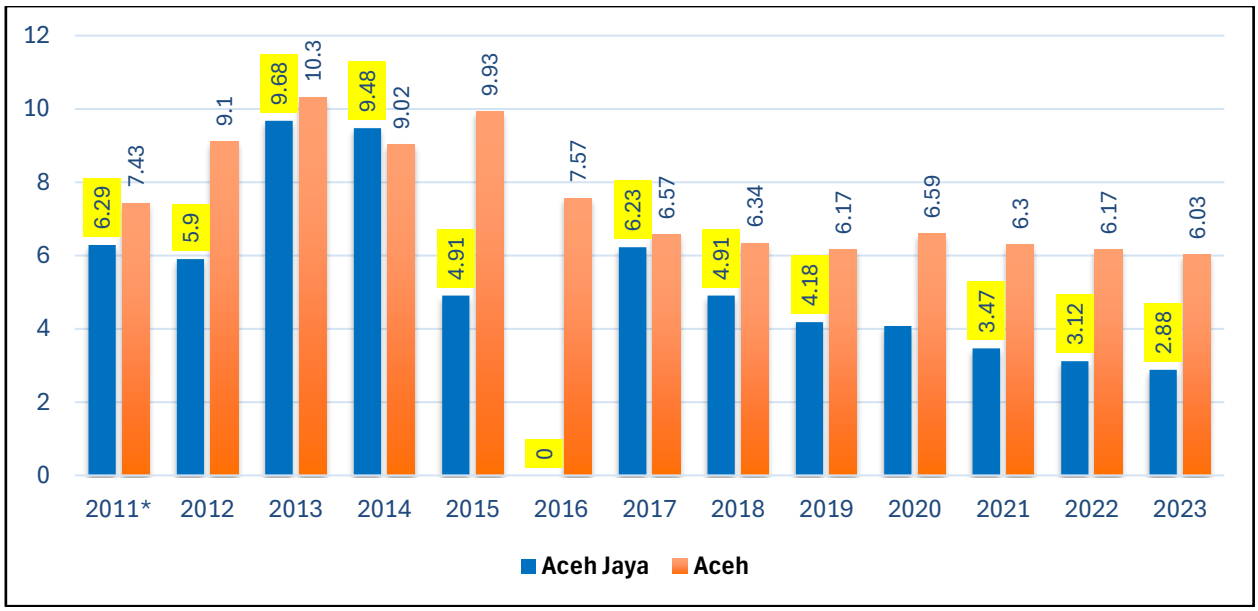

*) data awal
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Gambar 2.15. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tahun 2011-2023

Penurunan angka pengangguran ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam meningkatkan skill atau kemampuan para pencari kerja dengan memberikan pelatihan dan magang. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya saat ini juga masih menghadapi permasalahan dimana sebagian besar angkatan kerja yang tersedia didominasi angkatan kerja berpendidikan sekolah dasar maupun lulusan SMA umum. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pekerjanya khususnya melalui sektor Pendidikan.

Gambaran secara rinci mengenai pengangguran di Kabupaten Aceh Jaya dengan melihat komposisi dari jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.16. Pada tahun 2014 merupakan jumlah pengangguran laki-laki tertinggi dibandingkan yang lain yaitu sebanyak 2.196 orang. Hal yang sama juga berlaku pada pengangguran perempuan yaitu sebanyak 1.549 orang. Seiring perjalanan waktu hingga tahun 2023 terlihat jumlah pengangguran telah mengalami penurunan meski posisi jumlah pengangguran laki-laki masih lebih tinggi dari pengangguran Perempuan.

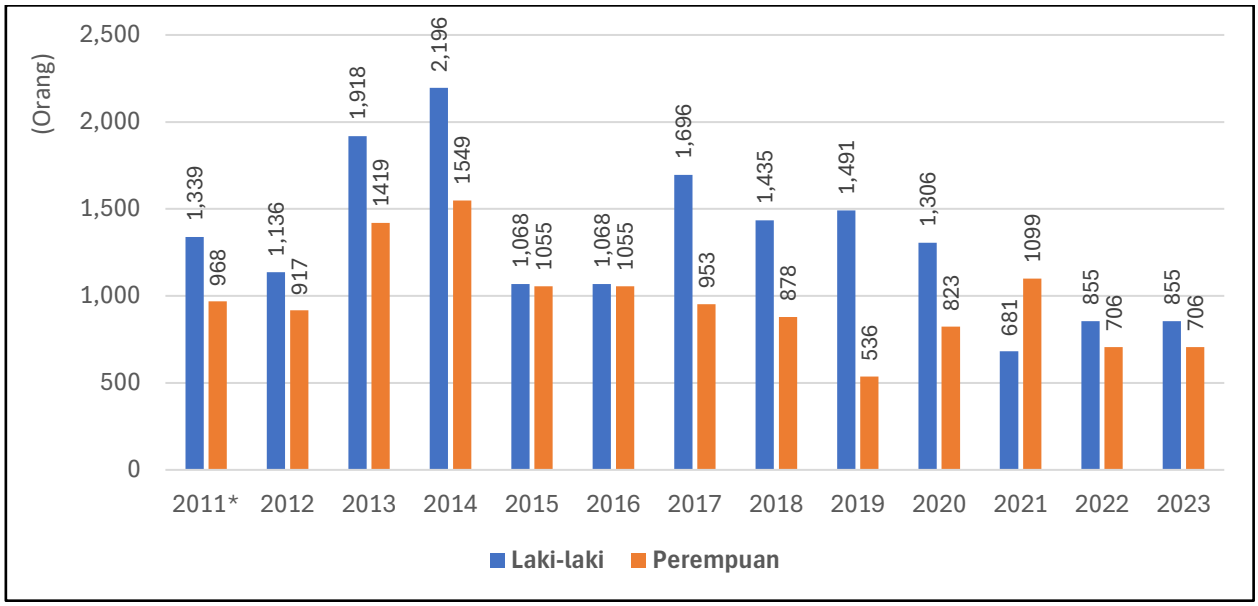

**) data awal*
Sumber: Distransnaker Kab, Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.16. Jumlah Pengangguran Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2023

2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Pengukuran pembangunan manusia terlihat dari indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia terdiri atas tiga indikator yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Gambar 2.17 memperlihatkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana Aceh Jaya masih jauh tertinggal dengan Provinsi Aceh. Pada tahun 2023, tercatat IPM Aceh Jaya sebesar 72,44. Adapun IPM Provinsi Aceh sebesar 74,70 dan IPM Nasional sebesar 74,39. Ini menunjukkan adanya gap pembangunan manusia di Aceh Jaya. Penilaian IPM terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat tinggi (IPM≥80); (2) tinggi (70≤IPM<80); (3) sedang (60≤IPM<70); dan rendah (IPM<60). Merujuk pada penilain

tersebut, IPM Aceh Jaya termasuk dalam kategori tinggi. Dalam jangka panjang ke depan, perlu diupayakan dan terus didorong pembangunan manusia di Aceh Jaya masuk dalam kategori sangat tinggi.

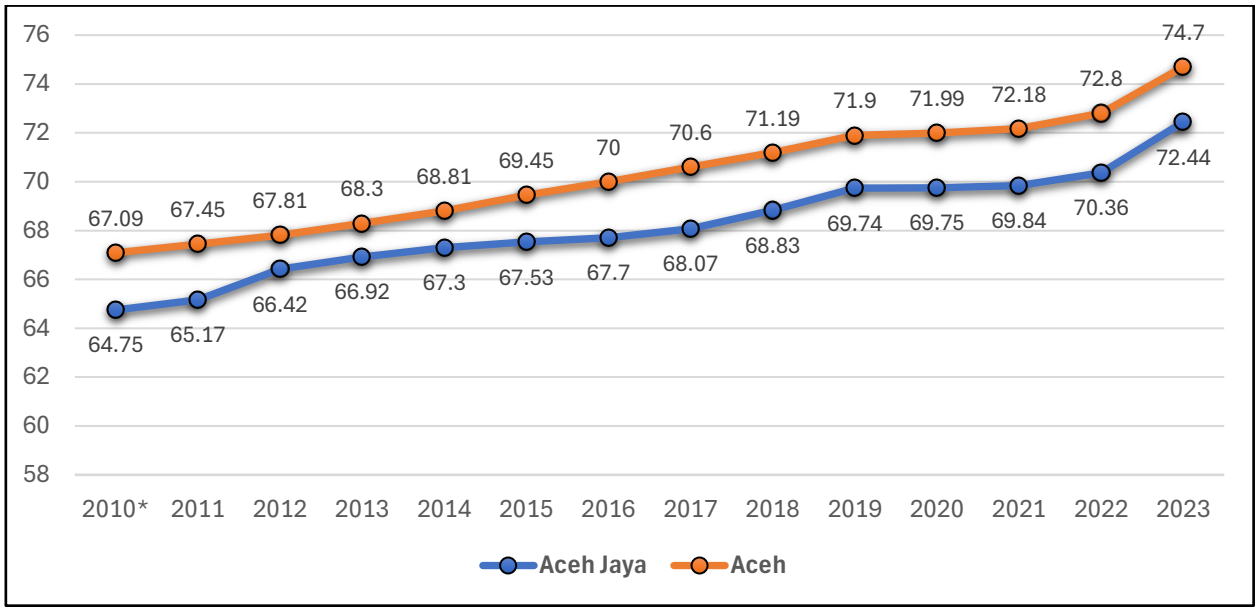

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Gambar 2.17. Indeks Pembangunan Manusia Aceh Jaya dan Aceh Tahun 2010-2023

Pada Gambar 2.17 dapat dilihat bahwa nilai IPM Aceh Jaya tahun 2023 sebesar 72,44 meningkat sebesar 2,08 poin dari nilai IPM tahun 2022 yaitu sebesar 70,36. Peningkatan nilai IPM Aceh Jaya tahun 2023 ini tidak terlepas dari adanya peningkatan nilai komponen-komponen pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita. Pada tahun 2023, Umur Harapan Hidup Aceh Jaya meningkat 0,14 poin dari tahun 2022 yaitu menjadi sebesar 70,76. Sedangkan angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah masing-masing meningkat 0,01 dan 0,02 poin dari tahun 2022 menjadi sebesar 14,02 untuk Harapan lama Sekolah dan 8,74 untuk Rata-rata Lama Sekolah. Adapun komponen pengeluaran per kapita mengalami peningkatan dari Rp. 10.041.000,- per orang per tahun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 10.461.000 per orang per tahun pada tahun 2023.

Indeks pembangunan manusia dalam segi komposisi jenis kelamin memperlihatkan bahwa indeks pembangunan manusia Aceh Jaya dari sisi laki-laki dan perempuan telah mengalami peningkatan yang signifikan namun masih di bawah Provinsi Aceh dan Nasional. Dari sisi perempuan terlihat indeks pembangunan manusianya masih tertinggal jauh dari Provinsi Aceh dan Nasional. Perkembangan indeks pembangunan manusia menurut jenis kelamin selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2010-2023

Tahun	Laki-Laki			Perempuan		
	Aceh Jaya	Aceh	Nasional	Aceh Jaya	Aceh	Nasional
2010*	68,22	71,27	70,94	52,61	63,47	63,43
2011	70,4	71,75	71,45	55,91	64,07	63,96
2012	71,36	72	71,98	59,45	65,03	64,83
2013	71,92	72,49	72,69	61,55	65,68	65,56
2014	72,72	73,1	73,36	64,03	66,89	66,27
2015	72,87	73,36	73,58	64,19	67,54	66,98
2016	-	73,94	74,26	-	67,94	67,44
2017	73,24	74,63	74,85	64,79	68,41	68,08
2018	73,57	75,27	75,43	65,67	69	68,63
2019	74,55	75,95	75,96	69,75	66,56	69,18
2020	74,55	75,96	75,98	69,94	66,7	69,19
2021	74,63	76,09	76,25	70,18	66,79	69,59
2022	75,13	76,71	76,73	67,33	70,76	70,31
2023	75,65	77,17	77,26	67,93	71,42	70,96

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menunjukkan indikator dalam pembangunan manusia. Perhitungan lama sekolah berdasarkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menempuh pendidikan. Rata-rata lama sekolah secara tidak langsung mencerminkan pendidikan dalam bingkai makro sehingga peningkatan pendidikan harus terus meningkat dari waktu ke waktu. Tabel 2.17 memperlihatkan perbandingan rata-rata lama sekolah antara Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional. Perhitungan rata-rata lama sekolah menggunakan acuan terbaru. Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata lama sekolah Aceh Jaya telah mengalami peningkatan namun sedikit melambat. Terlihat di tahun 2010 rata-rata lama sekolah berada di 7,17 tahun dan di tahun 2023 menjadi 8,74 tahun. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Aceh, Aceh Jaya masih tertinggal. Sedangkan dibandingkan dengan Nasional, maka terlihat Aceh Jaya sedikit lebih unggul.

Tabel 2.17. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2010-2023

Tahun	Aceh Jaya	Aceh	Nasional
2010*	7,17	8,28	7,46
2011	7,34	8,32	7,52
2012	7,64	8,36	7,59
2013	7,7	8,44	7,61
2014	7,88	8,71	7,73

Tahun	Aceh Jaya	Aceh	Nasional
2015	7,89	8,77	7,84
2016	7,95	8,86	7,95
2017	8,13	8,98	8,1
2018	8,37	9,09	8,17
2019	8,66	9,18	8,34
2020	8,7	9,33	8,48
2021	8,71	9,37	8,54
2022	8,72	9,44	8,69
2023	8,74	9,55	8,77

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

2.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak di masa depan pada umur tertentu. Perhitungan harapan lama sekolah dari usia 7 tahun ke atas. Tabel 2.18 memperlihatkan harapan lama sekolah Aceh Jaya mengalami peningkatan secara perlahan. Tahun 2023 memperlihatkan harapan lama sekolah Aceh Jaya yakni 14,02 tahun lebih tinggi dari Nasional yakni 13,15 tahun. Akan tetapi di tahun yang sama, Aceh Jaya masih ketinggalan dengan Provinsi Aceh yakni 14,38 tahun.

Tabel 2.18. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2010-2023

Tahun	Aceh Jaya	Aceh	Nasional
2010*	12,44	12,90	11,29
2011	12,51	13,03	11,44
2012	13,10	13,19	11,68
2013	13,69	13,36	12,10
2014	13,81	13,53	12,39
2015	13,93	13,73	12,55
2016	13,94	13,89	12,72
2017	13,95	14,13	12,72
2018	13,96	14,27	12,91
2019	13,97	14,3	12,95
2020	13,98	14,31	12,98
2021	13,99	14,36	13,08
2022	14,01	14,37	13.1
2023	14,02	14,38	13,15

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

2.2.2.3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Fokus aspek sosial lain yang perlu diperhatikan adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kematian ibu terjadi karena beberapa faktor seperti persalinan, kecelakaan, nifas, maupun masa kehamilan. Gambar 2.18 menunjukkan AKI di Aceh Jaya mempunyai jumlah kasus yang beragam dari tahun ke tahun. AKI di tahun 2016 sebanyak 6 kasus dan di tahun 2018 turun signifikan menjadi 1 kasus. Namun terjadi peningkatan kembali di tahun 2019 sebanyak 5 kasus dan hingga di tahun 2023 kasus kematian ibu berkurang menjadi 1 kasus.

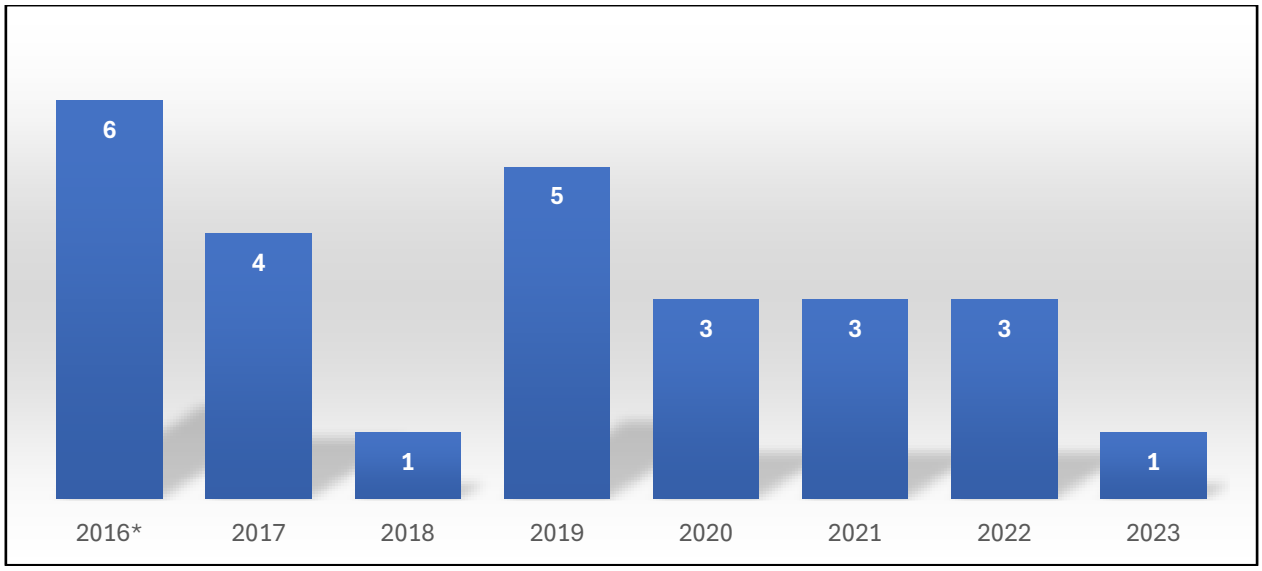

**) data awal*
Sumber: Dinkes Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.18. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI)

2.2.2.4. Angka Kematian Bayi (AKB)

Sementara itu dari sisi angka kematian bayi, Aceh Jaya masih banyak terjadi kematian bayi dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2016. Pada tahun 2020, angka kematian bayi terus mengalami penurunan dengan kasus kematian sebanyak 12 kasus. Namun pada tahun 2021 angka kematian bayi meningkat lagi menjadi 20 kasus kematian. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian bayi masih ada sebanyak 12 kasus. Gambaran tentang angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Jaya selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.19.

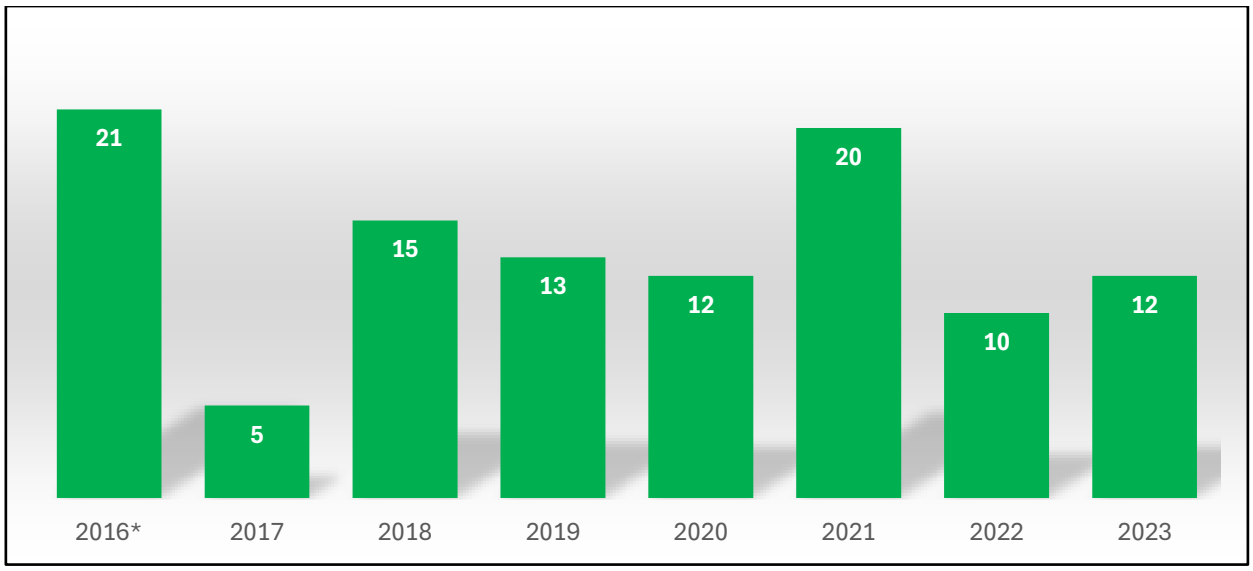

**) data awal*
Sumber: Dinkes Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.19. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)

2.2.2.5 Stunting

Stunting diartikan sebagai kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak seusianya. Maraknya kasus stunting menjadi perhatian khusus karena berdampak kepada kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Salah satu penyebab timbulnya stunting karena kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan.

Perkembangan prevalensi stunting di Aceh Jaya berdasarkan E-PPGBM (Elektronik Pelaporan dan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat) menunjukkan fluktuatif selama periode 2005-2023 (Tabel 2.19). Selama periode tersebut, prevalensi stunting terendah dicapai pada tahun 2016 yang berkisar 8,5 persen. Pada tahun 2023 prevalensi stunting naik menjadi 8,7 persen. Hal ini menjadi pendorong untuk terus memperkuat kualitas layanan kesehatan hingga pelosok gampong di Aceh Jaya, karena masih ada sekitar 661 anak yang mengalami gejala stunting di tahun 2023.

Tabel 2.19. Perkembangan Jumlah Stunting di Aceh Jaya Tahun 2005-2023

Tahun	Jumlah Stunting	Jumlah Anak	Prevalensi Stunting (%)
2005*	1.658	5.442	30,5
2006	1.452	7.017	20,7
2007	452	4.351	10,4
2008	473	4.366	10,8
2009	1.291	5.492	23,5
2010	1.427	6.175	23,1
2011	481	5.312	9,1
2012	1.038	2.260	45,9

Tahun	Jumlah Stunting	Jumlah Anak	Prevalensi Stunting (%)
2013	1.094	5.579	19,6
2014	937	5.893	15,9
2015	557	5.973	9,3
2016	613	7.242	8,5
2017	956	6.270	15,2
2018	647	6.938	9,3
2019	1.633	6.405	25,5
2020	1.450	7.231	20,1
2021	766	7.885	9,7
2022	624	7.285	8,6
2023	661	7.594	8,7

**) data awal*
Sumber: Dinkes Kab. Aceh Jaya, 2024

Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, sehingga harus ditangani melalui aksi multisektor. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Terdapat lima pilar penanganan stunting, yakni komitmen politik, kampanye dan edukasi, konvergensi program, akses pangan bergizi, dan monitoring progam. Stunting menimbulkan dampak jangka pendek, yakni perkembangan menjadi terhambat, penurunan fungsi kognitif, dan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Dalam jangka panjang dapat menurunkan produktivitas pada orang dewasa serta lebih rentan terhadap penyakit degeneratif.

2.2.2.6 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup menggambarkan umur hidup individu dalam suatu wilayah. Tabel 2.20 menyajikan perkembangan usia harapan hidup Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2010-2023. Terlihat dalam tabel tersebut perkembangan usia harapan hidup di Aceh Jaya mengalami peningkatan tetapi sangat lambat. Di tahun 2010 bahwa usia harapan hidup Aceh Jaya sebesar 66,29 dan di tahun 2023 menjadi 70,76 tahun. Meski ada peningkatan, usia harapan hidup Aceh Jaya masih jauh dari Aceh maupun Nasional.

Tabel 2.20. Perkembangan Usia Harapan Hidup di Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2010-2023

Tahun	Aceh Jaya	Aceh	Nasional
2010*	66,29	69,08	69,81
2011	66,35	69,15	70,01
2012	66,39	69,23	70,2
2013	66,45	69,31	70,4
2014	66,48	69,35	70,59
2015	66,63	69,5	70,78

Tahun	Aceh Jaya	Aceh	Nasional
2016	66,7	69,51	70,9
2017	66,7	69,52	71,06
2018	66,88	69,64	71,2
2019	67,11	69,87	71,34
2020	67,16	69,93	71,47
2021	69,26	69,93	71,57
2022	70,62	72,92	71,85
2023	70,76	73,06	72,13

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh Jaya Dalam Angka 2024

Selanjutnya pada Tabel 2.21 menyajikan angka harapan hidup menurut jenis kelamin, dimana usia harapan hidup perempuan dan laki-laki mengalami sedikit peningkatan dari waktu ke waktu. Tabel tersebut juga memperlihatkan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan Aceh Jaya berada di bawah Provinsi Aceh maupun Nasional.

Tabel 2.21. Perkembangan Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2010-2023

Tahun	Perempuan			Laki-Laki		
	Aceh	Aceh Jaya	Indonesia	Aceh	Aceh Jaya	Indonesia
2010*	71,09	68,12	71,83	67,17	64,35	67,89
2011	71,16	68,18	72,02	67,25	64,41	68,09
2012	71,22	68,23	72,22	67,32	64,45	68,29
2013	71,3	68,28	72,41	67,4	64,5	68,49
2014	71,34	68,31	72,59	67,44	64,53	68,87
2015	71,49	68,41	72,78	67,59	64,63	68,93
2016	71,52	-	72,8	67,61	-	69,09
2017	71,55	68,67	73,06	67,62	64,75	69,16
2018	71,67	68,78	73,19	67,73	64,86	69,3
2019	71,85	69,01	73,33	67,98	65,08	69,44
2020	71,91	69,06	73,46	68,04	65,16	69,59
2021	71,94	69,09	73,55	68,07	65,19	69,67
2022	72,16	69,31	73,83	68,26	65,37	69,93
2023	72,35	69,59	74,18	68,42	65,62	70,17

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

2.2.2.7. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang meliputi beberapa aspek, diantaranya yaitu kesehatan ibu dan anak, kondisi penyakit menular dan tidak menular, lingkungan rumah dan sekitarnya, kesehatan jiwa, serta gaya hidup. Nilai IKS ini dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,800; Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS berada pada kisaran 0,500 – 0,800; Keluarga Tidak

Sehat jika nilai IKS < 0,500. Capaian nilai IKS Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2023 sebesar 0,330 yang berarti bahwa baru 33% keluarga yang tergolong sehat di Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan 12 indikator. Adapun perkembangan nilai IKS Kabupaten Aceh Jaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22. Perkembangan Nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021-2023

Tahun	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Kategori
2021*	0,294	Keluarga Tidak Sehat
2022	0,326	Keluarga Tidak Sehat
2023	0,330	Keluarga Tidak Sehat

**) data awal*
Sumber: Dinkes Kab. Aceh Jaya, 2024

2.2.2.8. Indeks Perlindungan Anak

Secara umum capaian pembangunan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat dari nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA). Indeks ini disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 klaster pemenuhan hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus anak. Penjabaran secara rinci masing-masing klaster yaitu klaster I: hak sipil dan kebebasan; klister II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan klaster V: perlindungan khusus. Adapun capaian nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23. Capaian Nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2021-2023

Tahun	Aceh Jaya	Aceh	Nasional
2021*	66,99	63,12	61,38
2022	66,63	64,23	63,30
2023	67,57	64,34	63,83

**) data awal*
Sumber: Kemen PPPA, 2024

2.2.2.9 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Pada Tabel 2.23 dapat dilihat bahwa indeks ketimpangan gender Aceh Jaya mengalami penurunan dari 0,701 pada tahun 2018 menjadi 0,464 pada tahun 2023. Hal ini

menunjukan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Aceh Jaya sudah mulai berkurang. Nilai indeks ketimpangan gender Aceh Jaya tahun 2023 masih lebih baik dibandingkan dengan nilai indeks ketimpangan gender Provinsi Aceh yang sebesar 0,489. Namun nilai indeks ketimpangan gender Aceh Jaya masih lebih tinggi dari capaian nasional yang sebesar 0,447. Perkembangan nilai indeks ketimpangan gender selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2018-2023

Tahun	Aceh Jaya	Aceh	Nasional
2018*	0,701	0,503	0,499
2019	0,52	0,528	0,488
2020	0,542	0,514	0,472
2021	0,4	0,503	0,465
2022	0,478	0,504	0,459
2023	0,464	0,489	0,447

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

2.2.2.10 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Tabel 2.25 memperlihatkan kondisi IPG Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional. IPG Aceh Jaya tahun 2023 sebesar 89,80. Angka ini masih jauh di bawah Nasional dengan nilai 91,85 dan Aceh sebesar 92,55. Oleh karenanya peningkatan IPG sangat perlu diperhatikan agar bisa mengejar ketinggalan dari Aceh maupun Nasional.

Tabel 2.25. Indeks Pembangunan Gender di Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2010-2023

Tahun	Aceh Jaya	Aceh	Nasional
2010*	77.12	89.05	89.42
2011	79.42	89.3	89.52
2012	83.31	90.32	90.07
2013	85.59	90.61	90.19
2014	88.06	91.5	90.34
2015	88.08	92.07	91.03
2016	-	91.89	90.82
2017	88.46	91.67	90.96
2018	89.26	91.67	90.99
2019	89.28	91.84	91.07
2020	89.47	92.07	91.06

Tahun	Aceh Jaya	Aceh	Nasional
2021	89.49	92.23	91.27
2022	89.62	92.24	91.63
2023	89,80	92,55	91,85

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat diketahui melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-nya. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah biasa digunakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Jaya setiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Aceh Jaya dari tahun 2010 hingga tahun 2023. Pada tahun 2010 PDRB ADHB Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 1.422.989,69 juta meningkat menjadi sebesar Rp. 3.373.787,32 juta pada tahun 2023. Adapun perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Aceh Jaya selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.20.

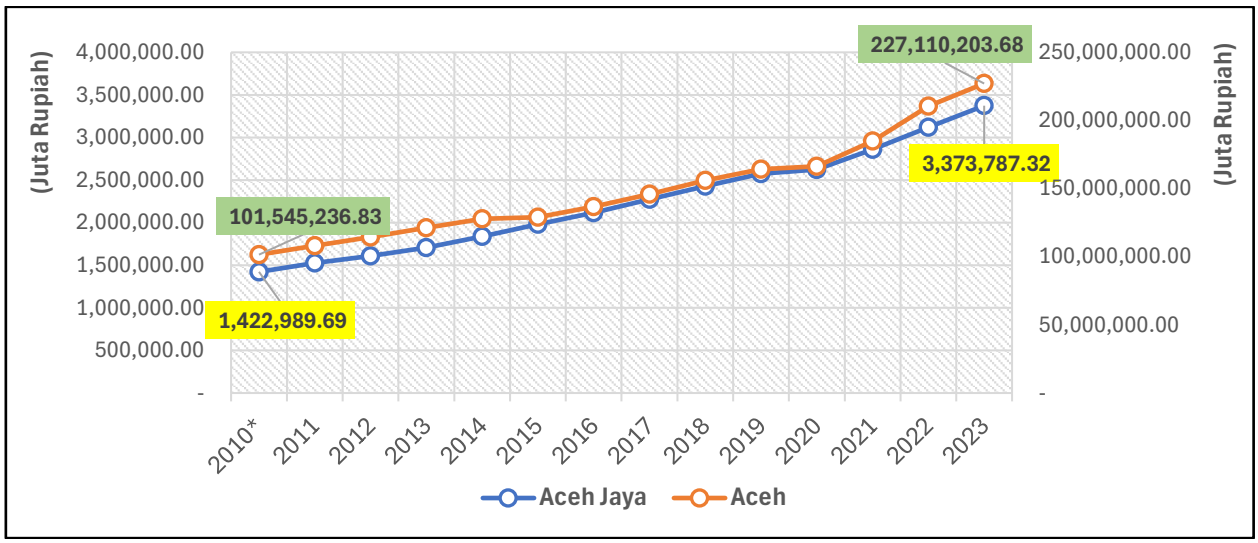

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2024

Gambar 2.20. Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tahun 2010-2023

Berdasarkan struktur perekonomian Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010-2023, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan yang menjadi penompang perekonomian dengan rata-rata kontribusi sebesar 31,41%. Sektor konstruksi menjadi sektor unggulan berikutnya yang berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Aceh Jaya dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,37%. Sektor lainnya yang mendominasi perekonomian Kabupaten Aceh Jaya yaitu sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib

dengan kontribusi sebesar 11,75% dan sektor perdagangan besar dan eceran dengan rata-rata kontribusi sebesar 10,48%.

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

Seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Aceh Jaya, PDRB Per Kapita masyarakat Kabupaten Aceh Jaya juga mengalami peningkatan dari tahun 2010-2023. Gambaran ini disajikan dalam Gambar 2.21 dimana secara umum peningkatan per kapita mengalami tren positif. Namun demikian, pendapatan per kapita Aceh Jaya masih berada dibawah pendapatan per kapita Provinsi Aceh. Pada tahun 2023, pendapatan per kapita Aceh sebesar 41,42 juta rupiah. Sedangkan pendapatan per kapita Kabupaten Aceh Jaya sebesar 34,55 juta rupiah.

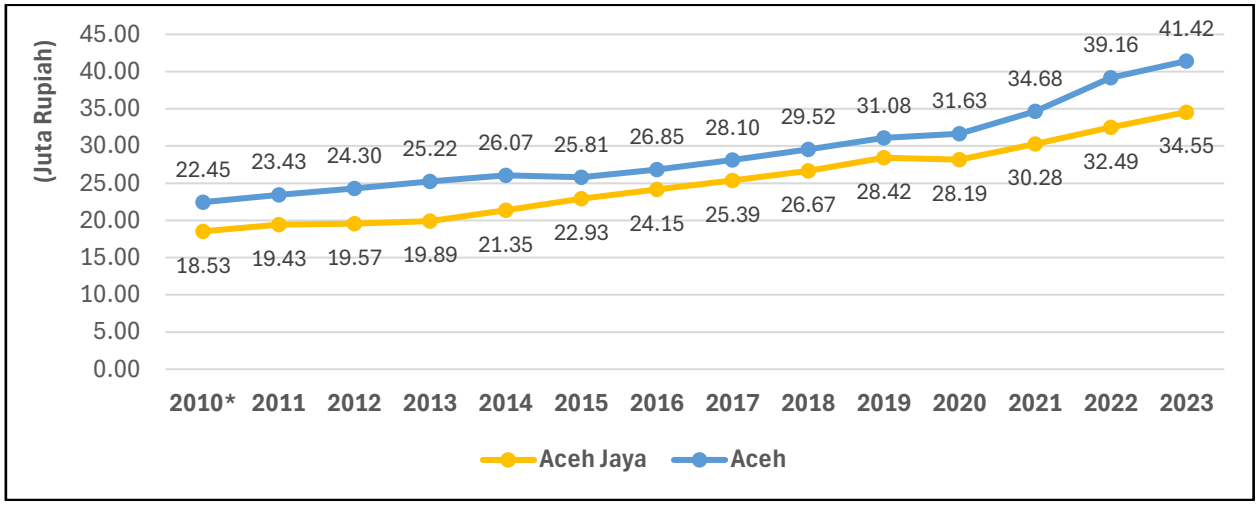

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2024

Gambar 2.21. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tahun 2010-2023

2.3.1.3 Produksi dan Produktivitas Pertanian

Dalam RPJP Aceh Tahun 2025-2045 telah ditetapkan komoditi-komoditi unggulan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun di masa mendatang. Kabupaten Aceh Jaya termasuk salah satu kabupaten di wilayah barat-selatan yang mendapatkan prioritas pengembangan komoditi padi. Padi merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Aceh Jaya. Di wilayah barat-selatan Aceh, Kabupaten Aceh Jaya termasuk penghasil luas panen padi ketiga terbesar setelah Aceh Barat dan Aceh Barat Daya (kondisi tahun 2021). Data BPS (2021), memperlihatkan luas panen padi di Aceh Jaya mencapai 9.990,28 ha, atau setara 3,36 persen dari total luas panen padi Aceh (297.058,38 ha). Kurun waktu 2006-2022, produksi padi cenderung fluktuatif, dengan kisaran rata-rata produktivitas 4,65 ton setiap hektarnya. Kejayaan produksi padi terjadi kurun waktu 2015-2018, dengan capaian produksi padi mencapai 104.231 ton. Di periode berikutnya, produksi padi telah berkurang hingga 50 persen. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menaruh harapan besar pada komoditi padi sebagai penghasil pendapatan bagi petani di Aceh Jaya, disamping juga menjadi lumbung pangan di wilayah barat-selatan Aceh. Untuk menuju arah tersebut,

perlu dilakukan secara sinergis dengan kebjakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh guna mendorong peningkatan produktivitas padi. Dalam jangka panjang ke depan, nilai tambah dari komoditi padi akan didorong untuk ditingkatkan melalui penguatan industri pengolahan padi yang ramah lingkungan. Gambaran secara utuh perkembangan produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada Gambar 2.22.

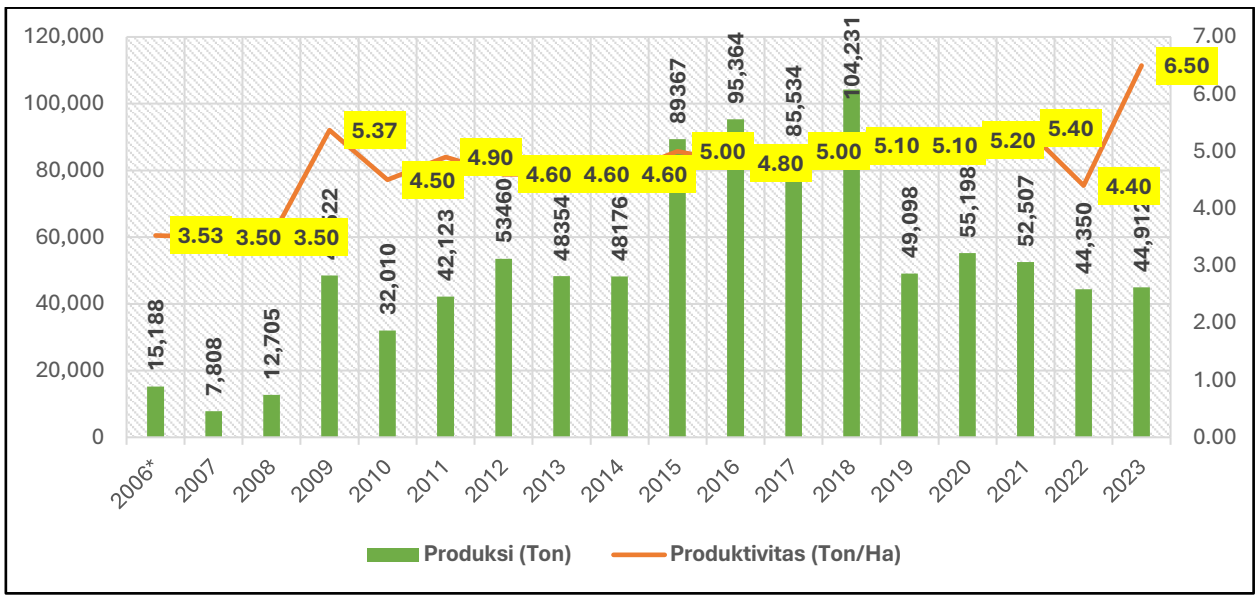

**) data awal*
Sumber: Distan Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.22. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023

Selain komoditi padi, sebagian petani di Aceh Jaya membudidayakan komoditi tanaman pangan lainnya, seperti jagung, kedele, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau. Produksi jagung telah meningkat drastis dari 240 ton tahun 2006 menjadi 13.813 ton pada tahun 2023. Selama periode 2006-2023, produksi jagung tertinggi di capai pada tahun 2019, yaitu sebanyak 22.290 ton. Demikian juga halnya dengan komoditi kedelei, produksi komoditi ini telah meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 1.349 ton dibandingkan dengan tahun 2006. Produksi komoditi pangan Kabupaten Aceh Jaya kurun waktu 2006-2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.25. Dalam upaya menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan, sekaligus mendukung bahan baku lokal penguatan UMKM di Aceh Jaya, dalam jangka panjang ke depan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya akan terus mendorong adanya peningkatan luas tanam dan produksi komoditi pangan non beras. Pembinaan petani dan penguatan SDM petani, berikut ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian akan diprioritaskan secara bertahap hingga akhir periode RPJP Kabupaten Aceh Jaya.

Tabel 2.26. Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023 (Ton)

Tahun	Jagung	Kedelei	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah
2006*	241	46,55	0	310	235,2	450,72
2007	109,0	63	0	521	202	170
2008	145	50,6	0	578,85	151	175,2
2009	300,6	60,2	0	578,85	220	202,8
2010	231,5	41,9	0	623,1	271,8	106,4
2011	601,3	199,4	0	431,9	163,9	146
2012	386	14,6	14,1	394,5	119,2	197,4
2013	398	460,8	23	772,9	320,5	320,5
2014	1.646	318,1	23,8	425,7	156	336,3
2015	5.036	1.088	75	287,8	116,3	108
2016	6.264	609	14,6	366,7	125,6	185
2017	18.884	355	6	277	90	3,6
2018	14.540	1.748	5	267,9	98,7	99
2019	22.290	0	1	222,7	88,2	103
2020	16.454	0	2	388,4	19,8	88
2021	11.930	104	5	72,5	19,6	65
2022	14.514	148	0	118,9	51,1	65
2023	13.813	1.349	1	0	59,2	88

**) data awal*
Sumber: Distan Kab. Aceh Jaya, 2024

Dilihat dari segi produktivitasnya, tanaman ubi jalar memiliki produktivitas tertinggi untuk komoditi tanaman pangan pada tahun 2023 yaitu sebesar 9,8 ton/ha. Disusul dengan jagung dan kedelei masing-masing dengan nilai produktivitas sebesar 5,3 ton/ha dan 3,2 ton/ha. Tingkat produktivitas komoditi tanaman pangan di Kabupaten Aceh Jaya selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.23.

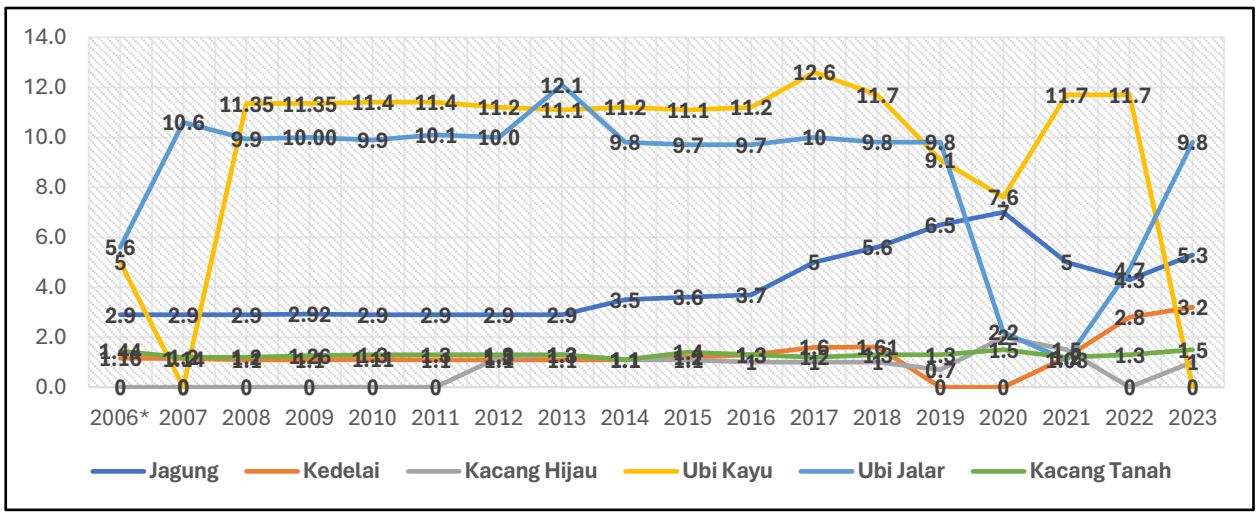

**) data awal*
Sumber: Distan Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.23. Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023 (Ton/ha)

2.3.1.4. Produksi Perkebunan

Selain komoditi pangan, Kabupaten Aceh Jaya memiliki potensi yang besar di sektor perkebunan yang diharapkan menjadi tumpuan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan akselerasi ekonomi Kabupaten Aceh Jaya di masa depan. Pengembangan komoditi perkebunan akan dibenahi dari hulu-hilir yang berbasis industri pengolahan dan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam periode RPJP Aceh Jaya sebelumnya, berbagai komoditi telah dikembangkan sesuai potensi dan karakteristik wilayah, seperti nilam, kelapa sawit, karet, kelapa dan kopi. Namun, pengelolaan komoditi ini belum terintegrasi secara optimal dengan industri pengolahan. Implikasinya, peran sektor perkebunan masih relatif stabil dalam mendorong kinerja ekonomi Kabupaten Aceh Jaya.

Berbagai komoditas unggulan perkebunan dibudidayakan petani, meliputi kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kopi dan nilam. Kurun waktu 2006-2023, pengembangan komoditi kelapa sawit cenderung meningkat signifikan. Produksi kelapa sawit mencapai 129.743 ton pada tahun 2023, meningkat drastis dibandingkan tahun 2006 yang masih sebanyak 19.803 ton (Tabel 2.27). Jumlah produksi kelapa sawit jauh lebih banyak dibandingkan dengan produksi komoditi perkebunan lainnya. Luas areal yang sudah ditanami kelapa sawit sebanyak 16.684 ha, atau sekitar 41,22 persen dari keseluruhan luas lahan yang sudah ditanami perkebunan (40.475 ha).

Tabel 2.27. Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023 (Ton)

Tahun	Karet	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Nilam
2006*	9.292	19.803	1.529	301,0	-
2007	15.724	19.803	1.529	301	-
2008	-	-	-	-	-
2009	4.996	20.700	1.656	271	15
2010	5.183	20.088	1.629	306,5	14
2011	14.066,9	130.464	1.655,1	235,6	25,9
2012	15.360	280.540	1.643	215	11
2013	8.702	134.946	1.395	205	35
2014	8.537	133.934	1.379	203	16
2015	5.230	10.425	1.454	245	19
2016	5.394	85.091	2.277	350	76
2017	5.440	88.517	2.610	357	43
2018	5.471	100.279	2.677	449	30
2019	50,12	103.818	2.673	538	36
2020	5.012	115.026	2.689	605	46
2021	5.013	115.881	2.671	538	35
2022	4.470	129.093	2.687	752	36
2023	4.076	129.743	2.051	756	29

**) data awal*

Sumber: Distan Kab. Aceh Jaya, 2024

Komoditi nilam termasuk komoditi unggulan di Aceh Jaya. Tidak semua daerah di Aceh dapat mengembangkan nilam. Periode 2006-2023, produksi nilam cenderung fluktuatif. Akhir tahun 2023, produksi nilam sebanyak 29 ton, dari luas tanam 347 ha. Untuk meningkatkan nilai tambah nilam, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berupaya mendorong pengembangan komoditi ini yang terintegrasi dengan pengembangan industri pengolahan. Dukungan dan sinergis dengan kebijakan prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, diharapkan dalam jangka panjang ke depan komoditi nilam menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dan pendorong percepatan pusat-pusat ekonomi wilayah di Aceh Jaya. Periode dua puluh tahun ke depan, luas tanam berbagai komoditi unggulan yang rusak milik masyarakat (seperti karet, kelapa dalam, kelapa sawit, kopi, kakao) perlu dilakukan rehabillitasi secara bertahap dan tuntas sehingga berkontribusi yang nyata mendorong ekonomi daerah.

Tabel 2.28. Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Potensi
		TBM	TM	TR				
1	Kelapa Dalam	408	2.341	2.458	5.207	2.051	877	1.869
2	Kelapa Sawit	5.540	8.152	2.992	16.684	129.743	2.864,8	11.447
3	Karet	3.861	4.780	4.990	13.631	4.076	853	9.772
4	Kakao	56	155	431	642	66	420	2.293
5	Kopi	774	851	599	2.224	756	887	2.421
6	Pinang	166	549	271	986	225	411	898
7	Pala	163	156	111	430	47	302	1.604
8	Cengkeh	56	91	200	347	40	439	1.064
9	Nilam	162	162	-	324	29	177	820
	Jumlah	**11.186**	**17.237**	**12.052**	**40.475**	**137.033**	**-**	**32.188**

Sumber: Distan Kab. Aceh Jaya, 2024

2.3.1.5. Populasi Peternakan

Selain komoditi tanaman pangan dan perkebunan, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengembangkan sub sektor peternakan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang bermutu tinggi. Ternak besar yang selama ini sudah menjadi komoditas strategis bagi masyarakat, seperti sapi dan kerbau, didorong pengelolaannya secara terpadu dan modern yang menganut prinsip ramah lingkungan. Tahun 2023 tercatat populasi ternak besar, seperti sapi potong berjumlah 35.560 ekor dan kerbau 5.326 ekor. Sentra pemeliharaan ternak sapi potong terbesar terkonsentrasi di Kecamatan Sampoiniet, Panga, Setia Bakti, dan Teunom. Untuk ternak kerbau, Kecamatan Jaya termasuk yang paling banyak pemeliharaan kerbau atau sentra terbesar. Ternak kecil yang dipelihara masyarakat secara tradisional mencakup ternak kambing berjumlah 18.906 ekor dan domba 404 ekor. Sentra terbesar ternak kambing terkonsentrasi di Kecamatan Panga, termasuk juga kecamatan

lainnya (Pasie Raya, Teunom, dan Jaya). Gambaran populasi populasi ternak di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29. Populasi Ternak Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 (ekor)

No.	Kecamatan	Jenis Ternak (Ekor)				
		Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
1	Teunom	4.234	629	-	2.149	-
2	Pasie Raya	2.421	48	-	2.618	169
3	Panga	4.447	704	-	2.976	38
4	Krueng Sabee	2.541	42	4	2.726	-
5	Setia Bakti	4.649	700	-	1.702	91
6	Sampoiniet	7.399	328	-	2.511	-
7	Darul Hikmah	2.762	151	-	698	18
8	Jaya	2.606	2.277	-	2.538	56
9	Indra Jaya	1.501	447	-	988	32
Aceh Jaya		**35.560**	**5.326**	**4**	**18.906**	**404**

Sumber: Distan Kab. Aceh Jaya, 2024

Pengembangan ternak unggas termasuk salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani yang bermutu tinggi bagi masyarakat, disamping juga menjadi sumber nafkah utama keluarga peternak. Ternak unggas yang banyak diperlihara peternak meliputi ayam ras pedaging mencapai 2.084.584 ekor, ayam kampung sebanyak 86.286 ekor, dan itik manila sebanyak 36.861 ekor. Adapun ternak ayam ras petelur masih terbatas dan hanya ada di Pasie Raya sentra pemeliharaannya.

Tabel 2.30. Populasi Ternak Unggas Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 (ekor)

No.	Kecamatan	Jenis Unggas (Ekor)			
		Ayam Kampung	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik/Itik Manila
1	Teunom	6.915	760	9.072	3.562
2	Pasie Raya	4.804	3.133	5.508	2.316
3	Panga	23.045	-	-	12.696
4	Krueng Sabee	17.257	-	266.800	5.192
5	Setia Bakti	1.200	-	-	1.150
6	Sampoiniet	8.403	-	36.000	1.529
7	Darul Hikmah	600	-	-	200
8	Jaya	11.963	-	60.000	4.550
9	Indra Jaya	7.009	-	-	1.398
Aceh Jaya		**81.196**	**3.893**	**377.380**	**32.593**

Sumber: Distan Kab. Aceh Jaya, 2024

2.3.1.6 Produksi Perikanan

Optimalisasi produksi perikanan juga akan terus didorong dan menjadi agenda prioritas ke depan. Dalam beberapa tahun terakhir, adanya kecenderungan produksi perikanan terus meningkat signifikan. Akhir tahun 2023, produksi perikanan tangkap di Aceh Jaya mencapai 12.863,5 ton. Angka produksi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 5.109,30 ton. Produksi perikanan tangkap lebih banyak dibandingkan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya masih belum optimal serta masih timpang dibanding produksi ikan dari laut. Tahun 2023, tercatat produksi perikanan budidaya hanya sebanyak 717,32 ton. Secara lebih rinci, perkembangan jumlah produksi perikanan di Kabupaten Aceh Jaya kurun waktu 2012-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.24.

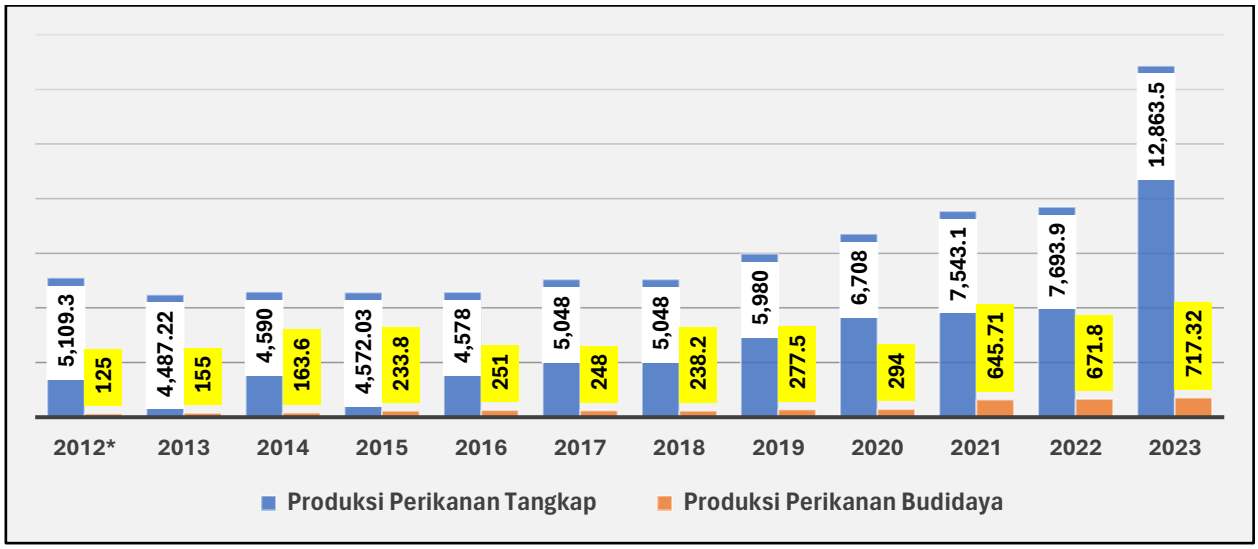

**) data awal*
Sumber: DKP Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.24. Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2023 (Ton)

2.3.1.7. Sarana Perdagangan

Wilayah yang maju dicirikan dengan berbagai aktivitas perdagangan dan pergerakan kegiatan ekonomi yang semakin berkembang. Pergerakan sektor perdagangan masih terbatas dalam mendorong perekonomian Kabupaten Aceh Jaya. Pusat-pusat perdagangan hanya ada di sebagian kecil di pusat ibukota kabupaten (Calang) dan pusat ibukota kecamatan, seperti Teunom, Krueng Sabee, dan Lamno meliputi perdagangan lokal di pasar tradisional, toko-toko dan pasar modern yang dilakukan oleh pedagang besar, pedagang menengah maupun pedagang kecil. Adapun transaksi perdagangan di Kabupaten Aceh Jaya pada umumnya meliputi perdagangan bahan pokok dan bahan penting lainnya, hasil-hasil komoditi pertanian/perikanan dan produk-produk UMKM lokal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya juga aktif menyelenggarakan transaksi perdagangan melalui operasi pasar dan pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi dan menjamin ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

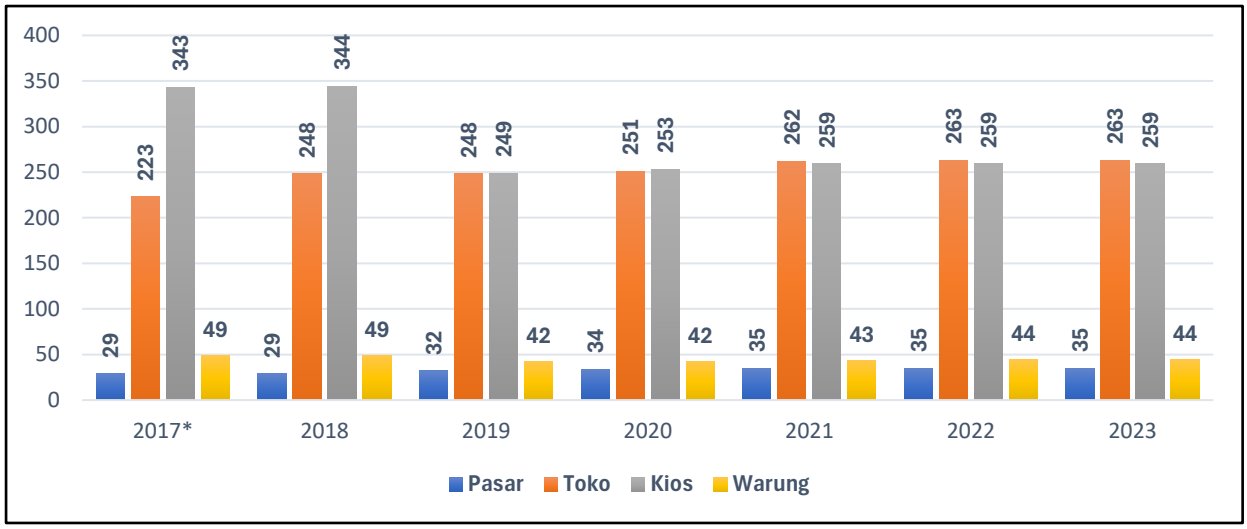

*) data awal
Sumber: Diskoperindag Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.25. Perkembangan Sarana Perdagangan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2023

Pada Gambar 2.25 dapat dilihat bahwa sarana perdagangan di Kabupaten Aceh Jaya kurun waktu 2017-2023 menunjukan jumlah yang realtif stabil. Kios menjadi sarana perdagangan yang paling banyak pada tahun 2017 yaitu sebanyak 343 unit dan pasar menjadi yang paling sedikit jumlahnya yaitu sebanyak 29 unit. Pada tahun 2023, toko dan kios masih mendominasi sarana perdagangan di Kabupaten Aceh Jaya meskipun jumlah kios berkurang menjadi sebanyak 259 unit dan toko bertambah menjadi 263 unit. Banyaknya jumlah toko dan kios di Kabupaten Aceh Jaya, hal ini menunjukan bahwa pelaku usaha di Kabupaten Aceh Jaya di dominasi oleh pedagang menengah dan pedagang kecil dalam kurun waktu yang sama. Adapun perkembangan jumlah pelaku usaha perdagangan di Kabupaten Aceh Jaya selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.26.

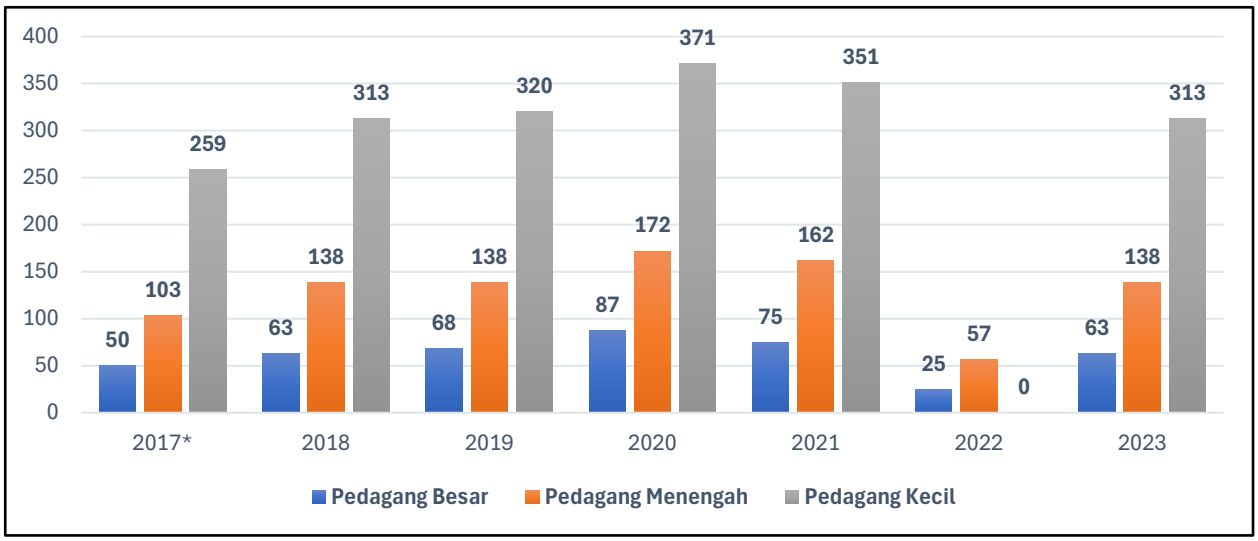

*) data awal
Sumber: Diskoperindag Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.26. Perkembangan Jumlah Pedagang Besar, Menengah dan Kecil di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2023

2.3.1.8. Perkembangan Industri

Sebagai salah satu penggerak dalam pembangunan ekonomi daerah, sektor industri mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan nilai tambah untuk produk unggulan lokal, dan mendorong investasi serta inovasi. Penguatan sektor industri tidak saja berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, namun juga menjadi landasan dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Perkembangan sektor industri pengolahan di Kabupaten Aceh Jaya kurun waktu 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 kontribusi sektor industri mengalami sedikit penurunan menjadi 5,23% dari 5,50% pada tahun 2022. Penguatan sektor industri pengolahan diupayakan terus berlanjut dalam jangka panjang ke depan. Hilirisasi produk-produk turunan dari komoditi unggulan pertanian (seperti kelapa sawit, nilam) diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan industri pengolahan di masa depan.

Adapun upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan diantaranya yaitu pencadangan Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) dalam RTRW Kabupaten Aceh Jaya seluas 782 ha yang berada di Kecamatan Krueng Sabee, Setia Bakti, dan Teunom. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya juga sudah membangun Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) Nilam yang berada di Kecamatan Teunom. Dimana pengelolaan SIKIM tersebut dilakukan oleh BUMD PT. BARAJAYA dengan harapan kedepannya akan memproduksi produk-produk turunan Nilam. Saat ini SIKIM Nilam sudah memproduksi produk-produk turunan Nilam seperti sabun, detergen dan juga parfum. Penguatan industri-industri kecil juga terus dilakukan Pemerintah dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha. Perkembangan industri di Kabupaten Aceh Jaya kurun waktu 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.27.

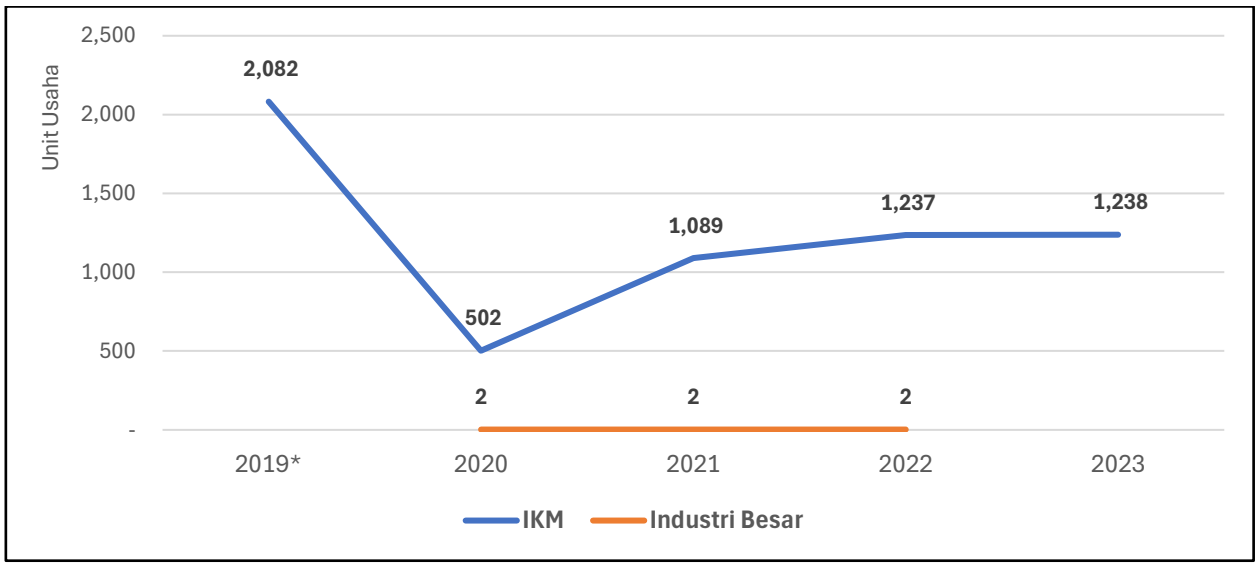

**) data awal*
Sumber: Diskoperindag Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.27. Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Besar di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019-2023

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pada hakekatnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menuju ke arah tersebut, dapat diwujudkan melalui pembangunan pendidikan yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan dan kemajuan pembangunan pendidikan yang telah diimplimentasikan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan berbagai program dan kegiatan pembangunan, dapat diukur dengan berbagai indikator pembangunan pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) salah satu indikator pembangunan pendidikan yang menggambarkan akses dan jangkauan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. Selama periode 2013-2023, tercatat APS SD/MI menuju kearah yang menggembirakan dan mengalami peningkatan. Akhir tahun 2023, APS pada tingkat pendidikan SD/MI mencapai 99,42 persen. Artinya, sekitar 0,58 persen peserta didik usia sekolah yang tidak mengeyam pendidikan formal.

Kondisi APS pada tingkat pendidikan SMP/MTs terlihat fluktuatif selama 11 (sebelas) tahun terakhir. Namun demikian, capaian APS SMP/MTs pada tahun 2023 sudah lebih tinggi dibandingkan APS SD/MI. Selama periode 2013-2023, APS tertinggi dicapai pada tahun 2023, yaitu sebesar 99,91 persen yang menyiratkan sebanyak 0,09 persen penduduk usia sekolah tidak mengecap pendidikan SMP/MTs (Gambar 2.28). Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya akan terus memastikan dan memperluas layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah SMP/MTs sehingga dapat mengecap pendidikan formal.

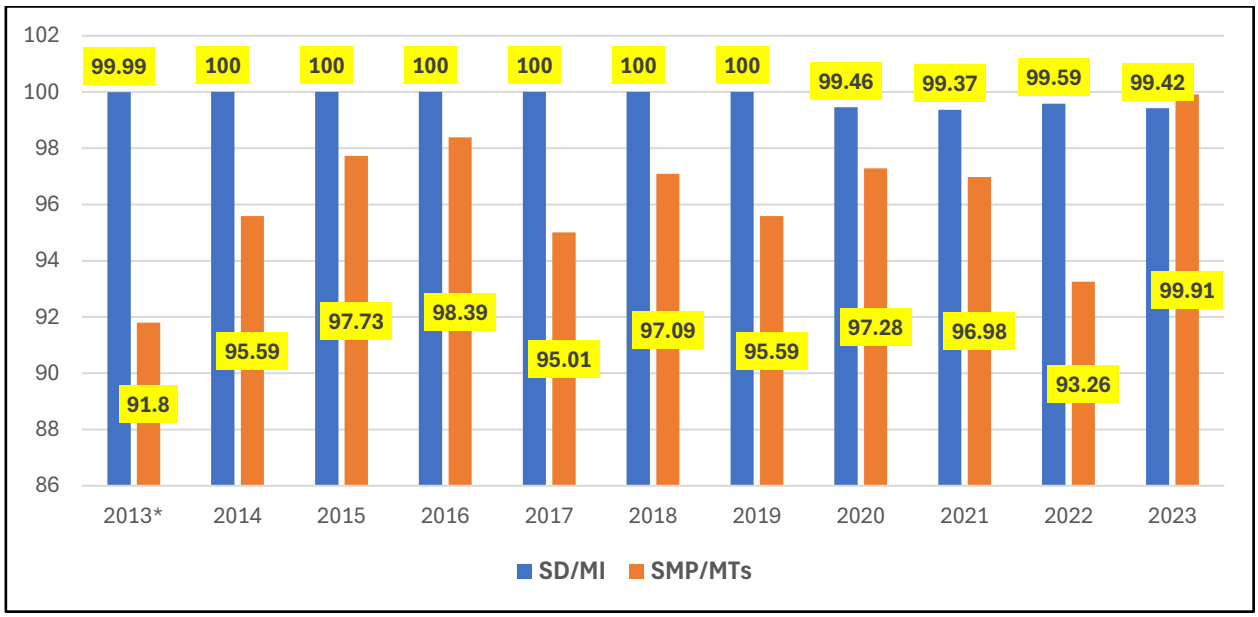

**) data awal*
Sumber: Disdikbud Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.28. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2023

2.3.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Selain APS, Angka Partisipasi Kasar (APK) termasuk salah satu indikator pembangunan pendidikan yang mengukur partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. APK yang semakin tinggi dapat mencerminkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Lebih dari satu dekade, perkembangan APK pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Jaya terlihat bervariasi. Capaian APK pada tingkat pendidikan SD/MI sudah melebihi dari 100 persen. Sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs terlihat berfluktuatif. Tahun 2013, APK tingkat SD mencapai 105,23 persen. Akhir tahun 2023, APK tingkat SD mencapai sebesar 108,12 persen. Kurun waktu 2013-2023, tercatat APK SD/MI tertinggi dicapai pada tahun 2018, yaitu sebesar 115,01 persen. Untuk jenjang pendidikan SMP, APK yang tinggi dicapai pada tahun 2016 yang mencapai 114 persen. Sementara itu, APK SMP terendah dicapai pada tahun 2023 sebanyak 91,96 persen. Perkembangan APK menurut jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana terlihat pada Gambar 2.29.

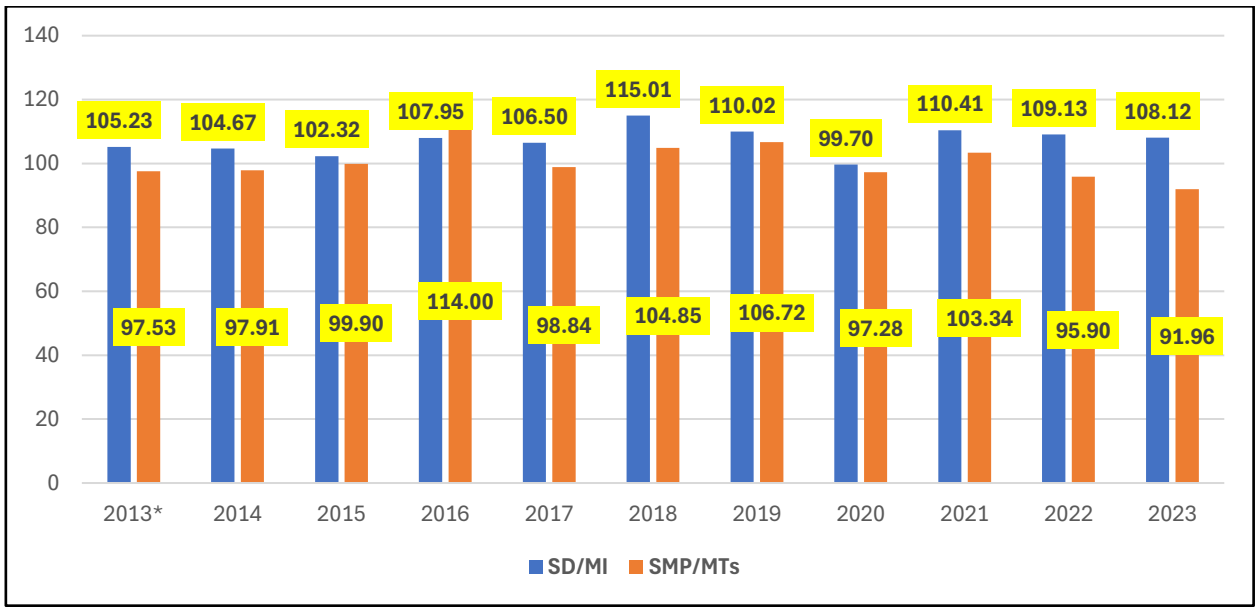

**) data awal*
Sumber: Disdikbud Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.29. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2023

2.3.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya akan terus memastikan penduduk usia sekolah mengecap pendidikan formal. Layanan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dalam jangka panjang ke depan akan menjadi prioritas dan diarahkan untuk terpenuhinya layanan pendidikan untuk semua, termasuk masyarakat miskin. Selama periode 2013-2023, perkembangan capaian APM SMP/MTs di Aceh Jaya menuju ke arah perbaikan dan terus meningkat (Gambar 2.30). Namun demikian, peningkatan APM

SMP/MTs belum mencapai angka ideal (100 persen). Akhir tahun 2023, APM SMP/MTs terealisasi sebesar 82,21 persen, yang berarti sekitar 17,79 persen tidak bersekolah jenjang pendidikan SMP/MTs. Sementara itu, pada tahun 2013, APS SMP/MTs masih sebesar 65,55 persen.

Pada jenjang pendidikan SD/MI, capaian APM pendidikan SD/MI jauh lebih baik daripada pendidikan SMP/MTs. Sampai tahun 2023, capaian APM SD/MI telah mencapai 99,42 persen, dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 81,69 persen. Kurun waktu 2013-2023, realisasi APM SD/MI tertinggi dicapai pada tahun 2018, dan terendah dicapai pada tahun 2013.

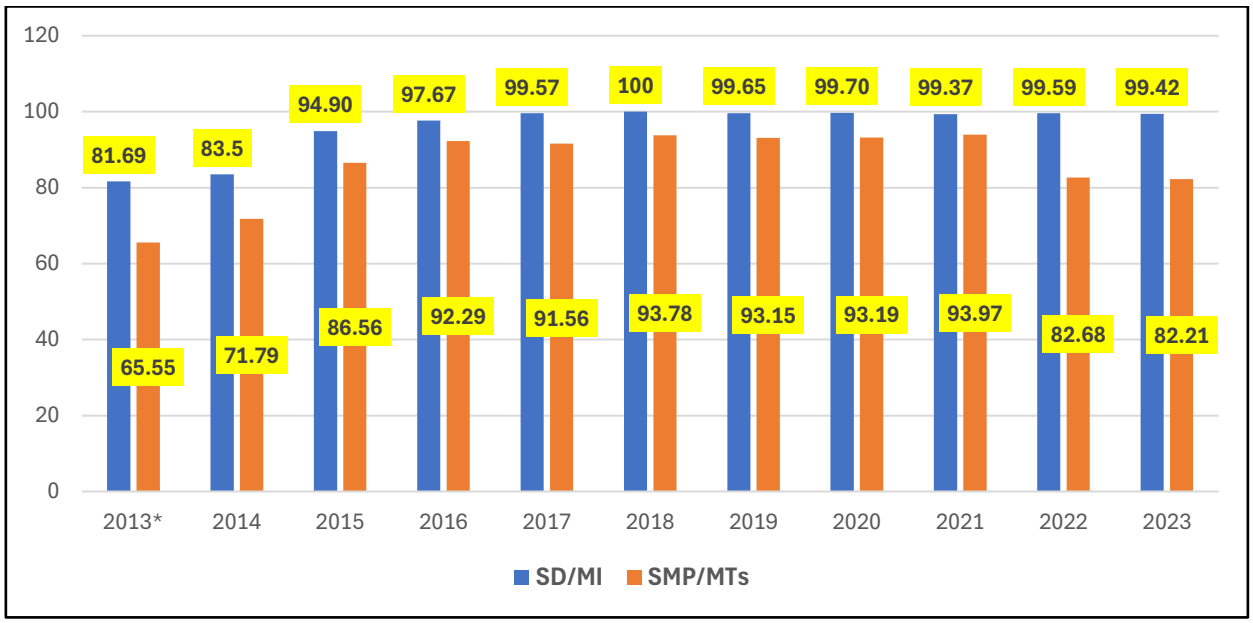

**) data awal*
Sumber: Disdikbud Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.30. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2023

2.3.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencerminkan besarnya partisipasi penduduk usia kerja atau angkatan kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan yang aktif dalam kegiatan ekonomi. TPAK yang lebih tinggi dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena adanya keterlibatan penduduk yang lebih banyak dalam aktivitas ekonomi. Angkatan kerja ini umumnya didominasi oleh penduduk berusia produktif yaitu yang berumur 15-64 tahun.

Pada tahun 2023, TPAK Aceh Jaya sebesar 70,46 persen. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 70,70 persen. Penurunan TPAK Aceh Jaya tahun 2023 tidak terlepas dari menurunnya partisipasi penduduk laki-laki dan penduduk perempuan dalam angkatan kerja. Namun demikian TPAK penduduk laki-laki masih jauh diatas TPAK penduduk perempuan. Adapun TAPK penduduk laki-laki pada tahun 2023 yaitu 84,24 persen dan TPAK penduduk perempuan yaitu 56,40 persen. Perkembangan TPAK Kabupaten Aceh Jaya kurun waktu 2018-2023 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.31.

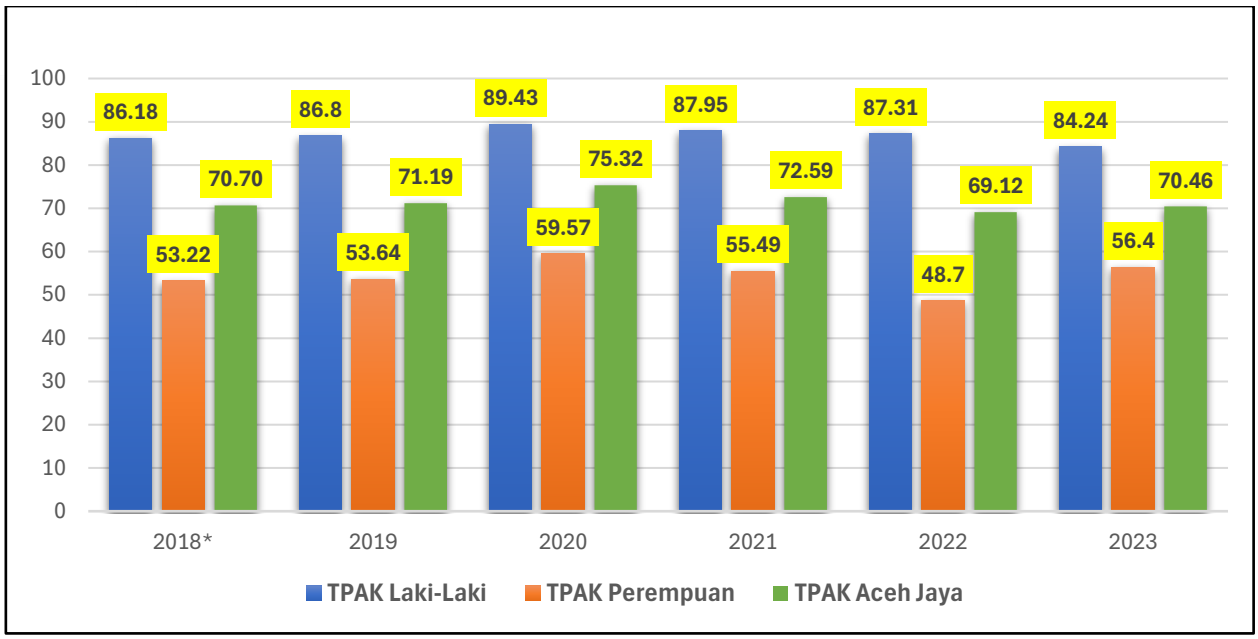

**) data awal*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2024

Gambar 2.31. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor pada suatu daerah atau antardaerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur diantaranya dapat dilihat dari fasilitas perhubungan, pengairan/irigasi, air bersih, serta energi dan telekomunikasi.

2.3.3.1. Pengairan/Irigasi

Sesuai RTRW Aceh Jaya (Tabel 2.30), rencana pengembangan sistem jaringan irigasi mencakup:.

a. Jaringan irigasi primer sepanjang 383,26 km, tersebar di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Krueng Sabee.
b. Jaringan irigasi sekunder sepanjang 80,21 km, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya.
c. Jaringan irigasi tersier sepanjang 79,27 km tersebar di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Sampoi Niet.

Tabel 2.31 . Rencana Pengembangan Jaringan Sumberdaya Air

No	Kecamatan	Jaringan Irigasi Primer	Jaringan Irigasi Sekunder	Jaringan Irigasi Tersier	Jaringan Pengendalian Banjir	Jumlah Total (km)
1	Kecamatan Teunom	14,95	3,87	0,55	15,77	35,13
2	Kecamatan Pasie Raya	63,76	5,95	2,16	4,15	76,01
3	Kecamatan Panga	33,25	7,92	8,31	-	49,48
4	Kecamatan Krueng Sabee	-	6,01	3,12	8,03	17,16
5	Kecamatan. Sampoi Niet	54,59	4,25	-	2,21	61,06
6	Kecamatan Setia Bakti	60,85	10,20	19,75	2,43	93,23
7	Kecamatan. Darul Hikmah	48,10	12,50	6,51	1,05	68,16
8	Kecamatan. Jaya	62,50	25,77	30,06	5,41	123,75
9	Kecamatan Indra Jaya	45,26	3,73	8,81	2,77	60,57
	Jumlah Total	**383,26**	**80,21**	**79,27**	**41,81**	**584,55**

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Jaya 2024-2044

Mengacu pada RPJP Aceh, kewenangan Daerah Irigasi (DI) Pemerintah Kabupaten/kota di Aceh sebanyak 1.439 DI dengan luas 203.428 Ha. Dari keseluruhan luas tersebut, DI permukaan 196.261 ha yang tersebar di kabupaten/kota. Sementara itu, DI permukaan di wilayah Aceh Jaya seluas 1.249.5 ha atau setara 0,64 persen dari keseluruhan DI permukaan di Aceh. DI permukaan di Aceh Jaya memperlihatkan hampir mencapai separuhnya kondisi rusak. DI permukaan berkondisi baik sekitar 83,73% pada tahun 2023, meskipun adanya perbaikan dibanding tahun 2019 yang masih sekitar 58,72 persen. Perkembangan Luas Irigasi menurut kondisi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32 Luas Irigasi Menurut Kondisi di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019-2023

Tahun	Irigasi (Ha)				
	Daerah Irigasi	Kondisi Irigasi			
		Luas	Baik	Rusak	Proporsi Kondisi Baik (%)
2019*	Permukaan	3.627	2.129,77	1.497,23	58,72
	Air Tanah	-	-	-	
	Rawa	-	-	-	
	Tambak	-	-	-	
2020	Permukaan	3.627	2.255,63	1.371,37	62,19
	Air Tanah	-	-	-	
	Rawa	-	-	-	
	Tambak	-	-	-	
2021	Permukaan	3.627	2.332,89	1.294,11	64,32
	Air Tanah	-	-	-	
	Rawa	-	-	-	
	Tambak	-	-	-	

Tahun	Irigasi (Ha)				
	Daerah Irigasi	Kondisi Irigasi			
		Luas	Baik	Rusak	Proporsi Kondisi Baik (%)
2022	Permukaan	3.627	2.377,5	1.249,5	65,55
	Air Tanah	-	-	-	
	Rawa	-	-	-	
	Tambak	-	-	-	
2023	Permukaan	3.627	3.036,81	590,19	83,73
	Air Tanah	-	-	-	
	Rawa	-	-	-	
	Tambak	-	-	-	

**) data awal*
Sumber: Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, 2024

2.3.3.2 Energi

Kebutuhan listrik di Kabupaten Aceh Jaya dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Tahun 2019, tercatat Rumah Tangga yang menggunakan PLN sebanyak 98,72 persen, dengan daya terpasang sebesar 37.962 KW. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak untuk kendaraan, di Kabupaten Aceh Jaya terdapat 5 buah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Keberadaan SPBU belum tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Jaya, karena ada beberapa kecamatan yang belum terdapat SPBU. Keberadaan SPBU akan mudah dijumpai pada wilayah kecamatan yang dilalui oleh jalan utama antar kabupaten.

Terkait dengan infrastruktur ketenagalistrikan, dalam RTRW Aceh Jaya direncanakan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Aceh Jaya, meliputi gardu induk dan PLTA. Untuk jaringan listrik, jaringan transmisi yang melintasi wilayah Kabupaten Aceh Jaya dilayani oleh PT. PLN ULP Calang yang merupakan bagian dari sistem interkoneksi wilayah Aceh. Rencana Pengembangan dan pembangunan pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Aceh Jaya, meliputi:

1) Rencana Pengembangan dan pembangunan Gardu Induk (GI) yang berada di Kecamatan Krueng Sabee;
2) Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berada di PLTA Pasie Raya Kecamatan Pasie Raya yang memanfaatkan aliran sungai Teunom.

Sementara itu, rencana pengembangan jaringan infrastuktur penyaluran tenaga dan sarana pendukung di Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Aceh Jaya, meliputi:

1. Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sepanjang 42,02 km berada di Kecamatan Teunom, Pasie Raya, Panga dan Kecamatan Krueng Sabee.
2. Jaringan distribusi tenaga listrik yang berfungsi untuk mendistribusikan energi listrik di Kabupaten Aceh Jaya meliputi:

a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 381,16 km yang menghubungkan seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya berada diseluruh kecamatan.
b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), berupa jaringan yang dipasang di udara, menggunakan penghantar / kawat yang direntangkan di tiang dan diikat pada isolator. Dalam hal ini rencana saluran udara tegangan rendah (SUTR) direncanakan disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya

2.3.3.3. Telekomunikasi

Dalam jangka panjang ke depan, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi berperan penting dalam mendorong kegiatan digitalisasi dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi di Aceh Jaya. Sesuai RTRW, rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Aceh Jaya antara lain meliputi:

a. Rencana pembangunan jaringan bergerak seluler diseluruh kecamatan sepanjang 246,05 km;
b. Pemerataan dan penyediaan pelayanan bagi kawasan yang belum terlayani;
c. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan arus penerbangan di masa mendatang diperlukan pengaturan frekuensi bagi pemancar radio di daerah sehingga tidak menggangu komunikasi;
d. Peningkatan koordinasi sistem jaringan baik pemanfaatan ruang daratan maupun ruang udara untuk meningkatkan pelayanan telepon sehingga merata ke seluruh wilayah;
e. Pengembangan sarana prasarana untuk daerah terisolir dengan sistem tanpa kabel atau dengan sistem tersendiri, seperti menggunakan sambungan telepon seluler dalam bentuk sambungan rumah;
f. Pengembangan jaringan bawah tanah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ruang di perkotaan;
g. Meningkatkan pelayanan pusat jaringan terpadu sampai dengan tingkat desa/ kelurahan serta memberikan akses bagi masyarakat umum dalam penggunaan sistem jaringan terpadu tersebut;
h. Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi dengan sistem tower terpadu.

2.3.3.4. Infrastruktur Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena dapat menjangkau penduduk sampai di pelosok. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Selain

melaksanakan tugas tersebut, puskesmas memiliki fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama serta sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

Selama periode 2005-2023, ketersediaan prasarana kesehatan terus meningkat. Untuk puskesmas, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah membangun 12 unit tahun 2023, dari 10 unit tahun 2005. Tabel 2.33 menunjukan rasio ideal puskesmas terhadap kecamatan, yaitu minimal 1 puskesmas di 1 kecamatan. Ketersediaan puskesmas di Aceh Jaya sudah mencapai angka ideal. Prasarana Poskesdes/Polindes termasuk yang paling banyak di Aceh Jaya. Perkembangan Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes/Polindes selama periode 2005-2023 di Kabupaten Aceh Jaya telah cukup memadai namun belum didukung dengan sarana dan tenaga yang berkualitas. Untuk itu, pembangunan jangka panjang kedepan adalah meningkatkan ketersedian peralatan medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas pada Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu dimaksud sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Tabel 2.33. Perkembangan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2023

Tahun	Jumlah Pukesmas (unit)	Jumlah Pukesmas Pembantu (unit)	Jumlah Poskesdes/ Polindes (unit)
2005*	10	-	-
2006	10	-	-
2007	10	-	-
2008	10	-	-
2009	10	-	-
2010	10	-	-
2011	10	-	-
2012	10	-	-
2013	10	-	-
2014	10	-	-
2015	10	-	-
2016	10	29	109
2017	12	29	110
2018	12	29	110
2019	12	29	110
2020	12	29	110
2021	12	28	110
2022	12	28	110
2023	12	28	122

**) data awal*
Sumber: Dinkes Kab. Aceh Jaya, 2024

Selain dilakukan upaya promotif dan preventif, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitative. Fungsi rumah sakit selain menyediakan upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan. Sampai tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah memiliki RSUD Teuku Umar kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia N0. 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Dibandingkan dengan layanan 1.000 penduduk, hanya ketersediaan prasarana polindes yang melebihi dari 1 (satu) pada tahun 2023. Angka rasio ini tertinggi dibandingkan dengan prasarana kesehatan lainnya. Angka rasio tersebut sedikit berkurang dibandingkan tahun 2015. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan penduduk di Aceh Jaya yang terus meningkat. Sementara itu, rata-rata prasarana kesehatan lainnya dalam melayani 1.000 penduduk, meliputi Puskesmas dan Pustu tidak mencapai 1 unit, pada tahun 2023. Angka rasio tersebut relatif stabil untuk puskesmas dihampir dua dekade dan relatif untuk pustu kurun waktu 2016-2023 (Gambar 2.32).

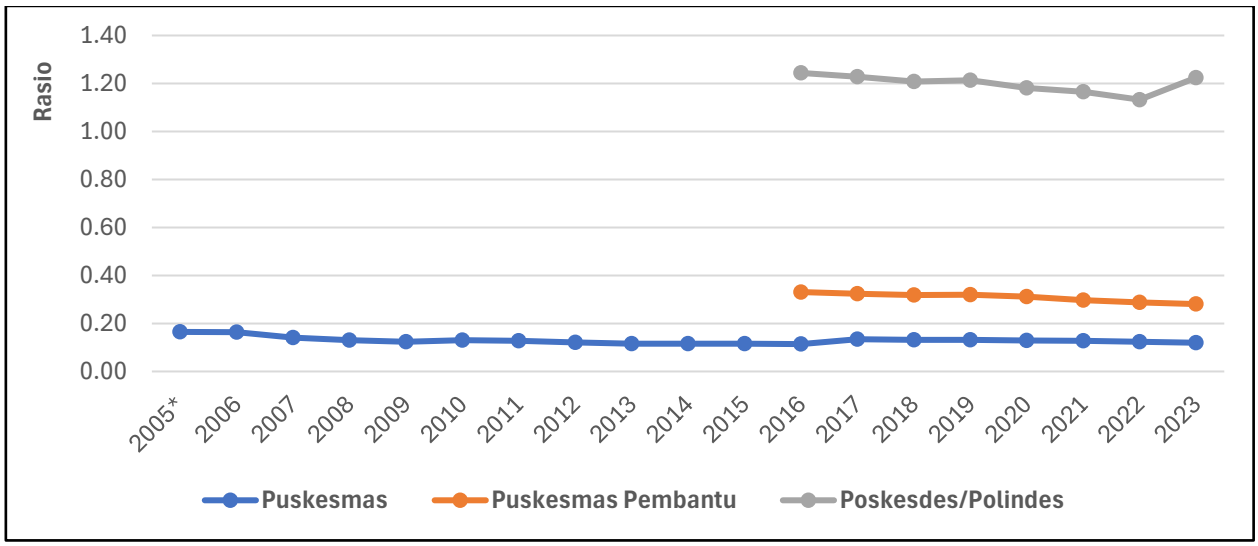

**) data awal*
Sumber: Dinkes Kab. Aceh Jaya, 2024 (diolah)

Gambar 2.32. Perkembangan Rasio Prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2023

2.3.3.5. Jaringan Jalan dan Jembatan

Infrastruktur jalan berperan penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, infrastruktur jalan sebagai tulang punggung dalam pergerakan ekonomi, terutama dalam distribusi barang dan jasa serta bagian penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Infrastruktur jalan dapat membuka akses terhadap kesempatan kerja, pelayanan, investasi, serta dapat menjadi pendorong perputaran/siklus kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan ekonomi lokal.

Topografi wilayah Aceh Jaya yang bervariasi menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk terus membangun infrastruktur jalan yang berkondisi mantap. Ketersediaan infrastruktur jalan yang representatif di Kabupaten Aceh Jaya merupakan dambaan bagi masyarakat untuk mendorong konektivitas dan memperlancar arus mobilitas barang dan jasa. Hingga tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah membangun jalan kabupaten sepanjang 551,24 km. Dibanding tahun 2006 atau pasca 2 (dua) tahun setelah terjadi tsunami (tahun 2004), panjang jalan di Aceh Jaya masih sekitar 307,20 km, berarti mengalami peningkatan sepanjang 244,04 km.

Pembangunan ruas jalan kabupaten yang rusak sedang dan berat menjadi agenda prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jaya dalam jangka panjang ke depan (periode 2025-2045). Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan untuk mendorong percepatan perekonomian antar kecamatan. Hingga tahun 2024, hanya sekitar 36,8 persen kualitas jalan di Aceh Jaya berkondisi baik atau sepanjang 251,49 km. Kondisi jalan yang rusak berat mencapai 362,43 km pada tahun 2024. Jalan kabupaten yang rusak tersebut sebelumnya mencapai 280,3 km pada tahun 2010. Adapun kondisi jalan kabupaten yang rusak ringan dilalui kendaraan bermotor sepanjang 47 km (kondisi tahun 2024), dari sepanjang 100,2 km (tahun 2010).

Penanganan atau rehabilitasi jalan yang rusak menjadi perhatian sungguh-sungguh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini mengingat jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah. Jika jalan rusak, dipastikan lalu lintas orang, barang, dan jasa akan terganggu. Selanjutnya, aktivitas ekonomi kurang berkembang serta merosot, layanan transportasi kurang efisien, dan timbulnya *high cost economy* bagi masyarakat/pengguna jalan. Perkembangan kondisi panjang jalan kabupaten di Kabupaten Aceh Jaya selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.34. Panjang Jalan Kabupaten Aceh Jaya Menurut Kondisi Jalan Tahun 2006-2024

Tahun	Jalan Kabupaten						
	Panjang Jalan (km)	Kondisi Jalan					
		Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak/Rusak Berat (km)	Proporsi Kondisi Jalan Baik (%)	
2006*	307.20	-	-	-	-		
2007	307,20	9	49,3	-	249,8	3,0	
2008	307,20	-	-	-	-	-	
2009	321,86	-	-	-	-	-	
2010	540,78	160,28	100,2	-	280,3	30,0	
2011	545,89	192,06	95,41	-	270,88	35,0	
2012	545,89	-	-	-	-	-	
2013	591,69	211,41	162,72	-	217,56	36,0	

Tahun	Jalan Kabupaten						
	Panjang Jalan (km)	Kondisi Jalan					
		Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak/Rusak Berat (km)	Proporsi Kondisi Jalan Baik (%)	
2014	591,78	211,48	162,73	-	217,62	36,0	
2015	585,14	-	-	-	-	-	
2016	551,24	215,54	108,15	-	227,55	39,0	
2017	551,24	220,02	9,62	-	321,61	40,0	
2018	551,24	235,71	67,84	30,62	43,0	43,0	
2019	551,24	238,3	8,84	30,62	273,49	43,2	
2020	551,24	240,21	68,84	136,58	105,61	43,5	
2021	551,24	245,41	68,84	133,39	103,60	44,5	
2022	551,24	261,51	87,79	55,61	146,33	47,4	
2023	551,24	266,06	87,84	52,71	144,63	48,2	
2024	682,00	251,49	21,07	47,01	362,43	36,8	

**) data awal*
Sumber: Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, 2024

Sesuai RTRW Kabupaten Aceh Jaya, pengembangan jaringan lingkungan yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah dengan skala pelayanan lingkungan meliputi Kecamatan Indra Jaya sepanjang 0,55 km, Kecamatan Jaya sepanjang 2,44 km, Kecamatan Krueng Sabee sepanjang 1,23 km, Kecamatan Pasie Raya sepanjang 29,52 km, Kecamatan Teunom sepanjang 4,75 km.

Selain infrastruktur jalan, kondisi jembatan yang rusak juga menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Akhir tahun 2024, jembatan dengan kondisi baik hanya sepanjang 2,47 km atau sekitar 63 persen dari keseluruhan panjang jembatan di Aceh Jaya. Selebihnya kondisi jembatan di wilayah Aceh Jaya harus mendapatkan penanganan dan rehabilitasi agar mobilitas orang, barang, dan jasa antar wilayah berjalan lancar. Panjang jembatan kabupaten menurut kondisi selama tahun 2014-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35. Panjang Jembatan Kabupaten Aceh Jaya Menurut Kondisi Tahun 2014-2024

Tahun	Jembatan Kabupaten							
	Panjang Jembatan (m)	Kondisi Jembatan						
		Baik (m)	Sedang (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak/ Rusak Berat (m)	Runtuh (m)	Proporsi Kondisi Baik (%)	
2014*	4.025	1.346	339	-	2.340	-	33,4	

Tahun	Jembatan Kabupaten						
	Panjang Jembatan (m)	Kondisi Jembatan					
		Baik (m)	Sedang (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak/ Rusak Berat (m)	Runtuh (m)	Proporsi Kondisi Baik (%)
2015	4.086	1.407	339	-	2.340	-	34,4
2016	-	-	-	-	-	-	
2017	4.086	1.587	339	-	2.160	-	38,8
2018	4.086	1.707	339	-	2.040		41,7
2019	3.959	2.144	220,5	710	764,5	120	54,2
2020	3.798	2.282	220,5	590	585,5	120	60
2021	3.798	2.292	220,5	580	585,5	120	60,3
2022	3.930	2.378	312,5	696	423,5	120	60,5
2023	3.930	2.389,9	492	516	412,1	120	60,8
2024	3.930	2.479,4	502	416,6	412	120	63

**) data awal*
Sumber: Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, 2024

2.3.3.6. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat salah satunya dari kondisi rumah layak huni. Sepanjang tahun 2013-2023, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah membangun rumah layak huni dan merehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 447 unit. Dalam periode tersebut, rumah layak huni paling banyak dibangun/direhabilitasi pada tahun 2019 sebanyak 100 unit dan pada tahun 2014 sebanyak 90 unit. Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dihadapkan tantangan yang besar dalam upaya mewujudkan rumah layak huni. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya harus bersinergis dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat serta BUMN/dunia usaha untuk mendorong secara bertahap perbaikan atau pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya.

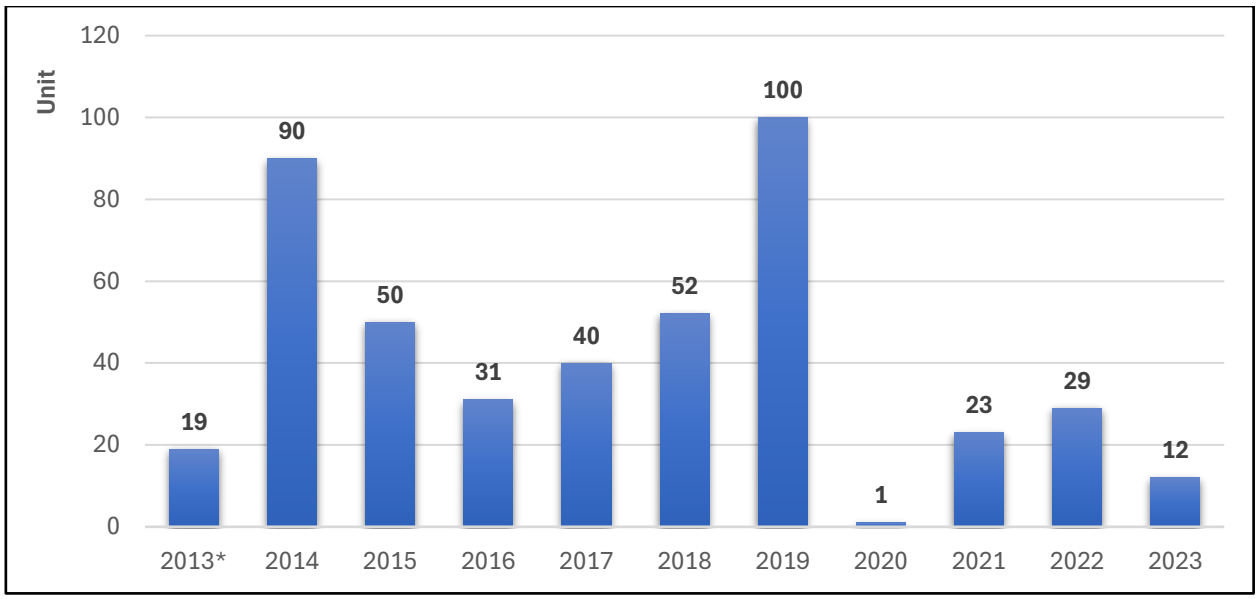

**) data awal*
Sumber: Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.33. Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2023

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Indeks Rasa Aman (Angka Kriminalitas)

Rasa aman dijelaskan sebagai kepastian bagi individu maupun berkelompok untuk hidup di suatu tempat. Aceh Jaya dapat dikategorikan sebagai daerah yang tingkat kriminalitasnya sangat rendah. Ini terlihat dari laporan statistik kriminal pada Aceh Jaya Dalam Angka tahun 2024, dimana jumlah kasus kriminal di tahun 2020 sebesar 114 kasus telah mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2023 dengan jumlah kasus sebesar 76 kasus. Kepastian rasa aman tidak hanya dilihat dari jumlah kasus yang terjadi tetapi juga jumlah kasus yang diselesaikan. Data menunjukkan jumlah perkara yang diselesaikan di Aceh Jaya pada tahun 2023 mencapai 511 perkara.

2.3.4.2. Indeks Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah yang didasarkan pada potensi, kekhasan, dan keunggulan suatu daerah. Suatu daya saing *(competitiveness)* merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dalam mencapai tingkat kesejahteraan dan keberlanjutan. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. Dalam empat tahun terakhir, capaian indeks daya saing daerah Kabupaten Aceh Jaya terlihat fluktuatif. Pada tahun 2019, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebesar 1,90. Nilai indeks tersebut mengalami kemajuan hingga mencapai 3,25 pada tahun 2021. Pada tahun 2023, nilai indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Aceh Jaya turun menjadi 2,84. Nilai indeks tersebut juga lebih rendah dari Provinsi Aceh yang mendapatkan nilai sebesar 3,49.

Tabel 2.36. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tahun 2019-2023

TAHUN	INDEKS DAYA SAING DAERAH	
	ACEH JAYA	ACEH
2019*	1,9	3,34
2021	3,25	2,76
2020	2,79	2,66
2022	2,51	3,15
2023	2,84	3,49

**) data awal*
Sumber: BRIN, 2024

Sementara itu, daya saing daerah secara berkelanjutan akhir-akhir ini menjadi tolok ukur dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon. Daya saing daerah berkelanjutan dimaknai sebagai keunggulan kompetitif daerah yang terbentuk dari interaksi institusi, kebijakan, dan kinerja dalam jangka panjang guna menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan keberlanjutan ekonomi, mewujudkan inklusi sosial, serta pelaksanaan tata kelola berkelanjutan. IDSDB dibentuk empat pilar yang saling menunjang: lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, dan tata kelola berkelanjutan. Empat pilar tersebut menjadi soko guru manifestasi daya saing daerah berkelanjutan yang idealnya dapat dilaksanakan oleh daerah secara konkret.

Berdasarkan pemetaan IDSDB, raihan daya saing daerah berkelanjutan Kabupaten Aceh Jaya berada pada level sedang (capaian skor 30 sd 60), yaitu 51,16. Raihan ini lebih rendah dari keseluruhan Provinsi Aceh yang sebesar 55,31. Dari beberapa aspek yang di nilai, inklusi sosial termasuk yang paling tinggi perolehan nilainya. Adapun yang paling rendah nilainya terdapat aspek ekonomi berkelanjutan**.** Capaian tingkat daya saing daerah berkelanjutan daerah ini disebabkan oleh ketidakseimbangan torehan capaian antar pilar dimana dari empat pilar yang diamati, tidak semuanya menunjukkan kinerja yang tinggi. Kabupaten Aceh Jaya hanya memiliki keunggulan pada pilar inklusi sosial dan lingkungan lestari, namun memiliki persoalan serius pada pilar ekonomi berkelanjutan. Pada pilar lingkungan lestari, diharapkan hal ini menjadi agenda prioritas ke depan terutama dalam mendukung pembangun berkelanjutan di daerah. Pembangunan daerah mulai memprioritaskan pemeliharaan lingkungan dalam menghadapi dampak buruk perubahan iklim dan dinamika risiko bencana di daerah. Refleksi atas kinerja pilar ekonomi berkelanjutan menuntut daerah untuk melakukan daya dukung wilayah, optimalisasi sektor basis lestari, kemandirian fiskal menjadi agenda prioritas dalam peningkatan kinerja pilar ekonomi berkelanjutan.

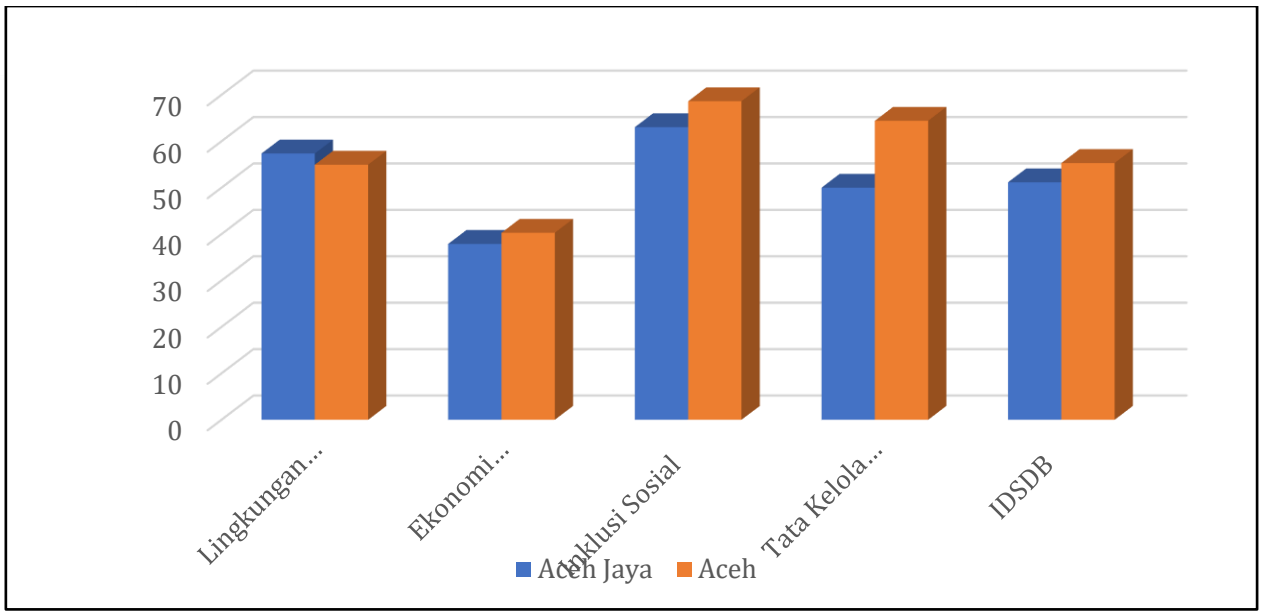

Sumber: KPPOD, 2023

Gambar 2.34. Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tahun 2022

2.3.4.3. Indeks Daya Saing Investasi (IDSI)

Tingkat daya saing investasi menjadi salah satu parameter untuk melihat iklim investasi suatu daerah. Iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Aceh, IDSI Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2022 berada pada peringkat 13 dengan nilai indeks daya saing yakni -0,007 dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh. Namun pada tahun 2023, IDSI Kabupaten Aceh Jaya turun ke peringkat 18 dengan nilai indeks daya saing yakni -0,492. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37. Indeks Daya Saing Investasi (IDSI) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022-2023

DAERAH	Nilai Lingkup								Nilai Indeks Daya Saing		Peringkat	
	Stabilitas Ekonomi Makro		Pemerintahan dan Institusi Publik		Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja		Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur					
	2022*	2023	2022*	2023	2022*	2023	2022*	2023	2022*	2023	2022*	2023
Aceh Jaya	-0,560	-0,741	0,587	-0,188	-0,538	-0,340	0,538	-0,701	0,007	-0,492	13	18

*) data awal
Sumber: DPMPTSP Aceh, 2023

2.3.4.4. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagai landasan yuridis yang memberikan kewenangan kepada Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Jaya untuk pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang pelaksanaannya meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Salah satu indikator mengukur kemajuan pembangunan syariat adalah menggunakan Indeks Pembangunan Syariah (IPS). IPS ini didasarkan pada 7 dimensi pembangunan yang terdiri dari Akidah, Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan Membayar Zakat di Baitul Mal, Melek Al-Quran, Manajemen Masjid, Hukum Jinayat, dan Akhlak. Hasil survei IPS tahun 2024 menunjukan bahwa Aceh Jaya masuk dalam kategori "Baik" dengan skor rata-rata sebesar 79,95. Begitu juga dengan skor masing-masing dimensi yang menjadi komponen penilaian IPS masuk dalam kategori "Baik". Adapun pencapaian skor masing-masing dimensi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.35.

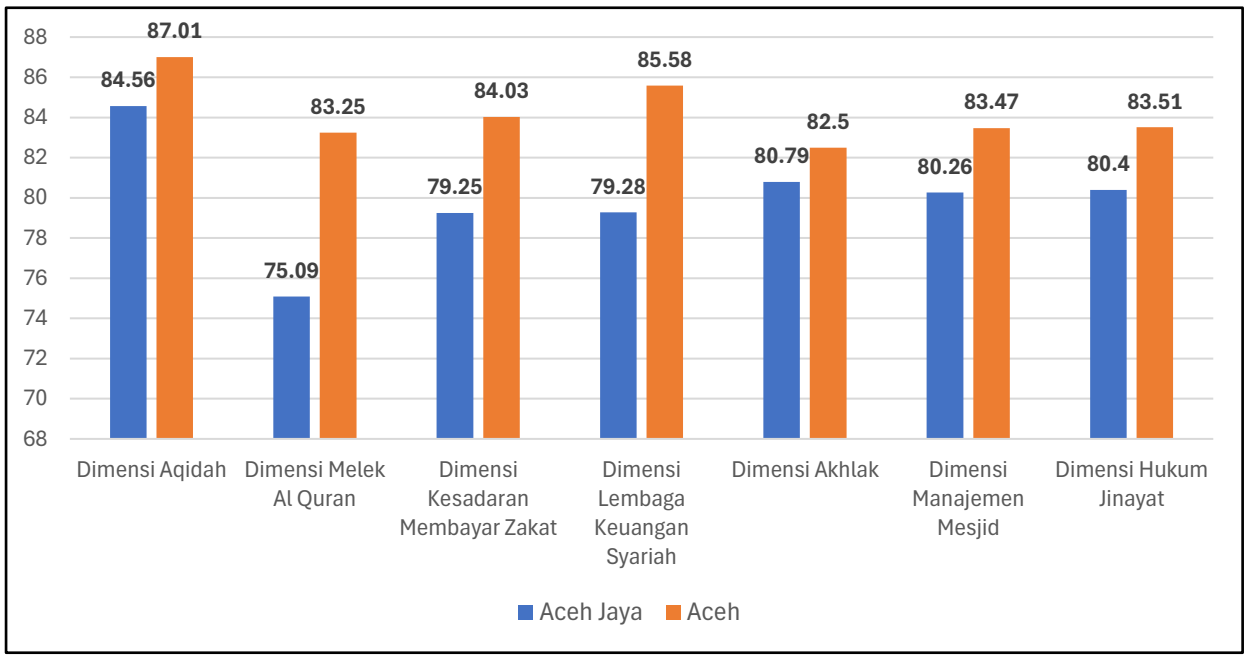

**) data awal*
Sumber: Dinas Syariat Islam Aceh, 2024

Gambar 2.35. Dimensi Indeks Pembangunan Syariah (IPS) Aceh Jaya Tahun 2024

Berdasarkan hasil survey IPS 2024, menunjukkan bahwa pelaksanaan syariat islam di Kabupaten Aceh Jaya belum sepenuhnya berjalan optimal serta memerlukan kerja keras semua komponen masyarakat sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini juga terlihat dari masih adanya kasus-kasus pelanggaran syariat yang terjadi di wilayah ini, terutama Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Beberapa kasus pelanggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.38. Dimana pada tahun 2018, terjadi kasus pelanggaran khalwat 4 kasus. Pelanggaran kasus-kasus syariat meningkat menjadi 9 kasus pada tahun 2020, yang didominasi kasus

khalwat. Sampai dengan tahun 2023, pelanggaran kasus syariat masih terjadi dan didominasi kasus khalwat. Kurangnya tenaga penegak pelaksana syariat serta masih rendahnya pengamalan masyarakat dalam menjalankan syariat islam, termasuk permasalahan yang menghambat pelaksanaan syariat islam di Kabupaten Aceh Jaya.

Tabel 2.38. Perkembangan Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Jaya

Jenis Pelanggaran	Tahun					
	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
Khamar	0	1	0	0	0	0
Maisir	0	0	2	5	7	1
Zina	0	0	0	0	0	0
Ikhtilat	0	0	0	0	0	0
Khalwat	4	4	6	1	0	2
Pencabulan Anak	0	0	1	0	0	1

**) data awal*
Sumber: Satpol PP dan WH Kab. Aceh Jaya, 2024

Sementara itu, angka melek Al Quran di Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan kemajuan selama kurun waktu 2018-2023. Sampai tahun 2023, angka melek Al Quran di Kabupaten Aceh Jaya sudah mencapai angka 87,5 persen, meningkat 7 poin dibandingkan tahun 2018 yang masih berkisar 80 persen. Gambaran perkembangan angka melek Al Quran di Kabupaten Aceh Jaya selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.36.

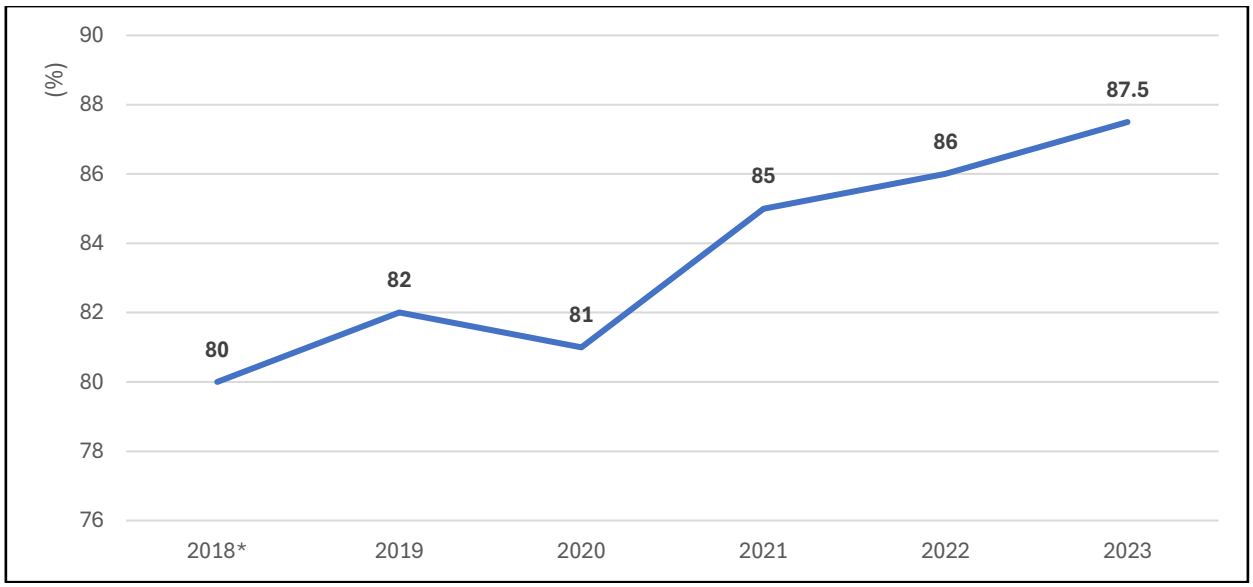

**) data awal*
Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.36. Perkembangan Angka Melek Al-Quran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023

Indikator pembangunan syariat lainnya, seperti ketersediaan jumlah masjid yang sesuai standar, jumlah hafizh/hafizah, jumlah Qari/Qariah, dan ketersediaan meunasah di Aceh Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39. Perkembangan Capaian Indikator Syariat Islam di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Hafidzh/hafidzah (orang)	Jumlah Qari/qariah (orang)	Penduduk usia 15-24 th yang melek Alquran (orang)	Jumlah Mesjid yang memenuhi standar Ri'ayah	Jumlah Mesjid yang memenuhi standar Idarah (unit)	Jumlah Mesjid yang memenuhi standar Imarah (unit)	Jumlah Masjid (unit)	Jumlah Meunasah (unit)
2018*	28	368	9.100	73	23	75	124	155
2019	41	370	9.275	77	25	76	124	157
2020	37	338	9.275	77	25	76	124	157
2021	38	341	9.300	78	26	78	124	158
2022	44	344	9.340	78	26	78	124	158
2023	72	144	9.385	90	35	85	1124	158

**) data awal*
Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Jaya, 2024

2.3.4.5. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

Dayah berperan penting dalam mendorong penguatan akidah, akhlak, dan keilmuan yang islami. Untuk meningkatkan dayah yang bermutu dan berkualitas, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus membina dan mendorong dayah sesuai standar dan terakreditasi. Dayah sebagai pelopor pendidikan Islami harus diperkuat dalam berbagai aspek, baik itu kurikulum, fasilitas sarana dan prasarana, maupun para tenaga pendidik. Kurun waktu tujuh tahun terakhir, para santri yang menimba ilmu di dayah semakin meningkat signifikan. Hingga tahun 2023, terdapat 7.657 santri yang menimba ilmu di Dayah. Sementara enam tahun yang lalu, tercatat santri di dayah masih sebanyak 2.558 santri. Pada tahun 2023, sebanyak 22 dayah sudah bertipe yang dapat dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan Badan Akkreditasi Dayah Aceh. Sedangkan 24 dayah lagi masih masuk dalam kategori non tipe. Jumlah dayah yang bertipe, jumlah santri dan tenaga pendidik dayah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40. Jumlah Pondok Pesantren, Santri, dan Tenaga Pendidik Di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Dayah berdasarkan Tipe				Jumlah Santri	Jumlah Tenaga Pendidik
	A	B	C	Non Tipe		
2018*	8	9	19	-	2.588	313

Tahun	Jumlah Dayah berdasarkan Tipe				Jumlah Santri	Jumlah Tenaga Pendidik
	A	B	C	Non Tipe		
2019	8	5	17	-	6.223	343
2020	8	5	17	-	7.028	343
2021	8	6	23	4	6.757	654
2022	8	6	23	3	6.932	688
2023	4	8	11	24	7.657	831

**) data awal*
Sumber: Dinas Pendidikan Dayah, 2024

2.3.4.6. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Pajak daerah termasuk salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi penerimaan Kabupaten Aceh Jaya. Pajak daerah yang terus meningkat dapat mencerminkan kondisi perekonomian yang terus berkembang sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk berkontribusi terhadap pajak daerah. Selama hampi dua dekade, perkembangan kontribusi pajak daerah cenderung fluktuatif. Kontribusi paling tinggi terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2017. Adapun kontribusi pajak daerah yang paling rendah terjadi pada tahun 2006. Dibandingkan dengan PRDB ADHB, rasio pajak daerah tercatat masih sangat minim selama hampir dua dekade pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya. Kurun waktu 2006-2023, rasio pajak daerah terhadap PDRB rata-rata masih dibawah kisaran 1 persen. PDRB yang terus meningkat signifikan belum mampu diimbangi dengan kontribusi pajak daerah sebagai komponen penerimaan daerah. Seiring dengan terus berkurangnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan berakhir pada tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah. Upaya intensif pemungutan pajak daerah sangat diperlukan, termasuk melakukan berbagai inovasi kebijakan yang memudahkan dan efisien dalam proses pemungutan pajak sehingga mampu meningkatkan rasio pajak daerah terhadap PDRB.

Tabel 2.41. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2023

Tahun	Pajak Daerah (Rp. Juta)	PDRB ADHB (Rp. Juta)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
2005*	N/A	358.311,52	N/A
2006	586,55	431.575,71	0,14
2007	2.478,57	557.799,41	0,44
2008	2,637,78	716.996,06	0,37
2009	2.464,71	838.556,12	0,29
2010	2.662,22	1.422.989,69	0,19
2011	2.138,68	1.526.339,42	0,14

Tahun	Pajak Daerah (Rp. Juta)	PDRB ADHB (Rp. Juta)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
2012	2.651,00	1.608.014,77	0,16
2013	3.284,70	1.708.522,53	0,19
2014	8.439,32	1.838.874,31	0,46
2015	3.592.73	1.980.786,49	0,18
2016	4.285,42	2.116.116,47	0,20
2017	7.046,24	2.275.043,95	0,31
2018	6.988,70	2.429.231,64	0,29
2019	5.391,40	2.575.142,32	0,21
2020	6.935,39	2.625.734,25	0,26
2021	6.065,52	2.851.397,37	0,21
2022	6.817,57	3.116.831,18	0,22
2023	6.716,72	3.373.787,30	0,19

**) data awal*
Sumber: BPS, DJPK Kementerian Keuangan, 2024

2.3.4.7. Rasio Pembiayaan Perbankan Terhadap PDRB

Pembiayaan perbankan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya menunjukan pergerakan peningkatan selama kurun waktu 2018-2023, meskipun terlihat sedikit penurunan terjadi pada tahun 2020. Pada tahun 2018, tercatat pembiayaan perbankan sebesar Rp.478.873,0 juta. Angka tersebut meningkat menjadi Rp. 677. 222,0 juta tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi Rp.654.481 juta tahun 2020. Sampai tahun 2023, tercatat pembiayaan perbankan mencapai Rp.788.211 juta, jauh lebih tinggi dari tahun 2018. Dilihat rasio pembiayaan terhadap PDRB, adanya kecenderungan yang terus menurun kurun waktu 2020-2022. Perkembangan pembiayaan perbankan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42. Perkembangan Pembiayaan Perbankan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023

Tahun	Pembiayaan Bank Umum dan BPR (Rp. Juta)	PDRB ADHB (Rp. Juta)	Rasio Pembiayaan Bank Umum dan BPR terhadap PDRB (%)
2018*	478.873,0	2.429.231,64	19,71
2019	677.222,0	2.575.142,32	26,30
2020	654.481,0	2.625.734,25	24,92
2021	663.821,0	2.851.397,37	23,28
2022	699.186,0	3.116.831,18	22,43
2023	788.211,0	3.373.787,30	23,36

**) data awal*
Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Aceh, 2024

2.3.4.8. Rasio Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB

Peran intermediasi perbankan sangat penting dalam mendorong perekonomian wilayah. Dana pihak ketiga yang terhimpun di bank, berupa giro, simpanan berjangka dan

tabungan yang berasal dari masyarakat dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Aceh Jaya melakukan berbagai kegiatan bisnis dan transaksi ekonomi. Selama empat tahun terakhir, adanya pergerakan yang meningkat dana pihak ketiga yang terhimpun di Bank. Namun demikian, dilihat dari sisi rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB, kisarannya masih di bawah dari 6 persen kurun waktu 2019-2023. Artinya, pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan belum mampu mengimbangi kenaikan signifikan dari pertumbuhan PDRB. Perkembangan dana pihak ketiga di Kabupaten Aceh Jaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43. Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019-2023

Tahun	Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum dan BPR (Rp.Juta)	PDRB ADHB (Rp. Juta)	Rasio Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB (%)
2019*	143.317,0	2.575.142,32	5,57
2020	56.656,0	2.625.734,25	2,16
2021	154.622,0	2.851.397,37	5,43
2022	166.615,0	3.116.831,18	5,35
2023	187.358,0	3.373.787,30	5,55

**) data awal*
Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Aceh, 2024
Ket. Dana Pihak ketiga (DPK) terdiri dari giro, simpanan berjangka, dan tabungan

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

2.4.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga dengan adanya pendidikan diharapkan kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Fungsi dari pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap orang seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 31, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berupaya meningkatkan kualitas SDM guna mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan akses pendidikan yang merata di setiap kecamatan. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah membangun prasarana pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Perkembangan prasarana pendidikan selama 14 (empat belas) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sampai tahun 2023, tercatat

prasarana pendidikan SD sebanyak 118 unit dari sebelumnya 111unit tahun 2010. Prasarana SMP berjumlah 44 unit tahun 2023, dari sebelumnya berjumlah 32 unit tahun 2010. Periode 2010-2023, pembangunan SD hanya bertambah 7 unit, dan SMP 12 unit.

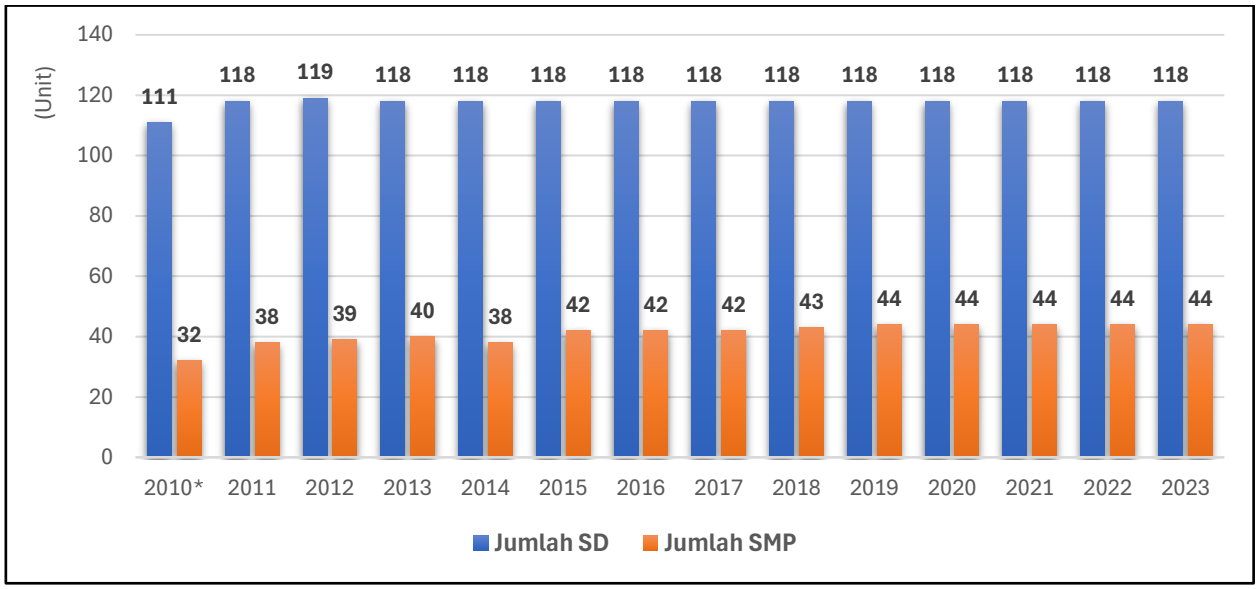

**) data awal*
Sumber: Disdikbud Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.37. Perkembangan Jumlah SD dan SMP di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010-2023

Sementara itu, rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah pada tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah pada semua jenjang pendidikan selama 14 (empat belas) tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Kurun waktu 2010-2023, rasio tertinggi pada jenjang pendidikan SD dicapai pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,012. Sedangkan rasio tertinggi pada jenjang Pendidikan SPM dicapai pada tahun 2012 juga yaitu sebesar 0,010.

Sedangkan untuk perkembangan peserta didik/murid pada tingkat SD menunjukkan fluktuatif selama periode 2010-2023. Selama periode tersebut, jumlah murid terbanyak dicapai pada tahun 2018 sebanyak 12.279 orang. Sampai tahun 2023, jumlah murid yang bersekolah SD sebanyak 11.440 orang.

Guru berperan penting dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan peserta didik. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya masih dihadapkan permasalahan dan tantangan dalam penyediaan guru berkualitas yang sesuai dengan kompetensi dan jenjang pendidikan tinggi. Selama hampir dua dekade, perkembangan jumlah guru yang mengabdi di Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan peningkatan. Pada tingkat pendidikan SD, guru yang mengabdi sebanyak 1.094 orang pada tahun 2023. Jumlah guru tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010 yang masih sebanyak 741 orang.

Untuk melihat ketersediaan tenaga pengajar (guru) terhadap peserta didik (murid) agar tercapainya mutu pengajaran digunakan rasio guru-murid. Perkembangan rasio guru-murid pada tingkat pendidikan SD relatif stabil di hampir dua dekade. Rata-rata perbandingan guru dan murid dalam proses pembelajaran berkisar 1:8 (terendah) hingga 1:14 (tertinggi). Dengan kata lain, dibandingkan dengan jumlah murid, ketersediaan guru pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten Aceh Jaya cukup memadai.

Tabel 2.44. Perkembangan Murid, Guru, dan Rasio Guru-Murid SD Di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010-2023

Tahun	Jumlah Guru (orang)	Jumlah Murid (orang)	Rasio Guru - Murid
2010*	741	9.602	1: 13
2011	741	9.742	1: 14
2012	814	9.360	1: 12
2013	801	9.393	1: 12
2014	1.116	10.086	1: 9
2015	1.088	10.623	1: 10
2016	1.195	10.698	1: 9
2017	1.287	11.564	1: 9
2018	1.269	11.880	1: 10
2019	1.162	11.913	1: 11
2020	1.214	11.719	1: 10
2021	1.511	11.955	1: 8
2022	1.411	11.610	1: 9
2023	1.094	11.440	1:11

**) data awal*
Sumber: Disdikbud Kab. Aceh Jaya, 2024

Untuk tingkat SMP, peserta didik yang menempuh pendidikan 4.974 orang pada tahun 2023. Jumlah peserta didik tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 2010, peserta didik yang bersekolah SMP masih berjumlah 3.788 orang. Sementara itu, pada tingkat pendidikan SMP, terjadi peningkatan guru yang sangat drastis dihampir dua dekade. Guru SMP telah bertambah hampir satu kali lipat, dari sebanyak 306 orang tahun 2010, bertambah menjadi 727 orang tahun 2023. Perkembangan Murid, Guru, dan Rasio Guru-Murid SMP di Kabupaten Aceh Jaya, Tahun 2010-2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45. Perkembangan Murid, Guru, dan Rasio Guru-Murid SMP Di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010-2023

Tahun	Jumlah Guru (orang)	Jumlah Murid (orang)	Rasio Guru -Murid
2010*	306	3.788	1: 12
2011	355	3.977	1: 11

Tahun	Jumlah Guru (orang)	Jumlah Murid (orang)	Rasio Guru -Murid
2012	431	3.890	1: 9
2013	425	3.954	1: 9
2014	554	4.018	1: 7
2015	507	3.971	1: 8
2016	542	3.969	1: 7
2017	599	3.959	1: 7
2018	581	3.832	1: 7
2019	581	4177	1: 7
2020	463	4.888	1: 11
2021	730	5.114	1: 7
2022	682	5.419	1: 8
2023	727	4.974	1: 7

**) data awal*
Sumber: Disdikbud Kab. Aceh Jaya, 2024

2.4.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan berkelanjutan membutuhkan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jenis, jumlah maupun kualitas. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Untuk tenaga kesehatan di puskesmas, minimal dikatakan cukup atau memenuhi jika setidaknya ada 1 (satu) orang dari masing-masing tenaga kesehatan, seperti (1) dokter atau dokter layanan pimer; (2) dokter gigi; (3) perawat; (4) bidan; (5) tenaga kesehatan masyarakat; (6) tenaga sanitasi lingkungan; (7) ahli teknologi laboratorium medik; (8) tenaga gizi; dan (9) tenaga kefarmasian.

Gambar 2.38 menampilkan selama delapan tahun terakhir (2016-2023), tenaga medis dan non medis bervariasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Tenaga perawat dan bidan mendominasi dalam SDM kesehatan di Kabupaten Aceh Jaya. Pada tahun 2016, tersedia paling kurang 246 orang perawat dan 197 orang bidan. Jumlah perawat dan bidan ini terlihat meningkat drastis pada tahun 2023 yang masing-masing sebanyak 318 orang perawat dan 387 orang bidan. Sementara itu, tenaga dokter cukup memadai di Kabupaten Aceh Jaya. Tahun 2023, tercatat dokter umum sebanyak 64 orang, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebanyak 34 orang. Demikian juga halnya dengan dokter spesialis dan dokter gigi, yang masing-masing sebanyak 10 orang dan 8 orang pada tahun 2016, meningkat masing-masing menjadi 19 orang dan 28 orang pada tahun 2023.

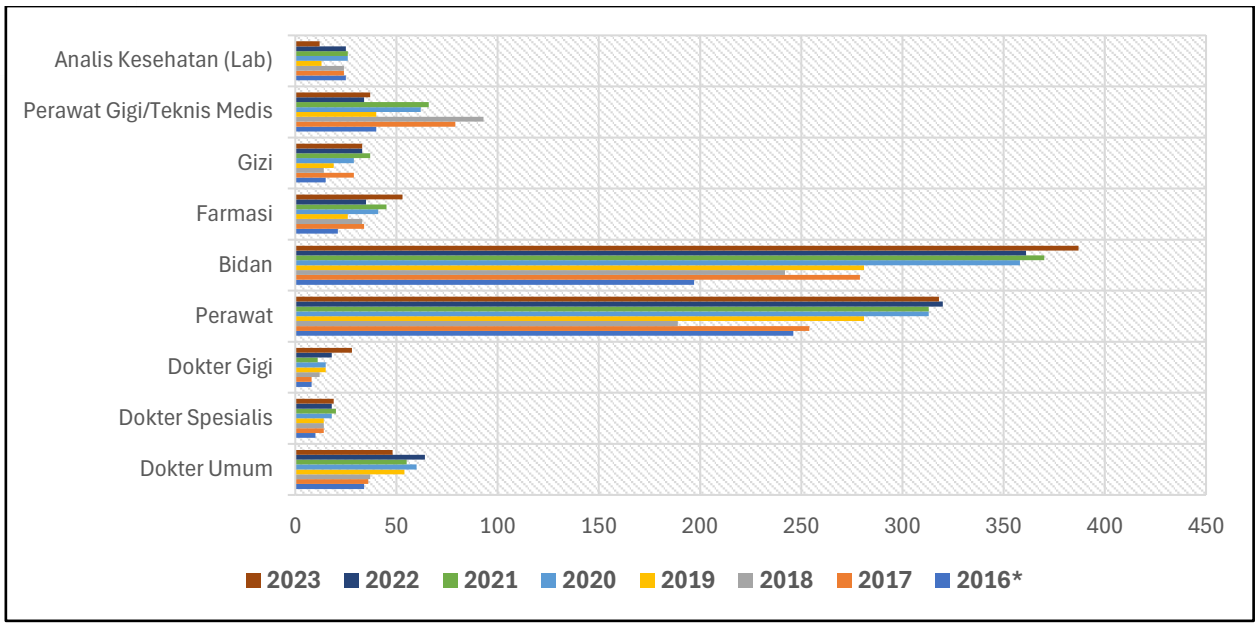

*) data awal
Sumber: Dinkes Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.38. Perkembangan Tenaga Kesehatan dan Medis di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016-2023 (orang)

Ketersediaan tenaga kesehatan dan medis dalam menjangkau dan melayani 100.000 penduduk Kabupaten Aceh Jaya masih bervariasi. Dalam melayani 100.000 penduduk, rasio tertinggi dicapai tenaga dokter umum, dimana hampir rata-rata terdapat 54 orang dokter. Untuk tenaga dokter spesialis juga sedikit lebih banyak dibandingkan dengan dokter gigi dalam melayani 100.000 penduduk Kabupaten Aceh Jaya. Perkembangan rasio tenaga medis per 100.000 penduduk Kabupaten di Aceh Jaya Tahun 2016-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.39.

Pada satu sisi memang kebutuhan penambahan tenaga kesehatan sebagai konsekuensi kebijakan aspek keadilan, pemenuhan dan pemerataan diperlukan, tetapi disisi lain dukungan anggaran dari daerah ternyata belum mencukupi. Oleh karena itu, program pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang ada dengan penambahan insentif yang cukup tentunya lebih efisien bila dibandingkan rekruitmen atau pengadaan tenaga baru, walaupun secara bertahap tetap harus dilakukan penambahan setiap tahunnya. Dengan demikian, perencanaan secara komprehensif dan bertahap perlu dilakukan baik melalui program pelatihan, rekruitmen dan penempatan maupun sistem insentif dengan tetap memperhatikan aspek kebutuhan prioritas.

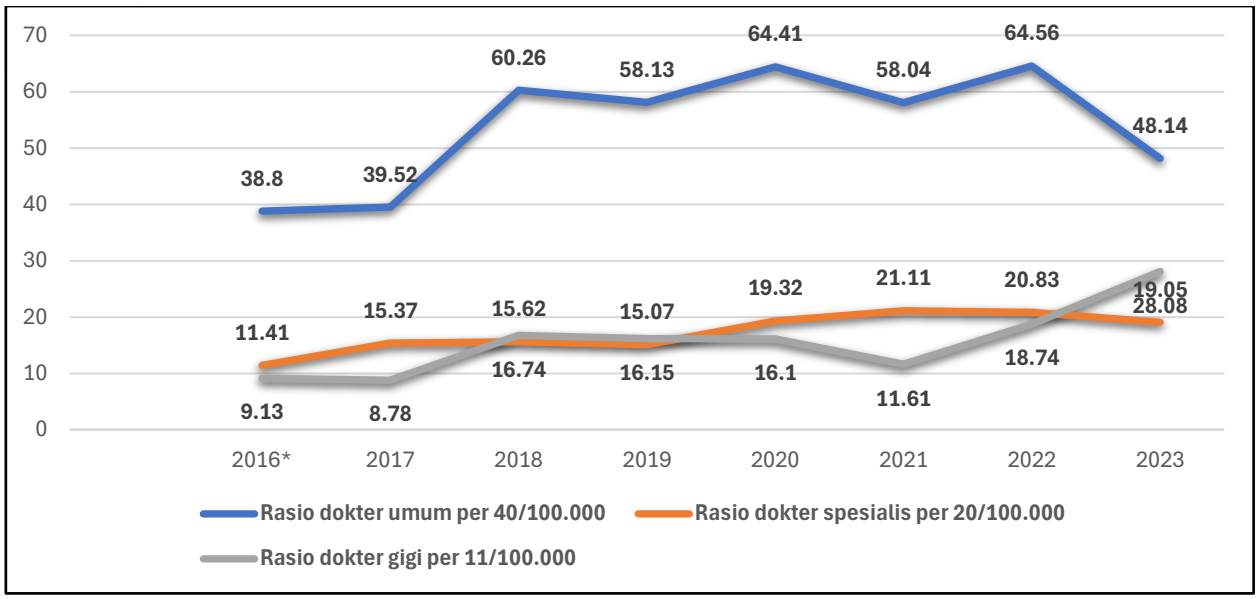

**) data awal*
Sumber: Dinkes Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.39. Perkembangan Rasio Tenaga Kesehatan dan Medis di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016-2023

2.4.1.3. Pekerjaan Umum

Ketersediaan fasilitas publik sebagian sudah dibahas dalam sub bab daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah. Selanjutnya pada sub bagian ini akan dibahaas terkait ketersediaan sanitasi dan akses air minum yang layak dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteran masyarakat. Perkembangan kondisi rumah tinggal berakses sanitasi yang layak dan air minum di Kabupaten Aceh Jaya cenderung fluktuatif kurun waktu 2018-2023. Tahun 2018 jumlah rumah tinggal yang memiliki akses sanitasi masih di bawah dari angka 70 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 85 persen pada tahun 2020. Sampai tahun 2023, kondisi rumah tinggal yang bersanitasi naik menjadi 87,82 persen.

Disisi lainnya, kondisi rumah tangga yang terakses dengan air bersih masih sedikit dibandingkan dengan ketersediaan sanitasi. Hingga akhir tahun 2023, rumah tinggal yang terakses air bersih berkisar di angka 43,86 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang masih berkisar 38,32 persen. Dalam jangka panjang dimasa mendatang, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya masih terus mengupayakan dan mendorong infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas permukiman penduduk yang diharapkan juga terwujudnya akses yang lebih baik terhadap rumah tinggal yang bersanitasi dan air bersih di setiap kecamatan.

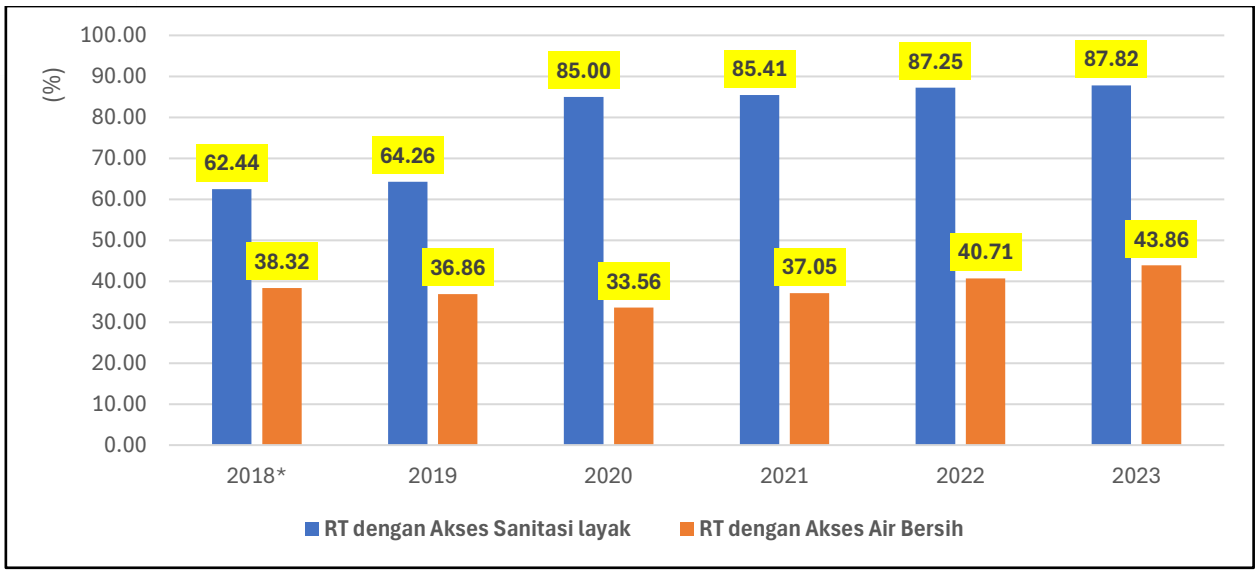

**) data awal*
Sumber: Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.40. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Air Bersih di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023

2.4.1.4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat 1 yaitu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas). Urusan pemerintahan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sub urusan meliputi sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum), sub urusan pemadam kebakaran (Damkar), dan sub urusan bencana.

Kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2023 terkait urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat baik. Hal ini terlihat dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2023 bidang trantibumlinmas masuk dalam kategori sangat tinggi dengan capaian 100%. Capaian SPM selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46. Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target SPM	Capaian SPM
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100%	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target SPM	Capaian SPM
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Jaya, 2024

2.4.1.5. Sosial

Urusan wajib bidang sosial merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kabupaten/kota terkait urusan pemerintahan bidang sosial yang juga menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana di kabupaten.

Permasalahan sosial yang terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Aceh Jaya terus diupayakan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sampai dengan tahun 2023 terus berupaya memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dan juga perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan dari berbagai sumber dana. Pada tahun 2023 jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dibantu sebanyak 20.708 orang. Selain itu, capaian SPM bidang sosial Kabupaten Aceh Jaya tahun 2023 juga mencapai 100%. Capian SPM bidang sosial Kabupaten Aceh Jaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47. Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target SPM	Capaian SPM
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target SPM	Capaian SPM
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Jaya, 2024

2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.2.1. Ketenagakerjaan

Salah satu komponen penting dalam ekonomi adalah tersedianya tenaga kerja yang memadai. Tabel 2.48 memperlihatkan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Aceh Jaya. Dari segi indikator angkatan kerja, terlihat adanya peningkatan angkatan kerja dari periode 2018 hingga 2020. Namun dari tahun 2021 hingga tahun 2023 jumlah angkatan kerja mulai mengalami penurunan. Puncak tertinggi angkatan kerja terjadi pada tahun 2020 dengan 52 ribu orang. Komposisi yang bekerja cukup tinggi di mana ada peningkatan yang signifikan. Terlihat dalam tabel tersebut tahun 2018 jumlah tenaga kerja sebanyak 43 ribu orang dan di tahun 2023 menjadi 48 ribu orang. Hal ini sejalan dengan indikator pengangguran terbuka yang mengalami penurunan dari 2.265 orang di tahun 2018 menjadi 1.424 orang di tahun 2023. Salah satu penyebab utama menurunnya angka pengangguran adalah jumlah angkatan kerja yang mengalami penurunan dan banyak yang beralih ke aktivitas lainnya.

Tabel 2.48. Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023

Kegiatan Utama	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	45.770	47.185	52.209	51.323	50.051	49.476

Kegiatan Utama	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bekerja	43.505	45.206	50.080	49.543	48.190	48.052
Pengangguran Terbuka	2.265	1.979	2.129	1.780	1.561	1.424
Bukan Angkatan Kerja	16.001	19.026	17.106	19.377	22.360	20.739
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,70	71,26	75,32	72,59	69,12	70,46
Tingkat Pengangguran Terbuka	4.95	4,19	4,08	3,47	3,12	2,88

**) data awal*
Sumber: BPS Aceh Jaya, 2024

2.4.2.2. Pangan

Isu pangan menjadi masalah penting. Ketersediaan pangan yang cukup menggambarkan kekuatan pangan. Semakin tinggi angka pangan maka semakin baik. Secara umum kondisi ketahanan pangan dilekatkan dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam 6 tahun terakhir skor pola pangan harapan telah mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2018, skor PPH Aceh Jaya sebesar 70,9 dan meningkat menjadi 84,5 pada tahun 2023. Hal yang serupa juga terjadi pada indeks ketahanan pangan Aceh Jaya. Pada Gambar 2.33 dapat dilihat nilai IKP Aceh Jaya pada tahun tahun 2018 sebesar 74,67 dan meningkat menjadi 80,22 pada tahun 2023.

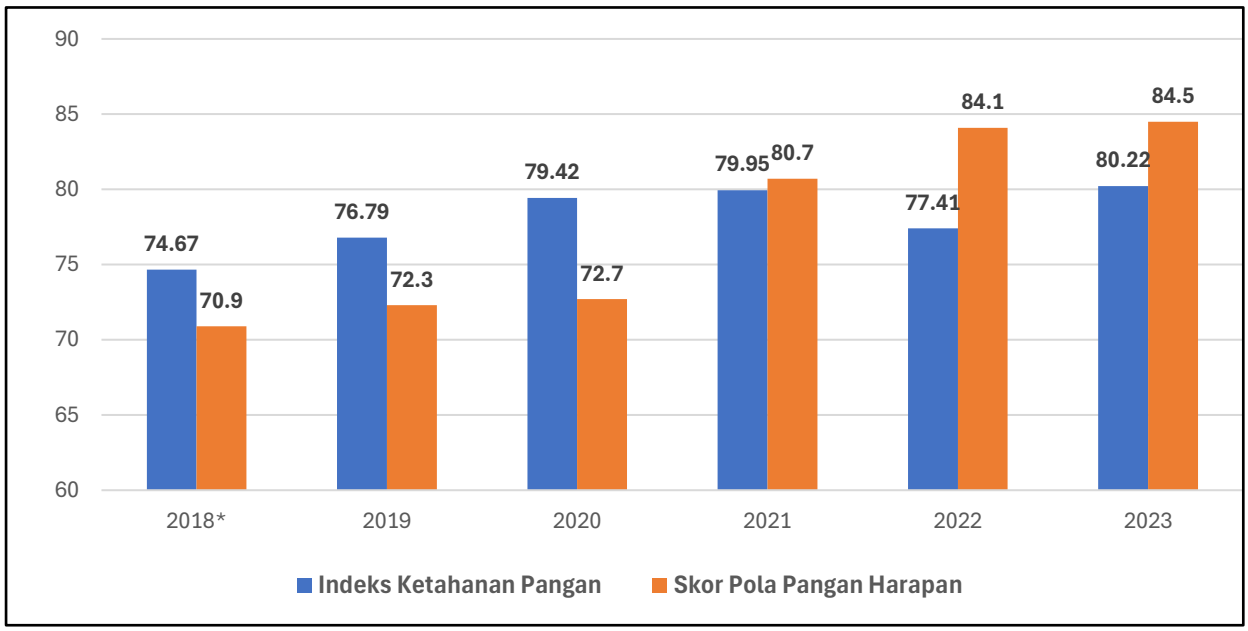

**) data awal*
Sumber: Bapanas, 2024

Gambar 2.41. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan dan Indek Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023

2.4.2.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencerminkan akan kontribusi perempuan dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi dengan indikator keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga professional dan sumbangan pendapatan. IDG Aceh Jaya telah mengalami peningkatan secara perlahan dari tahun 2010 hingga 2022. Namun demikian, posisi IDG Aceh Jaya masih di bawah Aceh dan Nasional. Pada tahun 2022, IDG Aceh Jaya sebesar 58,5 sedangkan Aceh pada angka 63,92 dan Nasional sebesar 76,59. Nilai IDG selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Aceh Jaya, Aceh, dan Nasional Tahun 2010-2023

Tahun	Aceh Jaya	Aceh	Nasional
2010*	48,65	53,4	68,15
2011	49,2	52,06	69,14
2012	49,59	54,44	70,07
2013	49,81	59,78	70,46
2014	57,53	65,12	70,68
2015	56,37	65,57	70,83
2016	-	67,4	71,39
2017	57,57	66,28	71,74
2018	51,79	66,6	72,1
2019	58,29	63,31	75,24
2020	58,27	63,47	75,57
2021	58,42	63,24	76,26
2022	58,5	63,92	76.59
2023	58,35	63,56	76,90

**) data awal*

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

2.4.2.4. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan suatu penilaian yang digunakan untuk menilai kualitas lingkungan hidup di suatu kawasan. Sampai saat ini perhitungan mengenai indeks kualitas lingkungan hidup telah mengalami revisi sebanyak dua kali. Tabel 2.50 memperlihatkan Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Aceh Jaya sempat mengalami peningkatan sampai tahun 2019. Sejak tahun 2020 hingga 2023 tercatat IKA mengalami penurunan menjadi 66,67. Selanjutnya dari Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan peningkatan tren positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, IKU berada di angka 82,92 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 95,54. Ini mencerminkan kualitas udara di Kabupaten Aceh Jaya sudah semakin membaik. Hal yang sama juga pada Indeks Kualitas Lahan (IKL) di mana mengalami peningkatan secara perlahan dari 74,23 pada tahun 2016 menjadi 84,01 di tahun 2023. Secara keseluruhan bahwa Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Aceh Jaya mengalami fluktuasi. Tahun 2019 merupakan angka tertinggi yang dicapai untuk IKLH dengan nilai 85,78.

Tabel 2.50. Perkembangan IKA, IKU, IKL, dan IKLH Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016-2023

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH
2016*	56,00	82,92	74,23	70,89
2017	70,00	85,33	76,60	77,65
2018	64,67	93,16	73,16	78,07
2019	81,42	93,60	78,80	85,78
2020	78,75	94,50	76,82	84,71
2021	60,00	94,63	83,20	79,11
2022	63,33	95,13	83,21	80,56
2023	66,67	95,54	84,01	82,16

**) data awal*
Sumber: DLH Kab. Aceh Jaya, 2024

2.4.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebuah pembangunan tidak terlepas dari administrasi kependudukan. Kependudukan sekarang ini harus tercatat dalam sebuah sistem yang berbasis pada sistem informasi agar pencatatan sipil menjadi lebih akurat, terpercaya, dan terupdate. Gambar 2.42 memperlihatkan perkembangan data akta kelahiran dan akta kematian di Kabupaten Aceh Jaya. Pada tahun 2023, pencatatan akta kelahiran telah mencapai di atas 60 ribu akta. Sedangkan akta kematian sudah mencapai 3.133 akta yang dicetak.

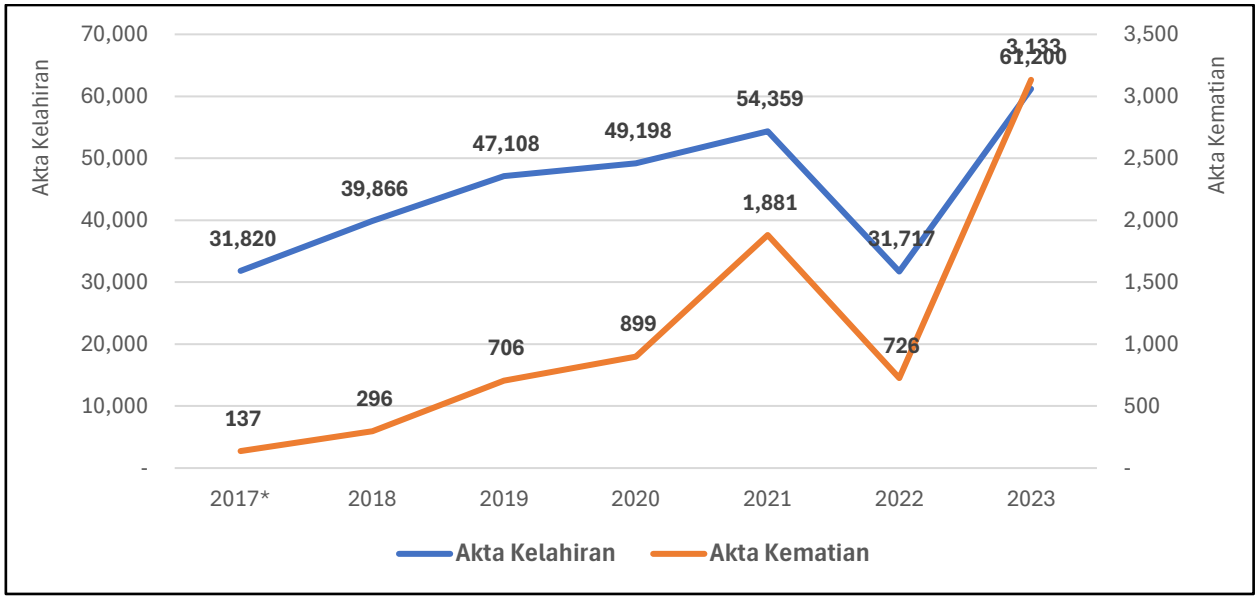

**) data awal*
Sumber: Disdukcapil Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.42. Perkembangan Data Akta Kelahiran dan Akta Kematian Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2023

Sementara itu, status sahnya penduduk diregistrasi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Saat ini, KTP telah menjadi Elektronik KTP agar pencatatan penduduk menjadi lebih update yang berbasis digital. Gambar 2.43 memperlihatkan adanya peningkatan jumlah

penggunaan E-KTP dari periode 2017 hingga 2023. Tercatat di tahun 2023 jumlah E-KTP telah diterbitkan mencapai 65 ribu unit.

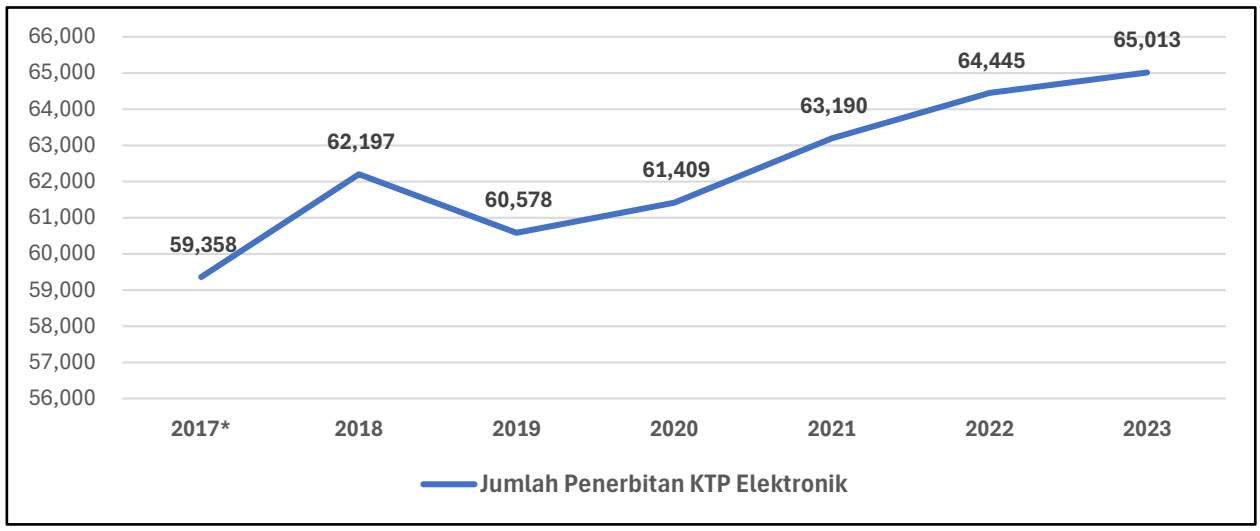

**) data awal*
Sumber: Disdukcapil Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.43. Perkembangan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2023

2.4.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Memberdayakan Masyakat dan Gampong merupakan salah satu kualitas penting agar menjadi diharapkan menuju maju dan mandiri. Gambar 2.44 memperlihatkan kondisi enam tahun terakhir tentang kemajuan desa. Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Aceh Jaya terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu sebesar 0,6024 menjadi 0,6768 pada tahun 2023. Pada tahun 2023, nilai IDM Kabupaten Aceh Jaya mengalami sedikit penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 0,6781. Namun demikian, desa di Kabupaten Aceh Jaya secara keseluruhan masuk dalam kategori desa berkembang.

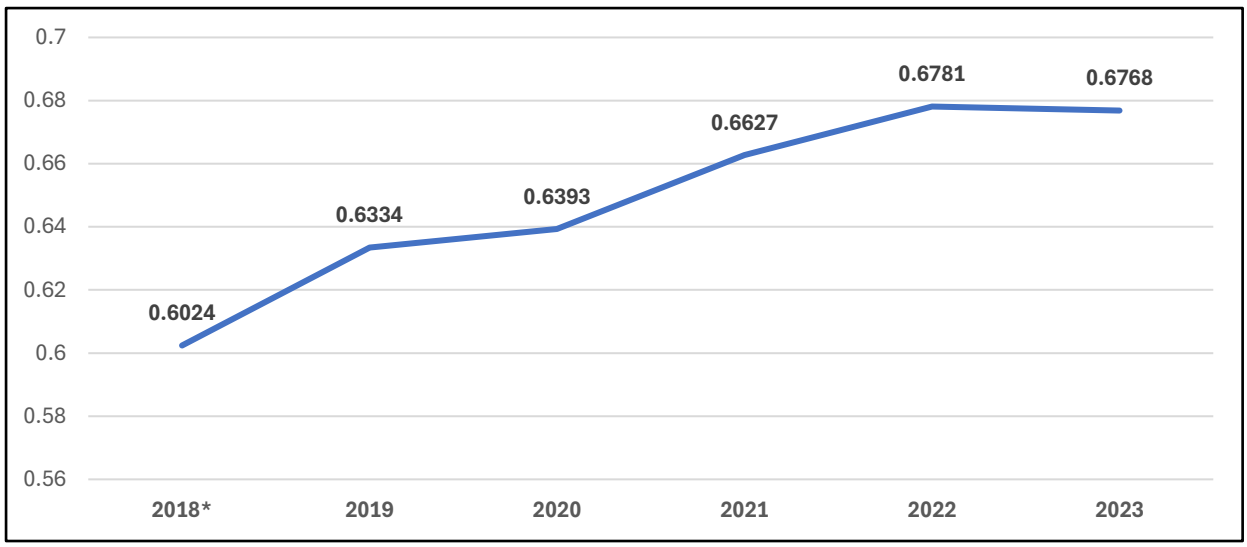

**)data awal*
Sumber: Kementrian Desa,PDT dan Transmigrasi, 2024

Gambar 2.44. Indeks Desa Membangun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023

2.4.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Upaya menjadikan keluarga yang berkualitas merupakan hal penting. Salah satu bentuk keluarga yang berkualitas yakni terciptanya rasa aman, tentram, dan masa depan yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan langkah melakukan Keluarga Berencana (KB). Gambar 2.45 merupakan perkembangan realisasi kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Aceh Jaya. Perkembangan peserta KB dari tahun 2015 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan secara perlahan. Akan tetapi di tahun 2023 cakupan peserta KB telah menurun menjadi 64,20 persen. Selanjutnya dari indikator cakupan PKB/PLKB yang aktif terlihat sangat berfluktuasi terutama di tahun 2018 hingga tahun 2023. Hal sama juga terlihat dari cakupan remaja pusat di mana tahun 2015 hingga 2017 terealisasi penuh mencapai 100 persen namun sejak tahun 2018, data cakupan remaja pusat mengalami fluktuasi dan di tahun 2023 cakupannya sebesar 57 persen.

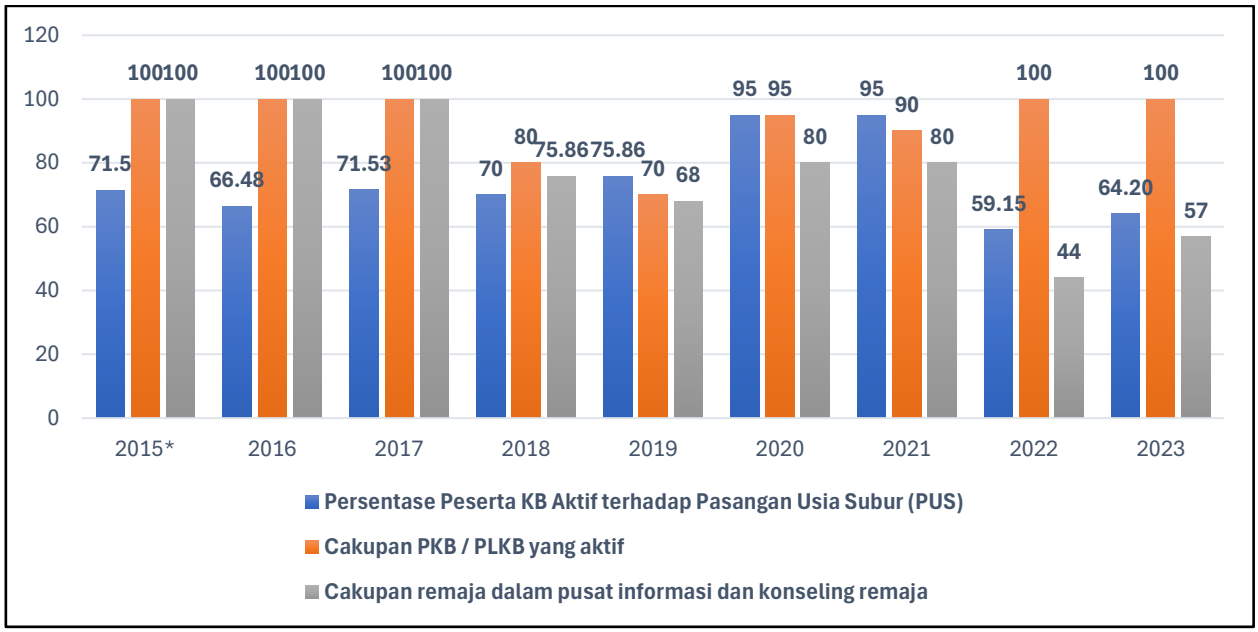

**) data awal*
Sumber: DPMPKB Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.45. Realisasi Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015-2023

2.4.2.8. Perhubungan

Aceh Jaya mempunyai dua infrastruktur perhubungan yang diakses oleh masyarakat yakni terminal bus dan pelabuhan. Kedua infrastruktur ini mempunyai peran penting terhadap akses mobilitas orang dan barang. Tabel 2.51 merupakan perkembangan data mobilitas masyarakat yang melalui terminal bus dan pelabuhan. Terlihat jumlah masyarakat yang melalui pelabuhan sangat berfluktuasi dari tahun 2018 hingga 2023 Puncaknya di tahun 2023 dengan 32 ribu orang dan tahun 2022 sebanyak 31ribu orang. Sementara dari terminal bus juga mengalami peningkatan yang signifikan khususnya pada tahun 2023 sebesar 11.771 orang.

Tabel 2.51. Jumlah Mobilitas Orang yang melalui Terminal dan Pelabuhan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023

Jumlah Orang melalui	Tahun					
	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
Terminal	236	302	259	508	11.597	11.771
Pelabuhan	5.959	6.066	6.260	26.804	31.648	32.281

**) data awal*
Sumber: Dishub Kab. Aceh Jaya, 2024

Untuk Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Aceh Jaya relatif stabil sepanjang tahun 2007-2023. Ini berarti bahwa meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas di jalan kabupaten, masih mampu di tampung. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007-2023 di sajikan pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52. Perkembangan Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007-2023

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan (unit)	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
2007*	307,20	8.806	0,00
2008	307,20	11.155	0,03
2009	321,86	13.795	0,02
2010	540,78	16.016	0,03
2011	545,89	19.339	0,03
2012	545,89	21.081	0,03
2013	591,69	22.390	0,03
2014	591,78	24.093	0,02
2015	585,14	25.827	0,02
2016	551,24	27.810	0,02
2017	551,24	29.583	0,02
2018	551,24	31.633	0,02
2019	551,24	33.645	0,02
2020	551,24	35.726	0,02
2021	551,24	37.886	0,01
2022	551,24	40.055	0,01
2023	551,24	40.427	0,01

**) data awal*
Sumber: Dishub Kab. Aceh Jaya, 2024

2.4.2.9. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau lebih dikenal sebagai e-government merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada instansi

pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, serta pihak-pihak lain. Dengan tersedianya SPBE diharapkan jalannya pemerintahan dapat dipantau secara transparan. Tabel 2.53 merupakan realisasi pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Aceh Jaya. Pada tahun 2023 nilai indeks SPBE Kabupaten Aceh Jaya sebesar 2,42 meningkat dari tahun 2021 sebesar 2,01. Angka ini masuk dalam kategori cukup. Sedangkan ketersediaan data statistik dan sektoral tersedia setiap tahunnya namun data perkembangan informasi gampong dan lembaga komunikasi lainnya masih belum tersedia. Berdasarakan data tersebut maka pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika masih perlu dikembangkan.

Tabel 2.53. Realisasi Pelayanan Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023

Tahun	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	Ketersediaan data statistik sektoral	Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong dan lembaga komunikasi lainnya (persen)
2018*	0	ada	0
2019	0	ada	0
2020	0	ada	0
2021	N/A	N/A	N/A
2022	2.01	ada	0
2023	2,42	ada	0

**) data awal*
Sumber: Diskominsa Kab. Aceh Jaya, 2024

2.4.2.10. Statistik

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Aceh Jaya, Badan Pusat Statistik Aceh Jaya menyediakan data-data penting baik secara makro, mikro, maupun sektoral. Salah satu publikasi statisik yang didapat diakses publik seperti Aceh Jaya Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran dan Lapangan Usaha, Hasil Survei maupun Sensus. Selain itu data statistik juga tersedia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan menyokong perencanaan pembangunan daerah Aceh Jaya.

2.4.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM)

Koperasi merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Koperasi turut berperan dalam menekan angka kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Tabel 2.54 menunjukkan perkembangan koperasi di Kabupaten Aceh Jaya telah mengalami peningkatan yang nyata dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, jumlah koperasi yang ada sebanyak 133 unit. Pada tahun 2023, jumlah koperasi yang tersedia sebanyak 64 unit. Tahun 2017 dan 2021 menunjukkan adanya penurunan jumlah koperasi menjadi 50 unit dan 64 unit. Pendistribusian layanan koperasi di kecamatan paling banyak ditemui pada Kecamatan Jaya, Kreung Sabee, Panga, dan Setia Bakti.

Tabel 2.54. Jumlah Koperasi di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015-2023

Kecamatan		Jaya	Indra Jaya	Kreung Sabee	Teunom	Panga	Samponiet	Darul Hikmah	Setia Bakti	Pasie Raya	Aceh Jaya
Tahun	**2015***	20	10	37	12	13	12	8	14	7	**133**
	2016	19	8	36	10	21	14	8	12	6	**134**
	2017	2	3	17	6	12	4	2	3	1	**50**
	2018	19	11	37	13	13	14	9	14	7	**137**
	2019	19	11	37	13	13	14	9	14	7	**137**
	2020	21	9	37	14	13	13	11	15	7	**140**
	2021	2	3	21	6	13	8	5	3	3	**64**
	2022	21	8	45	15	15	16	12	14	9	**155**
	2023	9	2	21	6	4	7	5	7	3	**64**

**) data awal*
Sumber: Diskoperindag Kab. Aceh Jaya, 2024

2.4.2.12. Penanaman Modal

Investasi memainkan peran penting dalam memajukan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizianan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), selaku dinas yang mengelola investasi, menyebutkan jumlah investor telah terjadi peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 7 investor dan di tahun 2023 menjadi 206 investor. Sejalan dengan itu, nilai investasi juga meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat di tahun 2016 nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Aceh Jaya sebesar 1,3 milyar rupiah dan pada tahun 2023 tercatat nilai investasi sebesar 75 milyar rupiah.

Tabel 2.55. Perkembangan Realisasi Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016-2023

Tahun	Jumlah Investor PMA-PMDN	Nilai Investasi (Milyar)
2016*	7	1,3
2017	11	1,4
2018	11	1,4
2019	16	454,3
2020	34	59,9
2021	141	271,6

Tahun	Jumlah Investor PMA-PMDN	Nilai Investasi (Milyar)
2022	30	4,7
2023	206	75

**) data awal*
Sumber: DPMPTSP Kab. Aceh Jaya,2024

2.4.2.13. Perpustakaan dan Kearsipan

Meningkatkan budaya literasi membaca merupakan hal penting. Salah satu upaya meningkatkan literasi ini dengan menyediakan infrastruktur perpustakaan dan bahan perpustakaan seperti buku. Tingginya tingkat kunjungan ke perpustakaan dapat diartikan sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam mendapatkan ilmu dan pengetahuan dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tabel 2.56 memperlihatkan jumlah kunjungan perpustakaan telah mengalami peningkatan yang signifikan khususnya dari tahun 2022 dan 2023. Tahun 2022 tercatat sebanyak 8.413 kunjungan dan merupakan angka yang paling tertinggi. Selanjutnya ketersediaan koleksi bahan dan buku juga menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.56. Pelayanan Umum Bidang Perpustakaan Kabupaten Aceh Jaya

Tahun	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Koleksi Bahan Perpustakaan	Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan
2017*	1134	12.360	3.262
2018	1298	13.440	3.415
2019	1298	14.472	3.931
2020	998	16.488	4.901
2021	1970	18.908	5.745
2022 2023	8413 5.795	20.910 21.603	6.712 7.063

**) data awal*
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Aceh Jaya, 2024

Di samping perpustakaan, tersedianya sumber daya manusia di bidang pengarsipan juga hal yang perlu diperhatikan. Gambar 2.38 memperlihatkan perkembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan arsip Kabupaten Aceh Jaya. Kurun waktu 2018 hingga 2022, SKPK yang sudah menerapkan pengelolaan arsip sebanyak 1 SKPK dan di tahun 2023 bertambah menjadi 2 SKPK. Peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2020 sebanyak 20 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 36 orang.

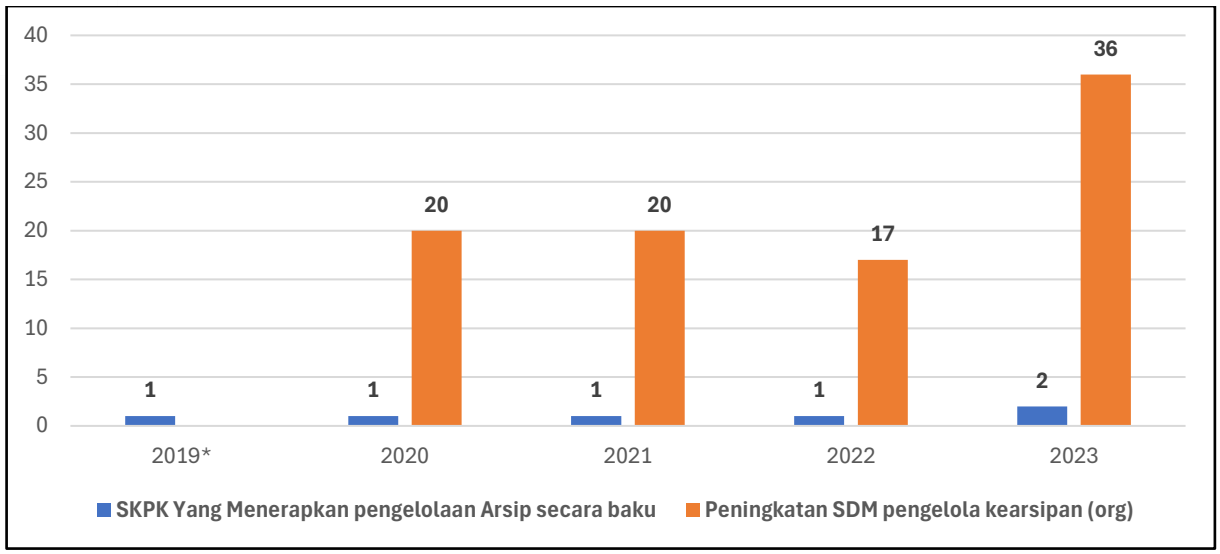

**) data awal*
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.46. Jumlah SKPK dan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023

2.4.2.14. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni dan budaya yang bercorak (ciri khas) lokal Kabupaten Aceh Jaya harus menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus mendorong percepatan pembangunan seni dan budaya melalui kegiatan pagelaran seni dan budaya, penguatan organisasi budaya, dan pembinaan sanggar (group) kesenian. Tahun 2023, terdapat 3 seni yang dilestarikan dan 30 sanggar (group) kesenian. Sementara itu, Aceh Jaya juga memiliki cagar budaya yang dikelola secara terpadu meliputi benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, serta benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah. Dalam jangka panjang ke depan, pembinaan dan pelestarian seni; penataan, pengelolaan, dan pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya secara terpadu masih perlu menjadi prioritas.

Tabel 2.57. Perkembangan Capaian Indikator Seni Budaya di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023

No.	Kategori	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah seni yang dilestarikan	2	2	2	3	3	3
2	Jumlah sanggar seni	37	37	37	37	39	30
3	Jumlah koleksi museum	-	-	-	-	-	
4	Cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	103	103	103	103	103
5	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	2	2	2	2	2
6	Jumlah Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	-	103	103	103	103	103

**) data awal*
Sumber: Disdikbud Kab. Aceh Jaya, 2024

Pemuda merupakan harapan bangsa. Oleh karena itu, perlunya pembinaan yang berkelanjutan diri semua pihak, agar arah dan visi kepemudaan menjadi lebih baik dalam menata kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi penting untuk menghindari aktivitas pemuda dari hal-hal negatif. Pemuda perlu didorong untuk terlibat dalam hal-hal positif seperti keterlibatan dalam partai politik, berwirausaha, dan menjadi pelopor dalam pembangunan. Tahun 2023, tercatat organisasi pemuda di Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 28 organisasi.

Di bidang olahraga, Kabupaten Aceh Jaya memiliki 127 sarana olahraga dan 193 klub olahraga. Dari sisi prestasi olahraga, terdapat 63 atlit yang berprestasi di tingkat provinsi pada tahun 2023. Jumlah atlit tersebut menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 74 atlit. Selain itu, terdapat juga pelatih yang bersertifikat dari 6 orang di tahun 2018 menjadi 28 orang tahun 2023. Pembinaan dan pembibitan atlit berprestasi di tingkat Aceh dan Nasional, peningkatan kualitas sarana olahraga, dan pemberdayaan pemuda menjadi agenda pokok dalam jangka panjang ke depan.

Tabel 2.58. Perkembangan Capaian Indikator Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023

No.	Kategori	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pelatih bersertifikat	6	6	26	26	26	28
2	Jumlah seluruh pelatih	-	-	46	46	46	48
3	Jumlah cabang olahraga yang dibina	7	6	5	8	8	16
4	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	-	30	30	38	38	46
5	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi tingkat Propinsi	13	3	3	3	3	3
6	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi tingkat Nasional	-	3	8	8	-	-
7	Jumlah Atlit yang Berprestasi tingkat Propinsi	50	-	3	3	74	63
8	Jumlah Atlit yang Berprestasi tingkat Nasional	-	-	-	3	-	2
9	Jumlah kasus pemuda terlibat narkoba dan zat aditif di Aceh Jaya	-	-	-	-	-	-
10	Jumlah Klub Olahraga	193	193	193	193	193	193
11	Jumlah Sarana Olahraga	127	127	127	127	127	127
12	Jumlah Organisasi Kepemudaan	-	-	28	28	28	28

**) data awal*
Sumber: Disparekrafpora Kab. Aceh Jaya ,2024

2.4.3. Layanan Urusan Pilihan

2.4.3.1. Pertanian

Pertanian menjadi penopang perekonomian di Aceh Jaya dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Aceh Jaya. Dalam periode sebelumnya, belum terjadi transformasi struktural dalam perekonomian Kabupaten Aceh Jaya, dari pertanian ke sektor sekunder dan tersier. Sampai tahun 2023, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya mencapai 33,51 persen (Gambar 2.47). Bahkan, kontribusi pertanian cenderung meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2010) yang sebesar 29,74 persen. Peningkatan kontribusi tersebut menggambarkan secara umum perekonomian Aceh Jaya baik penyerapan tenaga kerja serta sumbangsih perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

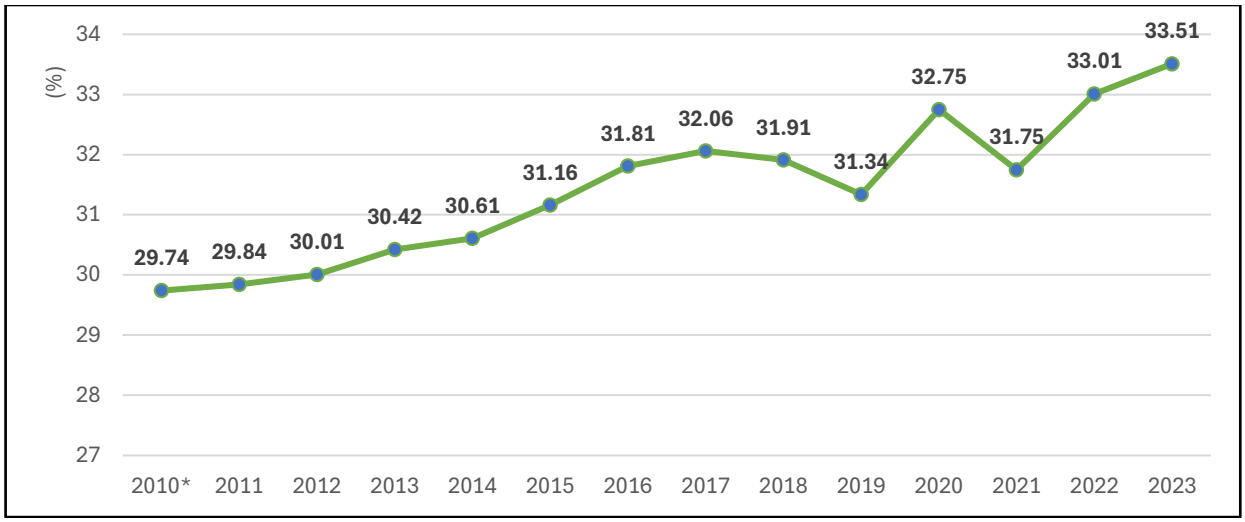

**) data awal*
Sumber: BPS Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.47. Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010-2023

2.4.3.2 Kelautan dan Perikanan

Sub sektor perikanan termasuk penyumbang menuju ketahanan pangan dan sumber protein hewani. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan laut, yang diapit dan dikelilingi Samudera Hindia, Kabupaten Aceh Jaya memiliki potensi sumber daya perikanan yang berlimpah yang dapat didayagunakan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023), kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Aceh Jaya relatif stabil dan masih berkisar di bawah dari 3 (tiga) persen. Adapun perkembangan kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Aceh Jaya selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.48.

Relatif stabilnya peran sub sektor perikanan dalam perekonomian Kabupaten Aceh Jaya, tidak terlepas dari pola penangkapan dan budidaya perikanan yang masih bersifat tradisional dan belum menggunakan teknologi yang modern. Terbatasnya investasi swasta/dunia usaha yang bergerak dalam aktivitas perikanan, turut menjadi pemicu relatif lambatnya perkembangan aktivitas ekonomi perikanan. Dalam jangka panjang ke depan, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu menggulirkan kebijakan yang mampu mendorong masuknya investasi dunia usaha/swasta yang bergerak di bidang perikanan secara berkelanjutan. Selain untuk mendorong peningkatan produksi perikanan secara berkelanjutan, kebijakan tersebut ditempuh bertujuan menyerap tenaga kerja lokal yang lebih banyak serta berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

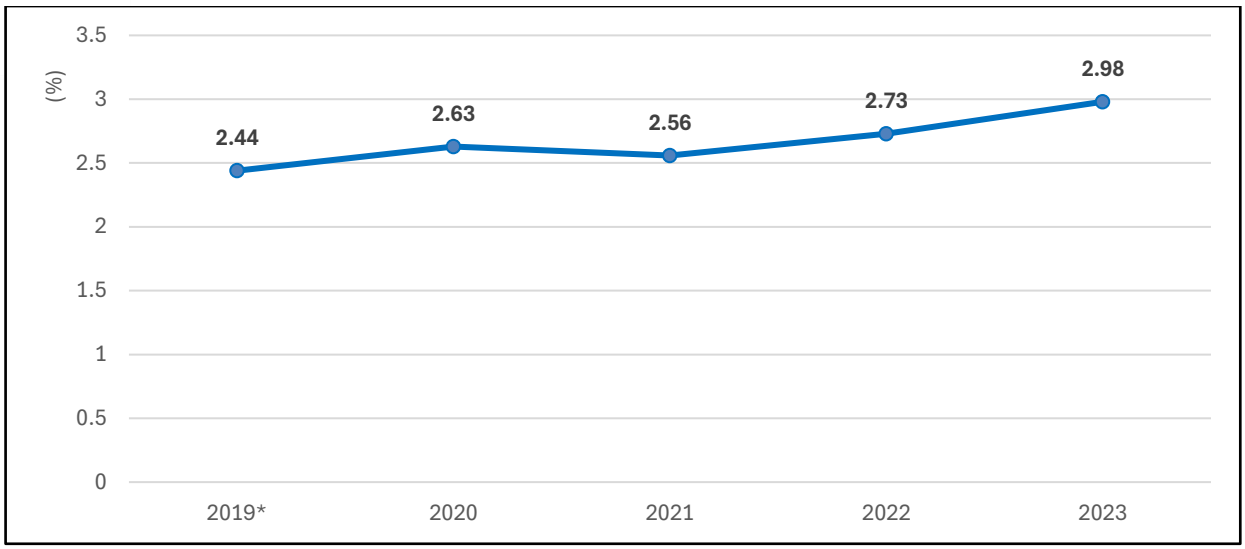

*) data awal
Sumber: BPS Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.48. Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019-2023

2.4.3.3. Pariwisata

Posisi Kabupaten Aceh Jaya yang diapit dan dikelilingi Samudera Hindia memiliki potensi daya tarik wisata yang dapat dikelola untuk mendukung berkembangnya pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas. Selain itu, Aceh Jaya juga memiliki panorama alam yang menarik sebagai daya tarik untuk mendorong peningkatan wisatawan. Untuk mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai fondasi perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus mengelola dan mengembangkan tempat dan daya tarik wisata. Pengelolaan pariwisata di masa depan dilakukan secara pola inovatif, adaktif, dan kolaboratif. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja lokal, mendorong UMKM, meningkatkan PAD, dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur antarwilayah.

Tahun 2015, tercatat ada 63 tempat wisata di Aceh Jaya. Akhir tahun 2023, objek wisata yang ada di Aceh Jaya menurun menjadi 56 tempat. Kurun waktu 2010-2023, telah bertambah tempat wisata di Aceh Jaya sebanyak 7 tempat.

Tabel 2.59. Perkembangan Tempat Wisata di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015-2023

No.	Kecamatan	Tahun								
		2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jaya	10	11	11	11	11	11	11	11	11
2	Indra Jaya	6	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Kreung Sabee	5	6	6	6	6	6	6	6	6
4	Teunom	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Panga	2	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Samponiet	19	5	5	5	5	5	5	5	5

No.	Kecamatan	Tahun								
		2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Darul Hikmah	6	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Setia Bakti	4	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Pasie Raya	6	5	5	5	5	5	5	5	4
Aceh Jaya		**63**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**56**

**) data awal*
Sumber: Disparekrafpora Kab. Aceh Jaya, 2024

Fasilitas pendukung pariwisata yang tersedia di Aceh Jaya masih terbatas. Akomodasi yang tersedia hanya ada sebanyak 7 unit. Sementara itu, restoran/rumah makan dari 51 unit tahun 2015 meningkat signifikan menjadi 84 unit tahun 2023. Restoran/rumah makan yang paling banyak terdapat di Kecamatan Krueng Sabee, dan Kecamatan Teunom. Perkembangan jumlah restoran/rumah makan di Kabupaten Aceh Jaya selama delapan tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60. Perkembangan Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015-2023

Kecamatan	Tahun								
	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Teunom	9	7	9	9	11	15	15	16	16
Pasie Raya	-	3	3	1	1	1	2	4	4
Panga	3	4	4	4	2	2	3	4	4
Krueng Sabee	13	10	13	17	20	23	23	24	26
Setia Bakti	4	5	6	6	8	9	9	10	10
Sampoiniet	3	4	6	3	3	3	4	4	4
Darul Hikmah	8	7	8	3	3	3	4	4	4
Jaya	10	8	11	8	9	11	12	12	12
Indrajaya	1	2	3	4	3	3	3	4	4
Aceh Jaya	**51**	**50**	**63**	**55**	**60**	**70**	**75**	**82**	**84**

**) data awal*
Sumber: Disparekrafpora Kab. Aceh Jaya, 2024

Dilihat dari kunjungan wisatawan ke Aceh Jaya, perkembangan selama enam tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kurun waktu 2018-2023, jumlah wisatawan terbanyak dicapai pada tahun 2019, yaitu sebanyak 613.246 orang. Adapun tahun 2023, tercatat wisatawan yang berkunjung ke Aceh Jaya tidak lebih dari 487.557 orang. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Aceh yang mengarahkan pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya merespon positif dan mengarahkan kebijakan strategis untuk bersinergi serta bersama-sama membangun pariwisata di Aceh Jaya melalui pengelolaan yang inovatif, adaktif, dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan kepariwisataan.

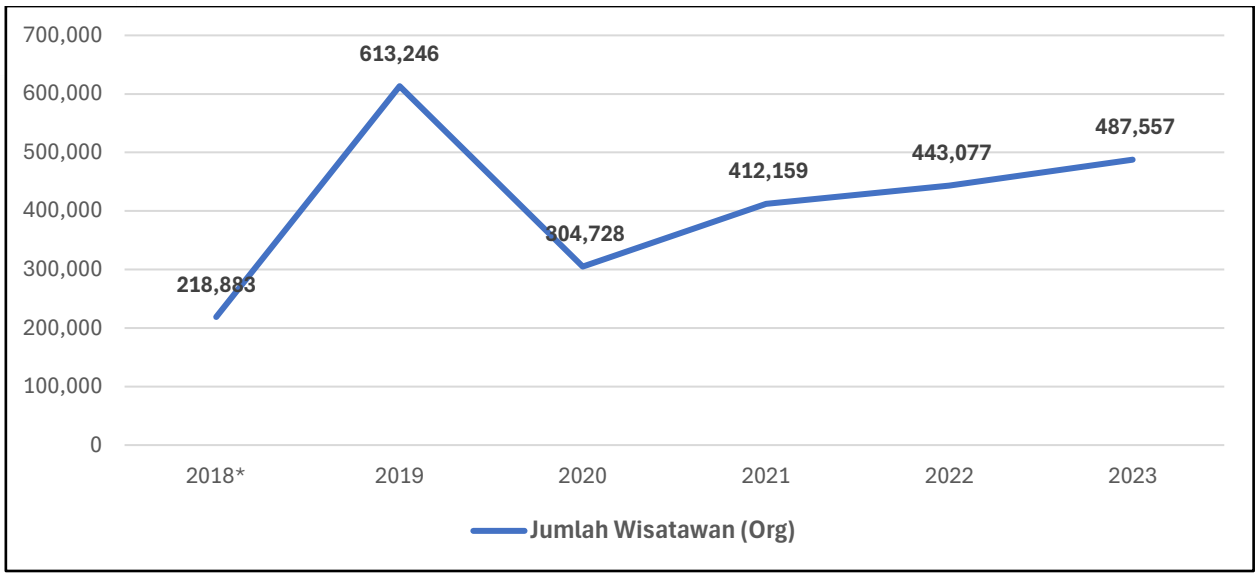

**) data awal*
Sumber: Disparekrafpora Kab. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.49. Perkembangan Jumlah Wisatawan yang Berkunjung di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018-2023

2.4.3.4. Perdagangan

Sektor perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil dan sepeda motor merupakan salah satu sektor yang mempunyai kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya. Namun demikian, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Aceh Jaya terus menunjukkan penurunan. Tahun 2010, tercatat kontribusi sektor perdagangan sebesar 10,73 persen, sementara tahun 2023 telah menurun menjadi 10,20 persen. Bahkan, kontribusi sektor tersebut mencapai di bawah dari 10 persen selama tahun 2020-2021. Adapun perkembang kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.50.

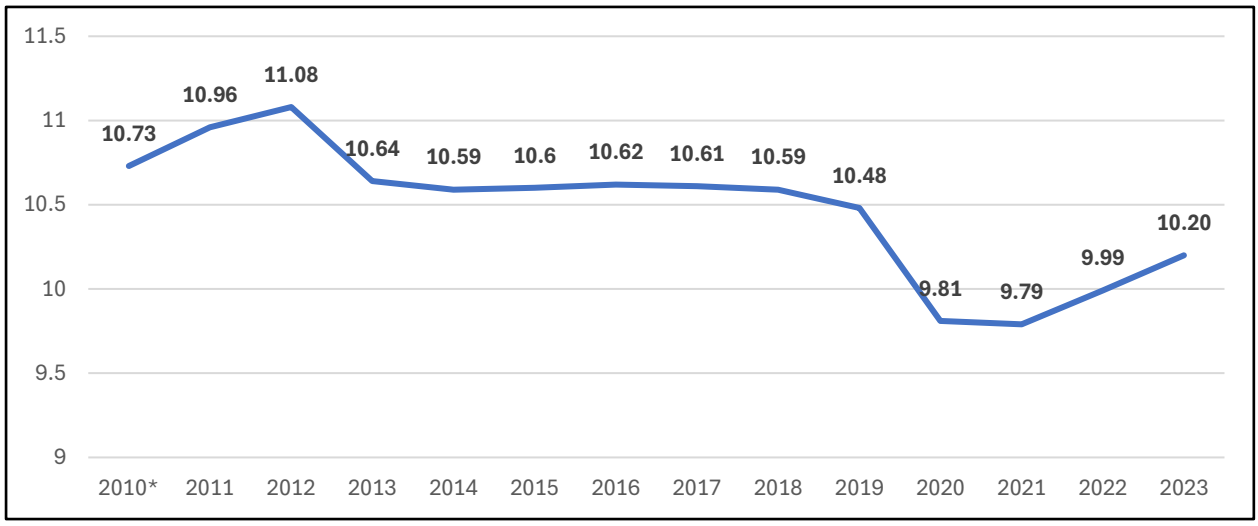

**) data awal*
Sumber: BPS Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.50. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kab. Aceh Jaya Tahun 2010-2023

2.4.3.5. Perindustrian

Perkembangan sektor industri pengolahan di Kabupaten Aceh Jaya kurun waktu 2010-2023 mengalami peningkatan. Kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah sebesar 5,23 persen pada tahun 2023. Dibandingkan tahun 2010, kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 3 persen. Penguatan sektor industri pengolahan diupayakan terus berlanjut dalam jangka panjang ke depan. Hilirisasi produk-produk turunan dari komoditi unggulan pertanian (seperti kelapa sawit, nilam) diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan industri pengolahan di masa depan.

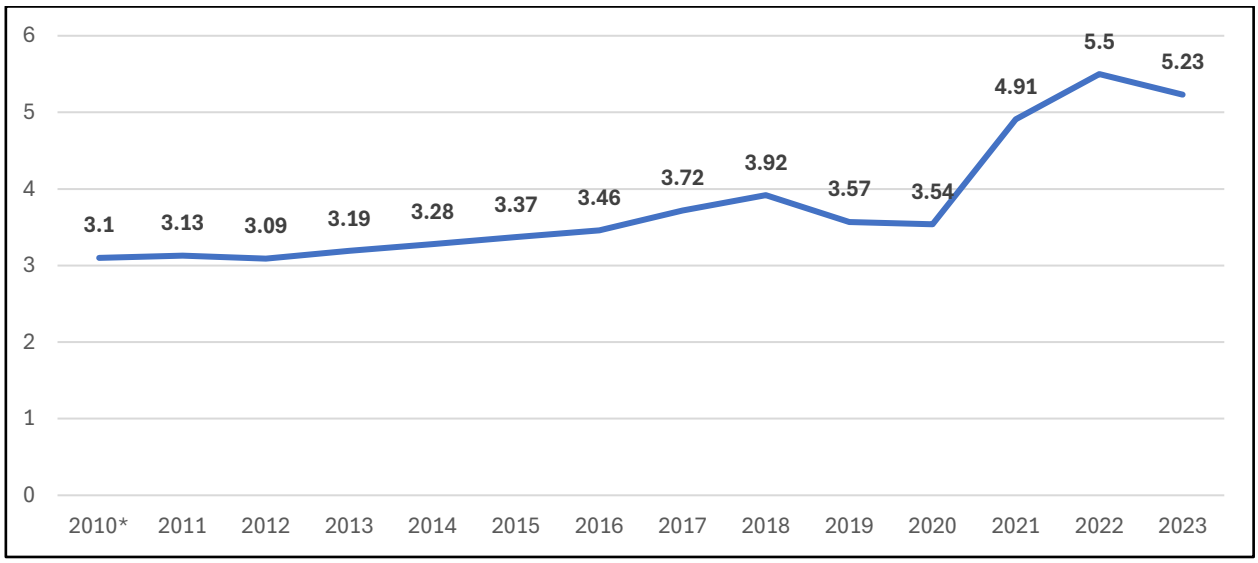

**) data awal*
Sumber: BPS. Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.51. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010-2023

2.4.3.6. Kehutanan

Kawasan hutan di Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung dengan luas sekitar 167.676,36 ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan hutan produksi terdiri dari hutan produksi terbatas dengan luas sekitar 70.078,99 ha yang tersebar di seluruh kecamatan, dan hutan produksi tetap dengan luas sekitar 14.084, 30 ha yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Panga seluas 1.084,48 ha; Kecamatan Krueng Sabee seluas 2.692,47 ha; Kecamatan Setia Bakti seluas 2.600,23 ha; Kecamatan Indra Jaya seluas 5.640,58 ha; dan Kecamatan Jaya seluas 2.066,54 ha.

Kabupaten Aceh Jaya juga memiliki hutan adat yang tersebar di dua mukim, yaitu Mukim Panga Pasi seluas lebih kurang 1.282 ha di Gampong Gle Putoh Kecamatan Panga dan Mukim Krueng Sabee seluas lebih kurang 4.155 ha di Gampong Panggong Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh.

Di sektor kehutanan potensi yang diharapkan menjadi salah satu tumpuan dalam mendorong peningkatan upaya kesejahteraan dan akselerasi ekonomi hijau di masa akan datang. Isu dan permasalahan kehutanan sering kali menjadi isu yang tak terpisahkan

dengan kehidupan masyarakat di Aceh Jaya terutama yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

2.4.3.6.1. Konflik Satwa

Gubernur Aceh melalui SK Nomor 522/1246/2023 tentang Penetapan Peta Indikatif Koridor Hidupan Liar Sebagai Kawasan Ekosistem Essensial Provinsi Aceh juga telah menetapkan indikatif koridor hidupan liar seluas 114.280 ha. Penetapan koridor hidupan liar ini merupakan salah satu langkah untuk menginisiasi kolaborasi antara UPT KLHK dan Pemerintah Provinsi Aceh dengan Kabupaten Aceh Jaya dalam konteks penanganan konflik manusia dan satwa liar khususnya gajah. Setidaknya, selama kurun waktu 2018 – 2022 BSKDA Aceh mencatat konflik antara manusia dan gajah terjadi sebanyak 86 kali.

Penetapan indikatif koridor hidupan liar sebagai kawasan ekosistem esensial ini diharapkan menjadi dasar dan acuan dalam pengelolaan habitat, pengelolaan ekosistem, menyesuaikan dan mensinergikan kebijakan, melestarikan sumber daya alam kunci serta melaksanakan program dan anggaran pengelolaan pada saat yang tepat. Penetapan koridor hidupan liar dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manusia dan hidupan liar serta memudahkan hidupan liar bergerak sesuai daerah jelajahnya dari satu kawasan ke kawasan lain.

2.4.4. Urusan Penunjang

2.4.4.1. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai kondisi dan potensi daerah, serta permasalahan dan isu strategis daerah. Selain itu, dalam perumusan perencanaan, Bappeda juga diharuskan menggunakan pendekatan partisipasif yang melibatkan seluruh komponen/unsur masyarakat di daerah sebagai bentuk menghimpun aspirasi, saran, dan masukan yang konstruktif dari masyarakat. Penguatan koordinasi, harmonisasi, dan sinergisitas antar SKPK di daerah dan kementerian di Pemerintah Pusat, juga menjadi bagian penting yang terus dilakukan Bappeda dalam memperkuat perencanaan daerah yang berbasis bukti (*eviden base)*.

Sesuai aturan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Bappeda memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan dokumen perencanaan, meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan rumusan hasil Musrenbang, serta menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat kerja daerah.

Selain itu, Bappeda juga mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;

meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran.

2.4.4.2. Keuangan

Sumber pendapatan daerah Aceh Jaya masih didominasi dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat, meskipun adanya kecenderungan Pendapatan Asli daerah (PAD) terus meningkat selama tahun 2005-2023. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal serta lain-lain. Kontribusi PAD belum optimal dalam struktur pendapatan daerah. Rendahnya PAD menyebabkan sumber pendanaan pembangunan mengandalkan dana transfer (DAU, DAK) dari pemerintah pusat. Selain itu, berkurangnya dana otonomi khusus juga menjadi tantangan ke depan, mengingat dana otonomi khusus berakhir pada tahun 2027. Terbatasnya investasi dari dunia usaha dan investasi dari luar daerah, juga menjadi tantangan ke depan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menghimpun akumulasi modal untuk menggerakkkan dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, dalam jangka panjang ke depan, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berupaya mengoptimalkan PAD, terutama pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber dalam pendanaan pembangunan. Perkembangan PAD, dana perimbangan, dan pembiayaan kurun waktu 2005-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.52.

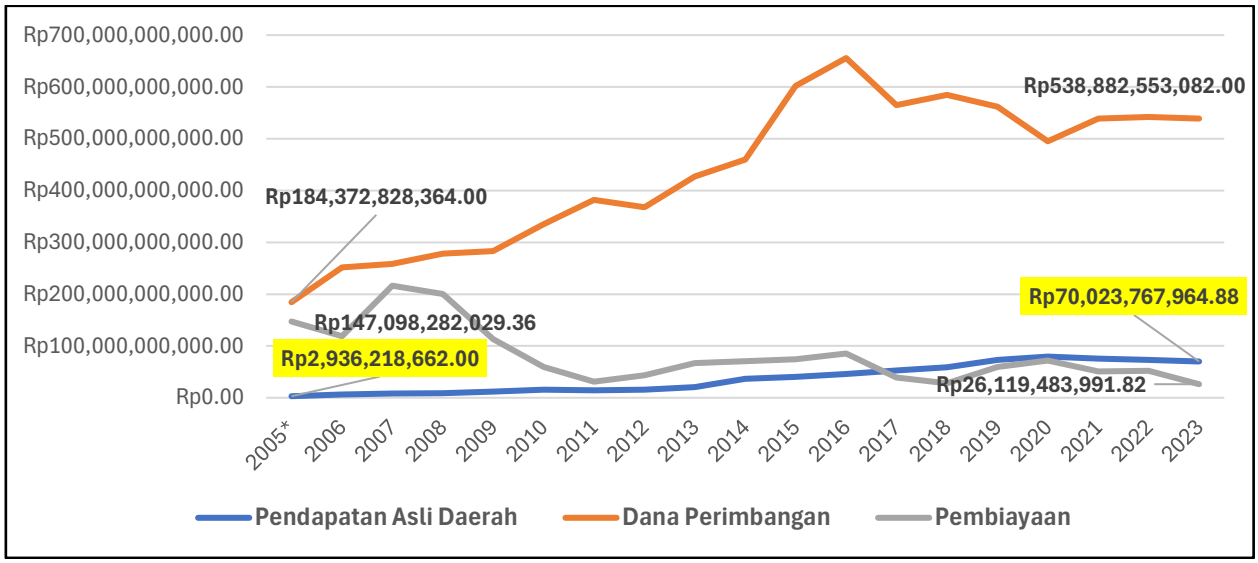

**) data awal*
Sumber: BPKK Aceh Jaya, 2024

Gambar 2.52. Perkembangan Pendapatan Daerah Aceh Jaya Tahun 2005-2023 (PAD, Dana Perimbangan, dan Pembiayaan)

Sementara itu, dari sisi belanja masih didominasi untuk kebutuhan pegawai. Masih tingginya belanja pemerintah untuk kebutuhan pegawai menyebabkan belanja untuk pembangunan publik tidak optimal. Dengan sumber dana yang terbatas, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berupaya menekan dan melakukan efisiensi terhadap penggunaan belanja untuk aparatur. Dalam jangka panjang ke depan, prioritas belanja pemerintah

diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, terutama peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), peningkatan infrastruktur dasar di setiap kecamatan, dan optimalisasi nilai tambah produk-produk pertanian yang mengarah pada hilirisasi. Disamping itu, tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi juga menjadi agenda dalam jangka panjang ke depan, sehingga penggunaan belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk penguatan SDM dan kinerja aparatur lebih efisien. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Aceh Jaya selama periode 2005-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.53.

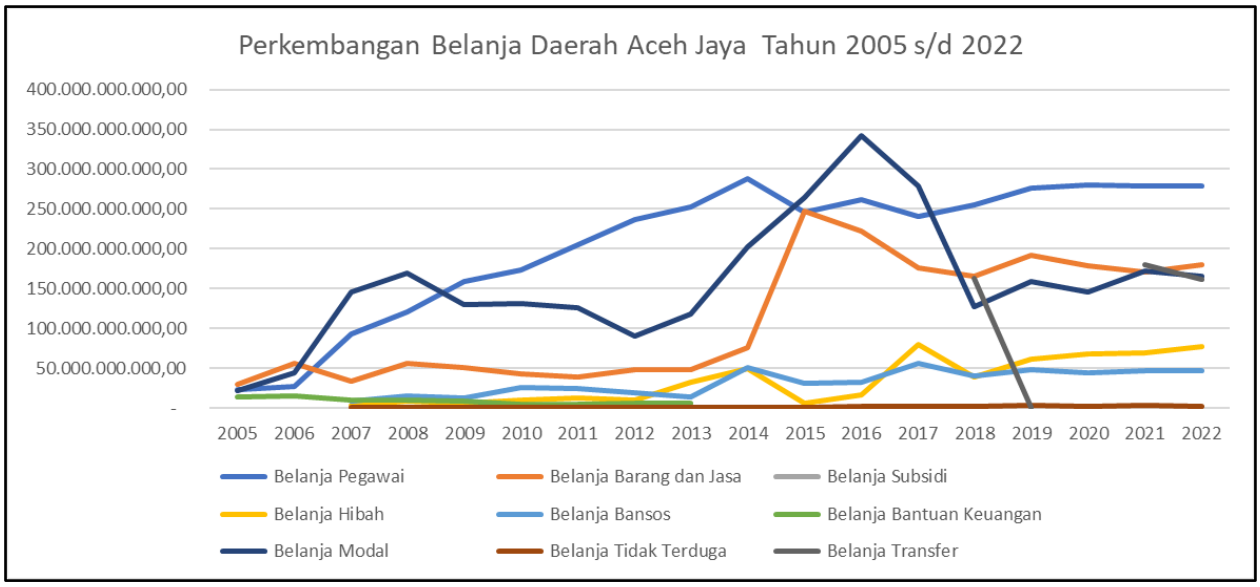

Sumber: BPKK Kab. Aceh Jaya, 2023

Gambar 2.53. Perkembangan Belanja Daerah Aceh Jaya Tahun 2005-2022

2.4.4.3. Kepegawaian

Ketersediaan sumberdaya aparatur yang berkualitas dan berintegritas di Kabupaten Aceh Jaya merupakan keharusan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Kondisi PNS di Aceh Jaya didominasi golongan III, terutama sejak tahun 2012-2023. Dari 2.847 aparatur, hampir 69,33 persen merupakan golongan III (kondisi tahun 2023). Beberapa tahun sebelumnya (kondisi 2006), tercatat aparatur yang golongan III masih sebanyak 48,34 persen. Adapun PNS bergolongan IV sebanyak 16,26 persen pada tahun 2023, juga cenderung meningkat dari sebanyak 11,67 persen pada tahun 2006.

Perubahaan dan peningkatan golongan kepangkatan sumberdaya aparatur di Aceh Jaya di hampir dua dekade penyelenggaraan pemerintahan mencerminkan adanya upaya untuk terus mendorong dan memperkuat SDM aparatur yang berkualitas dan berkompeten. Dalam jangka panjang ke depan, digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan menuntut kesiapan SDM aparatur yang inovatif, berintegritas, dan berkompeten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Perkembangan PNS menurut golongan dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61. Perkembangan PNS Menurut Golongan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006-2023

Tahun	Golongan PNS				
	I	II	III	IV	Total
2006*	24	435	555	134	1.148
2007	32	885	745	195	1.857
2008	26	964	786	195	1.971
2009	14	306	299	75	694
2010	14	306	299	75	694
2011	66	1.392	1.389	308	3.155
2012	61	1.206	1.448	327	3.042
2013	47	1.112	1.551	342	3.052
2014	47	1.112	1.551	342	3.052
2015	43	907	1.872	364	3.186
2016	31	675	2.045	374	3.125
2017	25	613	1.828	346	2.812
2018	15	555	1.799	350	2.719
2019	15	555	1.799	350	2.719
2020	11	538	1.975	373	2.897
2021	8	559	2.038	402	3.007
2022	5	493	2.054	547	3.099
2023	3	407	1.974	463	2.847

**) data awal*
Sumber: BKPSDM Kab. Aceh Jaya, 2024

Sementara itu, terkait dengan reformasi birokrasi, belum sepenuhnya menunjukkan perubahan yang drastis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2021-2022, nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Aceh Jaya masih tergolong kategori rendah. Namun pada tahun 2023 nilai IRB Kabupaten Aceh Jaya mengalami peningkatan menjadi 64,82 dengan kategori cukup baik. Perkembangan IRB Kabupaten Aceh Jaya selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021-2023

Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Kategori
2021*	44,73	C
2022	45,39	C
2023	64,82	B

**) data awal*
Sumber: Bag Organisasi Setdakab Kab. Aceh Jaya, 2024

2.4.4.4. Indeks Inovasi Daerah

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas salah satunya diukur dengan menggunakan Indeks Inovasi Daerah. Selama empat tahun terakhir, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya memperlihatkan capaian yang sangat inovatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No.100-4672 Tahun 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020, Kabupaten Aceh Jaya berada pada peringkat 64 dengan nilai skor 2.617 yang berstatus sangat inovatif. Nilai skor tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh. Tercatat nilai skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh sebesar 2.778 yang berada diperingkat 16 dari seluruh provinsi di Indonesia. Hingga tahun 2023, inovasi daerah Kabupaten Aceh Jaya berstatus sangat inovatif, meskipun adanya pergeseran peringkat antar kabupaten/kota, dari peringkat 22 (tahun 2022) ke peringkat 26 (tahun 2023). Capaian tersebut cenderung lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Aceh yang berstatus inovatif kurun waktu tiga tahun terakhir (2021-2023). Peringkat tersebut berdasarkan Kepmendagri No.002.6-5848 Tahun 2021, Kepmendagri No.400.10.11-6301.A Tahun 2022 dan Kepmendagri No.400.10.11-6287 Tahun 2023. Dalam jangka panjang ke depan, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus berupaya meningkatkan berbagai inovasi daerah di berbagai strata pelayanan dan SKPK. Inovasi daerah di tingkatan Pemerintahan Gampong juga diprioritaskan dalam jangka panjang ke depan, sehingga mendorong percepatan pelayanan public yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tabel 2.63. Perkembangan Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020-2023

Tahun	Skor Nilai Indeks Inovasi Daerah	Status	Peringkat Kabupaten/Kota
2020*	2.617	Sangat Inovatif	64
2021	60,29	Sangat Inovatif	13
2022	60,49	Sangat Inovatif	22
2023	62,31	Sangat Inovatif	26

**) data awal*
Sumber: Kemendagri, 2023

2.4.4.5. Indeks Pelayanan Publik

Upaya perbaikan pelayanan publik yang berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat menjadi agenda prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam pembangunan jangka panjang (periode 2025-2045). Merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Dan BUMN Tahun 2023, memperlihatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Aceh Jaya dengan rata-rata indeks sebesar 2,83 yang termasuk dalam kategori C (Cukup). Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Nilai rata-rata IPP pada tahun 2022 sebesar

3,25 dengan kategori baik (B-). Capaian tersebut juga terlihat lebih rendah dari Provinsi Aceh yang sebesar 4,01 dengan kategori A- (sangat baik) pada tahun 2022 dan sebesar 4,34 dengan kategori sangat baik (A-) tahun 2023. IPP ini merupakan hasil akumulasi dari tiga unit penyelenggara pelayanan yang menjadi lokus evaluasi tahun 2023. Lebih lanjut, mekanisme dan instrumen yang diterapkan dalam evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dijabarkan dalam Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dalam kaitan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya akan mengelola pengaduan dan menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagai instrumen dalam upaya perbaikan pelayanan publik. Selain itu, upaya koordinasi dan kerjasama antar SKPK dilakukan dengan lebih intensif. Dengan demikian, pelayanan publik di Kabupaten Aceh Jaya dapat mencapai pelayanan prima sebagai wujud dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani masyarakat.

Tabel 2.64. Perkembangan Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022-2023

Tahun	Rata-Rata Indeks Pelayanan Publik	Kategori	Keterangan
2022*	3,25	B-	Baik
2023	2,83	C	Cukup

**) data awal*
Sumber: KemenpanRB, 2023

2.5. Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Sesuai amanat Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasonal (SPPN), Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah memiliki RPJP Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk masa dua puluh tahun. Dokumen tersebut memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang dilaksanakan terhitung tahun 2005 hingga tahun 2025. Dalam periode 2005-2025, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah menetapkan Visi, yaitu ***Kabupaten Aceh Jaya Yang Maju Dengan Masyarakat Yang Sejahtera, Berkualitas dan Bertaqwa Dalam Tatanan Pemerintahan Yang Baik.***

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut, **pertama,** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; **Kedua,** Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan; ***Ketiga***, Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah; ***Keempat,*** Mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan ***Kelima***, Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama.

2.5.1. Kinerja Makro Pembangunan Aceh Jaya

Selama hampir mendekati dua dekade penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Kabupaten Aceh Jaya telah mencatat beberapa kemajuan dan prestasi dalam menuju cita-cita ***Kabupaten Aceh Jaya Yang Maju Dengan Masyarakat Yang Sejahtera, Berkualitas dan Bertaqwa Dalam Tatanan Pemerintahan Yang Baik.*** Disisi lainnya**,** terdapat juga beberapa indikator pembangunan yang terhambat dalam pencapaiannya. Berbagai kemajuan pembangunan yang dicapai, terukur dari beberapa kinerja makro Kabupaten Aceh Jaya diuraikan secara komprehensif sebagai berikut:

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2011, capaian pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya berada diurutan 10 antarkabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Aceh. Laju pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya yang terus meningkat hanya terjadi sepanjang periode 2014-2019. Disisi lainnya, Kabupaten Aceh Jaya termasuk daerah yang cepat keluar dari perangkap COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Memasuki tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya dalam transisi pemulihan hingga mencapai 3,68 persen, lebih tinggi dari tahun 2020 yang minus -0,62 persen. Transisi pemulihan ekonomi tersebut hanya menempatkan Kabupaten Aceh Jaya berada diurutan 13 dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (turun 3 peringkat dari tahun 2011). Kurun waktu 2011-2022, laju pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami perlambatan, dimana menurun 0,48 persen dari kinerja tahun 2011 (Kategori Kinerja Menurun). Transisi pemulihan ekonomi diperkirakan akan semakin cepat sehingga pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya yang terus meningkat dapat dicapai di periode pembangunan jangka panjang berikutnya (2025-2045).

B. Pendapatan Per Kapita

Kesejahteraan masyarakat Aceh Jaya yang tergambar dari pendapatan per kapita telah menunjukkan perubahan kemajuan di hampir dua dekade pembangunan. Pada tahun 2005, pendapatan per kapita masyarakat sebesar Rp.5,96 juta. Sampai tahun 2022, pendapatan per kapita masyarakat telah meningkat menjadi Rp.31,29 juta. Meskipun besaran pencapaian pendapatan per kapita Aceh Jaya masih jauh lebih rendah dari rata-rata Aceh dan Nasional, namun menjadi momentum dalam jangka panjang ke depan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Aceh Jaya yang berkelanjutan.

C. Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah berhasil menurunkan kemiskinan sepanjang periode 2005-2022. Pada tahun 2005, angka kemiskinan di Aceh Jaya mencapai 31,28 persen. Dengan angka kemiskinan tersebut, Aceh Jaya berada di urutan 7 kemiskinan terbesar antarkabupaten/kota di Aceh. Pada Tahun 2022, tingkat kemiskinan di Aceh Jaya menurun menjadi sebesar 12,51 persen, meskipun masih berada diatas rata-rata tingkat kemiskinan di Aceh dan Nasional. Penurunan angka kemiskinan tersebut, menempatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya diurutan 18 dari 23 Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh (5 besar kemiskinan terkecil). Dalam jangka panjang periode berikutnya (2025-2045), pengurangan angka kemiskinan di Aceh Jaya menjadi prioritas utama dan diupayakan terus

menurun dengan berbagai inovasi kebijakan pembangunan yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

D. Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas pembangunan manusia yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mengalami perubahan ke arah yang menggembirakan di hampir dua dekade. Pada Tahun 2005, IPM Aceh Jaya sebesar 68,8, yang menempatkan pembangunan manusia Aceh Jaya berada diurutan 17 di Propinsi Aceh. Angka IPM tersebut menempatkan Aceh Jaya dalam status sedang kinerja pembangunan manusia. Pada Tahun 2022, IPM Aceh Jaya mencapai 70,36, berada diurutan 13 di Provinsi Aceh (lebih baik 4 peringkat dari tahun 2005). Angka IPM tersebut telah mengubah kinerja pembangunan manusia Aceh Jaya dari berstatus sedang menjadi tinggi dalam kinerja pembangunan manusia. Selama kurun waktu 2005-2022, kenaikan IPM Aceh Jaya sebesar 3,56 poin, atau setara 5,3 persen dari kinerja periode 2005 (kategori kinerja meningkat/relatif). Periode pembangunan jangka panjang berikutnya (2025-2045), IPM menjadi tolok ukur dalam mendorong percepatan pembangunan manusia di Aceh Jaya, yang akan didorong melalui penguatan sumberdaya ekonomi lokal yang berbasis nilai tambah, perbaikan dalam pelayanan pendidikan, dan perbaikan dalam layanan kesehatan.

2.5.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Sasaran Pembangunan

Hasil evaluasi RPJP Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025, ditemukan beberapa faktor penghambat pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang 2005-2022, yaitu:

1. Terdapat inkonsistensi antara dokumen perencanaan jangka panjang dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Terdapat perbedaan indikator yang ditetapkan sehingga kesulitan dalam melakukan evaluasi capaian kinerja;
3. Tidak dilakukannya evaluasi RPJPD secara berkala sehinggga tidak adanya perbaikan indikator maupun arah kebijakan pembangunan sesuai RPJPD periode 2005-2025;
4. Pada kinerja sektor pendidikan angka rata-rata lama sekolah Aceh Jaya masih rendah jika dibandingkan pada level Kabupaten/Kota dalam Propinsi Aceh.
5. Pada capaian kinerja sektor kesehatan, Usia Harapan Hidup masih rendah hal ini disebabkan salah satunya oleh kinerja kesehatan yang belum fokus pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sehingga angka stunting masih relatif tinggi, serta persentase imunisasi dan usia harapan hidup masih rendah jika dibandingkan pada level Kabupaten/kota tingkat Propinsi Aceh.
6. Pada kinerja layanan dan akuntabilitas birokrasi, yang salah satunya di-wakili oleh indikator Nilai SAKIP, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya masih rendah dimana terdapat kesenjangan yang sangat besar dalam target dan capaian indikator nilai SAKIP hingga tahun 2022.
7. Pada kinerja layanan perekonomian, pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya cenderung melambat, hal ini salah satunya disebabkan oleh pandemi covid-19 dimana capaian pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya masih dibawah target yang ditetapkan hingga akhir

periode RPJMK 2017-2022, begitu juga ketimpangan pendapatan Aceh Jaya masuk dalam peringkat 6 besar ketimpangan tertinggi di Propinsi Aceh.

8. Masih lemahnya validitas database kesejahteraan penduduk, sehingga menjadi salah satu penyebab intervensi terhadap kemiskinan tidak berdampak maksimal.

Terdapat beberapa faktor pendorong pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang kabupaten Aceh Jaya 2005-2022, sebagai berikut:

1. Terbitnya regulasi terbaru terkait pedoman perencanaan, dan penganggaran keuangan daerah mendorong lahirnya konsistensi antar level dokumen perencanaan serta dokumen anggaran daerah, sehingga memperkuat dasar hukum dalam rangka pencapaian kinerja indikator pembangunan daerah.
2. Digitalisasi sistem perencanaan dan penganggaran serta evaluasi melalui berbagai macam platform digital seperti aplikasi SIPD, E-Sakip, ESPM, dan aplikasi lainnya membuat sinkronisasi dan pelaporan kinerja daerah lebih akuntabel, mudah dan terjadwal, sehingga mengurangi tingkat kesalahan dan inkonsistensi yang terjadi sebelumnya.
3. Perbaikan penyusunan indikator yang saat ini mulai dilakukan oleh Pemerintah Aceh Jaya, membuat kinerja pembangunan lebih terarah dan fokus dalam pencapaian target kinerja dari setiap indikator.
4. Kinerja perekonomian pada sektor kemiskinan dan angka pengangguran terbuka Aceh Jaya dalam kondisi positif dimana capaiannya merupakan empat besar terbaik pada level Propinsi Aceh. Hal ini membuktikan keberhasilan program pemerintah di sektor perekonomian walaupun belum terlalu berefek pada beberapa indikator lainnya.
5. Kinerja akuntabilitas melalui kinerja pengelolaan keuangan dalam kondisi baik dimana hingga tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mendapat Opini WTP sembilan kali secara berturut, sehingga menjadi salah satu capaian kinerja yang membanggakan.
6. Kinerja sektor pembangunan SDM dalam kondisi baik pada level indikator IPM, walaupun perlu penajaman pada capaian kinerja sektor kesehatan dan pendidikan.
7. Tersedianya platform database Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menjadi salah satu celah perbaikan sasaran dan penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya.

2.5.3. Kesimpulan dan Rekomendasi Terhadap RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045

Selama hampir dua dekade, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah melaksanakan pembangunan dengan capaian pembangunan yang menunjukkan kemajuan yang lebih baik. Disisi lainnya, hasil evaluasi RPJPK Aceh Jaya Tahun 2005-2025 juga menunjukkan terdapat beberapa indikator pembangunan yang belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, berbagai permasalahan pembangunan yang menjadi penghambat pembangunan harus menjadi perhatian utama pada RPJPK periode berikutnya.

Memperhatikan hasil evaluasi RPJPK Aceh Jaya Tahun 2005-2025, dirumuskan beberapa rekomendasi dalam penyusunan RPJPK Aceh Jaya Periode 2025-2045 sebagai berikut:

a. Penyusunan RPJPK Aceh Jaya periode berikutnya harus sesuai arahan dan mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
b. Penyusunan indikator target dan sasaran pokok RPJPK Aceh Jaya periode berikutnya perlu dirumuskan bersifat kuantitatif dan mampu dijabarkan dalam setiap tahapan/perioderisasi rencana pembangunan jangka menengah sehingga indikator tersebut menjadi rujukan penentuan arah kebijakan jangka menengah daerah.
c. Optimalisasi penggunaan platform digital dalam rangka perekaman data perencanaan pembangunan, sehingga data-data capaian pembangunan terkompilasi dan terpublikasi secara komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan kedepannya.
d. Penyusunan RPJPK Aceh Jaya periode berikutnya sepatutnya memperhatikan konsistensi dan keberlanjutan target indikator capaian yang bersifat signifikan pada masing-masing strategi dan arah kebijakan guna mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasaran Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Jumlah Penduduk

Penduduk Aceh Jaya diperkirakan akan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dalam kurun waktu 2025-2045, penduduk Aceh Jaya akan meningkat hingga 189.458 jiwa dari 99.717 jiwa di tahun 2023. Diperkirakan laju pertumbuhan penduduk Aceh Jaya akan meningkatkan secara bertahap dalam 3 persen per tahun.

Tabel 2.65. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Hingga Tahun 2045

Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
99.717	2025	2030	2035	2040	2045
	105.969	122.535	141.692	163.843	189.458

2.6.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Aceh Jaya diperkirakan akan mengalami peningkatan periode 2025-2045 yang di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan jenis kelamin penduduk laki-laki pada tahun 20245 diperkiran sebanyak 96.055 orang dan penduduk perempuan sebanyak 93.403 orang dengan rasio penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 102,84. Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin Hingga Tahun 2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	50.490	53.726	62.125	71.838	83.069	96.055
Perempuan	49.227	52.242	60.410	69.854	80.775	93.403
Rasio	102,57	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84

2.6.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Dalam meningkatnya penduduk maka akan terjadi juga pergeseran kelompok umur. Dalam proyeksi penduduk aceh Jaya, terdapat tiga kelompok yakni 0-14 tahun, 15-16 tahun yang merupakan kelompok usia produktif, dan usia non produktif pada 65+ tahun. Terlihat pada tabel proyeksi (Tabel 2.67) bahwa terjadi pergerseran komposisi meski tidak terlalu signifikan. Kelompok umur 0-14 tahun dari 28,9 persen di tahun 2025 menurun menjadi 26,8 persen di tahun 2045. Untuk kelompok 15-64 tahun, komposisi usia produktif ini diperkirakan meningkat dari 65,9 persen di tahun 2025 menjadi 67,4 persen di tahun 2045. Sedangkan usia non produktif pada kelompok umur 65+ juga mengalami peningkatan dari 5,2 persen di tahun 2025 menjadi 5,8 persen di tahun 2045. Selain itu proyeksi angka ketergantungan mengalami penurunan dari 46,28 di tahun 2025 menjadi 35,06 di tahun 2045. Dengan demikian di tahun 2045 bahwa satu orang yang bekerja menanggung/menafkahi tiga orang dalam rumah tangga.

Tabel 2.67. Proyeksi Proporsi Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan Hingga Tahun 2045

Tahun					
Kelompok Umur	2025	2030	2035	2040	2045
0-14	28.9	28.5	28.1	27.6	26.8
15-64	65.9	66.2	65.5	66.9	67.4
65+	5.2	5.3	5.4	5.5	5.8
Angka Ketergantungan	46,28	43,47	40,67	37,86	35,06

2.6.4. Kepadatan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya penduduk secara perlahan dari tahun ke tahun, maka aspek kepadatan penduduk juga perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan luas wilayah tidak terjadi penambahan. Pada Tabel 2.68 memperlihatkan kepadatan penduduk selama 20 tahun akan meningkat sebanyak 100 persen lebih. Di tahun 2025, kepadatan penduduk Aceh Jaya sebesar 28 jiwa per km2 dan di tahun 2045 sebesar 50 jiwa per km^2. Angka ini masih dalam kategori belum padat.

Tabel 2.68. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Hingga Tahun 2045

Tahun					
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)	2025	2030	2035	2040	2045
	28	32	37	43	50

2.6.5. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar

2.6.5.1. Proyeksi Kebutuhan Perumahan

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka terjadi peningkatan pemukiman di kawasan Aceh Jaya. Diperkirakan kebutuhan rumah sebesar 47.364 unit di tahun 2045 dengan asumsi 1 rumah tangga terdiri dari 4 orang dengan luas 100 m^2.

Tabel 2.69. Proyeksi Kebutuhan Rumah

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	99.717	105.969	122.535	141.292	163.843	189.458
Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)	24.929	26.492	30.633	35.323	40.960	47.364

Keterangan: Berdasarkan SNI 2004 No. 1733

2.6.5.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Kebutuhan air minum yang layak merupakan utilitas dasar yang harus dipenuhi. Seiring dengan peningkatan penduduk maka kebutuhan air akan terus meningkat. Berdasarkan SNI 03-7065-2005 menyebutkan kebutuhan orang per hari sebanyak 120 liter. Diperkirakan kebutuhan air minum di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2045 mencapai 8.298.260 (liter/Orang/Tahun). Proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Aceh Jaya hingga 2045 sebagai berikut:

Tabel 2.70. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	99.717	105.969	122.535	141.292	163.843	189.458
Kebutuhan Air Bersih (Liter/Orang/Hari)	120	120	120	120	120	120
Estimasi kebutuhan Air Bersih per tahun (Liter/Orang/Tahun)	4.367.604	4.641.442	5.367.033	6.188.590	7.176.323	8.298.260

Sumber: Hasil proyeksi, 2023

2.6.5.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Sejalan dengan bertambahnya penduduk serta rumah tangga maka kebutuhan Listrik akan semakin meningkat. Proyeksi kebutuhan Listrik ini dilakukan menggunakan standar dari SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu setiap rumah tangga atau keluarga harus dapat dilayani daya listrik minimum sebesar 450 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga. Kondisi listrik yang tersambung di Kabupaten Aceh Jaya hingga tahun 2023 sebanyak 34.334 pelanggan. Diperkirakan tahun 2045, jumlah pelanggan akan meningkat sebesar 44.679 pelanggan dengan kebutuhan listrik mencapai 119.358.540 VA atau 119 MVA. Tabel 2.71 memperlihatkan proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Aceh Jaya sampai tahun 2045.

Tabel 2.71. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	99.717	105.969	122.535	141.292	163.843	189.458
Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung	34.334	35.153	37.535	39.916	42.297	44.679
Kebutuhan Listrik (VA)	62.821.710	66.760.470	77.197.050	89.013.960	103.221.090	119.358.540

Sumber: Hasil proyeksi, 2023

2.6.5.4. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan

Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan menetapkan lahan-lahan yang baru. Jumlah timbunan sampah yang dihasilkan dari setiap komponen aktivitas yang ada di Kabupaten Aceh Jaya didasarkan atas hasil analisis. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan besarnya timbulan sampah adalah 2 l/orang/hari. Atas dasar pertimbangan di atas maka jumlah timbulan sampah di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 284 m^3/hari. Dengan jumlah timbulan sampah sebesar 284 m3/hari dan tingkat pelayanan sebesar 40%.

Tabel 2.72. Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten Aceh Jaya Hingga 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (jiwa)	99.717	105.969	122.535	141.692	163.843	189.458

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Proyeksi Timbunan Sampah (ton)	17.525	18.385	19.739	21.079	22.419	23.773
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah Tepadu (TPST)	0	0	1	1	1	1

Sumber: Hasil proyeksi, 2023

2.6.5.5 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan

Berdasarkan kondisi terakhir tahun 2023, Kabupaten Aceh Jaya mempunyai fasilitas puskemas sebanyak 12 unit dan 28 unit puskesmas pembantu yang tersebar di setiap kecamatan. Merujuk SNI 03-1733-2004 bahwa puskemas pembantu memiliki standar penduduk pendukung sebanyak 30.000 orang per 1 unit. Sedangkan puskesmas memiliki jumlah penduduk pendukung sebesar 120.000 orang per 1 unit. Hasil proyeksi kebutuhan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Aceh Jaya yang akan mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.73. Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Penduduk	99.717	105.969	122.535	141.292	163.843	189.458
Proyeksi kebutuhan sarana puskesmas pembantu (unit)	28	-	-	-	-	-
Proyeksi kebutuhan sarana puskesmas (unit)	12	-	-	-	-	1

Sumber: Hasil proyeksi, 2023.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004, Kabupaten Aceh Jaya telah memiliki Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dengan kondisi berlebih sampai dengan tahun 2045. Untuk 20 tahun ke depan terkait kebutuhan infrastruktur Kesehatan diperlukan revitalisasi dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana yang sudah ada.

2.6.5.6. Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari segi pendidikan, maka dibutuhkan perencaanaan infrastruktur pendidikan guna menunjang sarana dan prasana untuk sekolah. Kebutuhan infrastruktur pendidikan disebagai berikut.

Tabel 2.74. Proyeksi Kebutuhan Infrastrukur Pendidikan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Penduduk	97.124	105.969	122.535	141.292	163.843	189.458
TK	90	90	90	90	90	90
SD/MI	98	98	98	103	103	103
SMP/MTs	38	38	38	40	40	40
SMA/MA/SMK	27	27	27	27	27	27

Sumber: Hasil proyeksi, 2023.

2.6.5.7 Proyeksi Kebutuhan Infrastuktur Jalan dan Jembatan

Infrastruktur jalan diperlukan untuk meningkatkan aksesbilitas serta konektivitas di Kabupaten Aceh Jaya. Infrastruktur jalan menjembatani kebutuhan lokal ke luar dan sebaliknya agar perekonomian Kabupaten Aceh Jaya terus tetap tumbuh.

Tabel 2.75. Proyeksi Kebutuhan Infrastrukur Jalan dan Jembatan

No	Penyelesaian Infrastruktur Jalan	Lokasi	Panjang Jalan (Km) / unit Jembatan	Sudah Hotmix	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan (Km)			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
I	**Pembangunan Jalan**							
1	Peningkatan Jalan Pasar Lamno - Mns.Weh Leupee	Kec. Jaya	1,10	0,03	1,07			
2	Lanjutan Peningkatan Jalan Lamtui - Jambo Masi	Kec. Jaya	1,50	0,82	0,68			
3	Rehabilitasi Jalan Simpang Polsek - Babah Dua	Kec. Jaya	3,20	1,00	2,20			
4	Peningkatan Jalan Darat - Glee Jong	Kec. Jaya	0,38	0,00	0,38			
5	Peningkatan Jalan Babah Ie - Krueng Tunong	Kec. Jaya	4,28	1,28		3,00		

No	Penyelesaian Infrastruktur Jalan	Lokasi	Panjang Jalan (Km) / unit Jembatan	Sudah Hotmix	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan (Km)			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
6	Peningkatan Jalan Gp. Babah Ie - Kuala	Kec. Jaya	1,78	0,12			1,66	
7	Peningkatan Jalan Ujong Sudheun - Rumieb	Kec. Jaya	1,57	0,00	1,57			
8	Lanjutan Pembangunan Jalan Alue Rayeuk - Mareu	Kec. Jaya	9,25	0,00	1,25	2,00	3,00	3,00
9	Pembangunan Jalan Sabet - Mareu	Kec. Jaya	4,75	0,00	0,50	1,25	1,50	1,50
10	Pembangunan Jalan Lhuet - Badih	Kec. Jaya	2,34	0,00	0,50	0,50	0,50	0,84
11	Pembangunan Jalan Gle Putoh - Panton Makmur	Kec. Jaya	3,65	0,00			1,80	1,85
12	Pembangunan Jalan Glee Tamak Pante Giri	Kec. Jaya	4,07				2,00	2,07
13	Peningkatan Jalan Mns. Beutong Gp. Lambaroh	Kec. Jaya	0,58					0,58
14	Peningkatan Jalan MAS Jaya	Kec. Jaya	0,77		0,77			
15	Pembangunan Jalan Meudang Ghon - Lhok Maneh	Kec. Indra Jaya	6,60	0,47	0,40		3,00	2,73
16	Rehabilitasi Jalan Babah Dua - Ujong Muloh	Kec. Indra Jaya	3,35	3,35	1,55			
17	Lanjutan Peningkatan Jalan Gampong Kuala	Kec. Indra Jaya	1,18	0,35	0,43	0,40		
18	Pembangunan Jalan Aki Glee Lue	Kec. Indra Jaya	0,75	0,00		0,35	0,40	
19	Pembangunan Jalan Bubum	Kec. Indra Jaya	1,06	0,00				1,06

No	Penyelesaian Infrastruktur Jalan	Lokasi	Panjang Jalan (Km) / unit Jembatan	Sudah Hotmix	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan (Km)			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
20	Peningkatan Jalan Sarah Babah Awe	Kec. Indra Jaya	0,52	0,00	0,52			
21	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lhok Kruet - Suak Beukah	Kec. Sampoiniet	20,64	18,44	10,40			
22	Peningkatan Jalan Ligan - CRU	Kec. Sampoiniet	5,94	0,70	2,97	2,97		
23	Peningkatan Jalan Ie Jeureungeh - Cot Punti - Krueng Ayon	Kec. Sampoiniet	7,55	1,00	1,50	1,50	1,50	2,05
24	Lanjutan Peningkatan Jalan Cot Langsat - Mata Ie - Paya Santeut	Kec. Sampoiniet	9,36	4,38	4,98			
25	Pembangunan Jalan Koramil Sampoiniet - Blang Mon Lueng	Kec. Sampoiniet	3,97	0,00	0,15	1,20	1,25	1,37
26	Pembangunan Jalan Ranto Sabon - Apa Sapek	Kec. Sampoiniet	2,38	0,00			1,20	1,18
27	Peningkatan Jalan Lingkar Ligan - Seumantok	Kec. Sampoiniet	1,32	0,00		1,32		
28	Pembangunan Jalan Ujong Kot - Pante Bungoeng	Kec. Sampoiniet	3,18	0,00			1,55	1,63
29	Peningkatan Jalan USAID - Munasah Kulam	Kec. Sampoiniet	0,37	0,00	0,37			
30	Lanjutan Peningkatan Jalan Meunasah Kulam	Kec. Sampoiniet	1,10	0,76	0,34			
31	Lanjutan Peningkatan Jalan Gampong Baro L - Krueng Ayon	Kec. Darul Hikmah	8,17	0,60	1,57	2,00	2,00	2,00
32	Rehabilitasi Jalan Suak Beukah - Masen - Teupin Asan	Kec. Darul Hikmah	5,29	4,46	2,20	0,53		

No	Penyelesaian Infrastruktur Jalan	Lokasi	Panjang Jalan (Km) / unit Jembatan	Sudah Hotmix	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan (Km)			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
33	Pembangunan Jalan Rentang - Paya Laot	Kec. Darul Hikmah	5,63	0,89	1,00	1,00	1,21	1,53
34	Pembangunan Jalan Kantor Camat Darul Hikmah	Kec. Darul Hikmah	0,47	0,00	0,47			
35	Peningkatan Jalan Pajar - Arongan	Kec. Darul Hikmah	2,14	0,00			2,14	
36	Peningkatan Jalan Rentang	Kec. Darul Hikmah	0,89	0,27		0,62	,	
37	Pembangunan Jalan Panton Krueng	Kec. Darul Hikmah	1,50	0,00			1,50	
38	Pembangunan Jalan Drien Surga - Sayeung	Kec. Darul Hikmah	1,20	0,00			1,20	
39	Pembangunan Jalan Gunong Cut - Sayeung	Kec. Darul Hikmah	1,29	0,00			1,29	
40	Pembangunan Jalan Alue Gajah	Kec. Darul Hikmah	1,20	0,00			1,20	
41	Peningkatan Jalan Pajar	Kec. Darul Hikmah	1,06	0,00		1,06		
42	Pembangunan Jalan Rentang - Paya Laot	Kec. Darul Hikmah	5,63	0,89	1,20	1,20	1,20	1,14
43	Pembangunan Jalan Sapek - Gp. Baroh - Keunareuh	Kec. Setia Bakti	8,71	1,30	1,20	2,00	2,10	2,11
44	Pembangunan Jalan Gunong Meunasah - Paya Laot - Cot Pange	Kec. Setia Bakti	13,66	1,30	2,00	3,40	3,46	3,50
45	Pembangunan Jalan Keunareuh - Boswa	Kec. Setia Bakti	8,33			2,78	2,78	2,77
46	Peningkatan Jalan Wisata Ajay GR	Kec. Setia Bakti	1,28		1,28			

No	Penyelesaian Infrastruktur Jalan	Lokasi	Panjang Jalan (Km) / unit Jembatan	Sudah Hotmix	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan (Km)			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
47	Lanjutan Pembangunan Jalan Sayeung - Lhok Bot	Kec. Setia Bakti	5,35	0,60	1,00	1,25	1,25	1,25
48	Lanjutan Pembangunan Jalan Lhok Bot - Alue Bieng	Kec. Setia Bakti	2,69	0,80	0,89	0,50	0,50	
49	Peningkatan Jalan Gampoeng Baroh - Pante kuyun	Kec. Setia Bakti	1,18	0,00	0,50	0,68		
50	Peningkatan Jalan Sapek - Gunong Meunasah	Kec. Setia Bakti	3,81	0,00		1,30	1,30	1,21
51	Pembangunan Jalan Lhok Meugit Duson Rambong	Kec. Setia Bakti	3,26	0,00			1,60	1,66
52	Pembangunan Jalan Keutapang - Boswa	Kec. Krueng Sabee	12,96	0,60	2,00	3,40	3,46	3,50
53	Lanjutan Peningkatan Jalan Kabong - Batee Meutudong	Kec. Krueng Sabee	6,00	2,20	3,80			
54	Peningkatan Jalan Pang Ulee Harkat I	Kec. Krueng Sabee	1,67	0,00	1,67			
55	Peningkatan Jalan Lingkar Gampong Panggong	Kec. Krueng Sabee	1,34		1,34			
56	Peningkatan Jalan Mahkota Timur	Kec. Krueng Sabee	0,90		0,90			
57	Pembangunan Jalan Geuni - Boswa	Kec. Krueng Sabee	3,35				1,70	1,65

No	Penyelesaian Infrastruktur Jalan	Lokasi	Panjang Jalan (Km) / unit Jembatan	Sudah Hotmix	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan (Km)			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
58	Lanjutan Pembangunan Jalan Pinto Angen	Kec. Krueng Sabee	2,19	0,98	0,60	0,61		
59	Peningkatan Jalan Teupi Sungai Ranto Panyang	Kec. Krueng Sabee	1,32			1,32		
60	Peningkatan Jalan Gunong Peutek	Kec. Krueng Sabee	2,32	0,00		1,15	1,17	
61	Peningkatan Jalan Terminal Calang	Kec. Krueng Sabee	0,70	0,20	0,50			
62	Peningkatan Jalan Lingkar Gunong Balam	Kec. Krueng Sabee	2,00	0,00			1,00	1,00
63	Peningkatan Jalan Panton Makmur - Simpang Boswa	Kec. Krueng Sabee	4,72	1,40	0,50	0,82	1,00	1,00
64	Peningkatan Jalan PPI	Kec. Krueng Sabee	0,64	0,00		0,64		
65	Peningkatan Jalan Teupi Sungai Ranto Panyang	Kec. Krueng Sabee	1,32	0,00			0,66	0,66
66	Peningkatan Jalan Pulo Ie - Alue Tho	Kec. Panga	6,45	3,60	2,85			
67	Peningkatan Jalan Arun Patah - Alue Piet - Kuta Tuha	Kec. Panga	5,45	1,30	1,00	1,00	1,00	1,15
68	Peningkatan Jalan Keude Panga - Kulam Raya	Kec. Panga	4,16	2,00	1,00	1,16		
69	Pembangunan Jalan Wisata Konservasi Penyu	Kec. Panga	1,90	0,00	0,50	0,50	0,50	0,40

No	Penyelesaian Infrastruktur Jalan	Lokasi	Panjang Jalan (Km) / unit Jembatan	Sudah Hotmix	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan (Km)			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
70	Peningkatan Jalan Simpang Kuta Tuha - Glee Putoh	Kec. Panga	7,20	6,20	1,00			
71	Peningkatan Jalan Tuwi Kareung - Tuwi Empeuk	Kec. Panga	5,52	0,00		1,84	1,84	1,84
72	Peningkatan Jalan Gampong Harapan - Alue Raya	Kec. Panga	1,95	0,00		1,00	0,95	
73	Peningkatan Jalan Gunong Mantok - Gunong Meulinteung	Kec. Panga	1,00	0,00			0,50	0,50
74	Peningkatan Jalan Tuwi Empeuk - Gunong Meulinteung	Kec. Panga	1,95	0,00			1,00	0,95
75	Peningkatan Jalan Gunong Buloh - Gunong Meulinteung	Kec. Panga	1,80	0,00		0,60	0,60	0,60
76	Peningkatan Jalan TMMD Alue Pande - Batee Meutudong	Kec. Panga	4,65	0,00			2,30	2,35
77	Peningkatan Jalan Cot Singgreng - Kapal Nisero	Kec. Panga	1,80	1,30	0,50			
78	Peningkatan Jalan Keude Panga - Kulam Raya	Kec. Panga	4,16	2,00	0,76	0,80	0,60	
79	Peningkatan Jalan Panton Kabu - Tuwie Kaye	Kec. Panga	0,77					0,77
80	Pembngunan Jalan Pasie Timon - Bintah	Kec. Teunom	15,80	0,00	0,30	0,50	7,50	7,50

No	Penyelesaian Infrastruktur Jalan	Lokasi	Panjang Jalan (Km) / unit Jembatan	Sudah Hotmix	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan (Km)			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
81	Pembangunan Jalan Tanoh Manyang - Seumira	Kec. Teunom	8,74	0,00	2,00	2,20	2,24	2,30
82	Pembangunan Jalan Kubu - Gunong Buloh	Kec. Teunom	9,60	0,00	0,30	0,30	4,50	4,50
83	Pembangunan Jalan Lampoh Kawa	Kec. Teunom	7,20	0,00	0,20	2,30	2,30	2,40
84	Peningkatan Jalan Padang Kleng - Rambong Payong	Kec. Teunom	1,47	0,00	1,47			
85	Peningkatan Jalan Gampong Baro - Pasi Pawang	Kec. Teunom	2,56	0,00	1,00	1,00	0,56	
86	Peningkatan Jalan Lueng Gayo	Kec. Teunom	1,68	0,00	0,68	0,50	0,50	
87	Peningkatan Jalan Wisata Danau Laot Ni	Kec. Teunom	1,00	0,00	0,50	0,50		
88	Peningkatan Jalan Pasie Rambong	Kec. Teunom	1,85	0,00	1,85			
89	Peningkatan Jalan Cot Trieng	Kec. Teunom	1,33	0,00	0,70	0,63		
90	Rehabilitasi Jalan Lhok Guci - Seumira	Kec. Pasie Raya	9,15	9,15	5,35			
91	Pembangunan Jalan Alue Jang - Sarah Raya - Bintah	Kec. Pasie Raya	5,93	0,00		1,93	2,00	2,00
92	Lanjutan Pembangunan Jalan Tuwie Priya - Bintah	Kec. Pasie Raya	2,50	0,80	0,50	1,00	1,00	

No	Penyelesaian Infrastruktur Jalan	Lokasi	Panjang Jalan (Km) / unit Jembatan	Sudah Hotmix	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan (Km)			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
93	Pembangunan Jalan Alue Jang - Buket Keumuneng	Kec. Pasie Raya	5,40	0,00	0,40	1,50	1,50	2,00
94	Pembangunan Jalan Sarah Raya - Wisata Alue Minyek Sapi	Kec. Pasie Raya	2,85	0,00	0,35	0,50	1,00	1,00
95	Peningkatan Jalan Alue Jang - Ceuraceu	Kec. Pasie Raya	1,15	0,00	0,70	0,45		
96	Peningkatan Jalan Alue Jang	Kec. Pasie Raya	0,43	0,00	0,43			
97	Peningkatan Jalan Pasie Teubee - SMK 1 Pertanian	Kec. Pasie Raya	1,50	0,00	0,50	0,50	0,50	
98	Peningkatan Jalan Ceuraceu - MIN 12 Aceh Jaya	Kec. Pasie Raya	0,90	0,00	0,30	0,30	0,30	
99	Peningkatan Jalan Sekolah Alue Krueng	Kec. Pasie Raya	0,56	0,00		0,56		
II	**Pembangunan Jembatan**							
1	Jalan Sabet - Mareu	Kec. Jaya	2 unit	Pembangunan Jembatan	1 unit	1 unit		
2	Jalan Ujong Sudheun - Rumieb	Kec. Jaya	1 unit	Pergantian Jembatan			1 unit	
3	Jalan Teumareum - kuala	Kec. Indra Jaya	1 unit	Pergantian Jembatan	1 unit			
4	Jalan Meudang Ghon - Lhok Maneh	Kec. Indra Jaya	2 unit	Pembangunan Jembatan			1 unit	1 unit
5	Jalan Jbt. Gantung Teumareum	Kec. Indra Jaya	1 unit	Rehabilitasi Jembatan	1 unit			
6	Jalan Kareung Ateuh-Keude Unga	Kec. Indra Jaya	1 unit	Pembangunan Jembatan	1 unit			
7	Jalan Ranto Sabon - Apa Sapek	Kec. Sampoiniet	1 unit	Pembangunan Jembatan		1 unit		

No	Penyelesaian Infrastruktur Jalan	Lokasi	Panjang Jalan (Km) / unit Jembatan	Sudah Hotmix	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan (Km)			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
8	Jalan Cot Langsat - Mata Ie - Paya Santeut	Kec. Sampoiniet	3 unit	Pembangunan/ Pergantian Jembatan	3 unit			
9	Jalan Sapek - Gp. Baroh - Keunareuh	Kec. Setia Bakti	2 unit	Pembangunan/ Pergantian Jembatan	1 unit	1 unit		
10	Jalan Pulo Ie - Alue Tho	Kec. Krueng Sabee	1 unit	Pembangunan Jembatan	1 unit			
11	Jalan Padang Kleng - Seumira	Kec. Teunom	2 unit	Pembangunan Jembatan	2 unit			
12	Jalan Padang Kleng - Rambong Payong	Kec. Teunom	1 unit	Pembangunan Jembatan	1 unit			
13	Jalan Pasie Timon - Bintah	Kec. Teunom	2 unit	Pembangunan Jembatan			1 unit	1 unit
14	Jalan Tuwie Priya - Bintah	Kec. Pasie Raya	1 unit	Pergantian Jembatan	1 unit			
15	Jalan Lhok guci - Alue Jang	Kec. Pasie Raya	1 unit	Pergantian Jembatan	1 unit			

2.7. KLHS RPJPK Aceh Jaya

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan perundangan ini diketahui bahwa diperlukan adanya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisisi yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah. Penyusunan KLHS menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan KLHS juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Muatan KLHS RPJPD Kabupaten Aceh Jaya berisi tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung, dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Kajian tersebut menggambarkan kondisi aktual terkait lingkungan hidup yang menjadi acuan dan pedoman dalam perumusan arahan kebijakan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045.

Adapun kondisi aktual dari muatan KLHS RPJPD Kabupaten Aceh Jaya diuraikan sebagai berikut:

a. Mengacu pada data kondisi 2023, kemampuan Kabupaten Aceh Jaya dalam memberikan layanan terhadap jasa lingkungan penyedia air termasuk dalam kategori yang rendah, yang mencapai luasan 263.568,74 Ha (68,07%) dari luas keseluruhan Kabupaten Aceh Jaya 387.223,12 Ha. Adapun gabungan kategori sangat tinggi dan tinggi tidak lebih dari luasan 61.390,34 Ha (15,86%). Dari luasan jasa penyedia air yang rendah tersebut, paling dominan terdapat di Kecamatan Krueng Sabe (52.797,19 Ha). Kemudian disusul Kecamatan Jaya (39.124,88 Ha), Sampoiniet (34.222,26 Ha), Setia Bakti (33.306,29 ha), Panga (31.831,57 ha), dan Darul Hikmah (31.795,49 Ha).

b. Terkait dengan layanan jasa lingkungan penyedia pangan, Kabupaten Aceh Jaya termasuk memiliki kemampuan tergolong yang sangat rendah. Hampir 65,59% atau setara 253.972,17 Ha luasan lahan dalam kategori sangat rendah dan mendominasi kategori lainnya dari luas keseluruhan Kabupaten Aceh Jaya. Kemampuan yang rendah tersebut juga tergambar pada gabungan luasan kategori sangat tinggi dan kategori tinggi yang kecil, hanya 56.121.00 Ha (14,50%) dari luas keseluruhan Kabupaten Aceh Jaya 387.223,12 Ha. Wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang didominasi kawasan pegunungan dan perbukitan dengan tutupan ekoregionnya berupa pegunungan lipatan menjadi penyebab rendahnya luasan jasa penyediaan pangan kategori sangat tinggi dan kategori tinggi. Sebaran luasan layanan jasa penyedia pangan yang rendah terdapat di Kecamatan Indra Jaya, Darul Hikmah, Jaya dan Krueng Sabee. Adapun Kecamatan Teunom termasuk yang memiliki persentase luasan tertinggi dari gabungan kategori sangat tinggi dan tinggi yang mencapai 8.911,92 Ha (14,5%) dari luas wilayah Kecamatan Teunom 23.149,31 Ha, meskipun terlihat sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan luas wilayah Kabupaten Aceh Jaya (387.223,12 Ha).

c. Potensi Kabupaten Aceh Jaya memiliki jasa lingkungan penyedia serat tergolong besar. Luasan lahan jasa lingkungan penyedia serat berada pada kategori sangat tinggi yang mencapai 258.326,64 Ha atau hampir 66,71% dari keseluruhan luas Kabupaten Aceh Jaya. Bentuk geografi wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang didominasi kawasan pegunungan dengan tutupan lahan hutan yang dominan memberikan andil yang cukup besar terhadap layanan jasa ekosistem penyedia serat. Selain itu, tutupan hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi dan tutupan hutan lahan tinggi primer kerapatan sedang, serta tutupan lahan hutan mangrove sekunder kerapatan rendah juga memberikan nilai dominan pada kategori sangat tinggi. Bentuk rupa permukaan tanah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya juga didominasi oleh kawasan pegunungan. Dengan demikian, semua kecamatan memiliki kemampuan yang tinggi terhadap jasa lingkungan penyedia serat. Hanya kecamatan Teunom yang memiliki kemampuan rendah, yaitu sebesar 6.475,74 Ha (27,97%) pada kategori sangat tinggi, serta paling kurang 5.872,74 Ha (25,36%) dan 7.284,04 Ha (31,47%) pada kategori

sedang. Sebagian besar wilayah Kecamatan Teunom berada pada kawasan pesisir yang berupa dataran rendah, rawa dan gambut sehingga berdampak pada rendahnya luasan jasa lingkungan penyedia serat.

d. Kabupaten Aceh Jaya memiliki jasa lingkungan penyedia sumber daya genetik yang masih melimpah, didominasi oleh kategori sangat tinggi dan kategori tinggi, gabungan kedua kategori tersebut mencapai luasan 289.841,47 Ha (74,85%) dari luas keseluruhan Kabupaten Aceh Jaya. Kondisi tersebut didukung oleh sebagian besar permukaan tanah Kabupaten Aceh Jaya berupa kawasan pegunungan dengan kawasan hutan yang secara umum masih baik.

e. Sebagian besar Kabupaten Aceh Jaya masih memiliki tutupan hutan yang relatif masih baik dan memberikan kontribusi besar terhadap baiknya layanan jasa ekosistem pengaturan iklim, yang dominan pada kategori sangat tinggi dan kategori tinggi. Gabungan kedua kategori tersebut mencapai luasan 326.979,39 Ha (84,44%) dari luas keseluruhan Kabupaten Aceh Jaya. Data tutupan lahan juga mendukung kontribusi besar kawasan hutan terhadap jasa ekosistem pengaturan iklim, dimana tutupan hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi, tutupan hutan lahan tinggi primer kerapatan sedang dan tutupan lahan hutan mangrove sekunder kerapatan rendah juga memberikan dukungan yang dominan pada kategori sangat tinggi. Kawasan hutan merupakan kawasan penghasil oksigen utama yang menyebabkan udara di pegunungan dan perbukitan lebih sejuk dan relatif bersih.

f. Terkait dengan jasa pengaturan tata air dan banjir, Kabupaten Aceh Jaya termasuk dalam kategori sedang yang luasnya mencapai 253.159,47 Ha (65,38%). Implikasinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Jaya rentan bencana banjir, kecuali Kecamatan Pasie Raya. Kecamatan Pasie Raya tidak memiliki pantai/laut dan terletak pada kawasan pegunungan yang merupakan bagian atas kecamatan Teunom. Adapun Teunom termasuk rawan banjir mengingat pusat pemukiman penduduk Teunom pada umumnya berada pada bagian bawah dan muara sungai.

g. Kabupaten Aceh Jaya masih memiliki Jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana sangat baik, yang didominasi dan terdistribusi merata dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, gabungan kedua kategori tersebut memberikan luasan mencapai 322.021.06 Ha (83,16%) dari luas keseluruhan Kabupaten Aceh Jaya. Wilayah Kabupaten Aceh Jaya didominasi oleh tutupan ekoregion pegunungan dan perbukitan serta sebagian besarnya juga masih berupa tutupan hutan dengan vegetasi tinggi, sehingga mampu mencegah terjadinya bencana tanah longsor dan erosi. Disisi lainnya, upaya untuk menghambat laju deforestasi harus terus dilakukan. Tidak hanya itu, kegiatan illegal logging dan pembukaan lahan baru pada kawasan lindung harus terus diawasi, dicegah, dan ditindak dengan tanpa pengecualian.

h. Sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Jaya merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan, dan sebagian besar juga masih berupa hutan dengan tutupan vegetasi

yang masih lebat, alami, dan belum banyak diintervensi oleh kegiatan manusia, sehingga air permukaannya dikategorikan relatif bersih sebagai sumber air. Secara keseluruhan, Kabupaten Aceh Jaya memiliki jasa lingkungan pengaturan pemurnian air yang tinggi, merata, dan dominan dalam kategori tinggi ke semua wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Teunom yang relatif rendah. Kecamatan Teunom berada pada kawasan perbukitan lipatan, lahan gambut, dataran rendah, dan sebagian tutupan lahannya telah diintervensi oleh kegiatan manusia dan beralih fungsi menjadi areal perkebunan, kebun campuran atau ladang/tegalan hortikultura.

i. Kabupaten Aceh Jaya memiliki kemampuan yang rendah terhadap layanan jasa pengolahan dan penguraian limbah, dengan luasan mencapai 209.123,23 Ha (54,01%). Kondisi yang sama juga diberikan pada data tutupan lahan, dimana tutupan hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi, tutupan hutan lahan tinggi primer kerapatan sedang dan tutupan lahan hutan mangrove sekunder kerapatan rendah juga dominan pada kategori rendah. Kondisi tersebut juga merata pada semua kecamatan, kecuali Kecamatan Teunom yang memiliki persentase luas kategori sangat tinggi mencapai 35,07% dari luas keseluruhan wilayah kecamatan Teunom.

j. Terkait dengan Jasa Lingkungan Fungsi Pendukung (*Supporting*) meliputi pendukung keanekaragaman hayati (Perlindungan Plasma Nutfah), Jasa Lingkungan Fungsi Budaya (*Cultural*), dan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup, termasuk dalam kategori yang bervariasi. Kawasan Aceh Jaya yang didominasi pegunungan dan perbukitan dengan tutupan hutan yang rapat berkontribusi dengan baik terhadap jasa ekosistem pendukung keanekaragaman hayati. Kontribusi tersebut masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, dimana luasan gabungan kedua kategori tersebut mencapai 299.854,14 Ha (77,44%) dari luas keseluruhan Kabupaten Aceh Jaya. Disisi lainnya, Kabupaten Aceh Jaya memiliki jasa lingkungan fungsi budaya tempat tinggal dan ruang hidup yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan serius dalam mengelola ruang hidup yang sangat kecil tersebut untuk mendukung semua peruntukan kegiatan masyarakat masa kini dan juga masyarakat masa depan.

Sementara itu, dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya hanya mampu mengimplimentasikan 134 indikator dari 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Jaya (kondisi tahun 2022). Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Aceh Jaya, menunjukkan bahwa dari 134 indikator TPB tersebut, terdapat sebanyak 39 indikator TPB (29%) yang mencapai target, 33 indikator TPB (25%) belum mencapai target, tidak ada indikator TPB (0 %) yang belum dilaksanakan, dan 62 indikator TPB (46 %) tidak/belum ada data. Capaian indikator TPB di Kabupaten Aceh Jaya dilaksanakan oleh 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 3 organisasi pemerintah vertikal (Kepolisian, BPKK dan BPS). Dari 17 OPD dan 3 organisasi pemerintah vertikal (Kepolisian, BPKK dan BPS) tersebut, diketahui bahwa Dinas Kesehatan yang memiliki indikator paling banyak, yaitu 33 indikator (24.63 %). Kemudian disusul Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

(DPMPKB) sebanyak 17 indikator (12.69%), dan Dinas Pendidikan (Disdik) sebanyak 13 indikator (9.70%).

2.8. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Mengacu pada RTRW Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Aceh Jaya diarahkan sesuai dengan kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis kabupaten.

2.8.1. Perwujudan Struktur Ruang

2.8.1.1. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman

Sistem pusat permukiman meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat lain yang terdiri dari Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pengembangan PKL meliputi wilayah perkotaan Calang yang berada di Kecamatan Krueng Sabee.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. PPK meliputi PPK Teunom yang berada di Kecamatan Teunom, dan PPK Lamno berada di Kecamatan Jaya. Sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar gampong. PPL meliputi PPL Pasie Raya yang berada di Kecamatan Pasie Raya, PPL Panga di Kecamatan Panga, PPL Setia Bakti di Kecamatan Setia Bakti, PPL Darul Hikmah di Kecamatan Darul Hikmah, PPL Samponiet di Kecamatan Samponiet, dan PPL Indra Jaya di Kecamatan Indra Jaya.

2.8.1.2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirearki memiliki hubungan fungsional. Sistem jaringan prasarana di Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari:

1) Sistem jaringan transportasi meliputi sistem jaringan jalan, sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, dan sistem jaringan transportasi laut
2) Sistem jaringan energi meliputi infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung, dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung
3) Sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap, dan jaringan bergerak seluler
4) Sistem jaringan sumber daya air meliputi sistem jaringan irigasi, sistem jaringan pengendalian banjir, bangunan pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air
5) Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi SPAM, SPAL, B3, sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, dan sistem drainase

2.8.1.2.1. Sistem Jaringan Transportasi

A. Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan terdiri dari:

1) Jalan umum, merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan umum meliputi:
   a. Jalan arteri primer, meliputi Bts. Kota Banda Aceh – Bts. Aceh Jaya, Bts. Aceh Besar – Calang, Calang – Bts. Aceh Jaya/Aceh Barat, Jalan Akses PP Calang, dan Alih Trase Ruas Bts. Aceh besar - Calang
   b. Jalan kolektor primer, tersebar di seluruh kecamatan
   c. Jalan lokal primer, tersebar di seluruh kecamatan
   d. Jalan lingkungan, tersebar di seluruh kecamatan
2) Jalan tol, berupa ruas jalan tol Banda Aceh – Singkil
3) Terminal penumpang, meliputi:
   a. Terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Kruneg Sabee
   b. Terminal penumpang Tipe C di Kecamatan Jaya dan Kecamatan Teunom
4) Terminal barang, berada di Kecamatan Krueng Sabee
5) Jembatan, tersebar di seluruh kecamatan

B. Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa pelabuhan penyebarangan yang terdiri dari:

1) Pelabuhan penyeberangan kelas II yaitu Pelabuhan Calang di Kecamatan Setia Bakti
2) Pelabuhan penyeberangan kelas III, meliputi:
   a. Pelabuhan Ujong Seudheun berada di Kecamatan Jaya
   b. Pelabuhan Patek berada di Kecamatan Darul Hikmah
   c. Pelabuhan Rigaih berada di Kecamatan Setia Bakti

C. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut yaitu pelabuhan laut yang terdiri dari:

1) Pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Pengumpul Calang di Kecamatan Krueng Sabee
2) Pelabuhan pengumpan, berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal yaitu Pelabuhan Lhok Kruet di Kecamatan Samponiet
3) Pelabuhan perikanan, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang meliputi:
   a. PPI Kuala Daya berada di Kecamatan Jaya
   b. PPI Lambeusoi berada di Kecamatan Indra Jaya
   c. PPI Rigaih berada di Kecamatan Setia Bakti
   d. PPI Calang berada di Kecamatan Krueng Sabee
   e. PPI Alue Ambang berada di Kecamatan Teunom.

2.8.1.2.2. Sistem Jaringan Energi

A. Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung

Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung yang terdiri dari:

1) PLTA, berupa PLTA Krueng Teunom di Kecamatan Pasie Raya
2) PLTD, meliputi:
   a. PLTD Lamno berada di Kecamatan Jaya
   b. PLTD Calang berada di Kecamatan Krueng Sabee
   c. PLTD Teunom berada di Kecamatan Teunom

B. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung

Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang terdiri dari:

1) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yaitu SUTT Calang - Meulaboh dan Lampisang - Calang tersebar di seluruh Kecamatan
2) Jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
   a. SUTM, tersebar di seluruh kecamatan
   b. SUTR, tersebar dis eluruh kecamatan
3) Gardu listrik, yaitu Gardu Induk berada di Kecamatan Krueng Sabee

2.8.1.2.3. Sistem Jaringan Telekomunikasi

A. Jaringan Tetap

Jaringan tetap merupakan satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi yang tersebar di seluruh kecamatan

B. Jaringan Bergerak Seluler

Jaringan bergerak seluler merupakan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi, berupa menara BTS yang tersebar di seluruh kecamatan

2.8.1.2.4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

A. Sistem Jaringan Irigasi

Sistem jaringan irigasi terdiri dari:

1) Jaringan irigasi primer, berada di Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Samponiet, Kecamatan Indra Jaya, dan Kecamatan Jaya
2) Jaringan irigasi sekunder, tersebar di seluruh kecamatan
3) Jaringan irigasi tersier, berada di Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Indra Jaya, dan Kecamatan Jaya

B. Sistem Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem jaringan pengendalian banjir berupa jaringan pengendalian banjir yang berada di Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Teunom, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan

Setia Bakti, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Samponiet, Kecamatan Indra Jaya, dan Kecamatan Jaya

C. Bangunan Pengendalian Banjir

Bangunan pengendalian banjir berada di Kecamatan Teunom, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Samponiet, Kecamatan Indra Jaya, dan Kecamatan Jaya

D. Bangunan Sumber Daya Air

Bangunan sumber daya air tersebar di seluruh kecamatan

2.8.1.2.5. Sistem Jaringan Prasarana lainnya

A. SPAM

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa jaringan perpipaan yang terdiri dari:

1) Unit air baku, meliputi:
   a. SPAM IKK Teunom berada di Kecamatan Pasie Raya
   b. SPAM IKK Panga berada di Kecamatan Panga
   c. SPAM IKK Darul Hikmah berada di Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Sampoi Niet
   d. SPAM IKK Krueng Sabee berada di Kecamatan Krueng Sabee
   e. SPAM IKK Jaya berada di Kecamatan Indra Jaya dan Kecamatan Jaya
2) Unit produksi, meliputi:
   a. IPA IKK Teunom berada di Kecamatan Pasie Raya
   b. IPA IKK Darul Hikmah berada di Kecamatan Darul Hikmah
   c. IPA IKK Krueng Sabee berada di Kecamatan Krueng Sabee
   d. IPA IKK Panga berada di Kecamatan Panga
   e. IPA IKK Jaya berada di Kecamatan Jaya
3) Unit distribusi, berada di Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Samponiet, Kecamatan Indra Jaya, dan Kecamatan Jaya

B. SPAL

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dan domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik dan domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah. SPAL terdiri dari:

1) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
   a. IPLT Seumira berada di Kecamatan Teunom
   b. IPLT Keutapang berada di Kecamatan Krueng Sabee
   c. IPLT Babah Ie berada di Kecamatan Jaya
2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, berada di Kecamatan Setia Bakti

C. Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)

Sistem pengelolaan limbah B3 berada di Kecamatan Krueng Sabee

D. Sistem Jaringan Persampahan

Sistem jaringan perasmpahan terdiri dari:

1) TPS, tersebar di seluruh kecamatan
2) TPS3R, berada di Kecamatan Teunom
3) TPA, meliputi:
   a. TPA Keutapang berada di Kecamatan Krueng Sabee
   b. TPA Seumira berada di Kecamatan Teunom
   c. TPA Crak Mong berada di Kecamatan Sampoi Niet
   d. TPA Babah Ie berada di Kecamatan Jaya

E. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Sistem jaringan evakuasi bencana terdiri dari:

1) Sistem jaringan evakuasi bencana banjir
2) Sistem jaringan evakuasi bencana longsor
3) Sistem jaringan evakuasi bencana gempa
4) Sistem jaringan evakuasi bencana tsunami

Sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:

1) Jalur evakuasi bencana, tersebar di seluruh kecamatan
2) Tempat evakuasi bencana, tersebar di seluruh kecamatan

F. Sistem Drainase

Sistem drainase terdiri dari:

1) Jaringan drainase primer, tersebar di seluruh kecamatan
2) Jaringan drainase sekunder, tersebar di seluruh kecamatn
3) Jaringan drainse tersier, tersebar di seluruh kecamatan

2.8.2. Perwujudan Pola Ruang

2.8.2.1. Perwujudan Kawasan Lindung

Kawasan Lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

A. Badan Air

Badan air merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, telaga dan sebagiannya dengan luas kurang lebih 2.521 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

B. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu berupa Kawasan Hutan Lindung. 96. Kawasan Hutan Lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan

untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Aceh Jaya kurang lebih seluas 167.676 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

C. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat merupakan upaya bagi perlindungan badan sungai, pantai, mata air maupun danau atau waduk. Kabupaten Aceh Jaya mempunyai kawasan perlindungan setempat kurang lebih seluas 5.773 ha yang tersebar dis eluruh kecamatan.

D. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi terdiri dari:

1) Kawasan suaka alam, berupa Cagar Alam dengan luas kurang lebih 34 ha di Kecamatan Indra Jaya
2) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil, meliputi:
   a. Suaka pesisir, dengan luas kurang lebih 73 ha berada di Kecamatan Panga dan Kecamatan Teunom
   b. Taman pulau kecil, dengan luas kurang lebih 604 ha berada di Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamaatn Darul Hikmah, Kecamatan Samponiet, Kecamatan Indra Jaya, dan Kecamatan Jaya

E. Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove menyebar di sepanjang pesisir pantai barat Kabupaten Aceh Jaya dengan luas kurang lebih 670 ha berada di Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Samponiet, Kecamatan Indra Jaya, dan Kecamatan Jaya

F. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya dengan luas kurang lebih 30 ha yaitu Makam Po Teumeureuhom di Kecamatan Jaya.

2.8.2.2. Perwujudan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

A. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan huran produksi terdiri dari:

1) Hutan produksi terbatas, dengan luas kurang lebih 70.079 ha yang tersebar di seluruh kecamatan
2) Hutan produksi tetap, dengan luas kurang lebih 14.084 ha berada di Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabeee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Indra Jaya, dan Kecamatan Jaya.

B. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian terdiri dari:

1) Kawasan Tanaman Pangan, dengan luas kurang lebih 20.240 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan Tanaman Pangan ini juga ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 9.612 ha tersebar di seluruh kecamatan
2) Kawasan Hortikultura, dengan luas kurang lebih 26.805 ha tersebar di seluruh kecamatan.
3) Kawasan Perkebunan, dengan luas kurang lebih 64.872 ha tersebar di seluruh kecamatan
4) Kawasan Peternakan, dengan luas kurang lebih 1.472 ha tersebar dis eluruh kecamatan

C. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan berupa kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 1.283 ha berada di kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Samponiet, Kecamatan Indra Jaya, dan Kecamatan Jaya

D. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 782 ha berada di Kecamatan Teunom, Kecamatan Krueng Sabee, dan Kecamatan Setia Bakti

E. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata dengan luas kurang lebih 533 ha berada di Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Samponiet, dan Kecamatan Jaya

F. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri dari:

1) Kawasan Permukiman Perkotaan, dengan luas kurang lebih 3.494 ha tersebar di seluruh kecamatan
2) Kawasan Permukiman Perdesaan, dengan luas kurang lebih 6.145 ha tersebar di seluruh kecamatan

G. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 25 ha berada di Kecamatan Krueng Sabee

H. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 26 ha, terdiri dari:

1) Komando Distrik Militer 0114/Aceh Jaya berada di Kecamatan Krueng Sabee
2) Kompi Senapan D Yonif 116/GS berada di Kecamatan Teunom
3) Kompi Senapan E Yonif 116/GS berada di Kecamatan Setia Bakti

2.8.3. Perwujudan Kawasan Strategis

Pada wilayah Kabupaten Aceh Jaya terdapat kawasan strategis nasional dan kawasan strategis Provinsi Aceh**.** Untuk Kawasan Strategis Nasional yang berada di Kabupaten Aceh Jaya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan, yang kawasan perbatasan negara, termasuk pulau-pulau kecil terluar dan kawasan latihan militer. Kawasan strategis ini terdapat di Pulo Raya sebagai kawasan perbatasan negara laut lepas yang berada di Kecamatan Sampoiniet.

Sementara itu, dalam konteks Kawasan Strategis Provinsi Aceh yang ada di Kabupaten Aceh Jaya mencakup Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonom**i**, yaitu Kawasan Pusat Perdagangan dan Distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) tersebar di 6 (enam) zona, Kabupaten Aceh Jaya pada kawasan strategis ini termasuk dalam wilayah pengembangan Zona Barat Provinsi Aceh meliputi Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Barat.

Dalam RTRW Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044, telah ditetapkan kawasan-kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan antarwilayah sesuai karakteristik dan potensi wilayah. Kawasan strategis tersebut mencakup **Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, Kawasan Strategis Sudut Sosial Budaya, dan Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.** Adapun kawasan strategis tersebut meliputi**:**

1. **Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi:**
    a. Kawasan Perkotaaan Calang di Kecamatan Krueng Sabee dan Setia Bakti.
    b. Kawasan Perkotaan Lamno di Kecamatan Indra Jaya dan Kecamatan Jaya.
    c. Kawasan Perkotaan Teunom di Kecamatan Teunom.
    d. Kawasan Ekonomi Khusus (Industri dan Pelabuhan) di Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Setia Bakti.
    e. Kawasan Ekonomi terpadu Teluk Rigaih di Kecamatan Setia Bakti.
    f. Kawasan Pariwisata Lhok Geulumpang Kecamatan Setia Bakti.
    g. Kawasan Minapolitan yang berada di Kecamatan Krueng Sabe.
    h. Kawasan Agroforestri yang berada di Kecamatan Sampoiniet.
    i. Kawasan Pelabuhan Lhok Kruet yang berada di Kecamatan Sampoiniet.

2. **Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya:**
    Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya Makam Po Teumeureuhom yang berada di Kecamatan Jaya.

3. **Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung lingkungan Hidup:**
    Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi:
    a. Kawasan ekosistem mangrove.
    b. Kawasan perlindungan hewan dan keanekaragaman hayati.
    c. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.8.4. Indikasi Kerja Pembangunan Berdasarkan RTRW

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Jaya sehingga keterkaitan kedua dokumen ini sangat penting. Kebijakan strategis juga sudah dikemukakan dalam RTRW Kabupaten Aceh Jaya dengan tujuan untuk:

a. Mendorong pertumbuhan wilayah pedesaan yang lebih mandiri;
b. Meningkatkan aksesbilitas antar kawasan perdesaan dan perkotaan;
c. Mengembangkan kawasan industri berbasis sumber daya lokal;
d. Meningkatkan peran pusat-pusat pelayanan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sesuai hierarki masing-masing;
e. Membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi dengan pengembangan wilayah;
f. Mengembangkan kawasan ekowisata dan minapolitan sebagai andalan pengembangan kawasan perdesaan; dan
g. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan potensi unggulan dan keselarasan tata ruang.

Tabel 2.76. Indikasi Program Utama RTRW Aceh Jaya Tahun 2024-2044

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
A	**Perwujudan Rencana Struktur Ruang**									
1	**Perwujudan Rencana Sistem Pusat Permukiman**									
A.1.1	**Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Calang**									
	Penyusunan dan Penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi Perkotaan Calang	Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti	ABPK	Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Bag Hukum Setdakab Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Penyusunan dan Penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti	APBK	Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Bag Hukum Setdakab Aceh Jaya						
	- Penyusunan dan Penetapan RTBL Koridor Pelabuhan Calang	Kecamatan Krueng Sabee	APBK	Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Bag Hukum Setdakab Aceh Jaya						
	- Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pemerintahan	Kecamatan Krueng Sabee	APBK	Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Pengembangan Kawasan Pemerintahan Terpadu	Kecamatan Krueng Sabee	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Aceh Jaya						
	- Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pendidikan	Kecamatan Krueng Sabee	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Kab. Aceh Jaya						
	- Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum	Kecamatan Krueng Sabee	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengembangan sentra perdagangan dan jasa	Kecamatan Krueng Sabee	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						
	- Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar dan Pertokoan	Kecamatan Krueng Sabee	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan industri menengah, kecil dan rumah tangga	Kecamatan Krueng Sabee	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						
	- Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Krueng Sabee	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Penataan Pedagang Kaki Lima	Kecamatan Krueng Sabee	APBN, APBA, APBK	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						
	- Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan RTH, Sarana olah raga, rekreasi	Kecamatan Krueng Sabee	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Aceh Kab. Jaya, BUMN, Swasta						
A.1.2	**Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Teunom**									
	- Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Teunom	Kecamatan Teunom	APBK	Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Bag Hukum Setdakab Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengembangan sentra perdagangan dan jasa;	Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						
	- Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar dan Pertokoan	Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						
	- Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum	Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;	Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						
	- Peningkatan fasilitas kegiatan perikanan;	Kecamatan Teunom	APBK	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						
	- Penataan Pasar Tradisional	Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Penataan Pedagang Kaki Lima	Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						
	- Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan;	Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						
A.1.3	**Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Lamno**									
	- Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Lamno	Kecamatan Jaya	APBK	Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Bag Hukum Setdakab Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengembangan sentra perdagangan dan jasa;	Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						
	- Pengembangan dan peningkatan fasilitas perdagangan berupa pasar, toko dan pertokoan;	Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						
	- Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum	Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;	Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						
	- Penataan Pasar Tradisional	Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						
	- Penataan Pedagang Kaki Lima	Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan;	Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						
A.1.4	**Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Panga**									
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Panga	Kecamatan Panga	APBN, APBA, APBK	Dinas PUPR Aceh Jaya, Bag Hukum Setdakab Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan;	Kecamatan Panga	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkebunan	Kecamatan Panga	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura	Kecamatan Panga	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan	Kecamatan Panga	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan;	Kecamatan Panga	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
A.1.5	**Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Darul Hikmah**									
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan;	Kecamatan Darul Hikmah	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkebunan	Kecamatan Darul Hikmah	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura	Kecamatan Darul Hikmah	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan	Kecamatan Darul Hikmah	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan;	Kecamatan Darul Hikmah	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
A.1.6	**Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Setia Bakti**									
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan;	Kecamatan Setia Bakti	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkebunan	Kecamatan Setia Bakti	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura	Kecamatan Setia Bakti	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan	Kecamatan Setia Bakti	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan;	Kecamatan Setia Bakti	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
A.1.7	**Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Sampoi Niet**									
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan;	Kecamatan Sampoi Niet	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkebunan	Kecamatan Sampoi Niet	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura	Kecamatan Sampoi Niet	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan	Kecamatan Sampoi Niet	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan;	Kecamatan Sampoi Niet	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
A.1.8	**Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Indra Jaya**									
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan;	Kecamatan Indra Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkebunan	Kecamatan Indra Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura	Kecamatan Indra Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya						
	- Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan	Kecamatan Indra Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan;	Kecamatan Indra Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
A.1.9	**Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Pasie Raya**									
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan;	Kecamatan Pasie Raya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkebunan	Kecamatan Pasie Raya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura	Kecamatan Pasie Raya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan	Kecamatan Pasie Raya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan;	Kecamatan Pasie Raya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
2	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana**									
A.2.1	**Sistem Jaringan Transportasi**									
	- Peningkatan, Pemeliharaan rutin dan berkala jalan Arteri Primer	a) Bts. Kota Banda Aceh – Bts. Aceh Jaya; b) Bts. Aceh Besar – Calang; c) Calang – Bts Aceh Jaya/Aceh Barat;	APBN	Kementerian PUPR						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Peningkatan dan Pembangunan Jalan Arteri Primer	a) Jalan Akses PP Calang; dan b) Alih Trase Ruas Bts. Aceh Besar – Calang (Geurutee).	APBN	Kementerian PUPR						
	- Kajian Pengembanga Jalan Tol	Banda Aceh - Singkil	APBN, APBA, APBK, Swasta dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian PUPR						
	- Peningkatan, Pemeliharaan rutin dan berkala jalan Kolektor Primer	Kabupaten Aceh Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Peningkatan, Pemeliharaan rutin dan berkala jalan Lokal Primer	Kabupaten Aceh Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Peningkatan dan pemeliharaan jalan strategis kabupaten dan jalan lokal;	Kabupaten Aceh Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan primer;	Kabupaten Aceh Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Peningkatan dan pemeliharaan jembatan;	Kabupaten Aceh Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten ke sentra-sentra produksi;	Kabupaten Aceh Jaya	APBK, APBA, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan jalan perkotaan dan jalan akses pariwisata;	Kabupaten Aceh Jaya	APBK, APBA, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 2 Jalur perkotaan Lamno, Calang, Teunom	Perkotaan Lamno, Calang, Teunom	APBK, APBA, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Peningkatan dan Pengembangan terminal penumpang tipe B	Kecamatan Krueng Sabee	APBN, APBA	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh						
	- Peningkatan dan Pengembangan terminal penumpang tipe C	Kecamatan Jaya, Kecamatan Teunom	APBK	Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Penetapan dan Pengembangan Terminal Barang	Kecamatan Krueng Sabee	APBK	Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan dan Pemeliharaan Rest Area	Kecamatan Jaya, Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Calang	Kecamatan Setia Bakti	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	Kecamatan Jaya, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Setia Bakti	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Calang	Kecamatan Krueng Sabee	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan						
	- Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Lhok Kruet	Kecamatan Sampoi Niet	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan pelayanan jaringan jalan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh						
	- Peningkatan dan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan	Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Teunom	APBN	Kementerian Perhubungan						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Penyusunan Kajian Pelabuhan Perikanan Nusantara	Kecamatan Indra Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						
	- Kajian koridor trase jalur Kereta Api Wilayah Barat Selatan Aceh	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian Perhubungan						
A.2.2	**Sistem Jaringan Energi**									
	- Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Calang – Meulaboh dan Lampisang - Calang	APBN	Kementerian ESDM, PT.PLN						
	- Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian ESDM, PT.PLN						
	- Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian ESDM, PT.PLN						
	- Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Gardu Induk	Kecamatan Krueng Sabee	APBN	Kementerian ESDM, PT.PLN						
	- Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung Gardu Induk	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian ESDM, PT.PLN						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pembangunan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung									
	• Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Kecamatan Pasie Raya	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, PT.PLN, Swasta						
	• Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Kecamatan Jaya, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Teunom	APBN, APBK	Kementerian ESDM, PT.PLN						
	- Penyambungan jaringan interkoneksi antara wilayah pengembangan	Kabupaten Aceh Jaya	APBN, APBK, swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, swasta						
	- Kajian Dokumen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Kecamatan Pasie Raya	APBN, APBK, swasta	Kementerian ESDM, PT. PLN, Swasta						
	- Kajian dan Pembangunan Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi Pantai Barat Selatan	Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN	Kementerian ESDM						
A.2.3	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**									
	- Jaringan Tetap									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	• Penambahan sambungan telepon kabel ke seluruh pusat pelayanan	Kabupaten Aceh Jaya	APBN, swasta	BUMN, swasta						
	- Jaringan Bergerak Seluler									
	• Penambahan dan pengembangan menara telekomunikasi	Kabupaten Aceh Jaya	APBN, swasta	BUMN, swasta						
A.2.4	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**									
	- Sistem Jaringan Irigasi									
	• Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Teunom, Pasie Raya, Panga, Setia Bakti, Sampoi Niet, Setia Bakti, Darul Hikmah, Indra Jaya, Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	• Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	• Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Teunom, Pasie Raya, Krueng Sabee, Setia Bakti, Panga, Setia Bakti, Darul Hikmah, Indra Jaya, Jaya	APBN, APBA, APBK	kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Sistem Pengendalian Banjir									
	• Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir	Kecamatan Teunom, Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, BPBA, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, BPBK Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Bangunan Sumber Daya Air									
	• Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
A.2.5	**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**									
A.2.5.1	**Sistem Penyediaan Air Minum**									
	- Jaringan Air Baku									
	• Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Air Baku	Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Panga, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, BLUD SPAM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	• Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi	Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Panga, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Dinas PUPR, BLUD SPAM						
	- Unit Distribusi									
	• Pembangunan dan Pemeliharaan Reservoar	Kecamatan Teunom, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Panga, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, BLUD SPAM, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	• Pembangunan dan Pemeliharaan Unit Distribusi	Kecamatan Teunom, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Panga, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, BLUD SPAM, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Panga, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, BLUD SPAM, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Unit Produksi	Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Panga, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, BLUD SPAM, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
A.2.5.2	**Sistem Penyediaan Air Limbah**									
	- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	• Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan IPLT	Kecamatan Teunom, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya						
	- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik									
	• Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan IPAL	Kecamatan Setia Bakti	APBN, APBA, APBK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya						
A.2.5.3	**Sistem Drainase**									
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBK	Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier	Seluruh Kecamatan	APBK	Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
A.2.5.4	**Sistem Penglolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**									
	- Pembangunan, Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Setia Bakti	APBN, APBA, APBK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya						
A.2.5.5	**Sistem Jaringan Persampahan**									
	- Pembangunan dan Pemeliharaan Gerobak Sampah	Seluruh kecamatan	APBK	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)	Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh kecamatan	APBK	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kecamatan Jaya, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya						
A.2.5.6	**Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**									
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tempat Evakuasi Bencana	Seluruh kecamatan	APBN, APBA, APBK, Swasta	BNPB, BPBA, BPBK Aceh Jaya, Swasta						
	- Pembangunan, Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Jalur Evakuasi Bencana	Seluruh kecamatan	APBN, APBA, APBK	BNPB, BPBA, BPBK Aceh Jaya						
	- Pembangunan Sarana Mitigasi Bencana	Seluruh kecamatan	APBN, APBA, APBK, Swasta	BNPB, BPBA, BPBK Aceh Jaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
B	**Perwujudan Rencana Pola Ruang**									
1	**Kawasan Lindung**									
B.1.1	**Badan Air**									
	- Pengawasan dan pengendalian pada kawasan badan air/resapan air	Seluruh kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pemantapan fungsi kawasan resapan air	Seluruh kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Pengendalian kegiatan pada kawasan resapan air dan badan sungai	Seluruh kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
B.1.2	**Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**									
	Kawasan Hutan Lindung									
	- Penyediaan data dan informasi kawasan hutan lindung	Seluruh kecamatan	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
	- Penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan lindung	Seluruh kecamatan	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengembangan teknologi rehabilitasi lahan dan hutan lindung	Seluruh kecamatan	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
	- Penetapan batas kawasan hutan lindung	Seluruh kecamatan	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
	- Pemantauan kondisi kawasan hutan lindung	Seluruh kecamatan	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
	- Identifikasi perubahan kawasan hutan lindung	Seluruh kecamatan	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
	- Rehabilitasi kawasan hutan lindung	Seluruh kecamatan	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
	- Sosialisasi perwujudan kawasan hutan lindung	Seluruh kecamatan	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
B.1.3	**Kawasan Perlindungan Setempat**									
	- Kajian pemetaan dan penetapan tata batas kawasan perlindungan setempat	Seluruh kecamatan	APBN, APBA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						
	- Kajian kondisi fisik sosial dan ekonomi kawasan perlindungan setempat	Seluruh kecamatan	APBN, APBA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						
	- Pengendalian kegiatan kawasan terbangun di kawasan perlindungan setempat	Seluruh kecamatan	APBN, APBA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						
	- Rehabilitasi kawasan perlindungan setempat	Seluruh kecamatan	APBN, APBA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						
	- Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman kawasan perlindungan setempat	Seluruh kecamatan	APBN, APBA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						
	- Pemeliharaan dan pengawasan bangunan pendukung di kawasan perlindungan setempat	Seluruh kecamatan	APBN, APBA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						
	- Pembangunan jalan inspeksi untuk pengawasan dan pengendalian di kawasan perlindungan setempat	Seluruh kecamatan	APBN, APBA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengembangan ruang terbuka hijau (rth) di kawasan perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta						
B.1.4	**Kawasan Konservasi**									
B.1.4.1	**Kawasan Suaka Alam**									
	Cagar Alam									
	- Pemeliharaan Cagar alam	Kecamatan Indra Jaya	APBN	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh						
	- Pencegahan dan pengendalian kegiatan ruang pada Cagar Alam	Kecamatan Indra Jaya	APBN	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh						
	- Peningkatan pemanfaatan kawasan menjadi kawasan resapan air	Kecamatan Indra Jaya	APBN	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh						
B.1.4.2	**Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil**									
	Suaka Pesisir									
	- Kajian pemetaan dan penetapan tata batas kawasan konservasi suaka pesisir	Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						
	- Kajian kondisi fisik sosial dan ekonomi kawasan konservasi suaka pesisir	Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengendalian kegiatan kawasan terbangun di kawasan konservasi	Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						
	- Rehabilitasi kawasan konservasi	Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya, Swasta						
	- Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman kawasan konservasi	Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						
	- Pemeliharaan dan pengawasan bangunan pendukung di kawasan konservasi	Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya, Swasta						
	- Pembangunan jalan inspeksi untuk pengawasan dan pengendalian di kawasan konservasi	Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pembentukan dan pemantapan kelembagaan konservasi	Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Jaya, Swasta						
	Taman Pulau Kecil									
	- Kajian pemetaan dan penetapan tata batas taman pulau kecil	Kecamatan, Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Kajian kondisi fisik sosial dan ekonomi taman pulau kecil	Kecamatan, Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						
	- Pengendalian kegiatan kawasan terbangun di taman pulau kecil	Kecamatan, Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						
B.1.5	**Kawasan Ekosistem Mangrove**									
	- Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan ekosistem mangrove	Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pencegahan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang lainnya di kawasan ekosistem mangrove	Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove						
B.1.6	**Kawasan Cagar Budaya**									
	- Perlindungan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, revitalisasi, dan adaptasi kawasan cagar budaya	Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pendidikan Kab. Aceh Jaya, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengendalian kegiatan budi daya pada cagar budidaya agar tidak mengganggu fungsi utama kawasan cagar budidaya	Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pendidikan Kab. Aceh Jaya, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya						
2	**Kawasan Budidaya**									
B.2.1	**Kawasan Hutan Produksi**									
B.2.1.1	**Hutan Produksi Terbatas**									
	- Penyediaan data dan informasi kawasan hutan produksi terbatas	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						
	- Penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						
	- Pengembangan teknologi rehabilitasi lahan dan hutan kawasan hutan produksi terbatas	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Penetapan batas kawasan hutan produksi terbatas	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						
	- Pemantauan kondisi kawasan hutan produksi terbatas	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						
	- Pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat sekitar kawasan hutan produksi terbatas	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						
B.2.1.2	**Hutan Produksi Tetap**									
	- Penyediaan data dan informasi kawasan hutan produksi tetap	Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan produksi tetap	Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						
	- Pengembangan teknologi rehabilitasi lahan dan hutan kawasan hutan produksi tetap	Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						
	- Penetapan batas kawasan hutan produksi tetap	Kecamatan Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Indra Jaya, Jaya	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						
	- Pemantauan kondisi kawasan hutan produksi tetap	Kecamatan Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Indra Jaya, Jaya	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						
	- Pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat sekitar kawasan hutan produksi tetap	Kecamatan Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Indra Jaya, Jaya	APBN, APBA	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
B.2.2	**Kawasan Pertanian**									
B.2.2.1	**Kawasan Tanaman Pangan**									
	- Penetapan dan Pemantapan KP2B	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Penelitian dan Pengembangan Pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan.	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Penyusunan Masterplan pengembangan infrastruktur, jenis komoditas pada kawasan tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kawasan tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di kawasan tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pengendalian dan penanggulangan bencana alam dan non alam di kawasan tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengelolaan pelayanan jasa di kawasan tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
B.2.2.2	**Kawasan Hortikultura**									
	- Penyusunan Masterplan pengembangan infrastruktur, jenis komoditas pada kawasan hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kawasan hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di kawasan hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pengendalian dan penanggulangan bencana alam dan non alam di kawasan hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pengelolaan pelayanan jasa di kawasan hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
B.2.2.3	**Kawasan Perkebunan**									
	- Penyusunan Masterplan pengembangan infrastruktur, jenis komoditas pada kawasan perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kawasan perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di kawasan perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pengendalian dan penanggulangan bencana alam dan non alam di kawasan perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pengelolaan pelayanan jasa di kawasan perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
B.2.2.4	**Kawasan Peternakan**									
	- Penyusunan Masterplan pengembangan infrastruktur, jenis komoditas pada kawasan peternakan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kawasan peternakan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di kawasan peternakan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pengendalian dan penanggulangan bencana alam dan non alam di kawasan peternakan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
	- Pengelolaan pelayanan jasa di kawasan peternakan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya						
B.2.3	**Kawasan Perikanan Budi Daya**									
	- Penyusunan Masterplan pengembangan infrastruktur, jenis budidaya perikanan	Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengelolaan budidaya perikanan	Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						
	- Penyediaan data dan informasi PLTA daya ikan	Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						
	- Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung budidaya perikanan	Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat budidaya perikanan	Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						
	- Pengelolaan pelayanan jasa budidaya perikanan	Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengendalian dan penanggulangan bencana alam dan non alam budidaya perikanan	Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya						
B.2.4	**Kawasan Peruntukan Industri**									
	- Penetapan Kawasan Industri	Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Teunom	APBN, APBA, APBK	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, Bappeda Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Calang	Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti	APBN, APBA, APBK	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, Bappeda Kab. Aceh Jaya						
	- Penyusunan Informasi Industri	Kabupaten Aceh Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, Bappeda Kab. Aceh Jaya						
	- Penyusunan rencana pengembangan kegiatan industri	Kabupaten Aceh Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, Bappeda Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	Kabupaten Aceh Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, Bappeda Kab. Aceh Jaya						
	- Perencanaan dan pembangunan kawasan peruntukan industri	Kabupaten Aceh Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, Bappeda Kab. Aceh Jaya						
	- Fasilitasi Pemanfaatan teknologi industri tepat guna	Kabupaten Aceh Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah	Kabupaten Aceh Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya						
	- Promosi investasi bagi Pengembangan industri di kawasan peruntukan industri	Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti	APBN, APBA, APBK	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya						
	- Penyediaan infrastruktur dan pendukung industri kecil menengah sesuai komoditas unggulan setiap kecamatan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
B.2.5	**Kawasan Pariwisata**									
	- Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah	Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
		Setia Bakti, Kecamatan Jaya		Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya						
	- Penyediaan informasi Pariwisata	Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya						
	- Perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata daerah	Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya						
	- Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kawasan pariwisata	Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya						
	- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata	Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Jaya						
	- Pengelolaan pelayanan jasa pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Jaya						
B.2.6	**Kawasan Permukiman**									
B.2.6.1	**Kawasan Permukiman Perkotaan**									
	- Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, BAPPEDA Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Aceh Jaya						
	- Penyusunan Masterplan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Rehabilitas rumah tidak layak huni	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Kab. PUPR Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengembangan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
B.2.6.2	**Kawasan Permukiman Perdesaan**									
	- Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan permukiman perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang mempertimbangkan infrastruktur mitigasi pada daerah rawan bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Penyediaan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi di kawasan permukiman perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengembangan satuan permukiman di kawasan permukiman perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBA, APBK	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya						
B.2.7	**Kawasan Transportasi**									
	- Integrasi pelayanan angkutan umum	Kabupaten Aceh Jaya	APBN, APBA, APBK	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Aceh						
	- Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Pelabuhan	Kecamatan Krueng Sabee	APBN, APBA, APBK	Kementerian Perhubungan, Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya						
	- Penguatan konektivitas-mobilitas antar wilayah	Kabupaten Aceh Jaya	APBK	Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya						
	- Pengembangan jaringan pelayanan (trayek) angkutan massal	Kabupaten Aceh Jaya	APBA, APBK	Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
B.2.8	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**									
	- Kawasan Strategis Kepentingan Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kabupaten Aceh Jaya	APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan						
C	**Perwujudan Rencana Kawasan Strategis**									
C.1	**Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi**									
	- Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi kawasan perkotaan	Perkotaan Calang, Lamno, Teunom	APBN, APBA, APBK	Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya						
	- Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi kawasan peruntukan industri	Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti	APBN, APBA, APBK	Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya						
	- Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi kawasan ekonomi terpadu teluk rigaih	Kecamatan Setia Bakti	APBN, APBA, APBK	Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya						
	- Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi kawasan perikanan terpadu	Kecamatan Indra Jaya	APBN, APBA, APBK	Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi kawasan Pariwisata	Kecamatan Setia Bakti	APBN, APBA, APBK	Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya						
	- Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi Kawasan Pelabuhan Pengumpan Lhok Kruet	Kecamatan Sampoinet	APBN, APBA, APBK	Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya						
C.2	**Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya**									
	- Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi kawasan cagar budaya Makam Po Teumeureuhom	Kecamatan Jaya	APBN, APBA, APBK	Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya						
C.3	**Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup**									
	- Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi Kawasan Agroforestri	Kecamatan Sampoinet	APBN, APBA, APBK	Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6
	- Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi Konservasi Mangrove	Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Setia Bakti	APBN, APBA, APBK	Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya						
	- Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi KSNT Pulau Terluar Pulau Raya	Kecamatan Sampoinet	APBN, APBA, APBK	Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya						

2.8.5. Perencanaan Sektoral

2.8.5.1. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020-2045

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020-2045 merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Aceh Jaya untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Adapun tujuan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yaitu:

1) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan penduduk yang dinamis baik dari sisi kuantitas, struktur penduduk dan sebaran penduduk
2) Menjadi instrumen pemerintah dalam mengendalikan berbagai perubahan penduduk yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat
3) Mengembangkan kesejahteraan penduduk sejalan dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan, dan perkembangan serta mobilitas penduduk

Pelaksanaan GDPK Kabupaten Aceh Jaya dilakukan melalui 5 pilar yaitu:

1) Pengendalian kuantitas penduduk
2) Peningkatan kualitas penduduk
3) Pembangunan keluarga
4) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk
5) Penataan administrasi kependudukan

Road map Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020-2045 disusun sebagai panduan dan juga menjadi alat evaluasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan kependudukan. Adapun *Road Map* GDPK Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020-2045 yaitu:

A. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Road Map GDPK pengendalian kuantitas penduduk dalam jangka panjang akan membantu terciptanya pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang seimbang dengan kondisi stasioner

Tabel 2.77. *Road Map* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 - 2045

Sasaran	2025	2030	2035	2040	2045
jumlah penduduk	102,770	111,355	119,717	128,053	136,412
Laki-laki	53,553	58,076	62,515	66,929	71,348
Perempuan	49,217	53,279	57,202	61,124	65,064
Pertumbuhan Penduduk	1.69	1.62	1.46	1.35	1.27
Sex Ratio	108.81	109	109.29	109.5	109.66

Sasaran	2025	2030	2035	2040	2045
Rasio Ketergantungan	48.11	47.18	46.38	45.70	45.10
Rasio Penduduk Usia Lanjut	4.50	4.75	4.98	5.18	5.35

Sumber: GDPK Kab. Aceh Jaya Tahun 2020-2045

B. Pengendalian Kualitas Penduduk

Road Map peningkatan kualitas penduduk merupakan ukuran dan sasaran baik kuantitatif dan kualitatif dalam mencapai peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Aceh Jaya sampai pada periode akhir GDPK tahun 2045.

Tabel 2.78. *Road Map* Pengendalian Kualitas Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 - 2045

Sasaran	2025	2030	2035	2040	2045
IPM	72.27	74.66	77.13	79.53	81.93
Rata-rata Lama Sekolah	9.39	10.11	10.87	11.61	12.34
Angka Partisipasi Murni					
SD	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SMP	96.54	99.00	100.00	100.00	100.00
SMA	78.68	81.42	84.45	87.47	90.48
Angka Harapan Hidup	67.61	68.08	68.58	69.08	69.57
PDRB ADHB (Rp. Miliar)	3,358.02	4,023.93	4,701.82	5,379.97	6,054.89
Pendapatan perkapita	32.68	36.14	39.27	42.01	44.39
Rasio Gini	0.246	0.242	0.237	0.233	0.228
Penduduk Miskin (%)	12.55	11.93	11.29	10.48	9.60

Sumber: GDPK Kab. Aceh Jaya Tahun 2020-2045

C. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Fokus pembangunan keluarga Kabupaten Aceh Jaya adalah:

1) Mendorong masyarakat untuk membentuk keluarga yang bertaqwa kepada Allah SWT
2) Menciptakan iklim membangun keluarga berdasarkan ikatan perkawinan yang sah dan menghindari pernikahan siri
3) Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju dan mandiri
4) Membangun keluarga mandiri dan mampu menyiapkan rencana penciptaan, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya keluarga secara optimal
5) Terciptanya keluarga yang bermartabat, memiliki sumber daya berkelanjutan dan terlibat aktif dalam pemerintah

D. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dalam GDPK Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020-2045 menyelaraskan dengan perkembangan pembangunan regional dan pengarahan mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dan juga daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Dalam rangka untuk mewujudkan persebaran penduduk yang merata maka penyediaan fasilitas publik yang cukup dan mudah dijangkau.

2.8.5.2. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2038

Visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Jaya 2023-2038 yaitu "Mewujudkan Pembangunan Pariwisata halal Melalui Pengembangan Potensi Alam, Sejarah, dan Budaya Yang Berkelanjutann Berbasis Partisipasi Masyarakat".

Adapun tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Jaya yaitu:

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata Kabupaten melalui pengembangan Destinasi Wisata unggulan yang menjadi pilar Pariwisata Kabupaten dan Destinasi Wisata lainnya sebagai penunjang Destinasi Wisata unggulan;
2) Mewujudkan daya tarik wisata alam dan budaya berbasis agrowisata dan sumber daya kelautan yang memiliki kekhasan, berkualitas dan keberlanjutan yang mencerminkan kekuatan pariwisata Kabupaten sekaligus simbol Pariwisata yang mendorong Wisatawan untuk berwisata ke Kabupaten;
3) Mewujudkan Industri Pariwisata Halal yang mampu meningkatkan mobilisasi perekonomian Kabupaten melalui produk dan pelayanan industri yang beridentitas lokal serta memiliki kredibilitas tinggi;
4) Mewujudkan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab dan terpadu serta efektif dan efisien berbasis teknologi informasi untuk memperkuat citra pariwisata yang berprinsip halal dan ramah wisatawan;
5) Mewujudkan masyarakat sadar wisata yang ramah, inovatif dan kreatif sebagai pelaku utama pemabangunan Kepariwisataan; dan
6) Mewujudkan tata kelola Pariwisata melalui kolaborasi kelembagaan kepariwisataan Kabupaten yang sinergis, efektif dan profesional dengan dukungan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas dengan melibatkan unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media dan masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2038 meliputi daya tarik wisata kabupaten yang terdiri dari daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan. Selain itu juga akan dilakukan pengembangan pariwisata yang berbasis kawasan, diantaranya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten atau KSPK dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten atau KPPK.

KSPK merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,

pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup. KPSK terdiri dari KSPK Wisata Bahari Teluk Rigaih dan sekitarnya, dan KSPK Wisata Pesisir Calang dan sekitarnya. Sedangkan KPPK adalah kawasan pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan. KPPK terdiri dari KPPK Ekowisata Petualangan Geurutee dan sekitarnya, KPPK Edurekreasi Wisata Budaya dan Sejarah Negeri Daya, dan KPPK Wisata Sungai Krueng Teunom dan sekitarnya

2.8.5.3. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021-2041

Visi pembangunan industri Kabupaten Aceh Jaya Tahun 201-2041 yaitu ”Mewujudkan Pembangunan Industri Aceh Jaya yang Sehat dan Tangguh dengan Pondasi Sumber Daya Manusia yang Kompetitif ”

Adapun tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Jaya yaitu:

1) Meningkatnya pertumbuhan sektor industri non migas
2) Meningkatnya kontribusi sektor industri non migas terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Aceh Jaya
3) Terwujudnya sentra-sentra IKM yang produktif, berdaya saing dan maju
4) Meningkatnya serapan tenaga kerja pada sektor industri non migas
5) Tersedianya teknologi dan SDM yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan industri
6) Meningkatnya penguasaan pasar produk olahan industri dalam pasar domestik dan internasional
7) Meningkatnya pertumbuhan dan jumlah produk Industri Kecil Menengah dan Industri rumah tangga
8) Meningkatnya investasi sektor industri non migas.

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Industri kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021-2041 ada beberapa industri unggulan Kabupaten yaitu:

Tabel 2.79. Jenis Industri Unggulan kabupaten Aceh Jaya

No.	Industri Ungulan	Jenis Industri
1	102 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biodata Air	1. 10211 - Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan
		2. 10212 - Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
		3. 10213 - Industri Pembekuan Ikan
		4. 10214 - Industri Pemindangan Ikan
		5. 10215 - Industri Peragian/Fermentasi Ikan
		6. 10216 - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi
		7. 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan
		8. 10218 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan

No.	Industri Ungulan	Jenis Industri
		9. 10221 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng
		10. 10222 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng
		11. 10291 - Industri Penggaraman/Pengeringan Biodata Air Lainnya
		12. 10292 - Industri Pengasapan/Pemanggangan Biodata Air Lainnya
		13. 10293 - Industri Pembekuan Biodata Air Lainnya
		14. 10297 -Industri Pendinginan/Pengesan Biodata Air Lainnya
		15. 10298- Industri Pengolahan Rumput Laut
2	103 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur	1. 10330 - Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
		2. 10391 - Industri Tempe Kedelai
		3. 10392 - Industri Tahu Kedelai
		4. 10393 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe
		5. 10399 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan
3	104 - Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	1. 10421 - Industri Kopra
		2. 10422 - Industri Minyak Mentah Kelapa
		3. 10423 - Industri Minyak Goreng Kelapa
		4. 10431 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
		5. 10432 - Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
		6. 10433 - Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
		7. 10434 - Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
		8. 10435 - Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit
		9. 10436 - Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit
		10. 10437 - Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
4	106 - Industri Penggilingan Padipadian, Tepung, dan Pati	1. 10631 - Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
		2. 10632 - Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung

No.	Industri Ungulan	Jenis Industri
		3. 10633 - Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
		4. 10634 - Industri Pati Beras dan Jagung
5	107 - Industri Makanan Lainnya	1. 10721 - Industri Gula Pasir
		2. 10722 - Industri Gula Merah
		3. 10723 - Industri Sirop
		4. 10729 - Industri Pengolahan Gula Lainnya bukan Sirop
		5. 10761 - Industri Pengolahan Kopi
		6. 10762 - Industri Pengolahan Herbal (Herb Infunsion)
		7. 10763 - Industri Pengolahan Teh
6	108 - Industri Makanan Hewan	1. 10801 - Industri Ransum Makanan Hewan
		2. 10802 - Industri Konsentrat Makanan Hewan
7	110 - Industri Minuman	1. 11051 - Industri Air Kemasan
		2. 11052 - Industri Air Minum Isi Ulang
		3. 11090 - Industri Minuman Lainnya
8	202 - Industri Barang Kimia Lainnya	1. 20294 - Industri Minyak Atsiri
		2. 20296 - Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah
		3. 20231 - Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
9	210 - Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	1. 21022 - Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia
10	310 - Industri Furnitur	1. 31001 - Industri Furnitur dari Kayu
		2. 31002 - Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
11	329 - Industri Pengolahan Lainnya	1. 32905 – Industri Serat Sabut Kelapa

Sumber: RPIK Kab. Aceh Jaya 202102041

2.8.5.4. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RKPK) Tahun 2025-2029 mengangkat tema *"Agromina Ranchtourism* Aceh Jaya". ***"Agromina Ranch"*** sebagai kawasan perdesaan yang berfokus pada kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati, yang meliputi: pertanian, perikanan dan peternakan, dalam menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta dengan turut memperhatikan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. **"*Tourism* Aceh Jaya"** bermakna kawasan perdesaan yang turut mengembangkan sektor pariwisata alam, wisata religi, wisata sejarah, wisata buatan dan wisata kuliner.

Adapun tujuan dari Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RKPK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 yang mengangkat tema "*Agromina Ranchtourism* Aceh Jaya" yaitu:

1) Meningkatkan produktivitas usaha pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata (*Agromina Ranchtourism*), dalam suatu sistem yang terintegrasi secara lebih optimal dan berkualitas serta berkelanjutan (*sustainable*) yang bersifat "THIS" (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) yang dapat memberikan nilai tambah (*value added*) secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat di kawasan *Agromina Ranchtourism* Aceh Jaya
2) Menjadikan kawasan perdesaan Agrikultur Aceh Jaya sebagai tempat penyediaan lumbung ketahanan pangan (*Agromina Ranchtourism*) daerah dan nasional, khususnya di bagian wilayah barat Provinsi Aceh, serta menjadikan Kawasan Perdesaan Pariwisata Aceh Jaya sebagai tempat pariwisata nasional dan internasional di wilayah barat Indonesia, khususnya di bagian wilayah barat Provinsi Aceh
3) Meningkatkan pembinaan dan kapasitas serta pemanfaatan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat (kelompok/perseorangan/koperasi/Badan Usaha Milik Gampong) dalam sistem ekonomi pasar dan pemasaran hasil produksi pada kawasan perdesaan *Agromina Ranchtourism* Aceh Jaya
4) Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar dan infrastruktur perekonomian serta infrastruktur komersial pada kawasan perdesaan *Agromina Ranchtourism* Aceh Jaya yang lebih memadai dan optimal, melalui penyediaan fasilitas pembangunan dan pembenahan serta perbaikan fasilitas yang dapat menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pembangunan berkelanjutan (sustainable) pada kawasan perdesaan Agrikultur dan Periwisata Aceh Jaya

Kawasan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RKPK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 yaitu:

1) Kawasan Perdesaan Agro (Pertanian) Gampong Pertanian dan Perkebunan Aceh Jaya.
2) Kawasan Perdesaan Mina (Perikanan) Gampong Perikanan Aceh Jaya
3) Kawasan Perdesaan Ranch Gampong Peternakan Aceh Jaya
4) Kawasan Perdesaan Tourism Gampong Pariwisata Aceh Jaya
5) Kawasan Perdesaan Gampong Perindustrian, Perdagangan, UMKM, Koperasi, BUMDesa dan BUMDesa Bersama Aceh Jaya

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Usia Kabupaten Aceh Jaya masih relatif baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah kabupaten ini resmi dibentuk dan pembangunan belum dapat dilaksanakan maka gempa bumi dan tsunami 2004 mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap pembangunan daerah ini. Hal ini secara langsung menimbulkan dampak negatif yang sangat masif sehingga kinerja pembangunan daerah ini masih jauh dari yang diharapkan dan banyak persoalan yang dihadapi daerah ini. Dalam penyusunan target kinerja dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, penting dilakukan sandingan permasalahan antara tingkat daerah, provinsi, dan nasional guna menjamin keselarasan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. dentifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kabupaten Aceh Jaya menghadapi sejumlah tantangan utama, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya infrastruktur dasar, tingginya angka kemiskinan, serta kerentanan terhadap bencana alam. Permasalahan ini memiliki keterkaitan erat dengan isu-isu strategis di tingkat Provinsi Aceh, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, pengangguran terbuka, serta kebutuhan percepatan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal. Di tingkat nasional, permasalahan serupa tercermin dalam agenda pembangunan seperti peningkatan kualitas pendidikan, pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan iklim, dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, elaborasi terhadap keterkaitan masalah ini menjadi dasar dalam menetapkan target kinerja yang relevan dan realistis, serta memastikan bahwa perencanaan di tingkat daerah tidak berjalan secara sektoral dan terfragmentasi. Sinkronisasi ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mendorong kolaborasi lintas sektor, dan memastikan kontribusi daerah terhadap pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional. Dengan demikian, keselarasan antar level pemerintahan menjadi fondasi strategis dalam membangun daerah secara berkelanjutan dan inklusif.

Pentingnya sandingan permasalahan antara tingkat daerah, provinsi, dan nasional terletak pada fungsinya sebagai landasan strategis dalam merumuskan arah dan prioritas pembangunan yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Aceh Jaya, penyandingan permasalahan memungkinkan pemerintah daerah untuk tidak hanya

memahami isu-isu lokal secara mendalam, tetapi juga melihat keterkaitannya dengan dinamika pembangunan di tingkat Provinsi Aceh dan agenda nasional. Hal ini penting agar target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang tidak bersifat parsial, melainkan mampu menjawab tantangan lintas wilayah secara holistik. Tanpa sandingan permasalahan, kebijakan daerah berisiko tidak sinkron dengan kebijakan provinsi maupun nasional, yang dapat mengakibatkan tumpang tindih program, inefisiensi anggaran, serta rendahnya efektivitas pencapaian tujuan pembangunan. Selain itu, proses penyandingan juga mendorong sinergi antar level pemerintahan, memperkuat peran daerah dalam menyukseskan target pembangunan nasional seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan daya saing SDM, dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, sandingan permasalahan bukan hanya instrumen teknis dalam perencanaan, tetapi juga wujud komitmen terhadap tata kelola pembangunan yang kolaboratif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai tingkat. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pada level daerah hingga nasional, beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam periode pembangunan 2005-2025 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1
Permasalahan Pembangunan Tingkat Daerah dan Nasional Periode 2005-2025

No	Nasional	Provinsi Aceh	Aceh Jaya
1	Produktivitas Rendah	Pertumbuhan Ekonomi Aceh belum maksimal dan fluktuatif	Perekonomian Kabupaten Aceh Jaya cenderung stagnan
2	IPTEKIN dan riset lemah		
3	Deindustrialisasi dini		
4	Pariwisata di bawah potensinya		
5	Ekonomi laut belum optimal		
6	Kontribusi UMKM dan koperasi kecil		
7	Infrastruktur dan literasi digital rendah		
8	Pembangunan belum berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah	Upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan masih belum optimal
9	Integrasi domestik terbatas	Kesinambungan Pembangunan Belum Optimal	Masih terdapat kesenjangan dalam kesinambungan pembangunan
10	Kualitas SDM yang semakin rendah	Sumber daya manusia masih rendah	Kualitas SDM yang cenderung masih rendah
11	Tata kelola pemerintahan belum optimal	Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan Aceh	Pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya optimal dan memenuhi prinsip good governance
12	Kepastian dan penegakan hukum masih lemah	Implementasi Keistimewaan Aceh Belum Optimal terutama	Implementasi aspek-aspek keistimewaan Aceh belum

No	Nasional	Provinsi Aceh	Aceh Jaya
13	Demokratisasi belum optimal	pelaksanaan otonomi khusus Aceh, Syariat Islam, Korban Konflik serta perdamaian	sepenuhnya terwujud secara efektif dan menyeluruh
14	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Masih tingginya ketimpangan antar wilayah	Tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah masih belum merata secara signifikan

Sumber: RPJPN, RPJPA Tahun 2025-2045

Berdasarkan Tabel 3.1, terlihat adanya keterkaitan yang erat antara permasalahan pembangunan di tingkat nasional, Provinsi Aceh, dan Kabupaten Aceh Jaya. Secara nasional, isu-isu seperti produktivitas rendah, deindustrialisasi, ketimpangan wilayah, dan belum optimalnya tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya inklusif dan berkelanjutan. Permasalahan tersebut tercermin pula di tingkat Provinsi Aceh, yang menghadapi tantangan dalam pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia dan alam, serta ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota. Di tingkat Aceh Jaya, berbagai persoalan lokal seperti stagnasi ekonomi, rendahnya kualitas SDM, belum efektifnya pengelolaan lingkungan, serta lemahnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan menggambarkan dampak konkret dari isu-isu struktural di level yang lebih tinggi. Ketidakterpaduan dalam pelaksanaan otonomi khusus dan belum maksimalnya implementasi aspek keistimewaan Aceh juga menjadi penghambat dalam mempercepat transformasi daerah. Keterkaitan antar level wilayah ini menunjukkan pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang yang bersifat holistik dan terintegrasi, agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat provinsi dan kabupaten, serta mampu menjawab permasalahan yang saling memengaruhi dari hulu ke hilir. Berdasarkan hal tersebut permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada periode 2005-2025 dijelaskan sebagai berikut:

1. Perekonomian Kabupaten Aceh Jaya cenderung stagnan

Selama periode 2005–2025, perekonomian Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan kecenderungan stagnan dengan laju pertumbuhan yang relatif lambat dan fluktuatif. Meskipun pascakonflik dan rehabilitasi pascatsunami memberi harapan terhadap percepatan pembangunan, namun dinamika ekonomi daerah tidak berkembang secara signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan yang rentan terhadap guncangan eksternal serta belum adanya diversifikasi ekonomi yang memadai. Keterbatasan infrastruktur penunjang, rendahnya investasi, dan lemahnya peran sektor industri serta jasa juga mempersempit ruang pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang belum kompetitif, rendahnya kapasitas fiskal daerah, serta belum optimalnya pengelolaan potensi lokal turut memperkuat kondisi stagnasi tersebut. Pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya dalam dua dekade terakhir belum mampu mendorong transformasi struktural dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius dalam

perencanaan pembangunan jangka panjang, agar ke depan strategi pertumbuhan dapat lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi unggulan lokal yang dikelola secara optimal. Beberapa poin penting yang menyebabkan belum maksimalnya pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya, sebagai berikut:

1) **Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya,** pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya pada periode 2005–2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, dengan capaian yang cenderung tidak stabil dan jauh dari konsisten. Pada tahun 2005, Aceh Jaya mengalami kontraksi ekonomi yang sangat dalam sebesar -33,89 persen, jauh lebih buruk dibandingkan Provinsi Aceh yang tumbuh negatif -10,12 persen, sementara ekonomi nasional justru tumbuh positif sebesar 5,6 persen. Kondisi ini menggambarkan dampak besar pascatsunami dan konflik yang melanda wilayah tersebut. Meskipun sempat tumbuh tinggi pada tahun 2007 (11,6 persen), Aceh Jaya tidak menunjukkan tren pertumbuhan yang berkesinambungan seperti halnya tren pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih stabil di kisaran 5–6 persen per tahun. Pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan Aceh Jaya bergerak di kisaran 3–4 persen, yang secara umum masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Ketimpangan ini terus terlihat hingga tahun 2023, di mana pertumbuhan Aceh Jaya tercatat sebesar 4,15 persen, masih di bawah capaian nasional (5,05 persen) meskipun relatif mendekati pertumbuhan Provinsi Aceh (4,23 persen). Sempat mengalami pertumbuhan negatif pada 2020 sebesar -0,62 persen karena dampak pandemi COVID-19, Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan pemulihan yang lambat dibandingkan nasional yang juga sempat kontraksi namun tumbuh lebih cepat di tahun-tahun berikutnya. Fluktuasi dan ketidakstabilan ini menunjukkan bahwa perekonomian Aceh Jaya sangat rentan terhadap guncangan eksternal dan masih bergantung pada sektor-sektor ekonomi tradisional. Dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang cenderung stabil dan Provinsi Aceh yang menunjukkan upaya perbaikan, Aceh Jaya memerlukan strategi pembangunan yang lebih terarah dan berbasis potensi unggulan lokal agar dapat mengejar ketertinggalan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
2) **Ketergantungan pada sektor ekonomi tradisional,** Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Jaya yang mencapai 33,51 persen pada tahun 2023 mencerminkan dominasi sektor ini dalam struktur ekonomi daerah. Angka tersebut menunjukkan bahwa sepertiga lebih dari total nilai tambah yang dihasilkan perekonomian Aceh Jaya bersumber dari aktivitas pertanian, baik subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, maupun perikanan dan kehutanan. Ketergantungan yang tinggi ini memiliki dua sisi, di satu sisi menunjukkan potensi besar yang dimiliki daerah dalam hal sumber daya alam dan tenaga kerja berbasis agraris, namun di sisi lain juga menandakan kerentanan ekonomi daerah terhadap gejolak yang memengaruhi sektor ini, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta bencana alam. Ketergantungan yang besar terhadap sektor pertanian menjadikan perekonomian Aceh Jaya kurang terdiversifikasi, sehingga daya tahan terhadap krisis maupun tekanan eksternal menjadi rendah. Selain itu, nilai tambah dari sektor ini cenderung lebih kecil dibandingkan sektor sekunder dan tersier,

yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi jika tidak diimbangi dengan inovasi, industrialisasi pertanian, atau pengembangan sektor lainnya seperti pariwisata, industri kecil menengah, dan jasa. Oleh karena itu, ke depan, penting bagi Aceh Jaya untuk mendorong hilirisasi produk pertanian, peningkatan produktivitas, serta perluasan ke sektor ekonomi lain guna menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3) **Rendahnya kontribusi sektor industri dan pariwisata,** Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2023 hanya sebesar 3,52 persen, serta sektor pariwisata yang bahkan lebih kecil yakni 0,83 persen, menunjukkan bahwa kedua sektor ini masih belum berkembang secara optimal dan belum menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Rendahnya kontribusi sektor industri mencerminkan minimnya aktivitas manufaktur atau pengolahan di Aceh Jaya, yang berarti bahwa sebagian besar produk lokal, terutama hasil pertanian dan perikanan, belum diolah secara lokal, melainkan dijual dalam bentuk mentah dengan nilai tambah yang rendah. Hal ini memperkuat ketergantungan pada sektor primer dan membatasi peluang penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan. Sementara itu, kontribusi sektor pariwisata yang sangat kecil menunjukkan bahwa potensi wisata alam, budaya, maupun sejarah yang dimiliki Aceh Jaya belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai motor ekonomi baru. Padahal, sektor pariwisata memiliki efek ganda (multiplier effect) yang luas terhadap ekonomi lokal, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi hingga industri kreatif. Rendahnya kontribusi ini berdampak pada sempitnya sumber pertumbuhan ekonomi alternatif dan lambatnya transformasi ekonomi daerah. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pembangunan yang lebih agresif dalam mendorong diversifikasi ekonomi, industrialisasi berbasis potensi lokal, serta pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk memperkuat struktur ekonomi Aceh Jaya ke depan.

4) **Kemiskinan yang masih cukup tinggi,** pada tahun 2023 Kabupaten Aceh Jaya memiliki tingkat kemiskinan sebesar 12,51 persen. Angka ini berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh yang sebesar 14,64 persen, namun masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 9,54 persen. Secara regional, posisi Aceh Jaya relatif lebih baik dibandingkan banyak kabupaten/kota lain di Aceh, seperti Pidie Jaya (18,45 persen), Gayo Lues (18,87 persen), dan Aceh Singkil (19,18 persen), namun masih perlu banyak perbaikan untuk menyamai tingkat kesejahteraan rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja yang layak. Dampaknya terhadap perekonomian daerah cukup signifikan. Tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung menurunkan daya beli masyarakat, mempersempit pasar domestik, dan menghambat pertumbuhan usaha lokal. Selain itu, beban sosial yang besar dapat menekan anggaran daerah karena meningkatnya kebutuhan terhadap program bantuan sosial dan subsidi. Tingginya angka kemiskinan juga menjadi indikator rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penurunan

tingkat kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan Aceh Jaya melalui strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang produktif dan inklusif.

5) **Tenaga kerja yang berpusat pada sektor informal,** pada tahun 2023 Kabupaten Aceh Jaya mencatat tingkat pengangguran sebesar 2,88 persen, yang termasuk salah satu yang terendah di antara seluruh kabupaten/kota di Aceh, dan jauh di bawah rata-rata Provinsi Aceh yang mencapai 6,03 persen. Posisi ini menempatkan Aceh Jaya sebagai daerah dengan tingkat pengangguran relatif rendah, hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan Gayo Lues (2,65 persen) dan Bener Meriah (2,45 persen). Tingkat pengangguran yang rendah ini memiliki keterkaitan langsung dengan tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Aceh Jaya, yang pada tahun 2023 mencapai 33,51 persen. Sektor pertanian dikenal sebagai sektor padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Aceh Jaya terserap dalam aktivitas pertanian, baik formal maupun informal, sehingga menekan angka pengangguran terbuka. Namun, rendahnya angka pengangguran tidak selalu mencerminkan produktivitas atau kesejahteraan yang tinggi. Karena dominasi sektor pertanian yang masih bersifat tradisional dan berorientasi pada hasil primer, banyak tenaga kerja terserap pada pekerjaan dengan produktivitas dan pendapatan rendah. Hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan yang masih berada pada angka 12,51 persen, yang menunjukkan bahwa meskipun banyak yang bekerja, namun kualitas pekerjaan masih belum mampu menjamin kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian melalui modernisasi, hilirisasi, dan diversifikasi ekonomi menjadi penting agar pencapaian rendahnya pengangguran di Aceh Jaya dapat dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
6) **Lemahnya peranan koperasi,** pada periode 2019–2023, terlihat adanya penurunan signifikan jumlah koperasi aktif dimana pada tahun 2023, hanya tersisa 64 unit koperasi, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang sempat mencapai 140 koperasi pada 2020 dan 155 koperasi pada 2022. Penurunan tajam ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam keberlangsungan kelembagaan koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan di Aceh Jaya. Turunnya jumlah koperasi ini dapat dihubungkan langsung dengan stagnasi perekonomian Aceh Jaya dalam beberapa tahun terakhir. Koperasi pada dasarnya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan UMKM yang dominan di wilayah ini. Ketika perekonomian daerah tidak berkembang secara dinamis, seperti terlihat dari tingginya ketergantungan terhadap sektor pertanian dan minimnya kontribusi sektor industri dan pariwisata, maka koperasi-koperasi pun kesulitan untuk berkembang dan bertahan hidup, baik karena lemahnya permodalan, rendahnya daya beli masyarakat, maupun terbatasnya akses ke pasar dan teknologi. Lebih lanjut, koperasi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajerial dan tata kelola yang baik, serta dukungan kebijakan pemerintah. Rendahnya daya saing dan kurangnya revitalisasi koperasi menyebabkan banyak koperasi menjadi tidak aktif atau dibubarkan. Hal ini memperlihatkan bahwa stagnasi ekonomi Aceh Jaya tidak hanya berdampak pada angka pertumbuhan ekonomi,

tetapi juga turut menghambat kelembagaan ekonomi masyarakat seperti koperasi, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi.

7) **Produksi dan produktivitas sektor pertanian yang fluktuatif,** Produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Aceh Jaya selama lima tahun terakhir memperlihatkan pola fluktuatif yang mencerminkan kurangnya kesinambungan dalam pengelolaan sumber daya dan strategi pembangunan ekonomi lokal. Pada subsektor tanaman pangan, produksi padi sempat mencapai puncaknya pada 2020 dan 2021, namun mengalami penurunan signifikan pada 2022 sebelum meningkat kembali di 2023, hal tersebut ditopang oleh lonjakan produktivitas menjadi 6,5 ton/ha. Meski demikian, produksi komoditas pangan lainnya seperti jagung dan ubi kayu menunjukkan tren penurunan, sementara produksi kedelai dan kacang-kacangan masih relatif rendah dan inkonsisten. Sementara itu, pada sektor perkebunan, produksi kelapa sawit mengalami peningkatan yang konsisten, menunjukkan ketergantungan struktural terhadap satu komoditas utama, sedangkan produksi karet, kelapa, dan nilam terus menurun. Ketimpangan dalam performa antar subsektor ini menggambarkan lemahnya diversifikasi ekonomi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi agribisnis. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab stagnasi ekonomi Aceh Jaya, di mana dominasi sektor primer belum dibarengi dengan hilirisasi, industrialisasi, atau peningkatan daya saing melalui inovasi dan teknologi. Tanpa transformasi struktural dan perbaikan kebijakan sektoral, laju pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya akan cenderung datar dan rentan terhadap guncangan eksternal, sehingga sulit mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
8) **Potensi sektor kelautan dan perikanan yang belum optimal,** Produksi perikanan di Kabupaten Aceh Jaya hingga tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif, terutama pada subsektor perikanan tangkap yang melonjak tajam dari 7.693,90 ton pada 2022 menjadi 12.863,50 ton di tahun 2023. Demikian pula, perikanan budidaya mengalami pertumbuhan bertahap dari 277,50 ton pada 2019 menjadi 717,32 ton di 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya potensi besar yang mulai dioptimalkan dalam sektor kelautan dan perikanan, baik dari sisi eksplorasi sumber daya laut maupun pengembangan budidaya. Namun, meskipun sektor ini menunjukkan performa impresif, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih belum mampu mengakselerasi perubahan struktural secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya rantai nilai, minimnya hilirisasi hasil perikanan, serta kurangnya investasi dan teknologi pengolahan yang mendukung peningkatan daya saing produk perikanan lokal. Akibatnya, pertumbuhan di sektor perikanan belum sepenuhnya berkontribusi pada percepatan ekonomi daerah, dan stagnasi ekonomi Aceh Jaya tetap menjadi tantangan utama. Tanpa strategi penguatan sektor sekunder dan tersier berbasis potensi kelautan, nilai tambah dari pertumbuhan produksi perikanan akan terus terbatas.

2. Upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan masih belum optimal

Upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan di Kabupaten Aceh Jaya hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan

dan belum berjalan secara optimal. Eksploitasi lahan pertanian dan perkebunan yang kurang memperhatikan prinsip keberlanjutan, minimnya pengawasan terhadap aktivitas penebangan hutan, serta pengelolaan limbah yang belum memadai menunjukkan lemahnya kesadaran dan kapasitas dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Padahal, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan fondasi penting dalam mendukung visi pembangunan jangka panjang daerah, terutama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi hijau dan ketahanan bencana. Ketidakhadiran regulasi yang kuat serta kurangnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menyebabkan potensi sumber daya alam belum dapat dimanfaatkan secara efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip pelestarian lingkungan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi krusial agar pembangunan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Beberapa poin penting yang menyebabkan rendahnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana dijabarkan sebagai berikut.

1) **Rendahnya indeks ketahanan daerah,** nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Aceh Jaya tahun 2023 sebesar 0,39, yang meskipun sedikit lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Aceh (0,37), tetap tergolong dalam kategori rendah. Angka ini mengindikasikan bahwa kapasitas Kabupaten Aceh Jaya dalam menghadapi dan menanggulangi bencana masih terbatas. Rendahnya nilai IKD ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya infrastruktur tanggap bencana, minimnya kesiapsiagaan masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam manajemen risiko bencana. Padahal, sebagai daerah yang secara geografis rentan terhadap bencana seperti banjir, longsor, dan gempa, Aceh Jaya seharusnya memiliki sistem ketahanan yang kuat. Ketahanan daerah yang rendah tidak hanya berdampak terhadap kerentanan fisik dan sosial masyarakat, tetapi juga dapat menghambat laju pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan IKD harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka panjang yang holistik dan inklusif.
2) **Tingginya risiko bencana daerah,** data Indeks Risiko Bencana (IRBI) tahun 2015–2023, Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan nilai risiko bencana yang relatif tinggi dan cenderung stagnan pada angka 197,6 selama lima tahun berturut-turut (2015–2019), kemudian mulai menurun pada tahun 2020 hingga 2021, sebelum kembali mengalami kenaikan di tahun 2023. Meskipun sempat menunjukkan perbaikan, kenaikan kembali nilai IRBI pada tahun terakhir mengindikasikan bahwa risiko kebencanaan masih menjadi tantangan serius. Meskipun penurunan awal mencerminkan adanya upaya mitigasi, peningkatan kembali IRBI mengindikasikan bahwa kerentanan terhadap bencana masih tinggi. Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh yang nilai IRBI-nya cenderung stabil dan lebih rendah, Aceh Jaya tampak lebih rentan terhadap risiko bencana. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup di Aceh Jaya belum optimal. Alih fungsi lahan, degradasi hutan, dan pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan menjadi faktor pemicu tingginya risiko bencana. Oleh karena itu, dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, diperlukan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang lebih

terintegrasi, berbasis mitigasi risiko, serta memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dan ancaman bencana.

3) **Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup,** Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencakup Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), Kabupaten Aceh Jaya masih menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga mutu lingkungannya. Indeks kualitas air menunjukkan fluktuasi akibat pencemaran dari limbah domestik dan aktivitas pertanian yang tidak ramah lingkungan, sementara indeks kualitas udara relatif stabil namun rentan terganggu oleh pembakaran lahan dan emisi kendaraan. Sementara itu, indeks kualitas lahan memperlihatkan kecenderungan menurun akibat degradasi tanah dan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol. Hal ini mencerminkan bahwa upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan di Aceh Jaya belum berjalan optimal. Kelemahan dalam pengawasan, kurangnya integrasi antar sektor, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), hal ini menjadi sinyal penting agar strategi pembangunan diarahkan pada pendekatan yang lebih berkelanjutan, berbasis mitigasi kerusakan lingkungan, dan memperkuat kapasitas adaptasi daerah terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
4) **Akses terhadap energi bersih yang belum optimal,** Berdasarkan data distribusi persentase rumah tangga menurut bahan bakar utama untuk memasak di Provinsi Aceh tahun 2022, terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Aceh Jaya masih menggunakan gas/elpiji sebagai bahan bakar utama (94,66 persen), namun masih terdapat penggunaan bahan bakar tidak ramah lingkungan seperti kayu (3,37 persen) dan lainnya (0,34 persen). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap energi bersih sudah cukup tinggi, ketergantungan terhadap sumber daya alam seperti kayu masih terjadi, mencerminkan bahwa upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah tersebut belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam konteks pembangunan berkelanjutan, karena penggunaan kayu sebagai bahan bakar berpotensi menyebabkan kerusakan hutan dan degradasi lingkungan. Dalam kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Aceh Jaya perlu melakukan percepatan transisi energi bersih dan memperkuat kebijakan konservasi lingkungan agar pembangunan yang dilakukan selaras dengan prinsip keberlanjutan serta mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi masyarakat dan pelestarian alam.
5) **Cakupan akses air minum layak masih belum optimal,** Data perkembangan ketahanan air di Kabupaten Aceh Jaya hingga 2023 menunjukkan fluktuasi, yang mengindikasikan belum stabilnya akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak. Pada tahun 2019, akses berada di angka 90,64 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 89,89 persen di tahun 2020, dan terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2022 sebesar 83,1 persen, sebelum akhirnya meningkat kembali menjadi 87,87 persen pada tahun 2023. Penurunan signifikan tersebut menjadi indikator bahwa ketahanan air di Aceh Jaya masih rentan, serta memperlihatkan bahwa upaya pengelolaan sumber daya alam, khususnya air bersih, belum dilakukan secara

optimal dan berkelanjutan. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa Aceh Jaya masih menghadapi tantangan dalam menjaga kesinambungan sumber daya alam, terutama dalam menjamin ketersediaan air minum layak bagi seluruh masyarakat. Ketahanan air yang menurun ini juga berdampak pada aspek kesehatan, kebersihan, dan produktivitas masyarakat, serta berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang menargetkan pembangunan berkelanjutan berbasis kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, Aceh Jaya perlu memperkuat integrasi kebijakan pengelolaan air dalam rencana pembangunan, termasuk peningkatan infrastruktur air bersih, konservasi daerah tangkapan air, dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan. Ketersediaan air yang aman dan layak harus menjadi prioritas dalam RPJPD sebagai fondasi utama pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

3. Masih terdapat kesenjangan dalam kesinambungan pembangunan

Masih terdapat kesenjangan dalam kesinambungan pembangunan antar periode RPJMD di Kabupaten Aceh Jaya yang berdampak tidak tercapainya sejumlah target strategis secara optimal, terutama dalam aspek pembangunan ekonomi, kualitas sumber daya manusia (SDM), lingkungan hidup, dan produktivitas sektor unggulan. Ketidakterpaduan arah kebijakan antar periode RPJMD menyebabkan lemahnya sinergi lintas sektor dan keterputusan program prioritas yang seharusnya berkelanjutan. Hal ini tercermin dari stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah, rendahnya nilai produktivitas di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi lokal. Di sisi lain, pengembangan SDM juga masih belum menyentuh aspek kompetensi dan inovasi berbasis kebutuhan daerah, sementara kondisi lingkungan mengalami tekanan akibat belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kualitas air, udara, dan lahan menunjukkan tren fluktuatif yang mengindikasikan lemahnya integrasi kebijakan perlindungan lingkungan antar periode.

Ketidakterhubungan antara perencanaan jangka menengah dan implementasi program lintas sektor menyebabkan fragmentasi kebijakan, lemahnya monitoring dan evaluasi, serta inkonsistensi dalam pelaksanaan prioritas pembangunan. Hal ini terlihat dari stagnasi pertumbuhan ekonomi, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, serta rendahnya capaian indikator lingkungan dan ketahanan daerah. Kesenjangan ini juga memperlemah daya saing daerah dalam jangka panjang dan berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam kabupaten. Oleh karena itu, integrasi antara RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi krusial untuk memastikan kesinambungan arah pembangunan yang berkelanjutan, terarah, dan konsisten. Dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang terintegrasi dalam RPJPD, yang mampu menjembatani kesinambungan pembangunan antar periode RPJMD, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan sejalan menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penyelarasan visi, program prioritas, serta penguatan sinergi antar pelaku pembangunan menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan di masa depan.

4. Kualitas SDM yang cenderung masih rendah

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Aceh Jaya masih tergolong rendah, yang tercermin dari capaian indikator pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja yang belum optimal. Faktor utama penyebab kondisi ini antara lain adalah keterbatasan akses dan kualitas layanan pendidikan, minimnya pelatihan vokasional dan pengembangan kompetensi kerja, serta infrastruktur kesehatan yang belum merata. Rendahnya kualitas SDM ini berdampak langsung pada rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dan kurang maksimalnya kontribusi masyarakat terhadap pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), permasalahan kualitas SDM ini menjadi tantangan serius dalam mencapai visi pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan kapasitas SDM menghambat inovasi, adopsi teknologi, dan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan UMKM. Oleh karena itu, perlu strategi terpadu yang berkelanjutan melalui investasi pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing. Beberapa poin terkait permasalahan pembangunan SDM yang masih dihadapi dalam periode pembangunan 2005-2025 diantaranya adalah sebagai berikut.

1) **Kualitas hidup masyarakat yang masih rendah,** Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023, Kabupaten Aceh Jaya memiliki skor sebesar 72,44, menempatkannya di tingkat menengah dan belum termasuk dalam deretan daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Aceh. Angka ini masih berada di bawah rata-rata IPM provinsi yang mencapai 74,70, serta tertinggal cukup jauh dari kota-kota seperti Banda Aceh (88,32) dan Lhokseumawe (80,26). Rendahnya IPM ini mencerminkan adanya tantangan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Hambatan utama yang dihadapi Aceh Jaya kemungkinan besar berkaitan dengan terbatasnya infrastruktur pelayanan dasar, seperti akses air minum layak dan energi bersih, serta belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), pemerintah daerah perlu menitikberatkan pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap layanan dasar agar IPM dapat meningkat secara signifikan dan merata.
2) **Tingkat pendidikan yang belum ideal**, Berdasarkan data Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023, Kabupaten Aceh Jaya mencatat angka 14,02 tahun, yang menempatkannya pada posisi menengah ke bawah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Nilai ini masih berada di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 14,38 tahun, dan cukup tertinggal dari kota-kota seperti Banda Aceh (17,93 tahun) dan Lhokseumawe (15,27 tahun). Selanjutnya, Berdasarkan data rata-rata lama sekolah (ALS) tahun 2023, Kabupaten Aceh Jaya mencatat angka sebesar 8,74 tahun, yang berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh sebesar 9,55 tahun. Kabupaten Aceh Jaya dengan angka 8,74 tahun berada dalam kategori sedang, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dengan demikian, Aceh Jaya tidak tergolong sebagai daerah dengan lama sekolah terendah, namun juga belum mampu menembus kategori

tinggi, yang umumnya didominasi oleh kota-kota besar dengan infrastruktur pendidikan yang lebih maju. Rendahnya angka HLS dan ALS ini mencerminkan masih terbatasnya akses dan kualitas layanan pendidikan, serta kemungkinan adanya hambatan seperti kurangnya fasilitas pendidikan yang merata, keterbatasan tenaga pendidik berkualitas, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang belum mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak. Dalam konteks kebijakan pembangunan daerah jangka panjang, kondisi ini perlu menjadi perhatian utama, mengingat pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah daerah perlu merumuskan strategi yang berorientasi pada perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta intervensi sosial untuk menekan angka putus sekolah dan mendorong generasi muda agar dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

3) **Masih kurangnya keterampilan dan diversifikasi lapangan pekerjaan,** data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 menunjukkan, Kabupaten Aceh Jaya mencatat angka sebesar 70,46 persen, menempatkannya sedikit di atas rata-rata provinsi yang berada pada angka 64,77 persen. Capaian ini menunjukkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi yang relatif tinggi. Namun demikian, tingginya TPAK di Aceh Jaya sebagian besar masih didominasi oleh tenaga kerja di sektor tradisional seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan informal, yang umumnya memiliki produktivitas rendah dan rentan terhadap fluktuasi ekonomi serta perubahan iklim. Hal ini juga terlihat dari data BPS tahun 2023 yang menunjukkan bahwa, persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja di Kabupaten Aceh Jaya didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan SD sebesar 32,62 persen, SMP sebesar 18,51 persen, SMA sebesar 34,74 persen dan hanya 14,14 persen yang memiliki tingkat pendidikan di level universitas. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat keterampilan tenaga kerja, kurangnya diversifikasi lapangan pekerjaan, serta minimnya akses terhadap pelatihan vokasi dan teknologi. Dalam konteks pembangunan daerah jangka panjang, pemerintah daerah perlu mengarahkan kebijakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar, pengembangan UMKM berbasis inovasi, dan peningkatan investasi sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) **Tingkat kesehatan masyarakat yang belum optimal,** Berdasarkan data tahun 2023, angka harapan hidup di Kabupaten Aceh Jaya tercatat sebesar 67,55 tahun, berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh yang mencapai 70,34 tahun. Posisi ini mencerminkan adanya tantangan signifikan dalam aspek kesehatan masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya. Rendahnya angka harapan hidup ini dapat dikaitkan dengan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, serta tingginya ketergantungan terhadap sektor ekonomi informal yang rawan terhadap risiko kesehatan. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, pemerintah daerah perlu menyusun strategi komprehensif, antara lain peningkatan infrastruktur dan distribusi fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan, penguatan layanan kesehatan primer dan promotif, serta pengembangan program

intervensi gizi dan kesehatan ibu-anak. Kebijakan ini perlu diintegrasikan dengan pendekatan lintas sektor, seperti perbaikan sanitasi, edukasi masyarakat, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, guna mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan di Aceh Jaya.

5) **Masih rendahnya status gizi,** Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Kabupaten Aceh Jaya mencatat prevalensi stunting sebesar 34,0 persen, wasting 13,3 persen, dan underweight 21 persen, yang masih berada di atas rata-rata dan mendekati nilai rata-rata Provinsi Aceh masing-masing sebesar 29,4 persen, 13,6 persen, dan 22,6 persen. Posisi ini menunjukkan bahwa Aceh Jaya menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan gizi anak usia dini, yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Tingginya angka stunting dan underweight mengindikasikan adanya masalah struktural seperti akses terbatas terhadap pangan bergizi, kurangnya edukasi gizi keluarga, serta masih lemahnya pelayanan kesehatan dasar khususnya di wilayah terpencil. Untuk mengatasi kondisi ini, kebijakan pembangunan daerah perlu difokuskan pada program perbaikan gizi masyarakat melalui intervensi multi-sektor yang mencakup peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan makanan tambahan bergizi, serta pelatihan kader posyandu dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dalam jangka panjang, penting bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem pemantauan gizi yang berkelanjutan, mendorong kolaborasi lintas sektor, dan memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai fondasi untuk menurunkan prevalensi malnutrisi secara signifikan di Aceh Jaya.
6) **Rendahnya perhatian terhadap kualitas kesehatan keluarga,** Berdasarkan data perkembangan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Aceh Jaya tahun 2021 hingga 2023, terlihat bahwa capaian IKS mengalami peningkatan meskipun masih tergolong rendah. Pada tahun 2021, nilai IKS berada di angka 0,294, naik menjadi 0,326 di tahun 2022, dan kembali mengalami peningkatan kecil menjadi 0,330 di tahun 2023. Meskipun menunjukkan tren positif, nilai tersebut masih masuk dalam kategori Keluarga Tidak Sehat, karena berada di bawah ambang batas 0,500. Hal ini menandakan bahwa hanya sekitar 33 persen keluarga di Aceh Jaya yang memenuhi kriteria keluarga sehat berdasarkan 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, penyakit menular dan tidak menular, kondisi lingkungan, hingga gaya hidup sehat. Tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, serta masih kurangnya intervensi terintegrasi lintas sektor untuk peningkatan kesehatan keluarga
7) **Pendapatan Perkapita yang tergolong rendah,** Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tahun 2023, Kabupaten Aceh Jaya mencatat angka sebesar Rp34,554 juta, yang menempatkannya pada kelas menengah ke bawah di antara kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Nilai ini masih jauh di bawah kota-kota seperti Banda Aceh (Rp90,749 juta) dan Lhokseumawe (Rp56,597 juta), yang menandakan masih adanya kesenjangan signifikan dalam kinerja ekonomi antarwilayah. Rendahnya pendapatan per kapita di Aceh Jaya berpotensi memperburuk tantangan sosial-ekonomi

lainnya, seperti tingginya angka stunting dan rendahnya harapan hidup, sebagaimana terlihat dalam data sebelumnya. Tantangan utama bagi daerah ini meliputi ketergantungan pada sektor primer yang bernilai tambah rendah, rendahnya investasi sektor swasta, serta keterbatasan infrastruktur penunjang ekonomi lokal. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan jangka panjang perlu diarahkan pada diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, seperti pengembangan sektor pariwisata bahari, pertanian modern, dan industri pengolahan. Selain itu, perlu ada perluasan akses pendidikan dan pelatihan vokasi guna meningkatkan kualitas tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi daerah secara berkelanjutan.

8) **Ketimpangan gender yang masih cenderung tinggi,** Berdasarkan data perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Aceh Jaya dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya penurunan yang cukup konsisten dari 0,520 pada tahun 2019 menjadi 0,464 pada tahun 2023. Meskipun tren ini menunjukkan perbaikan, namun nilai IKG Aceh Jaya masih berada dalam rentang 0,50–0,75, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan gender sedang hingga tinggi. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek seperti partisipasi ekonomi, pendidikan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Aceh dan nasional, Aceh Jaya cenderung memiliki nilai IKG yang lebih tinggi, yang berarti tingkat ketimpangan gendernya lebih buruk. Pada tahun 2023, IKG nasional adalah 0,447 dan Aceh 0,489, sementara Aceh Jaya mencapai 0,464, sedikit lebih baik dari Provinsi Aceh namun masih lebih buruk dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, Aceh Jaya masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan kesetaraan gender. Untuk menurunkan tingkat ketimpangan ini secara lebih signifikan, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu memperkuat kebijakan afirmatif, seperti meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, mendorong keterlibatan perempuan dalam politik dan kepemimpinan, serta membangun sistem perlindungan sosial yang responsif gender. Upaya lintas sektor dan berbasis komunitas akan sangat penting dalam mengakselerasi pencapaian kesetaraan gender yang lebih merata dan berkelanjutan.

5. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya optimal dan memenuhi prinsip good governance

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Jaya belum sepenuhnya optimal dan masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain adalah kapasitas aparatur yang belum merata, lemahnya sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik turut menghambat efisiensi birokrasi. Ketidakseimbangan dalam tata kelola ini berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik, inefisiensi program pembangunan, dan potensi kebocoran anggaran. Dalam konteks

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), permasalahan ini menjadi tantangan besar karena dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta penerapan sistem pemerintahan digital menjadi strategi penting untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh. Beberapa poin permasalahan pembangunan SDM yang masih dihadapi dalam periode pembangunan 2005-2025 diantaranya adalah sebagai berikut.

1) **Pelayanan publik yang belum optimal,** Pelayanan publik di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2023 menunjukkan capaian yang masih perlu ditingkatkan, dengan skor Indeks Pelayanan Publik sebesar 2,83 yang menempatkannya dalam kategori "cukup". Nilai ini mencerminkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam penyediaan layanan kepada masyarakat, kualitas dan efektivitasnya masih belum optimal. Capaian ini sekaligus menunjukkan adanya ruang besar untuk perbaikan dan penguatan sistem pelayanan publik di masa depan. Beberapa tantangan yang kemungkinan dihadapi antara lain adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, infrastruktur pelayanan yang belum merata, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi layanan. Dalam konteks pembangunan jangka panjang daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta sebagai fondasi penting bagi percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
2) **Digitalisasai pelayanan publik yang belum berjalan optimal,** hal ini ditandai berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 di Aceh, Kabupaten Aceh Jaya memperoleh indeks sebesar 2,42 dengan predikat "Cukup". Posisi ini menempatkan Aceh Jaya di atas rata-rata beberapa kabupaten lainnya yang masih memperoleh predikat "Kurang", seperti Aceh Utara (1,70) dan Aceh Tenggara (1,74), namun masih tertinggal dari sejumlah daerah yang sudah meraih predikat "Baik", seperti Aceh Barat Daya (2,61), Pidie Jaya (2,63), dan Banda Aceh (3,54). Ini mencerminkan bahwa meskipun Aceh Jaya telah menunjukkan kemajuan dalam implementasi SPBE, masih terdapat ruang besar untuk peningkatan terutama dalam aspek integrasi layanan digital, efisiensi birokrasi, serta keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan digital. Tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh Kabupaten Aceh Jaya dalam optimalisasi SPBE mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di wilayah pedesaan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan sistem digital pemerintahan, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat dan aparatur sipil negara juga turut menjadi hambatan dalam mempercepat transformasi digital. Untuk itu, diperlukan investasi yang lebih besar dalam pelatihan SDM, penguatan infrastruktur TIK, serta kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penerapan layanan pemerintahan berbasis elektronik yang lebih efektif dan inklusif di Aceh Jaya.
3) **Profesionalitas ASN yang masih rendah,** hal ini tercermin dari nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Kabupaten Aceh Jaya tahun 2023 sebesar 59,48. Berdasarkan klasifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), skor tersebut masuk

dalam kategori "Sangat Rendah", yang mengindikasikan bahwa kualitas ASN dalam aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin masih jauh dari standar yang diharapkan. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan. Beberapa tantangan yang kemungkinan dihadapi antara lain adalah rendahnya akses dan partisipasi ASN dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi, kurangnya sistem merit yang kuat dalam manajemen karier, serta belum optimalnya pengawasan dan evaluasi kinerja ASN. Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), peningkatan profesionalitas ASN menjadi prioritas strategis karena ASN merupakan pilar utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, kebijakan yang responsif, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

4) **Implementasi reformasi yang belum optimal,** Implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Aceh Jaya hingga saat ini masih belum optimal, di mana pelaksanaannya cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial yang mendorong perubahan kinerja birokrasi secara signifikan. Reformasi yang seharusnya menjadi motor penggerak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan responsif, masih terbatas pada pemenuhan dokumen dan pelaporan formal semata tanpa diiringi dengan transformasi budaya kerja, peningkatan kualitas pelayanan, serta efisiensi proses birokrasi. Akibatnya, dampak reformasi belum dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam hal kecepatan layanan publik maupun kualitas kebijakan yang dihasilkan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi resistensi terhadap perubahan, rendahnya komitmen pimpinan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang daerah, kondisi ini menjadi penghambat serius yang perlu segera diatasi guna memastikan pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing dalam mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.
5) **Pengelolaan kearsipan yang masih kurang,** Kualitas pengelolaan kearsipan di Kabupaten Aceh Jaya hingga tahun 2023masih berada pada predikat “Kurang”, yang mencerminkan lemahnya manajemen arsip sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang kearsipan, belum adanya sistem arsip digital yang terintegrasi, serta kurangnya kesadaran dan komitmen perangkat daerah terhadap pentingnya pengelolaan arsip yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan standar nasional. Arsip, yang seharusnya menjadi instrumen pendukung pengambilan keputusan dan akuntabilitas birokrasi, justru kerap dipandang sebagai aspek administratif semata. Tantangan lainnya juga mencakup keterbatasan infrastruktur dan fasilitas penyimpanan arsip yang memadai. Kondisi ini berpotensi menghambat transparansi, efektivitas layanan publik, serta mengganggu kesinambungan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi birokrasi dan sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang yang menuntut sistem pemerintahan yang profesional, efisien, dan modern.

6) **Kemandirian keuangan daerah yang masih rendah,** Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Jaya masih tergolong rendah, yang tercermin dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah yang hanya sebesar 9,29 persen pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan pembangunan daerah masih bergantung pada transfer pusat, seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana otonomi khusus. Permasalahan utama yang dihadapi dalam peningkatan PAD meliputi basis pajak dan retribusi daerah yang sempit, belum optimalnya pengelolaan aset daerah sebagai sumber pendapatan, serta rendahnya kapasitas kelembagaan dalam menggali potensi ekonomi lokal secara maksimal. Selain itu, sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata belum dikelola secara terintegrasi dan produktif untuk menghasilkan kontribusi signifikan terhadap PAD. Tantangan lainnya adalah belum efektifnya inovasi kebijakan fiskal daerah dan kurangnya investasi swasta yang dapat memperluas basis ekonomi lokal. Dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang daerah, peningkatan kemandirian fiskal menjadi prioritas penting agar Aceh Jaya memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunannya secara mandiri dan berkelanjutan.

6. Implementasi aspek-aspek Keistimewaan Aceh belum sepenuhnya terwujud secara efektif dan menyeluruh

Implementasi aspek-aspek Keistimewaan Aceh di Kabupaten Aceh Jaya hingga kini belum sepenuhnya terwujud secara efektif dan menyeluruh, meskipun keistimewaan tersebut memberikan peluang besar dalam penguatan tata kelola pemerintahan, pendidikan, adat dan budaya, serta kehidupan beragama. Namun, dalam praktiknya, penerapan keistimewaan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman aparatur terhadap substansi kebijakan kekhususan, kurangnya koordinasi lintas sektor dan antar level pemerintahan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan dana otonomi khusus untuk program strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat juga menjadi kendala utama. Keterlambatan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan turunan dari kekhususan Aceh di tingkat daerah turut memperlemah efektivitas implementasi. Dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang daerah, optimalisasi keistimewaan Aceh harus menjadi prioritas utama, dengan memperkuat regulasi lokal, meningkatkan kapasitas ASN, serta memastikan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah agar keistimewaan dapat benar-benar menjadi fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Aceh Jaya.

1) **Pembangunan Syariat yang belum optimal,** Berdasarkan data hasil evaluasi Indeks Pembangunan Syariah (IPS) Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2024, Kabupaten Aceh Jaya menempati peringkat ke-22 dari 23 daerah, dengan nilai IPS sebesar 79,95. Posisi ini hanya sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Aceh Tengah (79,26) dan berada jauh di bawah Kabupaten/Kota dengan capaian tertinggi seperti Banda Aceh (89,66) dan Pidie (88,19). Dengan nilai tersebut, Aceh Jaya tergolong dalam kelompok daerah dengan nilai IPS rendah, menunjukkan bahwa pelaksanaan dan integrasi nilai-nilai Syariat Islam dalam aspek sosial dan kelembagaan masih belum optimal jika

dibandingkan dengan daerah lain di Aceh. Tingkat pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Jaya masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain. Rendahnya capaian ini mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi, seperti masih terbatasnya akses dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, rendahnya kepatuhan membayar zakat melalui Baitul Mal, serta lemahnya kemampuan baca Al-Qur'an dan pengelolaan masjid serta meunasah. Selain itu, pelaksanaan nilai-nilai akhlak dan hukum jinayat juga masih menghadapi hambatan dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi antar lembaga. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi strategis dari pemerintah daerah, baik melalui peningkatan literasi syariah, penguatan kelembagaan keagamaan, maupun optimalisasi program-program berbasis nilai-nilai Islam guna memperkuat implementasi Syariat Islam secara menyeluruh dan berkelanjutan di Aceh Jaya.

2) **Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan dan adat istiadat tradisional,** meskipun kekhususan Aceh memberikan ruang yang kuat untuk penguatan nilai-nilai lokal melalui peran adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah minimnya dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya lokal, terbatasnya dukungan anggaran dan infrastruktur kebudayaan, serta rendahnya partisipasi generasi muda dalam pelestarian tradisi. Selain itu, globalisasi dan perubahan gaya hidup turut menyebabkan tergerusnya nilai-nilai adat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Lemahnya sinergi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan komunitas budaya juga menghambat upaya pelestarian secara berkelanjutan. Dalam konteks kekhususan Aceh, permasalahan ini menjadi kritis karena identitas dan jati diri masyarakat Aceh sangat terkait erat dengan adat dan budaya. Oleh karena itu, penguatan kebijakan budaya dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah perlu dilakukan secara menyeluruh, dengan pendekatan yang integratif antara pelestarian, pendidikan budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
3) **Lemahnya kemandirian dayah dan kemampuan kewirausahaan bagi santri,** Lemahnya kemandirian dayah dan rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan santri menjadi salah satu tantangan nyata dalam konteks kekhususan Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Jaya. Meskipun dayah memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter dan pendidikan keagamaan, namun belum sepenuhnya mampu menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Tantangan utama yang dihadapi antara lain terbatasnya akses terhadap pelatihan kewirausahaan yang relevan, kurangnya integrasi kurikulum berbasis ekonomi kreatif, serta minimnya dukungan infrastruktur dan pendanaan bagi pengembangan unit usaha dayah. Selain itu, masih rendahnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan dalam mendorong ekonomi berbasis dayah turut memperparah kondisi ini. Dalam konteks kekhususan Aceh yang memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan dayah, perlu ada kebijakan afirmatif dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk memperkuat kapasitas manajerial dan ekonomi pesantren. Hal ini penting guna menjadikan dayah tidak hanya sebagai pusat dakwah, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi umat yang mandiri dan berkelanjutan.

7. Tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah masih belum merata secara signifikan

Tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Aceh Jaya selama periode 2005–2045 masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, yang tercermin dari kesenjangan akses terhadap infrastruktur dasar, layanan publik, serta peluang ekonomi antara wilayah pesisir dan pedalaman. Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai tantangan, seperti keterbatasan konektivitas jalan dan transportasi antar kecamatan, distribusi investasi pembangunan yang cenderung terkonsentrasi di pusat kabupaten, serta belum optimalnya perencanaan berbasis data spasial yang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Selain itu, ketimpangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia antar wilayah turut memperkuat disparitas tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan dan memperdalam jurang ketimpangan sosial. Oleh karena itu, dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis wilayah (spasial), yang mendorong pemerataan investasi, peningkatan konektivitas, serta penguatan kapasitas lokal di seluruh wilayah Aceh Jaya. Beberapa poin yang menunjukkan ketimpangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1) **Akses dan konektivitas belum optimal,** Berdasarkan data kondisi jalan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya tren peningkatan proporsi kondisi jalan baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, proporsi jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 43,0 persen, kemudian meningkat menjadi 44,0 persen pada 2020, 45,0 persen pada 2021, dan terus naik menjadi 47,0 persen di tahun 2022 hingga mencapai 48,26 persen pada tahun 2023. Meskipun perkembangan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan, namun proporsi jalan rusak dan rusak berat masih cukup signifikan, yaitu 197,355 km atau sekitar 36 persen dari total panjang jalan pada tahun 2023. Hal yang sama juga terlihat dari proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik yang hingga tahun 2023 hanya sekitar 60,8 persen. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah di Aceh Jaya belum merata secara signifikan, terutama di daerah-daerah pedalaman atau terpencil yang kemungkinan masih mengalami keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur dasar.
2) **Pengendalian kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang yang belum optimal,** Pengendalian terhadap kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang di Kabupaten Aceh Jaya hingga saat ini masih belum optimal, yang tercermin dari maraknya aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta tumpang tindih pemanfaatan lahan. Permasalahan ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya tata ruang yang berkelanjutan. Selain itu, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian tata ruang membuat pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang menjadi kurang efektif. Tantangan lainnya adalah belum terintegrasinya kebijakan sektoral dengan perencanaan ruang, yang menyebabkan inkonsistensi antara rencana pembangunan dengan arahan pemanfaatan ruang.

Ketidakteraturan ini dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan menimbulkan konflik penggunaan lahan. Oleh karena itu, dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), diperlukan upaya penguatan kelembagaan, pemutakhiran data tata ruang, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna memastikan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan dan mendukung pembangunan yang tertib, berkelanjutan, dan terarah.

3) **Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan transmigrasi,** Pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Aceh Jaya hingga kini masih belum optimal, ditandai dengan terbatasnya infrastruktur pendukung, minimnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, serta belum maksimalnya integrasi antara kawasan transmigrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya dukungan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum terbangunnya sistem pendampingan dan penguatan kapasitas bagi masyarakat transmigran. Selain itu, keberlanjutan ekonomi di kawasan transmigrasi sering terhambat oleh rendahnya produktivitas lahan dan keterbatasan akses pasar. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), pengembangan transmigrasi perlu diarahkan pada pendekatan berbasis kawasan yang terintegrasi dengan pembangunan sektor pertanian, industri olahan, dan infrastruktur konektivitas, serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini juga harus didukung oleh kebijakan afirmatif yang mendorong partisipasi aktif transmigran dan masyarakat lokal guna menciptakan kawasan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pemerataan pembangunan wilayah.
4) **Pengentasan kawasan kumuh yang belum optimal,** hal tersebut tercermin dari masih adanya 136,29 hektare kawasan kumuh atau sekitar 4,6 persen dari total luas permukiman. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman, termasuk akses terhadap air bersih, sanitasi layak, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya masih belum merata. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta belum adanya program penanganan kumuh yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan. Selain itu, tekanan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pengendalian tata ruang juga memperburuk kondisi kawasan permukiman. Dalam jangka panjang, kebijakan penanganan kawasan kumuh perlu diarahkan pada pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, serta integrasi program perumahan dengan pembangunan infrastruktur dasar yang ramah lingkungan. Pendekatan berbasis kawasan dan berbasis komunitas menjadi kunci untuk menciptakan permukiman layak huni, sehat, dan berkelanjutan dalam mendukung visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Jaya.

Berbagai masalah pembangunan ini merupakan sebagian persoalan yang sedang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya. Persoalan ini akan dirumuskan secara lebih fokus dalam isu-

isu strategis dan isu-isu strategis akan menentukan arah kebijakan yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan seluruh lapisan masyarakat.

3.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis ini sangat penting untuk menentukan arah. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Penyusunan isu strategis dilakukan melalui analisis menyeluruh terhadap kondisi eksisting, tantangan pembangunan, serta potensi dan sumber daya daerah yang tersedia. Proses ini mencakup identifikasi permasalahan pokok dari berbagai sektor pembangunan, pemetaan keterkaitan antar isu, serta penilaian terhadap dampaknya terhadap visi dan misi pembangunan jangka panjang. Isu strategis dirumuskan berdasarkan data dan informasi yang valid, aspirasi masyarakat, hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, serta sinkronisasi dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Dalam dokumen perencanaan seperti RPJPD atau RPJMD, isu strategis menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan, sehingga penyusunan yang cermat dan partisipatif menjadi sangat penting guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Berbagai isu strategis yang dianalisiskemudian dikelompokkan berdasarkan tingkatannya sebagai berikut.

3.2.1. Isu Strategis Global

Isu strategis global merujuk pada permasalahan besar yang berdampak luas lintas negara dan wilayah, serta memengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional hingga daerah. Beberapa isu strategis global yang dimasukkan sebagai bahan analisis dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1) **Perkembangan demografi global,** perubahan struktur penduduk di tingkat dunia turut memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Tren global menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, pergeseran piramida penduduk, urbanisasi yang masif, serta bonus demografi di negara-negara berkembang. Dalam konteks Kabupaten Aceh Jaya, dinamika ini menuntut kesiapan daerah dalam mengelola potensi dan tantangan demografi, seperti penyediaan lapangan kerja bagi usia produktif, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kesiapan infrastruktur sosial untuk menghadapi penuaan penduduk di masa depan. Jika tidak diantisipasi, perkembangan demografi global dapat memperlebar kesenjangan kesejahteraan dan menekan daya saing daerah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah harus berorientasi pada penguatan sumber daya manusia yang adaptif, inklusif, dan produktif, sebagai respon terhadap perubahan demografi global yang semakin kompleks dan cepat.

2) **Geopolitik dan geoekonomi,** Ketegangan antar negara, perang dagang, konflik wilayah, serta fluktuasi harga komoditas global akibat dinamika geoekonomi dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai daerah yang masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, Aceh Jaya rentan terhadap gejolak harga global dan gangguan rantai pasok internasional. Selain itu, posisi Indonesia sebagai bagian dari kawasan strategis Indo-Pasifik juga menempatkan daerah seperti Aceh Jaya dalam lingkup pengaruh kebijakan regional maupun global. Oleh karena itu, dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif dan resilien terhadap dinamika geopolitik dan geoekonomi global, melalui diversifikasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi era globalisasi dan kompetisi lintas batas yang semakin kompleks.
3) **Perkembangan Teknologi,** Perkembangan teknologi global yang pesat menjadi isu strategis yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk arah pembangunan daerah seperti Kabupaten Aceh Jaya. Transformasi digital, revolusi industri 4.0, kecerdasan buatan, big data, serta teknologi hijau telah mendorong perubahan besar dalam sistem ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan. Namun, pemanfaatan teknologi di daerah masih menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat dan aparatur, serta belum meratanya akses internet di wilayah pedesaan. Kesenjangan digital ini berisiko memperlebar ketimpangan pembangunan dan menurunkan daya saing daerah. Oleh karena itu, dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penting bagi Aceh Jaya untuk merumuskan strategi yang mendorong adopsi teknologi secara inklusif dan berkelanjutan, termasuk penguatan SDM digital, pembangunan infrastruktur TIK, serta integrasi teknologi dalam layanan publik, sektor pendidikan, pertanian, dan UMKM, guna menciptakan ekonomi lokal yang adaptif dan berorientasi masa depan.
4) **Peningkatan Urbanisasi Dunia,** Peningkatan urbanisasi global merupakan isu strategis yang berdampak luas terhadap perencanaan pembangunan, termasuk bagi daerah seperti Kabupaten Aceh Jaya. Tren pertumbuhan penduduk yang cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan menyebabkan tekanan terhadap penyediaan infrastruktur dasar, ketersediaan lahan, lingkungan hidup, serta pelayanan publik. Urbanisasi yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang baik dapat memicu tumbuhnya kawasan permukiman kumuh, meningkatnya kemacetan, pencemaran lingkungan, dan kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah. Meskipun Aceh Jaya belum mengalami urbanisasi secepat daerah metropolitan, penting untuk mengantisipasi dampak jangka panjang dari tren ini dengan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan wilayah, penguatan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar ibukota kabupaten, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan di wilayah perdesaan. Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), peningkatan kapasitas perencanaan tata ruang, pengembangan wilayah yang

inklusif, dan peningkatan kualitas hidup di kawasan urban dan perdesaan menjadi langkah strategis untuk mengelola dampak urbanisasi secara berkelanjutan.

5) **Konstelasi Perdagangan Global,** Konstelasi perdagangan global sebagai isu strategis mencerminkan dinamika hubungan ekonomi antarnegara yang semakin kompleks dan saling bergantung, ditandai dengan perubahan pola perdagangan, munculnya blok-blok ekonomi baru, serta ketegangan geopolitik yang memengaruhi arus barang dan jasa dunia. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi global, terutama bagi negara dan daerah yang sangat bergantung pada ekspor komoditas primer. Kabupaten Aceh Jaya, yang sebagian besar ekonominya masih berbasis pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan, juga terpengaruh oleh fluktuasi harga pasar global dan hambatan perdagangan internasional. Ketidakpastian ini menuntut daerah untuk memiliki strategi diversifikasi ekonomi, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia dan infrastruktur. Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka panjang, penting bagi Aceh Jaya untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah agar lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan global, termasuk dengan memperkuat kerja sama regional, pengembangan industri hilirisasi, dan peningkatan kualitas produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
6) **Tata Kelola Keuangan Global,** mencerminkan dinamika sistem keuangan internasional yang semakin kompleks dan saling terhubung antarnegara. Ketidakstabilan ekonomi di satu kawasan dapat berdampak langsung pada negara lain melalui jalur perdagangan, investasi, nilai tukar, dan arus modal. Perubahan kebijakan suku bunga di negara maju, gejolak pasar keuangan global, serta ketidakseimbangan neraca perdagangan menjadi tantangan utama bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, ketergantungan pada pembiayaan eksternal dan volatilitas nilai tukar dapat memperbesar risiko terhadap stabilitas makroekonomi nasional dan daerah. Dalam konteks pembangunan daerah seperti Aceh Jaya, tantangan ini perlu direspons dengan meningkatkan kapasitas fiskal, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Dalam jangka panjang, sinkronisasi kebijakan fiskal nasional dan daerah serta peningkatan literasi keuangan menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal terhadap dampak fluktuasi keuangan global.
7) **Pertumbuhan Kelas Menengah,** Pertumbuhan kelas menengah sebagai isu strategis global mencerminkan perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi dunia. Peningkatan jumlah populasi kelas menengah, terutama di negara-negara berkembang, membawa dampak besar terhadap pola konsumsi, permintaan terhadap layanan publik, serta tekanan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur. Kelas menengah yang semakin besar mendorong peningkatan aspirasi terhadap kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, serta partisipasi dalam proses demokrasi dan pembangunan. Namun, di sisi lain, pertumbuhan ini juga menimbulkan tantangan baru seperti ketimpangan pendapatan, urbanisasi yang tidak terkendali, dan peningkatan emisi karbon dari aktivitas konsumtif. Bagi daerah seperti Kabupaten Aceh Jaya, fenomena ini menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperluas akses pendidikan

dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi lokal agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, pertumbuhan kelas menengah harus direspons dengan kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengorbankan keseimbangan sosial dan lingkungan.

8) **Persaingan Pemanfaatan Sumber daya Alam,** Meningkatnya kebutuhan energi, pangan, dan bahan baku akibat pertumbuhan penduduk dan industrialisasi global telah mendorong eksploitasi SDA secara masif. Hal ini tidak hanya memicu ketegangan geopolitik, tetapi juga berdampak pada tingginya tekanan terhadap ekosistem lokal dan keberlanjutan lingkungan. Kabupaten Aceh Jaya yang memiliki potensi kekayaan alam, seperti hutan, hasil pertanian, perikanan, dan sumber daya mineral, dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Jika tidak dikelola dengan bijak, ketergantungan pada SDA dapat menimbulkan kerentanan ekonomi dan degradasi ekologis. Oleh karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), diperlukan strategi pengelolaan SDA yang berkelanjutan, berbasis nilai tambah lokal, serta memperkuat tata kelola lingkungan dan keadilan antar generasi. Penguatan kelembagaan, inovasi teknologi ramah lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci dalam merespons dinamika global ini secara adaptif dan berkelanjutan.
9) **Perubahan Iklim,** Perubahan iklim global merupakan isu strategis yang memiliki dampak luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk di tingkat daerah seperti Kabupaten Aceh Jaya. Fenomena ini ditandai dengan peningkatan suhu bumi, naiknya permukaan air laut, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan badai. Kabupaten Aceh Jaya sebagai wilayah pesisir dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim tersebut. Gangguan terhadap musim tanam, berkurangnya hasil tangkapan nelayan, dan meningkatnya ancaman abrasi serta banjir rob menjadi tantangan nyata yang perlu segera direspons. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perubahan iklim harus diintegrasikan sebagai salah satu isu prioritas dengan pendekatan mitigasi dan adaptasi yang terencana. Hal ini mencakup penguatan ketahanan wilayah, peningkatan kualitas tata kelola lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, Aceh Jaya dapat membangun ketahanan iklim yang tangguh sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan di tengah dinamika perubahan global.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-Isu strategis nasional adalah permasalahan, tantangan, atau peluang yang bersifat mendasar dan memiliki dampak luas terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan, yang harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan nasional. Isu ini mencerminkan kondisi aktual dan proyeksi masa depan Indonesia dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lingkungan hidup. Isu strategis nasional biasanya ditetapkan oleh pemerintah pusat

berdasarkan evaluasi terhadap capaian pembangunan, dinamika global dan regional, serta aspirasi masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, isu strategis nasional menjadi acuan penting agar kebijakan dan program di tingkat daerah selaras dengan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan di setiap wilayah, termasuk di kabupaten/kota seperti Aceh Jaya, dapat berkontribusi secara sinergis terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Beberapa isu strategis global yang dimasukkan sebagai bahan analisis dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1) **Produktivitas rendah,** Rendahnya produktivitas merupakan salah satu isu strategis nasional yang berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Produktivitas yang belum optimal, terutama di sektor-sektor utama seperti pertanian, industri manufaktur, dan jasa, menunjukkan adanya tantangan dalam pemanfaatan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta efisiensi proses produksi. Di tingkat daerah, seperti Kabupaten Aceh Jaya, rendahnya produktivitas terlihat dari dominasi sektor-sektor dengan nilai tambah rendah, terbatasnya inovasi, dan minimnya dukungan terhadap riset serta pelatihan berbasis kebutuhan industri lokal. Faktor seperti infrastruktur yang belum merata, akses pembiayaan yang terbatas, dan rendahnya literasi teknologi juga turut memperburuk kondisi tersebut. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), peningkatan produktivitas harus menjadi agenda utama melalui penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan dukungan terhadap sektor-sektor potensial berbasis keunggulan lokal. Dengan demikian, daerah tidak hanya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2) **IPTEKIN dan Riset yang Lemah,** penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) serta riset menjadi tantangan krusial dalam upaya pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing bangsa. Rendahnya investasi dalam riset dan pengembangan, keterbatasan sumber daya manusia yang andal di bidang sains dan teknologi, serta masih terbatasnya sinergi antara lembaga penelitian, dunia usaha, dan pemerintah menyebabkan inovasi yang dihasilkan belum mampu menjawab kebutuhan strategis nasional maupun daerah. Di daerah seperti Kabupaten Aceh Jaya, lemahnya IPTEKIN tercermin dari minimnya adopsi teknologi dalam sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif, serta rendahnya kualitas pendidikan sains dan keterampilan teknologi. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penguatan IPTEKIN dan riset harus menjadi prioritas, melalui pembangunan ekosistem inovasi, penguatan perguruan tinggi dan lembaga litbang, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor. Dengan mendorong riset terapan yang relevan dan mendorong inovasi lokal, daerah dapat menciptakan solusi berbasis ilmu pengetahuan untuk berbagai tantangan pembangunan dan meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan potensi sumber daya.
3) **Deindustrialisasi dini,** hal ini terjadi ketika sektor industri manufaktur mengalami penurunan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebelum mencapai tahap kematangan ekonomi yang optimal. Fenomena ini mengindikasikan bahwa transformasi struktural dari sektor primer ke sekunder tidak berjalan secara ideal, sehingga

menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, penciptaan lapangan kerja produktif, dan peningkatan daya saing nasional. Di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Jaya, dampak deindustrialisasi dini terlihat dari rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan minimnya pengembangan kawasan industri yang berbasis potensi lokal. Hal ini menyebabkan ketergantungan tinggi pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan tanpa pengolahan lanjutan, sehingga nilai tambah ekonomi tidak optimal. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), diperlukan kebijakan afirmatif untuk memperkuat sektor industri berbasis sumber daya lokal, mendorong hilirisasi, serta menyediakan infrastruktur dan SDM yang mendukung industrialisasi inklusif dan berkelanjutan.

4) **Pariwisata dibawah potensi,** pariwisata yang berada di bawah potensi mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan kekayaan alam, budaya, dan keunikan lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Indonesia memiliki ragam destinasi unggulan, termasuk kawasan pesisir, pegunungan, dan warisan budaya yang bernilai tinggi, namun kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan pembangunan daerah masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur pendukung, kurangnya promosi dan branding destinasi, kualitas pelayanan yang belum kompetitif, serta belum terintegrasinya sektor pariwisata dengan pelaku ekonomi lokal. Di daerah seperti Kabupaten Aceh Jaya, potensi wisata alam dan budaya belum tergarap maksimal karena terbatasnya aksesibilitas, fasilitas, dan investasi. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), diperlukan strategi pengembangan pariwisata yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis komunitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat identitas daerah melalui pelestarian budaya dan lingkungan.
5) **Ekonomi laut belum optimal,** hal ini mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Meskipun sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan negara, namun pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah praktik penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing), minimnya infrastruktur pelabuhan dan rantai dingin, lemahnya teknologi dan inovasi kelautan, serta rendahnya nilai tambah dari hasil laut akibat terbatasnya industri pengolahan. Di tingkat daerah, seperti di Kabupaten Aceh Jaya yang memiliki potensi sumber daya laut melimpah, pemanfaatannya belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena belum terintegrasinya kegiatan kelautan dengan sektor-sektor pendukung lainnya. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penguatan ekonomi biru melalui pendekatan yang berkelanjutan, berbasis teknologi, dan partisipatif menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut untuk generasi mendatang.
6) **Kontribusi Koperasi dan UMKM rendah,** hal ini mencerminkan tantangan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan penguatan ekonomi rakyat. Meskipun UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional dan koperasi memiliki potensi besar

sebagai sokoguru perekonomian bangsa, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya literasi digital dan manajerial pelaku usaha, lemahnya integrasi dengan rantai pasok industri, serta belum maksimalnya dukungan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Di daerah seperti Kabupaten Aceh Jaya, UMKM dan koperasi belum berkembang secara optimal karena masih menghadapi hambatan dalam akses pasar, teknologi, dan pendampingan usaha. Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penguatan sektor UMKM dan koperasi perlu menjadi prioritas strategis melalui kebijakan afirmatif, inovasi pembiayaan, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha guna menciptakan ekonomi lokal yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing.

7) **Insfrastruktur dan literasi rendah,** tantangan mendasar dalam mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta konektivitas digital, menghambat mobilitas barang dan jasa, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta memperlebar kesenjangan antarwilayah. Di sisi lain, tingkat literasi masyarakat—baik literasi baca tulis, literasi digital, maupun literasi keuangan—masih tergolong rendah, yang berdampak langsung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, daya saing, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Kabupaten-kabupaten seperti Aceh Jaya masih menghadapi tantangan ganda dalam membenahi infrastruktur dan meningkatkan literasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perlu dirancang kebijakan terpadu yang menekankan pada pemerataan pembangunan infrastruktur, digitalisasi layanan publik, serta penguatan program literasi sebagai fondasi utama menuju pembangunan daerah yang inklusif, cerdas, dan berdaya saing.
8) **Pembangunan belum berkelanjutan,** hal ini menunjukkan masih lemahnya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek seringkali mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengakibatkan degradasi sumber daya alam, pencemaran lingkungan, serta peningkatan risiko bencana. Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Aceh Jaya, pemanfaatan lahan dan eksploitasi sumber daya alam masih dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan berkelanjutan, sehingga mengancam keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan juga tercermin dari belum optimalnya implementasi kebijakan pelestarian lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penting untuk menekankan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan agar generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai.
9) **Integrasi domestik terbatas,** masih adanya ketimpangan konektivitas dan keterhubungan antarwilayah di Indonesia, baik dari sisi infrastruktur, perdagangan

antar daerah, maupun kesenjangan pembangunan. Kondisi ini memperlemah kohesi ekonomi nasional, memperbesar biaya logistik, menghambat distribusi barang dan jasa, serta memperlebar ketimpangan pertumbuhan antarwilayah, khususnya antara kawasan barat dan timur Indonesia. Kabupaten-kabupaten yang jauh dari pusat ekonomi nasional, seperti Aceh Jaya, merasakan dampak dari keterbatasan integrasi ini dalam bentuk akses pasar yang terbatas, investasi yang rendah, hingga lambatnya pergerakan ekonomi lokal. Untuk itu, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan penguatan jaringan perdagangan domestik menjadi kunci dalam rencana pembangunan jangka panjang. Mendorong integrasi domestik tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional melalui pemerataan pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

10) **Kualitas SDM masih rendah,** mencerminkan tantangan fundamental dalam pembangunan bangsa. Meskipun Indonesia memiliki bonus demografi, kualitas SDM yang belum optimal menghambat pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal. Rendahnya capaian pendidikan, kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan, serta belum meratanya kompetensi tenaga kerja menjadi faktor utama penyebab rendahnya kualitas SDM. Selain itu, kurangnya relevansi antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, minimnya pelatihan vokasi, serta lemahnya budaya inovasi dan literasi digital turut memperparah permasalahan ini. Dampaknya, produktivitas tenaga kerja tetap rendah, daya saing nasional terganggu, dan ketimpangan sosial semakin melebar. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, penguatan kualitas SDM menjadi kunci utama, melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, reformasi sistem kesehatan, pengembangan pelatihan berbasis kompetensi, dan penciptaan ekosistem pembelajaran seumur hidup. SDM unggul akan menjadi fondasi bagi terwujudnya pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

11) **Tata kelola pemerintahan belum optimal,** masih adanya berbagai tantangan dalam mewujudkan prinsip good governance di berbagai tingkatan pemerintahan. Masalah seperti rendahnya transparansi, akuntabilitas yang belum konsisten, lemahnya koordinasi lintas sektor, hingga masih maraknya praktik birokrasi yang tidak efisien menjadi hambatan utama dalam menjalankan pemerintahan yang responsif dan berintegritas. Selain itu, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur yang belum merata juga turut memperlambat implementasi kebijakan secara efektif di daerah. Ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi, berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik dan kurang optimalnya pencapaian target pembangunan. Dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang nasional, pembenahan tata kelola menjadi prioritas penting melalui reformasi birokrasi yang substansial, digitalisasi layanan, penguatan sistem pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur, demi menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

12) **Kepastian dan penegakan hukum masih lemah,** hal tersebut merupakan tantangan fundamental dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Lemahnya penegakan

hukum ditandai oleh masih tingginya praktik korupsi, ketimpangan perlakuan hukum, lambannya proses peradilan, serta rendahnya kepatuhan terhadap putusan hukum. Di sisi lain, kepastian hukum yang belum optimal menciptakan ketidakjelasan dalam implementasi kebijakan dan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berdampak langsung pada iklim investasi, perlindungan hak-hak warga negara, dan stabilitas sosial. Kondisi ini menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan lembaga hukum, reformasi sistem peradilan, serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi agenda penting guna memastikan hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi demi menjamin keadilan sosial dan ketertiban umum di seluruh wilayah Indonesia.

13) **Demokratisasi belum optimal,** hal tersebut mencerminkan tantangan dalam mewujudkan kehidupan politik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Meskipun Indonesia telah menjalankan sistem demokrasi secara konstitusional, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kualitas partisipasi publik, dominasi elite dalam pengambilan keputusan, maraknya politik uang, serta terbatasnya ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat di sejumlah wilayah. Selain itu, lemahnya kelembagaan partai politik serta minimnya pendidikan politik bagi masyarakat menyebabkan demokrasi sering kali berjalan secara prosedural, namun belum substantif. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik dan rendahnya akuntabilitas penyelenggara negara. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk memperkuat kapasitas lembaga demokrasi, menjamin perlindungan hak-hak sipil dan politik, serta meningkatkan literasi politik masyarakat guna mendorong demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

14) **Kesenjangan Jawa dan luar Jawa**, hal tersebut menunjukkan masih timpangnya pembangunan, distribusi sumber daya, serta akses terhadap layanan publik di Indonesia. Pulau Jawa, sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan infrastruktur, menikmati pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan wilayah luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Indonesia Timur. Ketimpangan ini terlihat dari perbedaan signifikan dalam hal pendapatan per kapita, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta ketersediaan infrastruktur dasar. Akibatnya, terjadi arus migrasi besar-besaran ke Jawa yang memperparah tekanan sosial dan lingkungan di wilayah tersebut, sekaligus memperlambat pengembangan potensi ekonomi di luar Jawa. Pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan menjadi sangat mendesak, melalui penguatan konektivitas antarwilayah, alokasi anggaran yang lebih proporsional, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Upaya ini penting untuk mengurangi disparitas regional, memperkuat integrasi nasional, dan memastikan bahwa setiap warga negara, di mana pun berada, mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang.

3.2.3. Isu Strategis Provinsi Aceh

Isu strategis Provinsi Aceh merujuk pada permasalahan utama, tantangan, serta potensi daerah yang memengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah secara jangka menengah maupun panjang. Isu-isu ini bersifat penting dan mendesak untuk ditangani karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks Aceh, isu strategis mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan. Misalnya, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi, pemanfaatan potensi sumber daya alam yang belum optimal, kualitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta tantangan dalam pelaksanaan otonomi khusus dan Syariat Islam. Di sisi lain, Aceh juga menghadapi tantangan dalam memperkuat stabilitas keamanan, investasi, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Identifikasi isu strategis ini menjadi landasan penting bagi perencanaan pembangunan yang responsif dan berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah utama daerah secara berkelanjutan dan berkeadilan. Beberapa isu strategis Aceh yang dimasukkan sebagai bahan analisis dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1) **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan penanggulangan stunting,** merupakan prioritas yang mendesak dalam rangka membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Meskipun telah dilakukan berbagai intervensi di sektor kesehatan, angka stunting di Aceh masih berada di atas rata-rata nasional, mencerminkan masih adanya tantangan serius dalam pemenuhan gizi anak, akses layanan kesehatan dasar, serta perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat rumah tangga. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya edukasi gizi, keterbatasan infrastruktur kesehatan di wilayah terpencil, serta belum optimalnya sinergi lintas sektor turut memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang holistik dan terintegrasi melalui penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan cakupan imunisasi dan gizi, serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting sejak dini. Meningkatkan derajat kesehatan bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan semata, tetapi menjadi agenda lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh secara menyeluruh.
2) **Pemerataan pendidikan, perkuatan pendidikan vokasi dan meningkatkan minat baca masyarakat**, hal tersebut menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Saat ini, masih terdapat kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang berdampak pada rendahnya angka rata-rata lama sekolah serta belum meratanya kompetensi lulusan. Di sisi lain, pendidikan vokasi yang seharusnya mampu menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja masih belum optimal dalam hal kurikulum, sarana, dan keterlibatan dunia industri. Selain itu, budaya literasi di kalangan masyarakat Aceh masih relatif rendah, yang ditandai dengan minimnya fasilitas perpustakaan yang memadai dan rendahnya akses terhadap bahan bacaan berkualitas. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan harus diarahkan pada pemerataan fasilitas pendidikan, revitalisasi pendidikan vokasi berbasis potensi lokal dan kebutuhan pasar kerja, serta

gerakan literasi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara luas. Upaya ini penting untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Aceh yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan global.

3) **Penanggulangan kemiskinan,** Meskipun angka kemiskinan di Aceh menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun persentasenya masih berada di atas rata-rata nasional dan menjadi tantangan serius, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Kemiskinan di Aceh bersifat multidimensi, dipengaruhi oleh faktor seperti rendahnya kualitas pendidikan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, keterbatasan lapangan kerja yang produktif, serta belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya alam dan ekonomi lokal. Upaya penanggulangan kemiskinan ke depan perlu difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, serta pengembangan program perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran. Pendekatan ini harus melibatkan kolaborasi lintas sektor dan berbasis pada data yang akurat agar dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan menciptakan masyarakat Aceh yang lebih sejahtera dan mandiri.
4) **Peningkatan pendapatan perkapita dengan memaksimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi Aceh,** Saat ini, meskipun Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor pertanian, perikanan, energi, serta pariwisata halal, kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat masih belum maksimal akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya investasi, serta ketergantungan pada sektor-sektor yang kurang produktif. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi juga menjadi tantangan tersendiri, terutama akibat ketidakstabilan harga komoditas dan belum optimalnya pemanfaatan Dana Otonomi Khusus secara efektif. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan perlu difokuskan pada diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan iklim investasi yang ramah dan kompetitif, serta peningkatan kualitas SDM untuk mendorong produktivitas. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita Aceh secara berkelanjutan.
5) **Optimalisasi Riset dan Inovasi serta Teknologi Digital,** merupakan isu strategis yang penting bagi Provinsi Aceh dalam menjawab tantangan pembangunan modern dan meningkatkan daya saing daerah. Saat ini, kemampuan riset dan inovasi di Aceh masih menghadapi berbagai hambatan, seperti terbatasnya kolaborasi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor industri, rendahnya anggaran riset daerah, serta minimnya hilirisasi hasil penelitian yang berdampak langsung pada masyarakat. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong efisiensi pelayanan publik, pengembangan ekonomi digital, maupun peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, perlu strategi komprehensif melalui penguatan ekosistem inovasi, peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi, serta digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik yang inklusif. Dengan memaksimalkan potensi riset dan inovasi berbasis kearifan lokal serta akselerasi transformasi digital, Aceh dapat mempercepat proses pembangunan yang berkelanjutan, adaptif, dan kompetitif di era global.

6) **Membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat,** struktur ketenagakerjaan Aceh masih didominasi oleh sektor informal dan tradisional, seperti pertanian subsisten dan perdagangan kecil, yang cenderung memiliki produktivitas rendah. Sementara itu, pertumbuhan sektor industri dan jasa modern belum cukup kuat untuk menyerap tenaga kerja secara signifikan, terutama kalangan muda dan lulusan pendidikan menengah serta tinggi. Keterbatasan keterampilan kerja, kurangnya akses permodalan, serta rendahnya inovasi usaha menjadi tantangan dalam menciptakan angkatan kerja yang produktif dan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja baru berbasis potensi lokal, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta penguatan wirausaha dan UMKM. Langkah-langkah ini akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, dan percepatan transformasi ekonomi Aceh menuju arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
7) **Memperkuat industri pengolahan dan ekspor,** Hingga kini, Aceh masih didominasi oleh penjualan komoditas mentah seperti hasil pertanian, perikanan, dan tambang, yang berdampak pada rendahnya nilai tambah dan keterbatasan serapan tenaga kerja di sektor hilir. Padahal, potensi sumber daya alam Aceh sangat besar dan beragam, mulai dari kopi, minyak atsiri, hasil laut, hingga produk pertanian unggulan yang memiliki peluang besar untuk diolah dan diekspor. Tantangan utama dalam penguatan industri pengolahan terletak pada minimnya infrastruktur industri, keterbatasan teknologi dan inovasi, serta akses terhadap pasar ekspor yang belum maksimal. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan perlu diarahkan pada pembangunan kawasan industri berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas dan sertifikasi produk, serta fasilitasi perdagangan luar negeri. Dengan penguatan sektor ini, Aceh berpotensi menjadi pusat industri berbasis sumber daya lokal yang mampu bersaing secara global.
8) **Mengembangkan produktivitas pangan dan ekonomi hijau,** Meskipun Aceh memiliki potensi lahan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang luas, produktivitas sektor pangan masih belum optimal akibat terbatasnya infrastruktur pendukung, penggunaan teknologi yang masih tradisional, serta lemahnya akses petani terhadap pembiayaan dan pasar. Di sisi lain, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan alih fungsi lahan menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan sektor ini. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi hijau berbasis pertanian ramah lingkungan, agroforestri, dan pemanfaatan energi terbarukan menjadi sangat penting. Strategi pembangunan ke depan perlu menekankan peningkatan kapasitas petani, integrasi sistem pertanian berkelanjutan, serta insentif untuk pelaku usaha hijau. Dengan pendekatan ini, Aceh tidak hanya dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan hidup sebagai aset pembangunan jangka panjang.
9) **Memperkuat perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,** Ketimpangan pembangunan antara wilayah urban dan rural masih cukup mencolok, di mana kota-kota besar cenderung menjadi pusat layanan dan ekonomi, sementara desa-desa tertinggal dalam hal infrastruktur, akses teknologi, dan peluang usaha. Padahal, desa-desa di Aceh memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, kerajinan lokal, dan pariwisata berbasis budaya dan alam. Untuk itu, diperlukan penguatan

konektivitas antarwilayah, peningkatan kapasitas ekonomi lokal, serta sinergi antara pembangunan desa dan kota. Pengembangan kawasan strategis berbasis potensi lokal, revitalisasi pasar tradisional, dan penyediaan layanan publik yang merata akan mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan memperkuat keterpaduan desa dan kota sebagai simpul-simpul pertumbuhan, Aceh dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis, merata, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

10) **Tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkesinambungan, T**antangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan akibat masih adanya praktik korupsi, lemahnya pengawasan internal, serta belum optimalnya akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Selain itu, pergantian kepemimpinan yang tidak diiringi dengan kesinambungan program pembangunan seringkali menghambat pencapaian target jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi berbasis kinerja, serta penanaman budaya integritas di seluruh level pemerintahan. Pembangunan daerah juga harus didasarkan pada perencanaan yang konsisten dan terukur, dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan, Aceh dapat membangun fondasi pemerintahan yang kuat, adaptif, dan responsif terhadap tantangan masa depan.

11) **Memperkuat Otonomi Khusus,** Sejak diberlakukannya Otsus pasca perdamaian Helsinki, Aceh memperoleh kewenangan lebih luas dalam pengelolaan pemerintahan, sumber daya alam, dan pelaksanaan syariat Islam. Namun, implementasi Otsus masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya efektivitas penggunaan dana Otsus, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta belum optimalnya penguatan kelembagaan lokal. Selain itu, belum semua masyarakat merasakan dampak nyata dari kebijakan Otsus terhadap peningkatan kualitas hidup mereka. Untuk itu, penguatan Otsus perlu diarahkan pada perbaikan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan transparansi dalam pemanfaatan dana Otsus. Dengan memperkuat pelaksanaan Otsus secara substansial dan akuntabel, Aceh dapat mewujudkan pembangunan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan identitas serta aspirasi masyarakatnya.

12) **Kemandirian ruang fiskal,** Selama ini, ketergantungan terhadap dana transfer pusat, termasuk Dana Otonomi Khusus, masih sangat tinggi, sementara kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total belanja daerah masih relatif rendah. Kondisi ini membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Tantangan utama meliputi terbatasnya basis pajak dan retribusi daerah, lemahnya manajemen aset daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan PAD melalui reformasi sistem perpajakan daerah, penguatan investasi, serta digitalisasi layanan publik dan keuangan. Dengan memperkuat kemandirian ruang fiskal, Aceh akan memiliki daya ungkit yang lebih besar untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

13) **Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh,** Penerapan Syariat Islam di Aceh memiliki kekuatan hukum khusus berdasarkan kekhususan otonomi daerah, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun pemahaman masyarakat. Di sisi lain, budaya Aceh yang kaya akan nilai-nilai luhur dan tradisi lokal mulai tergerus oleh arus globalisasi dan minimnya regenerasi dalam pelestarian seni, bahasa, dan adat istiadat. Upaya penguatan Syariat Islam perlu diiringi dengan pembinaan yang inklusif, edukatif, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Sementara itu, pelestarian budaya Aceh harus melibatkan institusi pendidikan, komunitas adat, dan dukungan teknologi untuk dokumentasi dan promosi budaya. Dengan memperkuat Syariat Islam dan budaya lokal secara harmonis, Aceh tidak hanya menjaga jati dirinya, tetapi juga membangun masyarakat yang berakhlak, berdaya saing, dan berkarakter.

14) **Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan disablitas, memperkuat gender dan keluarga,** Masih banyak kelompok rentan seperti lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan yang belum mendapatkan pelayanan sosial secara optimal, baik dari sisi akses, kualitas, maupun keberlanjutan. Selain itu, ketimpangan gender dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi dan politik masih menjadi tantangan nyata, yang diperparah dengan lemahnya ketahanan keluarga akibat tekanan sosial dan ekonomi. Untuk itu, perlu penguatan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu, peningkatan kapasitas lembaga layanan sosial, serta integrasi program kesejahteraan sosial dengan pembangunan daerah. Pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pendidikan keluarga berbasis nilai-nilai lokal dan keagamaan juga menjadi pilar penting. Dengan pendekatan yang holistik, Aceh dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung semua kelompok masyarakat untuk tumbuh dan berkembang secara bermartabat.

15) **Pengelolaan sumberdaya mineral dan Batu bara serta Migas yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan,** Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya di sektor migas dan pertambangan, namun eksploitasi yang tidak ramah lingkungan berisiko menimbulkan kerusakan ekologis, konflik sosial, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, kontribusi energi terbarukan seperti tenaga air, surya, dan biomassa masih sangat minim dan belum menjadi fokus utama dalam kebijakan energi daerah. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah lemahnya regulasi pengawasan lingkungan, terbatasnya investasi hijau, serta kurangnya kapasitas teknologi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Aceh perlu mendorong kebijakan transisi energi yang adil dan berkelanjutan, memperkuat tata kelola industri ekstraktif yang transparan, serta mengembangkan infrastruktur dan inovasi di sektor energi terbarukan. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi daerah, tetapi juga melindungi warisan alam Aceh untuk generasi mendatang.

16) **Pengurangan risiko bencana,** Provinsi Aceh, berada pada kawasan rawan bencana, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Pengalaman masa lalu, terutama bencana tsunami tahun 2004, menjadi pengingat penting akan

urgensi membangun sistem mitigasi bencana yang tangguh dan menyeluruh. Meskipun telah ada berbagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan penyusunan peta risiko bencana, tantangan masih dihadapi dalam bentuk keterbatasan infrastruktur peringatan dini, lemahnya integrasi mitigasi dalam perencanaan pembangunan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, pendidikan dan pelatihan masyarakat, serta penerapan teknologi dalam deteksi dan respons bencana. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra pembangunan sangat diperlukan untuk menciptakan Aceh yang lebih siap dan tangguh menghadapi berbagai potensi bencana di masa depan.

17) **Memperkuat pembangunan kewilayahan,** Saat ini, masih terdapat ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama antara kawasan pesisir dan pedalaman, serta antara pusat kota dan daerah terpencil. Akses terhadap infrastruktur dasar, layanan publik, serta peluang ekonomi belum sepenuhnya merata, yang berdampak pada kesenjangan sosial dan ekonomi. Untuk itu, diperlukan pendekatan pembangunan wilayah yang berbasis potensi lokal, penguatan konektivitas antarwilayah, serta integrasi antara perencanaan pembangunan sektoral dan spasial. Pemerintah Aceh perlu mendorong pengembangan kawasan strategis seperti kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil, dan daerah tertinggal melalui intervensi yang tepat sasaran, seperti pembangunan infrastruktur, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan ekonomi lokal. Dengan demikian, pembangunan kewilayahan dapat menjadi motor penggerak pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing Aceh secara menyeluruh.

18) **Memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas,** Infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jaringan irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, menjadi fondasi penting untuk mendorong mobilitas barang dan jasa, membuka akses wilayah terisolasi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, hingga saat ini, kualitas dan pemerataan infrastruktur di Aceh masih menjadi tantangan, dengan banyak daerah yang belum tersentuh pembangunan secara optimal. Hambatan seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang kompleks, serta rendahnya kualitas perencanaan dan pengawasan proyek menjadi faktor yang menghambat kemajuan sektor ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan perencanaan pembangunan infrastruktur yang berbasis kebutuhan wilayah dan potensi lokal, peningkatan kapasitas kelembagaan teknis, serta kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema pembiayaan inovatif. Pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang merata dan berdaya saing tinggi.

3.2.4. Isu Strategis Aceh Jaya

Isu-isu strategis yang dirumuskan pada bagian ini merupakan isu-isu yang dianalisis dari data dan keadaan pembangunan dan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya. Isu-isu strategis ini sangat penting untuk menentukan arah kebijakan sesuai dengan persoalan yang perlu diselesaikan selama periode RPJP Kabupaten Aceh Jaya ini. Isu-isu strategis ini dikelompokkan sesuai dengan pembahasan di BAB sebelumnya untuk menjamin

sinkronisasi antara masalah dan penyelesaiannya. Adapun isu strategis yang telah dilakukan pemetaan sebagai berikut :

a. Aspek **Kesejahteraan Masyarakat**, mencakup:

1. Tingkat kemiskinan masih tinggi
2. Pertumbuhan ekonomi masih rendah
3. Belum optimal industri pengolahan hasil pertanian
4. Rata-rata lama sekolah masih rendah
5. Kualitas pendidikan masih rendah
6. Angka kematian bayi masih tinggi
7. Angka stunting masih tinggi
8. Angka harapan hidup masih rendah
9. Konflik satwa masih tinggi

b. Aspek **Pelayanan Umum**, meliputi:

1. Indeks pembangunan syariah masih rendah.
2. Jumlah dayah type C masih banyak.
3. Fasilitas dayah masih rendah.
4. Indeks kualitas lingkungan hidup masih rendah.
5. Belum ada penataan kawasan kumuh.
6. Masih rendah ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
7. Penanganan sampah masih rendah.
8. Layanan komunikasi masih rendah di daerah pedesaan.
9. Tenaga pendidik dayah masih rendah.
10. Kesejahteraan teungku dayah masih rendah.
11. Angka kematian ibu masih tinggi.
12. Angka partisipasi sekolah masih rendah.
13. Kualitas jalan kabupaten masih rendah.
14. Masih banyak jembatan dengan kualitas rendah.
15. Masih rendah jumlah dan kualitas irigasi.
16. Sanitasi masih rendah.
17. Ketahanan pangan masyarakat masih rendah.
18. Kualitas koperasi dan usaha kecil masih rendah.
19. Pencapaian olahraga berprestasi masih rendah.
20. Produktivitas padi masih rendah.
21. Produksi barang pangan masih rendah.
22. Produktivitas barang pangan masih rendah.
23. Lahan perkebunan dengan kondisi rusak masih tinggi.
24. Produksi perikanan tangkap masih rendah.
25. Produksi perikanan budidaya masih rendah.
26. Prasarana dan sarana penunjang pariwisata masih rendah.
27. Jumlah restoran berstandar pariwisata masih rendah.
28. Jumlah wisatawan yang berkunjung masih rendah.
29. Kontribusi sektor industri sangat rendah.
30. Promosi pariwisata masih rendah.

31. Kontribusi sektor jasa sangat rendah.
32. Kemandirian fiskal daerah masih rendah.
33. Indeks reformasi masih rendah.

c. Aspek **Daya Saing,** terdiri dari:

1. Daya saing daerah masih rendah.
2. Pengeluaran masyarakat untuk makanan masih sangat tinggi.
3. Penanaman modal masih rendah.

Berdasarkan isu-isu strategis yang telah dirumuskan diatas menurut aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, dirangkum **isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Jaya dalam jangka panjang ke depan** (**periode 2025-2045**), sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Keistimewaan Aceh

Keistimewaan Aceh merupakan urusan wajib yang pelaksanaannya meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama; penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama islam; penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat islam; dan peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten. Adapun yang menjadi landasan yuridisnya yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Implementasi keistimewaan Aceh di Kabupaten Aceh Jaya saat ini masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan nilai Indeks Pembangunan Syariat (IPS) Kabupaten Aceh Jaya masih berada pada kisaran 80. Selanjutnya pelaksanaan kehidupan adat juga masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan mulai berkurangnya pelaksanaan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi bagi pengurus lembaga adat maupun masyarakat sehingga adat istiadat yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh dapat terus dilestarikan.

Pendidikan berbasis dayah juga masih perlu dioptimalkan dalam mendukung pelaksanaan keistimewaan Aceh. Dayah mempunyai peran penting dalam mencetak generasi-generasi islami yang bisa membantu mensosialisasikan syariat islam di tengah-tengah masyarakat. Saat ini, dayah yang kategori A di Kabupaten Aceh Jaya masih sedikit jumlahnya yaitu sebanyak 8 unit dari total dayah yang ada sebanyak 41 unit. Selanjutnya, ulama mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai syariat islam dan adat istiadat yang bersendikan agama islam. Untuk itu peningkatan kapasitas ulama dan lembaga-lembaga yang bisa mendorong pengimplementasian syariat islam menjadi sesuatu yang penting.

2) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal utama dalam pembangunan. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yaitu melalui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM ini meliputi berbagai macam

aspek diantaranya yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 2022, capaian IPM Kabupaten Aceh Jaya masih dibawah capaian Provinsi Aceh dan Nasional yaitu sebesar 70,36. Selain itu, kondisi pelayanan dasar bagi masyarakat saat ini juga masih belum optimal. Hal ini ditunjukan dengan masih adanya ketimpangan pendapatan di masyarakat, derajat kesehatan yang masih rendah serta partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Aceh Jaya yang berkualitas dan berdaya saing kedepannya, maka perlu meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat.

3) Infrastruktur dan Ketimpangan Pembangunan

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur yang merata dan adanya konektivitas antarwilayah juga dapat mengatasi permasalahan ketimpangan pembangunan yang terjadi.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Jaya saat ini belum sepenuhnya tercapai 100%. Kabupaten Aceh Jaya juga masih mempunyai permukiman kumuh seluas 136,29 ha atau 4,6% dari luas wilayah permukiman yang ada. Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan air minum berada pada kisaran 80%. Sedangkan rumah layak huni sebanyak 22.759 unit. Adapun Infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 257,01 km atau sebanyak 47% dari total keseluruhan panjang jalan kabupaten yang sudah dibangun. Untuk mendukung kemajuan daerah, pembangunan infrastruktur kedepan,perlu difokuskan kepada pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah dan infrastruktur produksi.

4) Transformasi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya saat ini masih belum optimal. Masih rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas produksi menjadi salah satu faktor penyebabnya. Selain itu, struktur perekonomian yang masih di dominasi sektor pertanian, menunjukkan belum adanya transformasi ekonomi di Aceh Jaya. Transformasi ekonomi perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya transformasi ekonomi diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan daya saing terhadap perekonomian daerah.

Transformasi ekonomi dilakukan dengan melakukan hilirisasi sumber daya alam dan mendorong sektor-sektor ekonomi yang produktivitasnya masih rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi diantaranya yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain itu, perlu juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan skill. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya kedepannya, transformasi ekonomi harus dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Transformasi ekonomi yang inklusif dapat memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraannya sehingga dapat mengurangi

kesenjangan ekonomi antarkelompok dan wilayah. Sedangkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan mengarahkan pembangunan dilakukan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

5) Daya Saing dan Daya Tarik Daerah

Daya saing daerah erat kaitannya dengan daya tarik daerah atau daya saing investasi. Semakin tinggi daya saing investasi maka semakin besar juga daya saing daerahnya. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya produktivitas dari barang-barang yang dihasilkan sehingga bisa bersaing dikancah nasional dan global yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Daya saing daerah juga sangat ditentukan dari transformasi ekonomi dan sosial yang dilakukan.

Indeks daya saing daerah Aceh Jaya saat ini sebesar 2,83 yang masuk dalam kategori tinggi. Namun demikian, nilai ini masih jauh dari indeks tertingginya yaitu 5 yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Untuk itu, Kabupaten Aceh Jaya kedepannya perlu melakukan perbaikan dalam berbagai sektor sehingga nilai indeks saing daerahnya bisa terus meningkat. Ada 4 (empat) komponen yang perlu ditingkatkan yaitu **lingkungan pendukung** meliputi kelembagaan, infrastruktur, adopsi TIK dan stabilitas ekonomi makro; **Sumber Daya Manusia** yang meliputi kesehatan, dan keterampilan; **Pasar** yang meliputi pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar; dan **ekosistem inovasi** yang meliputi dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi.

Selanjutnya, daya tarik daerah akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Saat ini nilai indeks daya tarik daerah Kabupaten Aceh Jaya berada di peringkat 18 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan nilai indeks daya saingnya sebesar -0,492. Ketersediaan infrastruktur dasar, kemudahan perizinan dan kenyamanan berusaha menjadi isu penting yang harus segera diselesaikan daerah kedepannya.

6) Tata Kelola dan Transformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk dapat bekerja lebih efektif, efisien, akuntabel, bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Jaya tahun 2023 sebesar 64,82 dengan kategori "B". Transformasi birokrasi di Kabupaten Aceh Jaya diharapkan bisa menjadi landasan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan optimal dalam mencapai tujuan pembangunan selama 20 tahun kedepan.

7) Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah menunjukkan seberapa besar tingkat kemandirian daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui sumber pendapatan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah bisa dilihat dari kapasitas fiskalnya. Kapasitas fiskal daerah dihitung melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu (SILPA) dikurangi dengan pendapatan

yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan tertentu.

Kapasitas fiskal Kabupaten Aceh Jaya tahun 2023 masuk dalam katagori fiskal yang rendah dengan rasio kapasitas fiskal 1,057. Kapasitas fiskal yang rendah ini dapat menganggu pencapaian tujuan dan jalannya proses pembangunan karena keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi keterbatasan fiskal ini, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien khususnya dalam hal belanja daerah. Belanja diarahkan yang bisa menjadi investasi daerah. Selain itu, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah harus terus diupayakan. Hubungan kemitraan dengan pihak ekternal pemerintahan juga perlu ditingkatkan dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan daerah.

8) Pengentasan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Aceh Jaya saat ini masih tinggi yaitu sebesar 12,42% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 12,22 ribu orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Aceh Jaya yang belum sejahtera. Beberapa penyebabnya antara lain yaitu masih terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar, terbatasnya kesempatan kerja, keterbatasan sumber daya, dan bencana alam. Mengatasi persoalan-persoalan tersebut menjadi penting dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya dalam periode 20 tahun kedepan.

9) Optimalisasi Fungsi Lahan dan Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Aceh Jaya saat ini berada pada kisaran 80,22. Nilai ini membuat Kabupaten Aceh Jaya masuk ke dalam kelompok wilayah yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Namun demikian, banyaknya lahan persawahan yang beralih fungsi menjadi lahan sawit memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produksi padi dan ketersediaan pangan dalam jangka panjang di Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini dikarenakan semakin berkurangnya lahan persawahan. Selain lahan persawahan yang beralih fungsi, saat ini juga terdapat 26 Gampong di Kabupaten Aceh Jaya yang rentan rawan pangan. Indeks prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan juga masih tinggi yaitu sebesar 9,44%. Sedangkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) baru mencapai 84,5. Ini artinya bahwa konsumsi pangan masyarakat belum sepenuhnya beragam dan bergizi seimbang.

10) Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Bencana

Wilayah Kabupaten Aceh Jaya masuk dalam wilayah dengan resiko bencana tinggi dengan skor indeks sebesar 166,09. Adapun resiko bencana yang mengancam jiwa yaitu banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, likuefaksi, tanah longsor dan tsunami. Untuk mengurangi dan meminimalisir resiko bencana maka upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana harus terus dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi

Visi pembangunan jangka panjang Indonesia (Indonesia Emas 2045) adalah **Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**. Visi tersebut dicapai dengan sasaran utama:

1) **Pendapatan per kapita setara negara maju**
   - GNI Per kapita (USD) dari 5.500-5.250 menjadi 30.300 USD
   - Kontribusi PDB Maritim dari 8,1 menjadi 15,0.
   - Kontribusi PDB Manufaktur dari 20,8 menjadi 28,0
2) **Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang**
   - Tingkat Kemiskinan (%) dari 7,0-8,0 sampai 0,5-0,8
   - Rasio Gini (indeks) 0,379-0,382 menjadi 0,290-0,320
   - Kontribusi PDRB KTI (%) dari 21,4 menjadi 28,5
3) **Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat**
   - Global Power Indeks (Peringkat) dari 34 (2023) menjadi 15 besar (2045).
4) **Daya saing sumber manusia meningkat**
   - Indeks Modal Manusia (Indeks) dari 0,56 menjadi 0,73 (2045).
5) **Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emisision***
   - Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) dari 38,6 menjadi 93,5 (2045).
   - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 76,49 menjadi 83,00

Sementara itu, dalam Rancangan Akhir (Rankhir RPJP Aceh Tahun 2025-2045, ditetapkan visi pembangunan Aceh Tahun 2025-2045 adalah **"Aceh Islami, Maju, dan Berkelanjutan".**

Memperhatikan cita-cita luhur para pendiri dan aspirasi komponen masyarakat serta modal dasar yang dimiliki Kabupaten Aceh Jaya, disamping juga sinkronisasi dengan visi nasional dan Aceh, maka **Visi Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025–2045 adalah:**

"ACEH JAYA ISTIMEWA, SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN"

Pokok-pokok visi adalah:

1. **Istimewa** artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Aceh Jaya berlandaskan Keistimewaaan Aceh.

2. **Sejahtera** artinya bahwa tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Aceh Jaya dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan ekonomi yang berkecukupan

3. **Maju** artinya mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berdaya saing tinggi

4. **Berkelanjutan** mempunyai makna bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara terencana dan terpadu, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sosial masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup serta berkesinambungan

Adapun yang menjadi sasaran utama Visi Aceh Jaya adalah:

1. Peningkatan pendapatan per kapita:
   a. PDRB per kapita (Rp Juta) dari 38,20 menjadi 83 juta
   b. Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan (%) dari 3,38 menjadi sebesar 6,38
   c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) dari 5,54 menjadi sebesar 13,54

2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan:
   a. Tingkat Kemiskinan (%) dari 11,20-12,05 menjadi sebesar 4,15-5,20
   b. Rasio gini (Indeks) dari 0,240-0,247 menjadi sebesar 0,210– 0,215
   c. Kontribusi PDRB Kabupaten (%) dari 1,53 menjadi sebesar 1,7
   d. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) dari 4,20-4,70 menjadi 4,15-5,15

3. Penguatan Tata Kelola, Keamanan, Demokrasi, Stabilitas Ekonomi dan Syariat Islam:
   a. Indeks Pelayanan Publik dari kategori B menjadi A
   b. Indeks Pembangunan Syariat dari 80-82 menjadi 92-95
   c. Indeks Inovasi Daerahdari 68,5 menjadi 73
   d. Indeks Daya Saing Daerah dari 3,4 menjadi 4

4. Daya saing sumber daya manusia meningkat:
   a. Indeks Pembangunan Manusia dari 73,65 menjadi 78,80

5. Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*:
   a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 85,13 menjadi 88,56

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi, misi, dan arah pembangunan RPJPD harus mengacu kepada RPJPN. Penyelarasan visi dan capaian visi RPJPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dengan RPJPN dan RPJPA Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1. Sandingan Visi RPJPN, RPJPA, dan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045

Visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045	Visi RPJP Aceh Tahun 2025-2045	Visi RPJP Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Aceh Islami, Maju dan Berkelanjutan	Aceh Jaya Istimewa, Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan

Tabel 4.2
Perbandingan Antara Capaian Visi Nasional, Aceh, dan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJPA Tahun 2025-2045				RPJP Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045
1	**Pendapatan per kapita setara negara maju**				**Peningkatan Pendapatan per Kapita**				**Peningkatan Pendapatan per Kapita**			
	a	GNI Per Kapita (US$)	5.500-5.250	30.300	a	PDRB per kapita (Rp Juta)	44.23-44.41	219.54-258.70	a	PDRB per kapita (Rp Juta)	38,20	83
	b	Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15	b	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEI)	46,61	129,64	b	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan (%)	3,38	6,38
	c	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28	c	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	5,2-5,3*	6.94-7.11	c	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,54	13,54
2	**Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan**				**Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan**				**Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan**			
	a	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8.0	0.5 - 0.8	a	Tingkat Kemiskinan (%)	12,00-13,00	0,33-0,83	a	Tingkat Kemiskinan (%)	11,20-12,05	4,15-5,20
	b	Rasio Gini (indeks)	0.379 – 0.382	0.290 – 0.320	b	Rasio gini (Indeks)	0.290-0.293	0.228-0251	b	Rasio gini (Indeks)	0,240-0.247	0,210-0,215
	c	Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5	c	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,08	1,03	c	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	1,53	1,7
					d	Pertumbuhan Ekonomi	4,28-4,51	4,18-5,17	d	Pertumbuhan Ekonomi	4,20-4,70	4,15-5,15
3	**Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat**				**Penguatan Tata Kelola, Keamanan, Demokrasi, Stabilitas Ekonomi dan Syariat Islam**				**Penguatan Tata Kelola, Keamanan, Demokrasi, Stabilitas Ekonomi dan Syariat Islam**			
	Global Power Index (peringkat)		34 (2023)	15 besar	a	Indeks Pelayanan Publik	4,01	5	a	Indeks Pelayanan Publik	B	A
					b	Indeks Pembangunan Syariat	80,00-83,00	90,00-95,00	b	Indeks Pembangunan Syariat	80-82	92-95
									c	Indeks Inovasi Daerah	68,5	73
									d	Indeks Daya Saing Daerah	3,4	4

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045			RPJPA Tahun 2025-2045			RPJP Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045		
	Sasaran Visi	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Baseline 2025	Target 2045
4	**Daya saing sumber daya manusia meningkat**			**Daya saing sumber daya manusia meningkat**			**Daya saing sumber daya manusia meningkat**		
	Indeks Modal Manusia	0.56	0,73	Indeks Modal Manusia	0,55	0,47	Indeks Pembangunan Manusia	73,65	78,80
5	**Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission***			**Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission***			**Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission***		
	a Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	a Penurunan intensitas emisi GRK (%)	36,08	91,09	a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	20	60
	b Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83	b Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,89	86,52			

4.2. Misi

Adapun dalam pencapaian Visi tersebut maka ditetapkan 8 Misi Pembangunan yaitu:

1) **Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing** dengan membangun manusia Aceh Jaya yang sehat dan berilmu pengetahuan yang mempunyai produktivitas tinggi dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah.

2) **Mewujudkan transformasi ekonomi Aceh Jaya** dengan meningkatkan produktivitas melalui penguasaan iptek, inovasi, peningkatan ekonomi produktif yang berintegrasi secara domestik dan berekspansi global, digitalisasi ekonomi dan pembangunan kota dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan.

3) **Mewujudkan transformasi tata Kelola yang baik** menuju tata kelola yang regulatif, profesional dan berintegritas serta birokrasi yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

4) **Mewujudkan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan pelaksanaan keistimewaan Aceh** menuju masyarakat Aceh Jaya yang aman, tertib, taat hukum dan harmonis dengan menjaga stabilitas ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian Aceh serta memperkuat nilai-nilai keistimewaan Aceh.

5) **Mewujudkan masyarakat Aceh Jaya yang sejahtera, berketahanan sosial budaya dan ekologis** menuju masyarakat yang sejahtera dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga. komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

6) **Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah** dengan meningkatkan pembangunan kewilayahan yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah melalui transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang adil dan makmur.

7) **Meningkatkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas serta ramah lingkungan** agar menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8) **Mewujudkan pembangunan yang tepat guna dan berkesinambungan** agar pembangunan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terukur, berdaya guna dan efisien melalui kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Pencapaian visi dan misi daerah ini sangat tergantung pada perumusan tema untuk masing-masing periode pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Jaya. Sesuai dengan tujuan tersebut maka tema untuk masing-masing periode dirumuskan sebagai berikut:

- Periode 1: 2025–2029
  Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan

- Periode 2: 2030–2034
  Percepatan Transformasi Pembangunan

- Periode 3: 2035–2039
  Pemantapan Transformasi Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing

- Periode 4: 2040–2045
  Perwujudan Aceh Jaya Istimewa dan Berjaya, Unggul, Mandiri bersama Indonesia Emas

Sesuai dengan periode pelaksanaan RPJP ini selama empat periode maka akan ada empat periode kepala daerah. Setiap periode kepala daerah harus menyusun visi dan misi kepala daerah yang akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka setiap calon kepala daerah harus melakukan penyesuaian visi dan misi kepala daerah sesuai dengan periode masing-masing kepala daerah tersebut.

Tabel 4.3
Perbandingan Antara Misi Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045

No	Misi RPJPA 2025 - 2045	Misi RPJPK Aceh Jaya 2025 - 2045	Keterangan
1	Mewujudkan Transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing	Membangun manusia Aceh Jaya yang sehat dan berilmu pengetahuan yang mempunyai produktivitas tinggi dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah
2	Mewujudkan transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi Aceh Jaya	Meningkatkan produktivitas melalui penguasaan iptek, inovasi, peningkatan ekonomi produktif yang berintegrasi secara domestik dan berekspansi global, digitalisasi ekonomi dan pembangunan kota dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan

No	Misi RPJPA 2025 - 2045	Misi RPJPK Aceh Jaya 2025 - 2045	Keterangan
3	Mewujudkan transformasi tata kelola	Mewujudkan transformasi tata Kelola yang baik	Menuju tata kelola yang regulatif, profesional dan berintegritas serta birokrasi yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
4	Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi subtansial, stabilitas ekonomi dan implementasi syariat Islam	Mewujudkan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan pelaksanaan keistimewaan Aceh.	Menuju masyarakat Aceh Jaya yang aman, tertib, taat hukum dan harmonis dengan menjaga stabilitas ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian Aceh serta memperkuat nilai-nilai keistimewaan Aceh
5	Mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis	Mewujudkan masyarakat Aceh Jaya yang sejahtera, berketahanan sosial budaya dan ekologis	Menuju masyarakat yang sejahtera dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga. komunitas, Masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6	Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah	Meningkatkan pembangunan kewilayahan yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah melalui transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang adil dan makmur.
7	Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas serta ramah lingkungan	Menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi

No	Misi RPJPA 2025 - 2045	Misi RPJPK Aceh Jaya 2025 - 2045	Keterangan
8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Mewujudkan pembangunan yang tepat guna dan berkesinambungan	Pembangunan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terukur, berdaya guna dan efisien melalui kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Penekanan fokus atau prioritas dalam setiap tahapan/periode dapat saja berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan pada Bab IV menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan daerah selama 20 tahun. Arah kebijakan pembangunan memberikan panduan tahapan pencapaian visi dan misi melalui 5 (lima) periode RPJMK Aceh Jaya, yaitu periode I (2025-2029), Periode II (2030-2034), Periode III (2035-2039), Periode IV (2040-2045). Visi dan misi RPJPK dan arah kebijakan terlampir pada Tabel 5.1.

5.1.1. Arah Kebijakan Tahap I Tahun 2025 – 2029: Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan

Selama periode lima tahun pertama dalam pelaksanaan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045, diperkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar 4,25 persen. Periode tahap I ini merupakan periode transisi ekonomi menuju pemulihan pasca terjadinya wabah virus Corona empat tahun yang lalu. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) sebagai perkuatan fondasi transformasi di Aceh Jaya diharapkan akan mendorong pergerakan pemulihan ekonomi berlangsung cepat. Dari sisi sektoral, pemulihan ekonomi didorong oleh penguatan sektor pertanian sebagai leading sektor. Selain itu, percepatan pemulihan ekonomi Aceh Jaya juga didorong dengan menguatnya kontribusi sektoral dari kontruksi, jasa pemerintahan, perdagangan, dan semakin menguatnya industri pengolahan yang berbasis produk lokal. Melalui dukungan sektoral tersebut, pada periode 1 (2025-2029), pergerakan pemulihan ekonomi Aceh Jaya akan dapat dicapai lebih awal dan menjadi momentum untuk mendorong percepatan ekonomi pada periode berikutnya.

Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing diarahkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif, berkarakter, dan adaptif.

Mewujudkan transformasi ekonomi Aceh Jaya diarahkan pada penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penguatan produksi bahan baku dan upaya hilirisasi SDA unggulan yang dapat menciptakan kesempatan kerja, inisiasi penerapan Ekonomi hijau dan Biru, Pengembangan Destinasi Wisata Halal dan ekonomi kreatif serta pemenuhan akses digital, pembangunan perkotaan dan pusat–pusat pertumbuhan ekonomi, inisiasi

pengembangan kawasan ekonomi khusus/kawasan industri terpadu, serta mendorong percepatan pembangunan Gardu Induk.

Mewujudkan transformasi tata kelola yang baik diarahkan pada penguatan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan tepat fungsi, regulasi yang efektif, memperkuat pemerintahan yang kolaboratif, peningkatan kualitas ASN berbasis sistem merit, kebijakan pembangunan berbasis data, peningkatan konsistensi antar dokumen dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan tata kelola partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Mewujudkan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan pelaksanaan keistimewaan Aceh diarahkan pada memperkuat supremasi hukum dan stabilitas politik serta keamanan daerah yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian Aceh berlandaskan Pancasila, dan penguatan lembaga demokrasi. Penguatan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Memperkuat pelaksanaan keistimewaan Aceh yang diarahkan kepada penguatan implementasi syariat islam melalui pelaksanaan regulasi dan nilai-nilai syariat islam, adat istiadat budaya dan juga memperkuat pelaksanaan otonomi khusus Aceh.

Mewujudkan masyarakat Aceh Jaya yang sejahtera, berketahanan sosial budaya dan ekologis diarahkan pada memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi berlandaskan keistimewaan Aceh sebagai landasan dan modal dasar pembangunan yang tahan terhadap perubahan lingkungan dan bencana, menjaga kelestarian lingkungan serta penyelesaian konflik satwa dengan manusia.

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah diarahkan pada penguatan pembangunan kewilayahan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi pelabuhan Calang. Peningkatan aksesibilitas secara terpadu. Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat melalui pengembangan jalan arteri, kolektor dan lokal dalam mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antarkecamatan. Melanjutkan penyediaan perumahan yang layak, sanitasi, air bersih dan air minum serta penyediaan infrastruktur yang mendukung produktivitas pertanian, perikanan dan pengendalian banjir. Menyelesaikan konflik agraria secara berkeadilan, partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta melakukan pemberdayaan ekonomi pada subyek reforma agraria.

Meningkatkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas serta ramah lingkungan diarahkan pada penguatan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif dan ramah lingkungan guna mendukung percepatan perekonomian dan pemerataan Pembangunan.

Mewujudkan pembangunan yang tepat guna dan berkesinambungan diarahkan pada menjaga kesinambungan pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas,

sinergi perencanaan pusat dan daerah, kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan pembangunan dan optimalisasi pembiayaan pembangunan termasuk pembiayaan kreatif pembangunan

5.1.2. Arah Kebijakan Tahap II Tahun 2030– 2034: Percepatan Transformasi Pembangunan

Periode II pelaksanaan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2030-2034, merupakan kelanjutan pembangunan dari periode I. Dalam periode ini diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya berkisar 4,8 persen. Periode tahap II ini menggambarkan aktivitas ekonomi terus bergerak naik dari periode sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi sudah kembali memperlihatkan capaian seperti periode sebelum terjadi Covid. Dari sisi sektoral, percepatan ekonomi masih didorong oleh penguatan sektor pertanian sebagai leading sektor. Selain itu, percepatan pemulihan ekonomi Aceh Jaya juga didorong dengan menguatnya kontribusi sektoral dari kontruksi, jasa pemerintahan, perdagangan, dan semakin menguatnya industri pengolahan yang berbasis produk lokal. Melalui dukungan sektoral tersebut, pada periode II (2030-2034), pergerakan pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya yang terus membaik menjadi momentum untuk mendorong percepatan ekonomi pada periode berikutnya.

Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing diarahkan pada peningkatan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, serta percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan inklusif.

Mewujudkan transformasi ekonomi Aceh Jaya diarahkan pada penguatan kapasitas riset inovasi, percepatan peningkatan produktivitas secara masif, percepatan penguatan produksi dan upaya hilirisasi serta industrialisasi sumber daya alam unggulan, percepatan pengembangan destinasi wisata unggulan dan penguatan ekonomi kreatif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan terutama di Pusat Pelayanan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti ekonomi hijau dan ekonomi biru, mendorong perluasan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi, penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga listrik secara masif. Transformasi digital semakin diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas di berbagai aspek kehidupan.

Mewujudkan transformasi tata kelola yang baik diarahkan pada percepatan reformasi birokrasi, kelembagaan pemerintahan daerah yang baik, bersih, adaptif dan kolaboratif, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi, SDM ASN yang berkualitas, proporsional, dan berkompeten, manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan yang andal, partai politik modern, serta masyarakat sipil yang partisipatif.

Mewujudkan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan pelaksanaan keistimewaan Aceh diarahkan pada percepatan supremasi hukum, keamanan daerah yang tangguh, paradigma restoratif dan berperspektif HAM, lembaga demokrasi yang kuat, partai politik yang berintegritas. Mempercepat stabilitas ekonomi

untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor serta keberlanjutan fiskal yang adaptif. Percepatan pelaksanaan keistimewaan Aceh melalui implementasi regulasi dan nilai-nilai syariat islam, adat istiadat serta mempercepat implementasi otonomi khusus Aceh.

Mewujudkan masyarakat Aceh Jaya yang sejahtera, berketahanan sosial budaya dan ekologis diarahkan pada mempercepat ketahanan sosial budaya dan ekologi berlandaskan keistimewaan Aceh sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif, peningkatan kelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana, serta penyelesaian konflik satwa dengan manusia.

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti di Pusat-Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) pada setiap kecamatan berbasis pada potensi sumber daya pariwisata termasuk pengembangan dan peningkatan konektivitas antarwilayah dan kecamatan, terutama jalan-jalan kabupaten yang terintegrasi dengan pusat-pusat aktivitas perekonomian di setiap kecamatan. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing di seluruh kecamatan. Mempercepat penyelesaian konflik agraria serta melakukan pemberdayaan ekonomi pada subyek reforma agraria.

Meningkatkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas serta ramah lingkungan diarahkan pada percepatan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif dan ramah lingkungan guna mendukung percepatan perekonomian dan pemerataan pembangunan.

Mewujudkan pembangunan yang tepat guna dan berkesinambungan diarahkan pada melanjutkan kesinambungan pembangunan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan, sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan pusat, serta didukung pendanaan pemerintah dan non pemerintah, maupun pembiayaan kreatif pembangunan lainnya.

5.1.3. Arah Kebijakan Tahap III Tahun 2035– 2039: Pemantapan Transformasi Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing

Untuk periode III pelaksanaan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2035-2039, peningkatan daya saing ekonomi daerah dan penguatan nilai tambah produk sektor pertanian menjadi leading dalam percepatan ekonomi daerah. Dalam periode ini diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya berkisar 5,25 persen. Periode tahap III, pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya semakin mantap yang ditunjukkan adanya hilirasi dari produk-produk pertanian. Dari sisi sektoral, percepatan ekonomi masih didorong oleh penguatan sektor pertanian, namun kontribusinya sebagai leading sektor menunjukkan penurunan. Selain itu, percepatan ekonomi Aceh Jaya didorong dengan menguatnya kontribusi sektoral dari kontruksi, jasa pemerintahan, perdagangan, dan semakin menguatnya industri pengolahan yang berbasis produk lokal. Melalui dukungan sektoral tersebut, pada periode III (2035-2039), pergerakan pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya yang terus membaik menjadi momentum untuk mendorong percepatan ekonomi pada periode berikutnya.

Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing diarahkan pada penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mewujudkan transformasi ekonomi Aceh Jaya diarahkan pada pemantapan transformasi ekonomi yang menghasilkan kemandirian dan peningkatan daya saing dengan menekankan pada perluasan dan penguatan peran Aceh Jaya dalam Global Value Chain dan Supply Chain serta menjadi hub wilayah Barsela Aceh, pemantapan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah, pemantapan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, pemantapan kawasan destinasi wisata unggulan dan ekonomi kreatif, penggunaan teknologi menengah dan tinggi yang semakin masif,serta kapasitas riset inovasi yang semakin unggul.

Mewujudkan transformasi tata kelola yang baik diarahkan pPemantapan reformasi birokrasi, kelembagaan pemerintahan daerah yang baik, bersih, adaptif dan kolaboratif, SDM ASN yang kompetitif, regulasi adaptif, partai politik modern dan mandiri, masyarakat sipil mandiri, sistem pemberantasan korupsi yang berkualitas dan perbaikan tata kelola melalui pendekatan Corruption Impact Assessment.

Mewujudkan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan pelaksanaan keistimewaan Aceh diarahkan pada pemantapan supremasi hukum dan keamanan daerah yang tangguh menuju Aceh Jaya yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, berdemokrasi substansial, aman dan nyaman. Pemantapan stabilitas ekonomi melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas dan efektivitas belanja daerah, penguatan potensi pembiayaan pembangunan alternatif, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Pemantapan implementasi keistimewaan Aceh dan Otonomi Khusus Aceh serta pemantapan intervensi korban konflik dan perdamaian Aceh yang semakin kuat.

Mewujudkan masyarakat Aceh Jaya yang sejahtera, berketahanan sosial budaya dan ekologis diarahkan pada mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang tangguh terhadap perubahan sosial budaya dan lingkungan serta bencana.

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah diarahkan pada pemantapan pembangunan kewilayahan melalui pembangunan infrastruktur dasar yang merata, pemantapan konektivitas antar wilayah dan sistem jaringan transportasi darat dan laut yang terintegrasi dalam koridor barat selatan Aceh dalam mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Penuntasan penyelesaian konflik agraria dan melanjutkan pemberdayaan ekonomi pada subyek agraria.

Meningkatkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas serta ramah lingkungan diarahkan pada pemantapan sarana dan prasarana yang berkualitas guna mendukung stabilitas perekonomian dan pemerataan pembangunan dalam rangka pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Mewujudkan pembangunan yang tepat guna dan berkesinambungan diarahakan pemantapan pembangunan yang berdaya saing tinggi dan berkesinambungan.

5.1.4. Arah Kebijakan Tahap IV Tahun 2040–2045: Perwujudan Aceh Jaya Istimewa dan Berjaya, Unggul, Mandiri bersama Indonesia Emas

Periode IV pelaksanaan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2040-2045, merupakan periode tahap akhir dari pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Jaya. Dalam periode akhir ini diharapkan transformasi struktur ekonomi di Aceh Jaya telah mengalami perubahan drastis yang diikuti dengan penguatan hilirisasi dan nilai tambah produk-produk sektor pertanian menjadi leading dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam periode akhir ini diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya berkisar **5,5-6 persen setiap tahunnya**. Periode tahap akhir ini, pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya semakin menguat dan berkualitas tercermin dari adanya hilirasi dari produk-produk pertanian. Selain itu, kontribusi sektor pertanian semakin menurun seiring dengan meningkatnya sektor tersier dan sekunder dalam proses transformasi struktur ekonomi Aceh Jaya. Percepatan ekonomi Aceh Jaya juga didorong dengan menguatnya kontribusi sektoral dari kontruksi, jasa pemerintahan, dan perdagangan.

Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing diarahkan pada terwujudnya SDM Aceh Jaya yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing global, memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif.

Mewujudkan transformasi ekonomi Aceh Jaya diarahkan pada terwujudnya pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya yang inklusif dan berkelanjutan sebagai kabupaten berpendapatan tinggi dan Maju.

Mewujudkan transformasi tata kelola yang baik diarahkan pada terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Mewujudkan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan pelaksanaan keistimewaan Aceh diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum, stabilitas keamanan dan ekonomi, serta implementasi Syariat Islam secara Kaffah dan otonomi khusus Aceh yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Mewujudkan masyarakat Aceh Jaya yang sejahtera, berketahanan sosial budaya dan ekologis diarahkan pada terwujudnya masyarakat Aceh Jaya yang sejahtera sebagai daerah yang kerketahanan sosial budaya, berkarakter serta tangguh dan adaptif dengan kondisi ekologis yang berkelanjutan.

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah diarahkan pada terwujudnya pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan dan terintegrasi ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan terpenuhinya layanan dasar dan infrastruktur tangguh yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Meningkatkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas serta ramah lingkungan diarahkan pada terwujudnya Aceh Jaya yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan.

Mewujudkan pembangunan yang tepat guna dan berkesinambungan diarahkan pada terwujudnya Aceh Jaya Istimewa dan Berjaya, Unggul, Mandiri bersama Indonesia Emas.

Tabel 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Jaya Berdasarkan Misi dan Periode Pembangunan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Penguatan Pondasi Transformasi	Percepatan Transformasi Pembangunan	Pemantapan Transformasi Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing	Perwujudan Aceh Jaya Istimewa dan Berjaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh Jaya Istimewa, Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan	1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing	Pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan kosial serta peningkatan Kualitas dan kuantitas Pendidikan SDM	Peningkatan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, serta percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya SDM Aceh Jaya yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing global, memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif
	2. Mewujudkan transformasi ekonomi Aceh Jaya	Penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penguatan produksi bahan baku dan upaya hilirisasi SDA unggulan yang dapat menciptakan kesempatan kerja, inisiasi penerapan Ekonomi hijau dan Biru, Pengembangan Destinasi Wisata Halal dan ekonomi kreatif serta pemenuhan akses digital, pembangunan perkotaan dan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi, inisiasi pengembangan kawasan ekonomi khusus/kawasan industri terpadu, serta	Penguatan kapasitas riset inovasi, percepatan peningkatan produktivitas secara masif, percepatan penguatan produksi dan upaya hilirisasi serta industrialisasi sumber daya alam unggulan, percepatan pengembangan destinasi wisata unggulan dan penguatan ekonomi kreatif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan terutama di Pusat Pelayanan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), optimalisasi sumber-sumber	Pemantapan transformasi ekonomi yang menghasilkan kemandirian dan peningkatan daya saing dengan menekankan pada perluasan dan penguatan peran Aceh Jaya dalam Global Value Chain dan Supply Chain serta menjadi hub wilayah Barsela Aceh, pemantapan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah, pemantapan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, pemantapan kawasan destinasi wisata unggulan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya yang inklusif dan berkelanjutan sebagai kabupaten berpendapatan tinggi dan Maju

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Penguatan Pondasi Transformasi	Percepatan Transformasi Pembangunan	Pemantapan Transformasi Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing	Perwujudan Aceh Jaya Istimewa dan Berjaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		mendorong percepatan pembangunan Gardu Induk.	pertumbuhan ekonomi baru seperti ekonomi hijau dan ekonomi biru, mendorong perluasan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi, penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga listrik secara masif. Transformasi digital semakin diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas di berbagai aspek kehidupan.	dan ekonomi kreatif, penggunaan teknologi menengah dan tinggi yang semakin masif,serta kapasitas riset inovasi yang semakin unggul	
	3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang baik	Penguatan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan tepat fungsi, regulasi yang efektif, memperkuat pemerintahan yang kolaboratif, peningkatan kualitas ASN berbasis sistem merit, kebijakan pembangunan berbasis data, peningkatan konsistensi antar dokumen dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah, penerapan	Percepatan reformasi birokrasi, kelembagaan pemerintahan daerah yang baik, bersih, adaptif dan kolaboratif, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi, SDM ASN yang berkualitas, proporsional, dan berkompeten, manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan	Pemantapan reformasi birokrasi, kelembagaan pemerintahan daerah yang baik, bersih, adaptif dan kolaboratif, SDM ASN yang kompetitif, regulasi adaptif, partai politik modern dan mandiri, masyarakat sipil mandiri, sistem pemberantasan korupsi yang berkualitas dan perbaikan tata kelola melalui	Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Penguatan Pondasi Transformasi	Percepatan Transformasi Pembangunan	Pemantapan Transformasi Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing	Perwujudan Aceh Jaya Istimewa dan Berjaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan tata kelola partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil	yang andal, partai politik modern, serta masyarakat sipil yang partisipatif	pendekatan Corruption Impact Assessment	
	4. Mewujudkan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan pelaksanaan keistimewaan Aceh	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas politik serta keamanan daerah yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian Aceh berlandaskan Pancasila, dan penguatan lembaga demokrasi. Penguatan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Memperkuat pelaksanaan keistimewaan	Percepatan supremasi hukum, keamanan daerah yang tangguh, paradigma restoratif dan berperspektif HAM, lembaga demokrasi yang kuat, partai politik yang berintegritas. Mempercepat stabilitas ekonomi untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor serta keberlanjutan fiskal yang adaptif. Percepatan pelaksanaan keistimewaan Aceh melalui implementasi regulasi dan nilai-nilai syariat islam, adat istiadat serta mempercepat	Pemantapan supremasi hukum dan keamanan daerah yang tangguh menuju Aceh Jaya yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, berdemokrasi substansial, aman dan nyaman. Pemantapan stabilitas ekonomi melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas dan efektivitas belanja daerah, penguatan potensi pembiayaan pembangunan alternatif, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Pemantapan implementasi keistimewaan Aceh dan Otonomi Khusus	Terwujudnya supremasi hukum, stabilitas keamanan dan ekonomi, serta implementasi Syariat Islam secara Kaffah dan otonomi khusus Aceh yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Penguatan Pondasi Transformasi	Percepatan Transformasi Pembangunan	Pemantapan Transformasi Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing	Perwujudan Aceh Jaya Istimewa dan Berjaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Aceh yang diarahkan kepada penguatan implementasi syariat islam melalui pelaksanaan regulasi dan nilai-nilai syariat islam, adat istiadat budaya dan juga memperkuat pelaksanaan otonomi khusus Aceh.	implementasi otonomi khusus Aceh.	Aceh serta pemantapan intervensi korban konflik dan perdamaian Aceh yang semakin kuat.	
	5. Mewujudkan masyarakat Aceh Jaya yang sejahtera, berketahanan sosial budaya dan ekologis	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi berlandaskan keistimewaan Aceh sebagai landasan dan modal dasar pembangunan yang tahan terhadap perubahan lingkungan dan bencana, menjaga kelestarian lingkungan serta penyelesaian konflik satwa dengan manusia	Mempercepat ketahanan sosial budaya dan ekologi berlandaskan keistimewaan Aceh sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif, peningkatan kelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana, serta penyelesaian konflik satwa dengan manusia	Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang tangguh terhadap perubahan sosial budaya dan lingkungan serta bencana	Terwujudnya masyarakat Aceh Jaya yang sejahtera sebagai daerah yang kerketahanan sosial budaya, berkarakter serta tangguh dan adaptif dengan kondisi ekologis yang berkelanjutan
	6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah	Penguatan pembangunan kewilayahan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi pelabuhan Calang. Peningkatan aksesibilitas secara terpadu. Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat melalui pengembangan jalan	Percepatan pembangunan infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti di Pusat-Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) pada setiap kecamatan berbasis pada potensi sumber daya pariwisata termasuk pengembangan dan	Pemantapan pembangunan kewilayahan melalui pembangunan infrastruktur dasar yang merata, pemantapan konektivitas antar wilayah dan sistem jaringan transportasi darat dan laut yang terintegrasi dalam koridor barat selatan Aceh dalam mendukung	Terwujudnya pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan dan terintegrasi ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan terpenuhinya layanan dasar dan infrastruktur tangguh yang dapat mendorong

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Penguatan Pondasi Transformasi	Percepatan Transformasi Pembangunan	Pemantapan Transformasi Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing	Perwujudan Aceh Jaya Istimewa dan Berjaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		arteri, kolektor dan lokal dalam mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antarkecamatan. Melanjutkan penyediaan perumahan yang layak, sanitasi, air bersih dan air minum serta penyediaan infrastruktur yang mendukung produktivitas pertanian, perikanan dan pengendalian banjir. Menyelesaikan konflik agraria secara berkeadilan, partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta melakukan pemberdayaan ekonomi pada subyek reforma agraria.	peningkatan konektivitas antarwilayah dan kecamatan, terutama jalan-jalan kabupaten yang terintegrasi dengan pusat-pusat aktivitas perekonomian di setiap kecamatan. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing di seluruh kecamatan. Mempercepat penyelesaian konflik agraria serta melakukan pemberdayaan ekonomi pada subyek reforma agraria.	terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Penuntasan penyelesaian konflik agraria dan melanjutkan pemberdayaan ekonomi pada subyek agraria	pertumbuhan ekonomi yang kuat.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Penguatan Pondasi Transformasi	Percepatan Transformasi Pembangunan	Pemantapan Transformasi Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing	Perwujudan Aceh Jaya Istimewa dan Berjaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7. Meningkatkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas serta ramah lingkungan	Penguatan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif dan ramah lingkungan guna mendukung percepatan perekonomian dan pemerataan pembangunan	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif dan ramah lingkungan guna mendukung percepatan perekonomian dan pemerataan pembangunan	Pemantapan sarana dan prasarana yang berkualitas guna mendukung stabilitas perekonomian dan pemerataan pembangunan dalam rangka pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Terwujudnya Aceh Jaya yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan.
	8. Mewujudkan pembangunan yang tepat guna dan berkesinambungan	Menjaga kesinambungan pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas, sinergi perencanaan pusat dan daerah, kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan pembangunan dan optimalisasi pembiayaan pembangunan termasuk pembiayaan kreatif pembangunan	Melanjutkan kesinambungan pembangunan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan, sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan pusat, serta didukung pendanaan pemerintah dan non pemerintah, maupun pembiayaan kreatif pembangunan lainnya	Pemantapan pembangunan yang berdaya saing tinggi dan berkesinambungan.	Terwujudnya Aceh Jaya Istimewa dan Berjaya, Unggul, Mandiri bersama Indonesia Emas.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang merupakan kinerja daerah untuk mencapai visi daerah yang dilakukan melalui langkah-langkah transformasi di daerah dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas. Sasaran pokok RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dirumuskan dari Arah Pembangunan hasil penyelarasan RPJPK Aceh Jaya dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPA Tahun 2025-2045, Arah Kebijakan Transformasi, serta Indikator Utama Pembangunan (IUP).

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 merupakan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah Aceh Jaya. Arah pembangunan Aceh Jaya Tahun 2025-2045 memuat 17 (tujuh belas) koridor yang diselaraskan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan arah pembangunan Provinsi Aceh Tahun 2025-2045 dan disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Penyelarasan Arah pembangunan Daerah dalam RPJPK Aceh Jaya dengan RPJPA dan RPJPN Tahun 2025-2045

NO	RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPA Tahun 2025-2045		RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
1	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Transformasi Ekonomi	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		IE5. Penerapan Ekonomi Hijau		IE5. Penerapan Ekonomi Hijau		IE5. Penerapan Ekonomi Hijau
		IE6. Transformasi Digital		IE6. Transformasi Digital		IE6. Transformasi Digital
		IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

NO	RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPA Tahun 2025-2045		RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
		IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3	Transformasi Tata Kelola	IE9. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	IE9. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	IE9. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Keamanan Daerah tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi dan Implementasi Syariat Islam	IE10. Perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketenrataman dan Ketertiban yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Keamanan Daerah tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi dan Implementasi Syariat Islam	IE10. Perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketenrataman dan Ketertiban yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial
		IE11. Stabilitas Ekonomi Makro		IE11. Stabilitas Ekonomi Makro		IE11. Stabilitas Ekonomi Makro
		IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		IE12. Syariat Islam		IE12. Syariat Islam
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaa n Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas		IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas		IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas
		IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah terhadap arah kebijakan pembangunan kewilayahan sebagaimana yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah.

Arah kebijakan transformasi pembangunan Aceh Jaya dirancang untuk mendorong perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi ekonomi, sosial, pendidikan, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta lingkungan hidup. Arah kebijakan transformasi ini menjadi panduan strategis bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengarahkan berbagai program dan kebijakan pembangunan, dengan tetap berpedoman pada kerangka transformasi yang ditetapkan di tingkat provinsi maupun nasional. Dengan pendekatan ini, Aceh Jaya diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan. Berikut disajikan arah kebijakan transformasi pembangunan Kabupaten Aceh Jaya.

Tabel 5.3. Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
1	Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Kesehatan, PUPR, LH, Pendidikan, Kekhususan Aceh
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Kesehatan
		Peningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Kesehatan
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan, Kekhususan Aceh
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Kesehatan
		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Kesehatan
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Kesehatan

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan desa tertinggal	Kesehatan
		lnvestasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).	Kesehatan
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas terutama di desa tertinggal	Kesehatan
		Percepatan penuntasan *stunting* dan pencegahan *stunting.*	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan, Pangan, Kelautan dan Perikanan, PUPR, Kekhususan Aceh
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Dinkes, DPMPKB, DKPP, Distan
		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Kesehatan
		Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tubercolosis dan respirasi.	Kesehatan
		Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.	Kesehatan
		Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	Kkesehatan, Keuangan
		Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan	Kesehatan

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Memperkuat sistem kesehatan dimana setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya	Kesehatan
		Perkuatan keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan.	Kesehatan
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olah raga rekreasi	Kepemudaan dan Olahraga
		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama).	Pendidikan
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah pertama.	Pendidikan
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kekhususan Aceh
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pertama yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Pendidikan, Perhubungan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Pendidikan, Kekhususan Aceh
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy dan numerasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Pendidikan, Kekhususan Aceh
		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Pendidikan, Kekhususan Aceh
		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Pendidikan
		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Pendidikan, Kepegawaian

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pendidikan, Kepegawaian
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan terutama di desa tertinggal	Pendidikan
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di desa tertinggal	Pendidikan
		Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).	Kepegawaian
		Mendorong penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	Pendidikan
		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK terutama di desa tertinggal	Pendidikan
		Penguatan sekolah terbuka dan pengembangan sekolah berbasis asrama	Pendidikan
		Meningkatkan olah raga prestasi melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga	Kepemudaan dan Olahraga
		Pengembangan Promosi Literasi, peningkatan Akses terhadap Bahan Bacaan, peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Buku, Integrasi Literasi dalam Kurikulum Pendidikan, Pembangunan Keterampilan Literasi Digital, Kolaborasi dengan Pihak-pihak Terkait, pengembangan Inisiatif Inovatif dalam promosi literasi, seperti penggunaan teknologi digital untuk membantu akses	Perpustakaan, Kearsipan

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		terhadap bahan bacaan, pelatihan keterampilan literasi, atau platform berbagi cerita dan informasi. membangun budaya membaca yang kuat dan berkelanjutan melalui promosi nilai-nilai literasi di masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ini melibatkan peran aktif orang tua, guru, dan pemimpin masyarakat dalam mempromosikan kebiasaan membaca di kalangan anak-anak dan generasi mendatang.	
		Mendukung pemenuhan Gizi, kecukupan Gizi peserta didik	Pendidikan, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
		Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	Perencanaan, PUPR, Sosial, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Kop UKM, Perindustrian, Kekhususan Aceh
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion	PUPR, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kekhususan Aceh
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Aceh Jaya guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah	Penanaman Modal , Kop UKM, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, Pertanian
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.	Tenaga Kerja, Pendidikan
		Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja guna menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah dan berdaya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri	Tenaga Kerja

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Aceh Jaya yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di daerah melalui bertambahnya demand.	PUPR, Perhubungan
		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Sosial
		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi terhadap sumber daya ekonomi produktif dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Aceh Jaya	Kesehatan, Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, KOP UKM, PUPR, Kekhususan Aceh, Perhubungan
		Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat	Sosial, Tenaga Kerja, Kesehatan
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Kop UKM
		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	PUPR, Kesehatan
		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	PUPR, Kesehatan

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	PUPR, Kekhususan Aceh
		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	PUPR
2	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perkebunan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Pertanian, PUPR
		Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan budidaya peternakan dan perikanan yang terintegrasi untuk peningkatan populasi dan produksi	Pertanian, Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Pertanian
		Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditi unggulan daerah melalui kegiatan hilirisasi	Pertanian, Kop UKM, Perindustrian
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Pertanian
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian, perkebunan dan peternakan	Pertanian, Setda
		Penyediaan infrastruktur terintegrasi yang esensial bagi upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perkebunan	Pertanian, PUPR

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Pertanian
		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Perencanaan, Kelautan dan Perikanan,
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Kelautan dan Perikanan, Kop UKM
		Pengembangan sentra-sentra produksi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat	Kelautan dan Perikanan
		Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan nelayan dan kelompok nelayan melalui perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan dan peningkatan perlindungan sosial nelayan.	Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan infrastruktur terintegrasi yang esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan armada perikanan, modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Kelautan dan Perikanan

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	PUPR, Tenaga Kerja, Komunikasi dan Informatika, LH
		Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Aceh Jaya	Pariwisata
		Peningkatan SDM, penguatan industri dan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan akademisi, media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Pariwisata
		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Pariwisata, PUPR
		Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis	PUPR, Perhubungan
		Penguatan pengelolaan jalan kabupaten dan jalan lingkungan	PUPR
		- Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten yang terkoneksi ke jalan tol Banda Aceh-Calang-Meulaboh-Sukamakmue-Blangpidie;	PUPR

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Dukungan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama Pelabuhan Calang dan Pelabuhan Rigaih	Perhubungan
		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan	Pariwisata
		Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTA dan PLTM) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.	Perencanaan, Perhubungan, Penanaman Modal
		Mendorong percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.	Perencanaan, Perhubungan
		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Perencanaan, Kekhususan Aceh
		Pengembangan kawasan industri terpadu Aceh Jaya	Perencanaan, Perindustrian, Penanaman Modal, LH, PUPR
		Penguatan manajerial dan pengelolaan koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan profesional	Kop UKM
		Peningkatan kemudahan dan iklim usaha yang kondusif dalam mendorong investasi	Penanaman Modal
		Peningkatan kemandirian gampong melalui penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas, optimalisasi potensi sumberdaya ekonomi gampong, penguatan badan usaha milik gampong (BUMG), dan peningkatankualitas perencanaan pembangunan gampong	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Penguatan riset dan inovasi disektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan	Perencanaan

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Peningkatan produktivitas BUMD.	Setda
		Identifikasi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan Aceh yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Perencanaan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
		Memberikan Dukungan bagi UMKM dalam bentuk akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk akan membantu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Aceh Jaya	Kop UKM
		Meningkatkan promosi pariwisata Aceh Jaya baik di tingkat nasional maupun internasional dengan menggarisbawahi potensi pariwisata alam, budaya, dan sejarahnya. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang mendukung serta peningkatan kualitas layanan pariwisata juga harus diperhatikan	Pariwisata
		Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Aceh Jaya.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Mendorong diversifikasi perekonomian Aceh Jaya dengan mengembangkan sektor- sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan, serta mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi pasar	Perencanaan
		Membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh Jaya dengan mengadakan acara-acara, kompetisi, dan program edukasi yang mendorong kreativitas dan kolaborasi dalam menghasilkan solusi untuk tantangan lokal	Perencanaan
		Investasi dalam pembangunan infrastruktur,	Penanaman Modal, PUPR

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pasar yang lebih luas, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja,	Tenaga Kerja
		Mengimplementasikan kebijakan dan insentif untuk menarik investasi ke daerah tersebut. Investasi dalam sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, industri manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi informasi dan komunikasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Penanaman Modal
		Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi dan infrastruktur dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan investasi	Perencanaan, Setda
		Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan	Pariwisata
		Pengembangan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik, kerajinan lokal, dan pariwisata berbasis masyarakat dapat membantu menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan	Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata
		Mendukung pengembangan UMKM sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor formal dan memperluas kesempatan kerja.	Kop UKM
		Memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal usaha dan teknologi bagi industri pengolahan di Aceh Jaya	Perindustrian
		Menjadikan Aceh Jaya sebagai Industri pariwisata Halal	Pariwisata
		Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting,	Perencanaan, Pertanian, LH

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		dan pajak karbon untuk pemulihan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon.	
		Pengembangan ekonomi hijau berbasis keunggulan wilayah untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan	Perencanaan, Pertanian, Perindustrian, Kop UKM, LH
		Memperkuat pengelolaan sumber daya alam Aceh yang berkelanjutan, termasuk hutan, perairan, dan lahan pertanian, untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau.	Perencanaan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	Pertanian
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi	Kelautan dan Perikanan

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.	
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.	Komunikasi dan Informatika
		Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).	Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.	Komunikasi dan Informatika
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Kop UKM, Perindustrian
		Penguatan proses bisnis UMKM dan IKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Kop UKM, Perindustrian
		Meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) melalui anggaran pemerintah, kerjasama dengan lembaga penelitian, universitas, dan sektor swasta.	Perencanaan
		Membangun infrastruktur penelitian dan inovasi seperti laboratorium riset, pusat inovasi, dan ruang kerja bersama untuk mendorong kolaborasi antara peneliti, pelaku industri, dan masyarakat sipil dalam menghasilkan solusi inovatif.	Perencanaan

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, universitas, perusahaan swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam mengembangkan riset dan inovasi,	Perencanaan
		Mendorong perkembangan ekosistem startup dan inovasi di Aceh dengan memberikan dukungan kepada perusahaan startup, ruang kerja bersama, inkubator bisnis, dan akses ke modal dan mentorship.	Kop UKM, Perindustrian
		Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik.	Komunikasi dan Informatika
		Penerapan e-government, e-commerce, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi untuk memecahkan masalah lokal.	Komunikasi dan Informatika
		Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi melalui pelatihan, beasiswa riset, dan pertukaran ilmiah dengan institusi- institusi riset dan universitas lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.	Perencanaan, Kepegawaian
		Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset dalam mengembangkan industri pengolahan Aceh Jaya	Perencanaan, Perindustrian
		Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian dan perkebunan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Pertanian
		Peningkatan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar domestik dan global	Kelautan dan Perikanan
		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor	PUPR, Perhubungan

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		industri manufaktur dan pengolahan	
		Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Aceh Jaya dengan pelabuhan-pelabuhan utama	Perhubungan
		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Perencanaan
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Kop UKM
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Kop UKM, Perindustrian
		Peningkatan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri	Perencanaan, Setda
		Investasi dalam infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat untuk memperbaiki konektivitas dan kemudahan akses bagi industri pengolahan.	Perhubungan
		Mendorong diversifikasi produk-produk industri pengolahan Aceh dan mencari pasar ekspor yang baru	Perindustrian
		Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk industri pengolahan Aceh untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor.	Perindustrian
		Mengembangkan kawasan industri dan pusat produksi khusus yang dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi industri pengolahan. Membangun jejaring dan kerjasama dengan negara-negara	Perindustrian, Kop UKM

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		lain untuk meningkatkan akses pasar internasional bagi produk-produk Aceh Jaya	
		Membangun rantai pasokan yang terintegrasi mulai dari produksi hingga distribusi dan pemasaran produk.	Perindustrian, Kop UKM
		Mengembangkan strategi promosi dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal Aceh baik di pasar domestik maupun internasional.	Perindustrian, Kop UKM
		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan	Perencanaan, PUPR, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,
		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Perencanaan, PUPR
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	PUPR
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.	BPBK
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	PUPR, DLH
		Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection	Komunikasi dan Informatika

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	
		Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	PUPR, Perhubungan
		Peningkatan tata kelola, aksesbilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.	PUPR, Perhubungan
		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Perhubungan
		City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	Pariwisata, PUPR, LH, Komunikasi dan Informatika
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Pariwisata
		Pembangunan jalan kabupaten yang terkoneksi dengan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.	PUPR
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	PUPR
		Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan.	Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, PUPR
3	Transformasi Tata Kelola	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di Aceh Jaya dan penguatan regulasi otonomi khusus Aceh	Sekretariat DPRK, Setda

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Perencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Kekhususan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Inspektorat Daerah
		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa	Komunikasi dan Informatika, Inspektorat Daerah, Setda
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh Jaya	Kepegawaian, Setda
		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Aceh Jaya, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Kepegawaian, Setda, Inspektorat Daerah
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Komunikasi dan Informatika
		Pengembangan teknologi informasi bidang tata kelola dan reformasi birokrasi	Komunikasi dan Informatika, Kepegawaian, Setda
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Kepegawaian
		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai	Kesbangpol

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		nasional serta lembaga demokrasi lainnya	
		Penguatan tapal batas wilayah administrasi antardesa dan Kecamatan di Aceh Jaya	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Setda
		Peningkatan layanan administrasi kependudukan yang berkualitas dan inovatif melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola sistem informasi administrasi, peningkatan fasilitas layanan berbasis teknologi informasi, dan data base kependudukan yang akurat dan terpercaya	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatkan peran dan fungsi budgeter, legislasi dan pengawasan DPRK serta fungsi fungsi lain yang sudah ditetapkan UUPA	Sekretariat DPRK
		Meningkatkan kepatuhan kepada seluruh pihak, terutama lembaga pemerintah Aceh Jaya untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan	Perencanaan, Sekretariat DPRK,
		Memperkuat sistem pembentukan peraturan pemerintahan di Aceh Jaya terutama Qanun sesuai dengan semangat otonomi Aceh	Setda, Sekretariat DPRK
		Meningkatkan peran dan fungsi budgeter, legislasi dan pengawasan DPRA serta fungsi fungsi lain yang sudah ditetapkan UUPA (Pasal 23 UUPA)	Sekretariat DPRK
		Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, termasuk anggaran dan kontrak pemerintah.	Setda, Keuangan, Komunikasi dan Informatika
		Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian	Setda, Inspektorat Daerah
		Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah.	Inspektorat Daerah
		Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika, integritas, dan penerapan	Kepegawaian, Inspektorat Daerah

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		prinsip- prinsip tata kelola yang baik.	
		Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan.	Inspektorat Daerah
		Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan	Komunikasi dan Informatika
		Membangun komitmen kuat dari pemimpin pemerintah Aceh untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan	Inspektorat Daerah
		Penguatan sistem data terpilah dan terpadu yang terintegrasi	Komunikasi dan Informatika
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi dan Implemetasi Syariat Islam	Melaksanakan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi untuk korban konflik di Aceh Jaya	Kesehatan, Sosial, Perdagangan, perindustrian, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Kelautan dan perikanan, Pendidikan Pertanian, Pertanahan, Kesbangpol, PUPR, Pendidikan dan pelatihan, Tenaga Kerja, Kekhususan
		Memperkuat otonomi Aceh	Setda, Sekretariat DPRK
		Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran SatpolPP dan WH dan Pengamanan hutan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Kehutanan
		Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi	Kesbangpol
		Meningkatkan peran dan fungsi KIP Aceh Jaya dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Jaya	Kesbangpol
		Mendukung pemantapan sistem pemilihan langsung Aceh	Kesbangpol
		Mendukung penguatan integritas partai politik lokal Aceh	Kesbangpol

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Memperkuat pelaksanaan dan implementasi Hak Azasi Manusia	Kesbangpol, Setda
		Memperkuat pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan kabupaten	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kekhususan
		memperkuat implementasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi khusus Aceh, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.	Setda, Sekretariat DPRK
		Menyusun qanun yang mendukung implementasi otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional.	Setda, Sekretariat DPRK
		Mendorong partisipasi aktif masyarakat Aceh Jaya dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan otonomi khusus.	Perencanaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Membangun kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan otonomi khusus Aceh.	Setda
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Setda, Kop UKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Perdagangan
		Peningkatan Pajak Daerah	Keuangan
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Perencanaan, Keuangan, Setda
		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	Keuangan, Setda

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Peningkatan kredit untuk masyarakat	Setda, Kop UKM, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perindustrian
		Melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar transfer dari pemerintah pusat	Keuangan
		Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Aceh secara optimal dan berkelanjutan	Perencanaan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
		Memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan melakukan reformasi perpajakan, peningkatan administrasi pajak, dan penegakan hukum terhadap pajak yang tidak dibayar.	Keuangan
		Melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan meminimalkan pemborosan.	Keuangan
		Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri dengan meningkatkan investasi, kewirausahaan, dan daya saing sektor-sektor ekonomi lokal.	Perencanaan, Penanaman Modal, Kop UKM, Perindustrian
		Membangun kerjasama dan sinergi antara kabupaten/kota di Aceh untuk memperkuat kemandirian fiskal secara bersama-sama.	Keuangan
		Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Aceh dalam bidang keuangan, perpajakan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola fiskal daerah secara efektif.	Keuangan, Kepegawaian
		Menggalakkan promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan insentif bagi investor, mendorong kemitraan publik-swasta, serta mendukung pengembangan UMKM dan industri kreatif di Aceh	Penanaman Modal, Kop UKM, Perindustrian

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, melek Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di Aceh dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di Aceh Jaya	Setda, Kekhususan Aceh
		Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayatul hisbah, pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	Setda, Kekhususan Aceh, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.	Kekhususan Aceh
		Mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif	Kekhususan Aceh
		Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.	Kekhususan Aceh
		Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah	Kekhususan Aceh
		Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.	Kekhususan Aceh
		Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.	Kekhususan Aceh, Kop UKM, Perindustrian
		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan dayah	Kekhususan Aceh

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Penguatan manajemen talenta dan prestasi santri.	Kekhususan Aceh
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan keislaman dan Pancasila.	Pendidikan, Kekhususan Aceh
		Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan	Kesbangpol, Kekhususan Aceh
		Memperkuat peran dan fungsi lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Aceh Jaya dalam aspek keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.	Pemebrdayaan Masyarakat dan Desa, Kekhusussan Aceh
		Pelestarian, pembinaan, pengembangan kebudayaan, kesenian dan adat istiadat Aceh yang berlandaskan nilai Islam dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di Aceh Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelestarian bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal, mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pendidikan, Kekhususan Aceh
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga, Sosial
		Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga, Sosial
		Meningkatkan peran dan fungsi pemuda dalam kehidupan sosial, kemandirian ekonomi, kreatif dan inovatif	Kepemudaan dan Olahraga
		Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	PUPR, LH
		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	LH
		Pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat di Kabupaten Aceh Jaya	Pertanahan, Kekhususan Aceh, Setda
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular	LH
		Peningkatan penyuluhan, peran serta dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pemulihan pencemaran sumberdaya dan lingkungan hidup	LH, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung-jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.	LH, Penanaman modal
		Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan ramah lingkungan	Kelautan dan Perikanan, Pertanian, LH
		Konservasi energi, peningkatan dan pengembangan energi terbarukan.	Perencanaan, Setda

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	PUPR, LH
		Pengembangan sistem pangan akuatik	Kelautan dan Perikanan, Pangan
		Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menghindari alih fungsi lahan; peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal.	Pertanian
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Pendidikan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,
		Mendukung penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	LH, Pertanian, Perindustrian
		Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi dalam upaya pengurangan risiko bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,
		Memperkuat keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.	Kesehatan, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Penyelesaian konflik satwa dengan manusia	Setda, LH, Pertanian
6	Implementasi Transformasi	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	PUPR
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	Keuangan

No	Transformasi / Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Bidang Urusan
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Perencanaan
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten	Perencanaan, PUPR
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	Perencanaan, Setda
		Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Setda, Sekretariat DPRK
		Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Inspektorat Daerah
		Pelaksanaan reforma agraria	Pertanahan, Pertanian

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan provinsi dan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja daerah, digunakan untuk merumuskan sasaran pokok pembangunan yang ingin dicapai. Adapun rumusan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Jaya yang disertai Arah Pembangunan serta Indikator Utama Pembangunan disajikan pada Tabel 5.4. dan Tabel 5.5.

Tabel 5.4. Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
I	TRANSFORMASI SOSIAL													
1	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing	IE1	Kesehatan untuk Semua	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	70,99	71,39	72,50	73,60	75,00	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
				2	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	2	Kesehatan Ibu dan Anak:							
				3	Peningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	132	120	100	80	66		
				4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	28	16	12,50	9	5,50		
				5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	3	Penanganan Tuberkulosis:							
				6	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	92	96	98	100		

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				7	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.		b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	92	96	98	100		
				8	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan desa tertinggal	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,5	99,8	100	100	100		
				9	lnvestasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).									
				10	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas terutama di desa tertinggal									
				11	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.									
				12	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.									
				13	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				14	Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tubercolosis dan respirasi.									
				15	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.									
				16	Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan									
				17	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan									
				18	Memperkuat sistem kesehatan dimana setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya									
				19	Perkuatan keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				20	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olah raga rekreasi									
		IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama).	5	Hasil Pembelajaran:						Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, merata dan berdaya saing	
				2	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah pertama.		a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
				3	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.		i) Literasi Membaca (SD)	62,88	72,88	82,18	90,68	100		
				4	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pertama yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.		ii) Numerasi (SD)	56,72	68,32	78,82	88,32	100		
				5	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.		i) Literasi Membaca (SMP)	66,07	70,47	79,17	88,67	100		

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				6	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy dan numerasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).		ii) Numerasi (SMP)	61,34	67,34	77,64	88,64	100		
				7	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.		c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,03	9,1	10,10	11,10	12		
				8	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.		d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,07	14,11	14,60	15	15,80		
				9	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,10	12,70	13,30	13,90	14,50		
				10	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	85,30	85,80	86,30	86,80	87,30		
				11	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan terutama di desa tertinggal									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				12	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di desa tertinggal									
				13	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).									
				14	Mendorong penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.									
				15	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK terutama di desa tertinggal									
				16	Penguatan sekolah terbuka dan pengembangan sekolah berbasis asrama									
				17	Meningkatkan olah raga prestasi melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				18	Pengembangan Promosi Literasi, peningkatan Akses terhadap Bahan Bacaan, peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Buku, Integrasi Literasi dalam Kurikulum Pendidikan, Pembangunan Keterampilan Literasi Digital, Kolaborasi dengan Pihak-pihak Terkait, pengembangan Inisiatif Inovatif dalam promosi literasi, seperti penggunaan teknologi digital untuk membantu akses terhadap bahan bacaan, pelatihan keterampilan literasi, atau platform berbagi cerita dan informasi. membangun budaya membaca yang kuat dan berkelanjutan melalui promosi nilai-nilai literasi di masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ini melibatkan peran aktif orang tua, guru, dan pemimpin masyarakat dalam mempromosikan kebiasaan membaca di kalangan anak-anak dan generasi mendatang.							

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				19	Mendukung pemenuhan Gizi, kecukupan Gizi peserta didik									
		IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	1	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	8	Tingkat Kemiskinan (%)	11,20-12,05	9,60-10,33	6,65-7,55	4,10-4,95	1,15-2,20	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat	
				2	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion	9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	27	42	57	72	99,50		
				3	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Aceh Jaya guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah	10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	3	18	33	48	63		
				4	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				5	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja guna menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah dan berdaya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri									
				6	Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Aceh Jaya yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di daerah melalui bertambahnya demand.									
				7	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				8	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi terhadap sumber daya ekonomi produktif dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Aceh Jaya								
				9	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat								
				10	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan								

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				11	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.									
				12	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.									
				13	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah									
				14	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.									
II	**TRANSFORMASI EKONOMI**													
2	Mewujudkan transformasi ekonomi Aceh Jaya dengan meningkatkan produktivitas	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perkebunan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	11	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,54	7,14	9,14	11,14	13,54	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan produktivitas ekonomi daerah	

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				2	Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan budidaya peternakan dan perikanan yang terintegrasi untuk peningkatan populasi dan produksi		Rasio PDRB Pertanian dan Peternakan	30,00	29,21	28,50	27,31	25,41		
				3	Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	12	Pengembangan Pariwisata							
				4	Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditi unggulan daerah melalui kegiatan hilirisasi		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,20	1,80	2,30	2,90	3,50		
				5	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.		b) Jumlah Tamu Wisatawan (Orang)*	585.066	889.812	1.557.171	2.725.049	3.500.000		
				6	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian, perkebunan dan peternakan	13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (ie) yang sama							

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				7	Penyediaan infrastruktur terintegrasi yang esensial bagi upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perkebunan		a) Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (Unit Usaha)	50	75	95	115	125		
				8	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD							
				9	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.		a) Proposi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level kabupaten (%)	1,8	2,2	3,0	3,3	8,3		
				10	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.		b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	2,8	5	10	20	35,5		

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				11	Pengembangan sentra-sentra produksi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat		c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	5,5	10	16,6	23	53		
				12	Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan nelayan dan kelompok nelayan melalui perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan dan peningkatan perlindungan sosial nelayan.		d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,5	4,9	6,8	8,3	11,1		
				13	Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.		e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,5	1,25	2.25	3,5	5		
				14	Penyediaan infrastruktur terintegrasi yang esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,7	2,4	2,25	2,1	1,8		

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				15	Pengembangan armada perikanan, modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	57,4	60	62,4	65	67,4		
				16	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	17	Tingkat Penguasaan IPTEK:							
				17	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.		a) Presentase Dana untuk Inovasi dari APBK	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08		

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				18	Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Aceh Jaya		b) Peringkat Inovasi Daerah	23	20	16	13	10		
				19	Peningkatan SDM, penguatan industri dan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan akademisi, media dan dunia usaha/asosiasi usaha.		c) Indeks Kapabilitas Inovasi	1,5	2,1	2,7	3,5	3,8		
				20	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.									
				21	Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis									
				22	Penguatan pengelolaan jalan kabupaten dan jalan lingkungan									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				23	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten yang terkoneksi ke jalan tol Banda Aceh-Calang-Meulaboh-Sukamakmue-Blangpidie;									
				24	Dukungan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama Pelabuhan Calang dan Pelabuhan Rigaih									
				25	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan									
				26	Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTA dan PLTM) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.									
				27	Mendorong percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				28	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.									
				29	Pengembangan kawasan industri terpadu Aceh Jaya									
				30	Penguatan manajerial dan pengelolaan koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan profesional									
				31	Peningkatan kemudahan dan iklim usaha yang kondusif dalam mendorong investasi									
				32	Peningkatan kemandirian gampong melalui penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas, optimalisasi potensi sumberdaya ekonomi gampong, penguatan badan usaha milik gampong (BUMG), dan peningkatankualitas perencanaan pembangunan gampong									
				33	Penguatan riset dan inovasi disektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan									
				34	Peningkatan produktivitas BUMD.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				35	Identifikasi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan Aceh yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan									
				36	Memberikan Dukungan bagi UMKM dalam bentuk akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk akan membantu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Aceh Jaya									
				37	Meningkatkan promosi pariwisata Aceh Jaya baik di tingkat nasional maupun internasional dengan menggarisbawahi potensi pariwisata alam, budaya, dan sejarahnya. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang mendukung serta peningkatan kualitas layanan pariwisata juga harus diperhatikan									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				38	Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Aceh Jaya.									
				39	Mendorong diversifikasi perekonomian Aceh Jaya dengan mengembangkan sektor- sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan, serta mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi pasar									
				40	Membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh Jaya dengan mengadakan acara-acara, kompetisi, dan program edukasi yang mendorong kreativitas dan kolaborasi dalam menghasilkan solusi untuk tantangan lokal									
				41	Investasi dalam pembangunan infrastruktur,									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				42	Pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pasar yang lebih luas, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja,									
				43	Mengimplementasikan kebijakan dan insentif untuk menarik investasi ke daerah tersebut. Investasi dalam sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, industri manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi informasi dan komunikasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.									
				44	Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi dan infrastruktur dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan investasi									
				45	Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				46	Pengembangan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik, kerajinan lokal, dan pariwisata berbasis masyarakat dapat membantu menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan									
				47	Mendukung pengembangan UMKM sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor formal dan memperluas kesempatan kerja.									
				48	Memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal usaha dan teknologi bagi industri pengolahan di Aceh Jaya									
				49	Menjadikan Aceh Jaya sebagai Industri pariwisata Halal									
				50	Meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) melalui anggaran pemerintah, kerjasama dengan lembaga penelitian, universitas, dan sektor swasta.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				51	Membangun infrastruktur penelitian dan inovasi seperti laboratorium riset, pusat inovasi, dan ruang kerja bersama untuk mendorong kolaborasi antara peneliti, pelaku industri, dan masyarakat sipil dalam menghasilkan solusi inovatif.									
				52	Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, universitas, perusahaan swasta, dan organisasi non- pemerintah dalam mengembangkan riset dan inovasi,									
				53	Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi melalui pelatihan, beasiswa riset, dan pertukaran ilmiah dengan institusi- institusi riset dan universitas lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.									
		IE5	Penerapan Ekonomi Hijau	1	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon untuk pemulihan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon.	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						Terwujudnya penerapan ekonomi hijau	

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				2	Pengembangan ekonomi hijau berbasis keunggulan wilayah untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah							
				3	Memperkuat pengelolaan sumber daya alam Aceh yang berkelanjutan, termasuk hutan, perairan, dan lahan pertanian, untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau.		a1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	85,13	85,82	86,67	87,53	88,56		
							b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)							
		IE6	Transformasi Digital	1	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi						Terwujudnya transformasi digital	

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
					perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.									
				2	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.		a.) Indeks Masyarakat Digital Indonesia	48	52	57	61	65		

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				3	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.									
				4	Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.									
				5	Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).									
				6	Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.									
				7	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.									
				8	Penguatan proses bisnis UMKM dan IKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				9	Mendorong perkembangan ekosistem startup dan inovasi di Aceh dengan memberikan dukungan kepada perusahaan startup, ruang kerja bersama, inkubator bisnis, dan akses ke modal dan mentorship.									
				10	Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik.									
				11	Penerapan e-government, e-commerce, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi untuk memecahkan masalah lokal.									
		IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	1	Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset dalam mengembangkan industri pengolahan Aceh Jaya	20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi						Terwujudnya integrasi ekonomi domestik dan global	
				2	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian dan perkebunan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	50,15	53,15	56,15	59,15	62,15		

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				3	Peningkatan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar domestik dan global	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0,20	1,20	2,00	2,80	3,50		
				4	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan									
				5	Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Aceh Jaya dengan pelabuhan-pelabuhan utama									
				6	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				7	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.									
				8	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.									
				9	Peningkatan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri									
				10	Investasi dalam infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat untuk memperbaiki konektivitas dan kemudahan akses bagi industri pengolahan.									
				11	Mendorong diversifikasi produk- produk industri pengolahan Aceh dan mencari pasar ekspor yang baru									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				12	Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk industri pengolahan Aceh untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor.									
				13	Mengembangkan kawasan industri dan pusat produksi khusus yang dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi industri pengolahan. Membangun jejaring dan kerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan akses pasar internasional bagi produk-produk Aceh Jaya									
				14	Membangun rantai pasokan yang terintegrasi mulai dari produksi hingga distribusi dan pemasaran produk.									
				15	Mengembangkan strategi promosi dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal Aceh baik di pasar domestik maupun internasional.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
		IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						Terwujudnya infrastruktur dan layanan dasar yang memadai di wilayah perkotaan dan perdesaaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	
				2	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)		a) Proposi kontribusi PDRB Wiayah Metropolitan Terhadap Nasional (%) (Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun arah pembangunan (IE) yang sama						
				3	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.		a1) Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	39,07	47,87	55,87	63,87	75,00		
				4	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.		b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	79,00	82,00	85,50	88,20	90,00		

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				5	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.		c1) Persentase Desa Mandiri	7.6	10	13	17	20		
				6	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.		c2) Rerata Indeks Desa Membangun	0,6811	0,6833	0,6856	0,6880	0,7120		
				7	Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.									
				8	Peningkatan tata kelola, aksesbilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.									
				9	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				10	City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.									
				11	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.									
				12	Pembangunan jalan kabupaten yang terkoneksi dengan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.									
				13	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.									
				14	Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan.									
				15	Pelaksanaan reforma agraria									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
III	TRANSFORMASI TATA KELOLA													
3	Mewujudkan transformasi tata kelola yang baik	IE9	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	1	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di Aceh Jaya dan penguatan regulasi otonomi khusus Aceh	24	Indeks Reformasi Hukum	78,5	80	83	86	92	Terwujudnya pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	
				2	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,80	3,35	3,39	4,45	5,00		
				3	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa		Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	AA		
				4	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh Jaya	26	Indeks Pelayanan Publik	B	A-	A-	A	A		

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				5	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Aceh Jaya, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	27	Indeks Integritas Aceh Jaya	76,02	79,58	83,14	86,69	90,25		
				6	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital									
				7	Pengembangan teknologi informasi bidang tata kelola dan reformasi birokrasi									
				8	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.									
				9	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				10	Penguatan tapal batas wilayah administrasi antardesa dan Kecamatan di Aceh Jaya									
				11	Peningkatan layanan administrasi kependudukan yang berkualitas dan inovatif melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola sistem informasi administrasi, peningkatan fasilitas layanan berbasis teknologi informasi, dan data base kependudukan yang akurat dan terpercaya									
				12	Meningkatkan peran dan fungsi budgeter, legislasi dan pengawasan DPRK serta fungsi fungsi lain yang sudah ditetapkan UUPA									
				13	Meningkatkan kepatuhan kepada seluruh pihak, terutama lembaga pemerintah Aceh Jaya untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan									
				14	Memperkuat sistem pembentukan peraturan pemerintahan di Aceh Jaya terutama Qanun sesuai dengan semangat otonomi Aceh									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				15	Meningkatkan peran dan fungsi budgeter, legislasi dan pengawasan DPRA serta fungsi fungsi lain yang sudah ditetapkan UUPA (Pasal 23 UUPA)									
				16	Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, termasuk anggaran dan kontrak pemerintah.									
				17	Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian									
				18	Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah.									
				19	Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika, integritas, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.									
				20	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				21	Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan									
				22	Membangun komitmen kuat dari pemimpin pemerintah Aceh untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan									
				23	Penguatan sistem data terpilah dan terpadu yang terintegrasi									
				24	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.									
				25	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten									
				26	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.									
				27	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
IV	KEAMANAN YANG TANGGUH, DEMOKRASI SUBTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH													
4	Mewujudkan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan pelaksanaan keistimewaan Aceh	IE10	Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang Tangguh, dan Demokrasi Subtansial	1	Melaksanakan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi untuk korban konflik di Aceh Jaya	28	Jumlah peraturan pelaksana UUPA yang sudah diterbitkan dengan yang dibutuhkan	14	16	18	20	22	Terwujudnya kondusivitas daerah	
				2	Memperkuat otonomi Aceh		Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial							
				3	Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran SatpolPP dan WH dan Pengamanan hutan	29	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)							
				4	Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi		a) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100		
				5	Meningkatkan peran dan fungsi KIP Aceh Jaya dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Jaya	30	Indeks Demokrasi Indonesia							
				6	Mendukung pemantapan sistem pemilihan langsung Aceh		a) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	-	89,00	90,50	92,00	93,50		
				7	Mendukung penguatan integritas partai politik lokal Aceh									
				8	Memperkuat pelaksanaan dan implementasi Hak Azasi Manusia									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				9	Memperkuat pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan kabupaten									
				10	memperkuat implementasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi khusus Aceh, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.									
				11	Menyusun qanun yang mendukung implementasi otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional.									
				12	Mendorong partisipasi aktif masyarakat Aceh Jaya dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan otonomi khusus.									
				13	Membangun kerjasama yang baik dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan otonomi khusus Aceh.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				14	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.									
		IE11	Stabilitas Ekonomi Makro	1	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,50	0,51	0,52	0,53	0,55	Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah	
				2	Peningkatan Pajak Daerah	32	Tingkat Inflasi (%)	2,5-4,8	2,1-4,8	1,8-4,2	1,5-3,2	1,2 – 2,7		
				3	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan							

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				4	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	6	6,5	7	7,5	8		
				5	Peningkatan kredit untuk masyarakat		b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)							
				6	Melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar transfer dari pemerintah pusat		c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*							
				7	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Aceh secara optimal dan berkelanjutan		b) Total Kredit/PDRB (%)	25,00	25,80	26,50	27,00	27,50		
				8	Memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan melakukan reformasi perpajakan, peningkatan administrasi pajak, dan penegakan hukum terhadap pajak yang tidak dibayar.	34	Inklusi Keuangan (%)							
				9	Melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan meminimalkan pemborosan.		a) Ketersediaan kantor layanan perbankan (Unit)	9	9	11	12	13		
				10	Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri dengan meningkatkan investasi, kewirausahaan, dan daya saing sektor-sektor ekonomi lokal.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				11	Membangun kerjasama dan sinergi antara kabupaten/kota di Aceh untuk memperkuat kemandirian fiskal secara bersama-sama.									
				12	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Aceh dalam bidang keuangan, perpajakan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola fiskal daerah secara efektif.									
				13	Menggalakkan promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan insentif bagi investor, mendorong kemitraan publik-swasta, serta mendukung pengembangan UMKM dan industri kreatif di Aceh									
				14	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
		IE12	Transformasi nilai-nilai syariat islam	1	Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, melek Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di Aceh dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di Aceh Jaya	35	Indeks Pembangunan Syariat	80-82	83-85	86-88	89-91	92-95	Terwujudnya implementasi keistimewaan Aceh dalam kehidupan sosial masyarakat	
				2	Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayatul hisbah, pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	36	Persentase dayah yang mandiri	4,2	17,02	38,29	80,85	100		
				3	Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				4	Mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif									
				5	Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.									
				6	Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah									
				7	Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.									
				8	Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.									
				9	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan dayah									
				10	Penguatan manajemen talenta dan prestasi santri.									
V	**KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI**													
5	Mewujudkan masyarakat Aceh Jaya yang sejahtera, berketahanan sosial budaya dan ekologis	IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1	Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan keislaman dan Pancasila.	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)						Terwujudnya inklusivitas masyarakat yang berbudaya dan beragama	

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				2	Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan		a) Persentase pengelolaan dan perlindungan cagar budaya dan kesenian tradisional dalam daerah (%)	77,88	77,89	78,92	79,06	80		
				3	Memperkuat peran dan fungsi lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Aceh Jaya dalam aspek keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)							
				4	Pelestarian, pembinaan, pengembangan kebudayaan, kesenian dan adat istiadat Aceh yang berlandaskan nilai Islam dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di Aceh Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelestarian bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal, mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai		a) Persentase kegiatan pembinaan terhadap kerukunan umat beragama	100	100	100	100	100		

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
					warisan budaya Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.									
		IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	68	70	73	76	80	Terwujudnya keluarga berkualitas, keseteraan gender dan masyarakat yang inklusif	
				2	Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,41-0,45	0,36-0,40	0,31-0,35	0,26-0,30	0,25-0,20		
				3	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal									
				4	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.									

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				5	Meningkatkan peran dan fungsi pemuda dalam kehidupan sosial, kemandirian ekonomi, kreatif dan inovatif									
		IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas	1	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah						Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
				2	Pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat di Kabupaten Aceh Jaya		a) Persentase luas RTH terhadap Luas perkotaan	21,85	21,85	25	27	32,94		
				3	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular	42	Kualitas Lingkungan Hidup							
				4	Peningkatan penyuluhan, peran serta dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pemulihan pencemaran sumberdaya dan lingkungan hidup		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	85,13	85,82	86,67	87,53	88,56		
				5	Setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung-jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	27,50	30,36	37,67	42,92	45,82		
				6	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan ramah lingkungan		*) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	88,54	88,99	89,61	90,07	90,50		

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				7	Penyelesaian konflik satwa dengan manusia		c) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	66	70	75	80	90		
							d)Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	20	25	30	40	50		
		IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1	Konservasi energi, peningkatan dan pengembangan energi terbarukan.	43	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan						Terwujudnya ketahanan energi, air dan pangan	
				2	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.		a) Ketahanan Energi							
				3	Pengembangan sistem pangan akuatik		- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.760	2.260	2.760	3.260	3.760		
				4	Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menghindari alih fungsi lahan; peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal.		- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*							

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
							b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%)	9	8,3	8	7,3	7		
							c) Ketahanan Air							
							-Kapasitas Air Baku (m3/detik)							
							'-Rumah tangga dengan akses jaringan air minum perpipaan (%)	49,99	61,17	76,38	87,81	98,27		
							d) Indeks Ketahanan Pangan	80,55	81,35	82,5	83,50	85		
		IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	161-166	147-160	133-142	121-132	100-120	Terwujudnya resiliensi masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim	
				2	Mendukung penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)							

NO	Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Sasaran Pokok	Keterangan
								Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045		
				3	Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi dalam upaya pengurangan risiko bencana		a. Kumulatif							
				4	Memperkuat keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.		b. Tahunan							
				5	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.		*) Indek Kualitas Udara	86,87	87,67	88,50	89,50	90,50		

Tabel 5.5. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045

N0	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Keterangan
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
I	TRANSFORMASI SOSIAL										
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IE1	Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	70,99	71,39	72,50	73,60	75,00	
				2	Kesehatan Ibu dan Anak:						
					a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	132	120	100	80	66	
					b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	28	16	12,5	9	5,5	SSGI/SKI
				3	Penanganan Tuberkulosis:						
					a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	92	96	98	100	
					b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	92	96	98	100	

N0	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Keterangan
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
				4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,5	99,8	100	100	100	
2	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, merata dan berdaya saing	IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil Pembelajaran:						
					a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
					i) Literasi Membaca (SD)	62,88	72,88	82,18	90,68	100	
					ii) Numerasi (SD)	56,72	68,32	78,82	88,32	100	
					i) Literasi Membaca (SMP)	66,07	70,47	79,17	88,67	100	
					ii) Numerasi (SMP)	61,34	67,34	77,64	88,64	100	
					c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,03	9,1	10,1	11,1	12	

N0	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Keterangan
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
					d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,07	14,11	14,6	15	15,8	
				6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,10	12,70	13,30	13,90	14,50	
				7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	85,30	85,80	86,30	86,80	87,30	
3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat	IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	11,20-12,05	9,60-10,33	6,65-7,55	4,10-4,95	1,15-2,20	
				9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	27	42	57	72	99,5	
				10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	3	18	33	48	63	

N0	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Keterangan
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
II	**TRANSFORMASI EKONOMI**										
4	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan produktivitas ekonomi daerah	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,54	7,14	9,14	11,14	13,54	
					Kontribusi PDRB Pertanian dan Peternakan	30	29,21	28,50	27,31	25,41	
				12	Pengembangan Pariwisata						
					a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,20	1,80	2,30	2,90	3,50	
					b) Jumlah Tamu Wisatawan (Orang)*	585.066	889.812	1.557.171	2.725.049	3.500.000	
				13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (ie) yang sama						
					a) Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (Unit Usaha)	50	75	95	115	125	

N0	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Keterangan
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
				14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
					a) Proposi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level kabupaten (%)	1,8	2,2	3,0	3,3	8,3	
					b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	2,8	5	10	20	35,5	
					c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	5,5	10	16,6	23	53	
					d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,5	4,9	6,8	8,3	11,1	
					e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,5	1,25	2,25	3,5	5	
				15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,7	2,4	2,25	2,1	1,8	
				16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	57,4	60	62,4	65	67,4	
				17	Tingkat Penguasaan IPTEK:						

N0	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Keterangan
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
					a) Presentase Dana untuk Inovasi dari APBK	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	
					b) Peringkat Inovasi Daerah	23	20	16	13	10	
					c) Indeks Kapabilitas Inovasi	1,5	2,1	2,7	3,5	3,8	
5	Terwujudnya penerapan ekonomi hijau	IE5	Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
					a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah						
					a1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	85,13	85,82	86,67	87,53	88,56	
					b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)						
6	Terwujudnya transformasi digital	IE6	Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi						
					a.) Indeks Masyarakat Digital Indonesia	48	52	57	61	65	
7	Terwujudnya integrasi ekonomi domestik dan global	IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi						

N0	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Keterangan
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
				21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	50,15	53,15	56,15	59,15	62,15	
				22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0,20	1,20	2,00	2,80	3,50	
8	Terwujudnya infrastruktur dan layanan dasar yang memadai di wilayah perkotaan dan perdesaaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						
					a) Proposi kontribusi PDRB Wiayah Metropolitan Terhadap Nasional (%) (Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun arah pembangunan (IE) yang sama						
					a1) Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	39,07	47,87	55,87	63,87	75,00	
					b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	79,00	82,00	85,50	88,20	90,00	
					c1) Persentase Desa Mandiri	7,6	10	13	17	20	

N0	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Keterangan
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
					c2) Rerata Indeks Desa Membangun	0,6811	0.6833	0,6856	0,6880	0,7120	
III	**TRANSFORMASI TATA KELOLA**										
9	Terwujudnya pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	IE9	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	78,5	80	83	86	92	
				25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,80	3,35	3,39	4,45	5,00	
					Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	A A	
				26	Indeks Pelayanan Publik	B	A-	A-	A	A	
				27	Indeks Integritas Aceh Jaya	76,02	79,58	83,14	86,69	90,25	
IV	**KEAMANAN YANG TANGGUH, DEMOKRASI SUBTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH**										
10	Terwujudnya kondusivitas daerah	IE10	Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang Tangguh, dan Demokrasi Subtansial	28	Jumlah peraturan pelaksana UUPA yang sudah diterbitkan dengan yang dibutuhkan	14	16	18	20	22	
					Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial						

N0	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Keterangan
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
				29	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)						
					a) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100	
				30	Indeks Demokrasi Indonesia						
					a) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	-	89,00	90,50	92,00	93,50	
11	Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah	IE11	Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,50	0,51	0,52	0,53	0,55	
				32	Tingkat Inflasi (%)	2,5-4,8	2,1-4,8	1,8-4,2	1,5-3,2	1,2 – 2,7	
				33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
					a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	6	6,5	7	7,5	8	
					b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)						

N0	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Keterangan
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
					c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*						
					b) Total Kredit/PDRB (%)	25	25,8	26,5	27	27,5	
				34	Inklusi Keuangan (%)						
					a) Ketersediaan kantor layanan perbankan (Unit)	9	9	11	12	13	
12	Terwujudnya implementasi keistimewaan Aceh dalam kehidupan sosial masyarakat	IE12	Transformasi nilai-nilai syariat islam	35	Indeks Pembangunan Syariat	80-82	83-85	86-88	89-91	92-95	
				36	Persentase dayah yang mandiri	4,2	17,02	38,29	80,85	100	
V	**KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI**										
13	Terwujudnya inklusivitas masyarakat yang berbudaya dan beragama	IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)						
					a) Persentase pengelolaan dan perlindungan cagar budaya dan kesenian tradisional dalam daerah (%)	77,88	77,89	78,92	79,06	80	

N0	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Keterangan
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
				38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)						
					a) Persentase kegiatan pembinaan terhadap kerukunan umat beragama	100	100	100	100	100	
14	Terwujudnya keluarga berkualitas, keseteraan gender dan masyarakat yang inklusif	IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Keluarga	68	70	73	76	80	
				40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,41-0,45	0,36-0,40	0,31-0,35	0,26-0,30	0,25-0,20	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah						
					a) Persentase luas RTH terhadap Luas perkotaan	21,85	21,85	25	27	32,94	
				42	Kualitas Lingkungan Hidup						
					a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	85,13	85,82	86,67	87,53	88,56	
					b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	27,5	30,36	37,67	42,92	45,82	

N0	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Keterangan
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
					*) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	88,54	88,99	89,61	90,07	90,5	
					c) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	66	70	75	80	90	
					d)Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	20	25	30	40	50	
16	Terwujudnya ketahanan energi, air dan pangan	IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan						
					a) Ketahanan Energi						
					- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.760	2.260	2.760	3.260	3.760	
					- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*						
					b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%)	9	8,3	8	7,3	7	
					c) Ketahanan Air						
					-Kapasitas Air Baku (m3/detik)						

N0	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target Daerah					Keterangan
						Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045	
					'-Rumah tangga dengan akses jaringan air minum perpipaan (%)	49,99	61,17	76,38	87,81	98,27	
					d) Indeks Ketahanan Pangan	80,55	81,35	82,5	83,5	85	
17	Terwujudnya resiliensi masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim	IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	161-166	147-160	133-142	121-132	100-120	
				45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
					a. Kumulatif						
					b. Tahunan						
					*) Indek Kualitas Udara	86,87	87,67	88,50	89,50	90,50	

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan pedoman pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan. RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 harus dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antardokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku Pembangunan.

6.1.1.1. Keterkaitan RPJP Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat kabupaten (APBD).

Konsistensi antara RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

1) Sinkronisasi periodisasi dan substansi RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 mengikuti dan mempedomani muatan RPJPN dan RPJPA Tahun 2025-2045.

2) RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai Visi Aceh Jaya 2045.
3) **Arah (Tujuan) Pembangunan Aceh Jaya dan indikator dalam RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045** mempedomani RPJPN dan RPJPA Tahun 2025-2045 dan menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan Aceh Jaya dalam RPJMK
4) **Sasaran dan indikator prioritas daerah pada RPJMK** menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan Aceh Jaya pada RKPK, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis SKPK (Renstra SKPK), serta tujuan dan sasaran pada renja SKPK
5) **Sasaran dan indikator strategis/program Renstra SKPK** menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja SKPK (Renja SKPK), sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Kabupaten menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun sasaran program RKPK.
6) **Sasaran dan indikator prioritas pembangunan Aceh Jaya pada RKPK** juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja SKPK. lndikator prioritas pembangunan Aceh Jaya dilaksanakan melalui Jndikator Kinerja Utama (IKU) SKPK yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja SKPK.
7) **Dokumen RPJP, dokumen RPJM, dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP)** menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral kabupaten seperti rencana induk/Master Plan/Grand strategi Aceh Jaya, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan Aceh Jaya.
8) **Dokumen RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 menjadi pedoman visi, misi, dan program** bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya

6.1.1.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan lntegratif.

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan

gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.

- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

6.1.1.3. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan Aceh Jaya dalam RPJPK, RPJMK, dan RKPK, perlu didukung dengan sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan pembangunan. Selain itu optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah perlu dilakukan secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, hibah, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan

6.1.2. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan, diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek dan menengah yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua bagian

a. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek

Pengendalian jangka menengah mencakup :

1) Penjabaran perencanaan RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 ke RPJMK, intergrasi dokumen RPJMK ke dokumen Renstra Perangkat Daerah
2) Kesiapan desain proyek prioritas pembangunan Aceh Jaya termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan

3) Konsistensi perencanaan dan penganggaran
4) Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup :

1) Penjabaran perencanaan RP JMK ke dokumen RKPK, integrasi dokumen RKPK ke dokumen Renja Perangkat Daerah
2) Kesiapan desain proyek prioritas pembangunan Aceh Jaya termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan
3) Konsistensi perencanaan dan penganggaran
4) Identifikasi risiko pembangunan dan mitigasinya.

b. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek.

6.1.3 Analisis Risiko Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan Visi "Aceh Jaya Istimewa, Sejahtera, Maju dan berkelanjutan", diperlukan pengelolaan risiko pembangunan yang responsif terhadap konteks lokal. Risiko-risiko ini perlu diidentifikasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti dengan strategi mitigasi yang adaptif agar pencapaian Visi Aceh Jaya Tahun 2045 dapat terjaga secara berkelanjutan.

Aceh Jaya memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khas, sehingga pendekatan terhadap risiko pembangunan harus berbasis pada kondisi riil di lapangan. Analisis risiko berikut ini menitikberatkan pada enam aspek utama yang dinilai strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah:

1. Risiko Sosial, Kesenjangan sosial antar wilayah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menghambat transformasi sosial. Diperlukan pendekatan partisipatif dan pengembangan desa inovatif.
2. Risiko Ekonomi, Ketergantungan pada sektor primer membuat struktur ekonomi rentan. Solusinya adalah diversifikasi ekonomi lokal, penguatan UMKM, dan pengembangan klaster unggulan.
3. Risiko Lingkungan dan Kebencanaan, Ancaman bencana alam seperti gempa, banjir, dan tsunami berpotensi mengganggu capaian pembangunan. Diperlukan sistem mitigasi bencana dan perencanaan tata ruang yang responsif.
4. Risiko Tata Kelola Pemerintahan, Lemahnya koordinasi dan akuntabilitas dapat menurunkan efektivitas pembangunan. Solusinya adalah penerapan e-governance dan pengawasan berbasis digital.
5. Risiko SDM dan Pendidikan, Ketidaksesuaian keterampilan SDM dengan kebutuhan masa depan memperlambat inovasi. Diperlukan revitalisasi pendidikan vokasi dan beasiswa di bidang strategis.

6. Risiko Infrastruktur dan Konektivitas, Keterbatasan infrastruktur dasar dan digital membatasi pertumbuhan wilayah. Solusinya adalah pembangunan konektivitas dan internet desa.

Dengan memahami dan mengantisipasi risiko-risiko tersebut sejak dini, diharapkan Kabupaten Aceh Jaya dapat membangun fondasi pembangunan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Pengelolaan risiko yang terintegrasi ke dalam perencanaan jangka panjang akan memperkuat resiliensi daerah dalam menghadapi dinamika perubahan, sekaligus menjaga arah transformasi menuju Aceh Jaya 2045 yang maju dan inovatif.

6.1.4. Sistem Intensif

Sistem intensif dalam rangka mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku Pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah seperti dunia usaha, lemabag penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya.

6.1.5. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinakan pencapaian sasarn Pembangunan jangka Panjang, target RPJPK dapat dimutakhirkan melalui RPJMK. Pemutakhiran dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPK Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.1.6. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

6.2. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor Keuangan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 sangat ditentukan pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Aceh Jaya. Untuk itu, perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Aceh Jaya 2025-2045: **"ACEH JAYA ISTIMEWA, SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN".**

BUPATI ACEH JAYA

SAFWANDI, S.Sos.

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN (RPJPK) ACEH JAYA TAHUN 2025-2045

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** telah diselenggarakan kegiatan Musrenbang RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi oleh Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Jaya (Rahmad Fuadi,S.T, M.T)
2. Tanggapan dan saran dari peserta Musrenbang RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045 terhadap materi yang dipaparkan oleh Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil kesepakatan bersama, maka pada:

   Hari dan Tanggal : Selasa/23 April 2024
   Jam : 09.00 WIB sd Selesai
   Tempat : Aula Lantai Setdakab Aceh Jaya

MENYEPAKATI

KESATU : Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045: "ACEH JAYA YANG ISTIMEWA, SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN";

KEDUA : Misi RPJPD Kabupaten Aceh Jaya 2025-2045 yaitu:

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing;
b. Mewujudkan transformasi ekonomi Aceh Jaya dengan meningkatkan produktivitas;
c. Mewujudkan tata kelola dan reformasi birokrasi yang baik;

d. Mewujudkan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan pelaksanaan keistimewaan Aceh;
e. Mewujudkan masyarakat Aceh Jaya yang sejahtera, berketahanan sosial budaya dan ekologis;
f. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah;
g. Meningkatkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas serta ramah lingkungan; dan
h. Mewujudkan pembangunan yang tepat guna dan berkesinambungan

KETIGA : Arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045;

KEEMPAT : Hasil kesepakatan berupa Saran dan Masukan terhadap Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini;

KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan Rancangan Akhir RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Calang, 23 April 2024
Pimpinan Sidang
Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Jaya

RAHMAD FUADI, S.T, M.T
Pembina
NIP. 19840507 201003 1 001

Mewakili peserta Musrenbang RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045

No.	Nama	Unsur/Instansi	Tanda Tangan	
1.	Syarif Hidayat	Ka. Bkpsdm	1.	
2.	Muhammad Ali. S.Sos.	Anggota DPRK.		2.
3.	FAHMI	KADIS SOSIAL	3.	
4.	[illegible]	Sarjana (P) MM.		4.
5.	Muslim Arai	Camat Kr Jabar	5.	
6.	Salman Alfarisi	DSI		6.
7.	M.G. Sahata	Dit Kesmas	7.	
8.	Rafiii. S.Hum	Kabag RSUD-TU		8.
9.	ABDULHADI, S.Pd	Kasang Taruna	9.	
10.	Ismail. S.pd.	Kabid pencegahan BPBD		10.

Lampiran I Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045

No.	Nama	Unsur/Instansi	Tanda Tangan	
1.	Muhammad Ali. S.Sos	Anggota DPRK.	1.	
2.	Syarif Hidayat	Ka. Bidang SDM		2.
3.	FAHMI	KODIM / KODIM	3.	
4.	[illegible]	Sekjen (PP-IKAH.		4.
5.	Muslim Arais	Camat Kec Setia	5.	
6.	Salman Alfarisi	DSI		6.
7.	Ismail, S.Pd.	BPBK, Aceh Jaya	7.	
8.	Rafli, S.Hum	Kabag RSUTU		8.
9.	ABDUL HADI, S.Pd	Karang Taruna	9.	
10.	P.C. [illegible]	Ditlantas		10.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
INSPEKTORAT
Jln. Mahkota Kuala Meurisi, Calang. Kode Pos (23645)
Telepon (0654) 2210063 Faximile (0654) 2210152
e-mail : inspektorat@acehjayakab.go.id

Nomor : 700/11/LHR-RPJPD/2024 Calang, 19 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir RPJP Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045**

Yth. Pj. Bupati Aceh Jaya
di
Calang

I. Ringkasan Eksekutif

1. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya sebagai Aparat Pengawasan Intern telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 berupa pengujian terbatas terhadap penyajian bab-bab dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 menjadi instrumen penting dalam melaksanakan visi pembangunan nasional yang tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan merupakan sebuah roadmap yang menetapkan visi, tujuan, dan strategi pembangunan untuk periode dua dekade ke depan.
   Secara substansi, penyusunan memperhatikan beberapa hal, antara lain:
   1. penyelarasan visi, misi, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama nasional dalam RP JPN Tahun 2025-2045;

2. keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan Pernbangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang dinilai masih relevan di Kabupaten Aceh Jaya hingga tahun 2045;
3. hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJPD Tahun 2005-2025;
4. isu-isu strategis yang berkembang; dan
5. regulasi yang berlaku saat ini.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 harus juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta memperhatikan rekomendasi KLHS RPJPD. Penyusunan RPJPD ini telah diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045 serta memperhatikan isu-isu strategis lokal dan regulasi yang berlaku. Dokumen ini juga didukung oleh dokumen-dokumen perencanaan terkait seperti RTRW dan RPPLH. Proses penyusunan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai relevan dan implementatif.

2. Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, namun terdapat beberapa catatan sebagai berikut :
   1) Sasaran Pokok yang dijabarkan pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 belum dipetakan per periode Arah Kebijakan yang ada.
   2) Ketepatan sistematika BAB dalam RPJPD belum seluruhnya sesuai Inmen dan SEB
   3) Masih terdapat indikator utama Pembangunan belum memuat target pada Ranwal dan Rankhir RPJPD.

II. Dasar Reviu

Dasar hukum peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah semua peraturan yang terkait dengan perencanaan, meliputi :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045;
e. Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 700/11/RTT/20224 tanggal 21 Juni 2024.

III. Tujuan Reviu

Reviu RPJP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang terbatas kesesuaian dokumen perencanaan dengan kaidah peraturan perundang-undangan, sebagai upaya untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah melaksanakan pengujian terbatas terhadap dokwnen RPJPD, melaksanakan penelaahan keterhubungan dan kesesuaian program misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan strategi dalam RP JPD sebagai berikut :

1. Keterhubungan dan Kesesuaian visi dengan misi dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024- 2045;
2. Keterhubungan dan Kesesuaian misi dengan arah kebijakan dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
3. Keterhubungan dan kesesuaian arah kebijakan dengan sasaran pokok dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
4. Keterhubungan dan kesesuaian sasaran pokok dengan visi dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
5. Konsistensi antar Bab dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
6. Keselarasan antara rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab Tabun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RP JPN) 2025-2045; dan
7. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil konsultasi penyelarasan ranwal.

V. Metodologi Reviu

Reviu dilaksanakan dengan berdasarkan Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024. Pelaksanaan Reviu menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan kelengkapan dokumen, sistematika, tahapan, keselarasan, kesesuaian dan hubungan Rancangan Akhir RPJPD Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

VI. Gambaran Umum

Rancangan Akhir RPJPD Aceh Jaya Tahun 2025-2045, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. RPJPD merupakan perencanaan yang bersifa makro yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Pembangunan jangka

Panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara teknokratik, *top-down, bottom-up,* partisipatif dan politis, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pembangunan.

Rancangan Akhir RPJPD Aceh Jaya Tahun 2025 - 2045 akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Kabupaten Aceh Jaya pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) untuk jangka waktu I (satu) tahunan.

VII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dokumen RPJPD Aceh Jaya Tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kelengkapan Dokumen Rancangan Akhir Rencana RPJPD Aceh Jaya Tahun 2025 - 2045 yang telah disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, yaitu :
   a. Dokumen Rancangan Akhir Rencana RPJPD Aceh Jaya Tahun 2025 - 2045;
   b. Dokumen Rancangan Awal Rencana RPJPD Aceh Jaya Tahun 2025 - 2045;
   c. Hasil Konsultasi Ranwal RPJPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045.
2) Secara keseluruhan Visi dengan Misi dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 telah saling berhubungan dan berkesesuaian.
3) Secara keseluruhan Misi dengan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 telah saling berhubungan dan berkesesuaian.
4) Sasaran Pokok yang dijabarkan pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 tidak dipetakan per periode Arah Kebijakan yang ada, sehingga tidak dapat mereviu kuat atau lemahnya keterhubungan antara Arah Kebijakan per periode dengan Sasaran Pokok yang ada. Penjabaran Sasaran Pokok di dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 disusun per periode jangka

panjang 2025-2045 dan telah sesuai dengan pedoman Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, tetapi Sasaran Pokok tersebut tetap harus dipetakan per periode Arah Kebijakan Kabupaten. Pemetaan Sasaran Pokok per periode Arah Kebijakan dapat dilihat pada Aplikasi SIPD tetapi dalam hal ini belum selesai dilakukan pemetaan.

5) Konsistensi antar Bab dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
   a) Bab II dengan Bab III sudah konsisten dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
   b) Sudah terdapat keterkaitan Hubungan Bab III (Keterkaitan Masalah Dan Isu Strategis) dengan Bab IV (Sasaran Visi Jangka Panjang).
6) Hasil reviu atas Keselarasan antara rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 (tindak lanjut atas rekomendasi hasil konsultasi penyelarasan ranwal) dapat diuraikan :
   a) Ketepatan sistematika BAB dalam RPJPD sesuai Inmen dan SEB dengan hasil :
      - Rankhir RPJPD Aceh Jaya telah memuat informasi mengenai Aspek Geografi dan Demografi sesuai Inmen. Aspek Geografi telah menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan KLHS serta kebencanaan. Namun dalam dokumen Rankhir RPJPD belum terlihat indikator-indikator gambaran geografi seperti Persentase Alih Fungsi Lahan, Indeks Ketahanan Energi (Inmen Hal 16; RPJPD Hal 15-19);
      - Rankhir RPJPD Aceh Jaya telah memuat informasi mengenai Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya sesuai Inmen. Kesejahteraan Ekonomi telah menjelaskan Indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Indek Gini (Ketimpangan Pendapatan). Namun belum terlihat penjelasan terkait Indeks Pembangunan Manusia. Tetapi telah menjalaskan Indikator IPM dalam Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya (Inmen Hal 16; RPJPD Hal 23-30) Seharusnya informasi mengenai Indikator IPM dalam Aspek Kesejahteraan Ekonomi.

- Rankhir RPJPD Aceh Jaya telah memuat informasi mengenai Kesejahteraan Sosial Budaya. Namun belum terlihat gambaran mengenai indikator indeks keluarga sehat, indeks kualitas keluarga, indeks perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks ketimpangan Gender. Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Kebudayaan.
- Sesuai Inmen terkait penjelasan Daya Saing Daerah Ekonomi sekurang-kurangnya dilengkapi dengan Indikator seperti PDRB, PDRB Per Kapita, Indeks Ekonomi Inklusif, Indeks Ekonomi Hijau, Rasio Kewirausahaan, dan Indikator lainnya sesuai kontek daerah (Hal 16). Namun pada Dok. Rankhir RPJPD menjelaskan tentang Indeks Daya Saing Daerah, Pengeluaran Konsumi RT Per Kapita (Hal 37-39) Seharusnya penjelasan Indeks Daya Saing Daerah dalam aspek Daya Saing Iklim Investasi.
- Sesuai Inmen terkait penjelasan Daya saing iklim investasi sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator seperti Indeks Demokrasi, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketentraman dan Ketertiban, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Daya Saing Daerah. Namun pada Rankhir RPJPD hanya menjelaskan indikator Indeks rasa Aman , IDSI , Rasio Pajak terhadap PDRB, Rasio Pembiayaan Perbankan terhadap PDRB, Rasio Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB (Hal 43-45).
- Sesuai Inmen terkait Aspek Pelayanan Umum menjelaskan sekurang-kurangnya dilengkapi indikator seperti Indeks Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks SPBE (16). Namun pada Rankhir RPJPD menjelaskan Penyelenggaraan kehidupan Beragama, Penyelenggaraan Pendidikan Daerah, Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, pendidikan (APS, APK,APM), kesehatan, Proporsi Jaringan jalan dalam kondisi baik, Irigasi dalam kondisi baik,kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, ketenagakerjaan, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (IPG & IDG), LIngkungan Hidup, Administrasi Dukcapil, pemberdayaan masyarakat dan gampong, pengendalian penduduk dan KB, perhubungan, komunikasi dan

informatika. Seharusnya penjelasan mengenai Indikator IPG dalam Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya. Indikator penyelenggaraan kehidupan beragama dan pendidikan dayah dalam aspek Daya Saing Iklim Investasi. Indikator Kesehatan, Proporsi Jaringan Jalan, Irigasi, Kawasan Permukiman lebih tepat dalam aspek Daya Saing Fasilitas.

- Jumlah Total penduduk pada RPJPD belum sepenuhnya sesuai dengan Lampiran VII Tabel 71 yaitu belum menampilkan Jumlah penduduk tahun 2023 pada Kolom Jumlah Penduduk
- RPJPD belum memuat informasi proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin sesuai Inmen Lampiran VII Tabel 7.2
- RPJPD telah memuat informasi proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, namun belum memuat informasi jumlah penduduk tahun 2023 sesuai inmen Lampiran VII Tabel 7.3
- Proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan pada Dok. Rankhir RPJPD belum sepenuhnya sesuai dengan Lampiran VII Tabel 7.7 (Hal 31)
- Belum terdapat informasi mengenai perumusan sasaran pokok dalam RPJPD sesuai Inmen Tabel 5.2 dan 5.3.

b) Visi Misi daerah jangka Panjang telah tepat dengan Visi dan Misi RPJPN
c) RPJPD telah sesuai dengan 17 (tujuh belas) arah Pembangunan RPJPN
d) Sasaran Pokok Kebijakan telah selaras
e) RPJPD telah selaras dan disesuaikan dengan karakteristik daerah dalam 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan RPJPN
f) Arah kebijakan wilayah telah selaras dengan sarana prasarana
g) Sebagian dari indikator utama pembangunan telah menyesuaikan target pada Base Line 2025 dan Target 2045 sesuai rekomendasi Bappeda Aceh, namun masih terdapat indikator utama Pembangunan belum memuat target pada Ranwal dan Rankhir RPJPD.

VIII. KESIMPULAN

1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sudah memperhatikan kesesuaian antar BAB dan arah Pembangunan RPJPN
2) Sasaran Sasaran Pokok yang dijabarkan pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 belum dipetakan per periode Arah Kebijakan yang ada.
3) Ketepatan sistematika BAB dalam RPJPD belum seluruhnya sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama.
4) Masih terdapat indikator utama Pembangunan belum memuat target pada Ranwal dan Rankhir RPJPD.

IX. SARAN

Kepada Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 agar :

1. Penyusunan RPJPD sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama.
2. Segera memetakan sasaran pokok per periode arah kebijakan
3. Menyusun target indikator utama Pembangunan yang belum terdapat pada Rankhir RPJPD.

X. Apresiasi

Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045.

INSPEKTUR
KABUPATEN ACEH JAYA

SAFRUL MARYADI,S.E.,Ak.,M.A.P.
NIP 19720327 200212 1 003

BERITA ACARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI ACEH JAYA DAN DPRK ACEH JAYA TERHADAP RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2045

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Dr. A. MURTALA, M.Si : Pj. Bupati Aceh Jaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang beralamat di Calang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. 1. MUSLEM. D : Ketua DPRK Aceh Jaya
2. IRWANTO N.P : Wakil Ketua I DPRK Aceh Jaya
3. TEUKU ASRIZAL, SH : Wakil Ketua II DPRK Aceh Jaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang beralamat di Calang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calang, tanggal tersebut di atas

DPRK ACEH JAYA
SELAKU PIHAK KEDUA,

MUSLEM. D
KETUA

IRWANTO N.P
WAKIL KETUA I

TEUKU ASRIZAL, SH
WAKIL KETUA II

Pj. BUPATI ACEH JAYA
SELAKU PIHAK PERTAMA,

Dr. A. MURTALA, M.Si

BUPATI ACEH JAYA

Calang, 29 Juli 2024 M
23 Muharram 1446 H

Nomor : 000.7.2.1/758 /2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : ***Permohonan Evaluasi RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045***

Yang Terhormat :
Gubernur Aceh
c/q. Kepala Bappeda Aceh
di-
Tempat

1. Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Rancangan Akhir RPJPK Aceh Jaya Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 331 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk dievaluasi.

2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan permohonan fasilitasi Evaluasi RPJP Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
   a. Rancangan Qanun tentang RPJPK Tahun 2025-2045;
   b. Naskah persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRK terhadap Rancangan Qanun tentang RPJPK Tahun 2025-2045.
   c. Laporan KLHS;
   d. Hasil reviu APIP terhadap Rancangan Akhir RPJPK Tahun 2025-2045; dan
   e. Berita Acara kesepakatan Musrenbang RPJPK Tahun 2025-2045.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pj. BUPATI ACEH JAYA

Dr. A. MURTALA, M.Si

Tembusan :
1. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang;
2. Kepala Bapperida Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang.

Jalan Mahkota Kuala Meurisi Calang Kabupaten Aceh Jaya, Aceh
Telepon (0654) 2215206 Kode Pos 23655

HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN
TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembentukan tim penyusun RPJPD dan penyusunan rencana kerja	√				Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 050/284/2023, Tanggal 2 November 2023 tentang Pembentukan tim Penyusun, Tim Koordinasi dan Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045
2	Penyiapan data dan informasi	√				Kertas Kerja Tabulasi analisis data dan informasi
3	Penelaahan RTRW daerah	√				Pada Bab 2 Halaman 125, terdapatnya atau tersedianya hasil telaah RTRW Kabupaten Aceh Jaya sebagai bahan acuan untuk penyelarasan arah kebijakan RPJPD.
4	Analisis gambaran umum kondisi daerah	√				Pada Bab 2 Halaman 16 dijabarkan deskripsi materi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
5	Perumusan permasalahan pembangunan daerah daerah	√				Pada Bab 3 Halaman 199 Tercantum Permasalahan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya
6	Penelaahan RPJPN	√				Pada Bab 4 Halaman 207, mencantumkan visi dan misi RPJPN
7	Analisis isu-isu strategis daerah	√				Pada Bab 3 Halaman 201 tercantum Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya
8	Perumusan visi dan misi daerah	√				Pada Bab 4 mulai halaman 207, mencantumkan visi dan misi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 beserta penjelasannya
9	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi	√				Pada Bab 4 mulai halaman 208, mencantumkan Visi, Misi-Misi, Arah Kebijakan yang selaras dengan Visi, Misi, Arah, Tahapan dan Prioritas RPJPA
10	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional	√				Pada Bab 4 mulai halaman 207, mencantumkan Visi, Misi-Misi, Arah Kebijakan yang selaras dengan Visi, Misi, Arah, Tahapan dan Prioritas RPJPN
11	Perumusan arah kebijakan	√				Pada Bab 5 Halaman 114, mencantumkan deskripsi rumusan arah kebijakan.
12	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi	√				Pada Bab 5 Halaman 221, mencantumkan deskripsi rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi
13	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional	√				Pada Bab 5 Halaman 221, mencantumkan deskripsi rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional
14	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Aceh Jaya selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten meliputi:					
14.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:					

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Ket
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
	a. Kawasan Lindung:					Pada Bab 2 mulai halaman 129, terdapatnya atau tersedianya hasil telaah RTRW Kabupaten Aceh Jaya
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	√				
	2. kawasan perlindungan setempat	√				
	3. kawasan suaka alam	√				
	4. kawasan pelestarian alam	√				
	5. kawasan rawan bencana alam	√				
	6. kawasan lindung lainnya	√				
	b. Kawasan Budi Daya:					Pada Bab 2 mulai halaman 130, terdapatnya atau tersedianya hasil telaah RTRW Kabupaten Aceh Jaya
	1. kawasan hutan produksi	√				
	2. kawasan pertanian	√				
	3. kawasan pertambangan	√				
	4. kawasan industri	√				
	5. kawasan pariwisata	√				
	6. kawasan permukiman	√				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah	√				
14.b.	Indikasi program pemanfaatan struktur ruang, pada:					
	a. sistem perKabupatenan;	√				Pada Bab 2 mulai halaman 133, terdapatnya atau tersedianya hasil telaah RTRW Kabupaten Aceh Jaya
	b. sistem jaringan transportasi;	√				
	c. sistem jaringan energi;	√				
	d. sistem jaringan telekomunikasi;	√				
	e. sistem jaringan sumber daya air;	√				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah memperhatikan RPJPD daerah lainnya	√				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan RTRW Provinsi	√				
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan RTRW Nasional	√				
18	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah telah memperhatikan RTRW daerah lainnya	√				
19	Pelaksanaan forum konsultasi publik	√				1- Undangan Konsultasi Publik terhadap Ranwal RPJPD Kabupaten Aceh Jaya periode 2025-2045, Nomor Surat : 000.7.2/270/2023 Tanggal 28 Desember 2023 2-Notulensi Masukan dan Usulan program pembangunan dari pihak pemangku kepentingan dalam forum KP
20	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD	√				
21	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.	√				Bab V
22	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.	√				Bab V
23	Musrenbang RPJPD daerah menyepakati:	√				
23.a.	Penajaman visi dan misi daerah;	√				Bab IV mulai hal 207
23.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;	√				
23.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah	√				
23.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah;	√				
23.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan daerah.	√				Penetapan Qanun RPJPK Aceh Jaya Tahun 2025-2045
24	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJPD	√				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Ket
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Seesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
25	Penyusunan rancangan akhir	√				
26	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten lainnya	√				
27	Rancana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten lainnya	√				
28	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi	√				
29	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional	√				
30	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi	√				
31	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional	√				
32	Penyusunan RPJPD provinsi dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri	√				
33	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD Kabupaten.	√				
34	Dokumen RPJPD Kabupaten yang telah disahkan	√				

Aceh Jaya, 30 Juli 2024
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ACEH JAYA

BAPPEDA

RAHMAD FUADI, S.T., M.T
NIP. 19840507 201001 1001

GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 000.7/ 651 /2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2045

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota untuk menguji kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan surat Bupati Aceh Jaya Nomor 188.342/46/2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
2. Surat Bupati Aceh Jaya Nomor 188.342/46/2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya;
3. Berita Acara Hasil Evaluasi Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 tanggal 18 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Aceh Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan tetap menetapkan Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 menjadi Qanun, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : .../3

KEEMPAT : Bupati Aceh Jaya wajib menyampaikan Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Qanun.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Februari 2025
28 Sya'ban 1446

GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
4. Sekretaris Daerah Aceh;
5. Bupati Aceh Jaya;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;
8. Inspektur Aceh;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
10. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya.-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 000.7/651/2025
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2045.----------

HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025-2045

A. RANCANGAN QANUN

1. Konsiderans menimbang disempurnakan menjadi "bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045".

B. DOKUMEN

1. PENDAHULUAN

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
1	Latar Belakang	Memuat gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJPD Tahun 2025-2045.	Sesuai	-
2	Dasar Hukum	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.	Belum Sesuai	- Menambahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
				Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Regulasi atau peraturan perundang-undangan level provinsi (Qanun/Perda) seperti Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6). - Menambahkan Qanun tentang Perikanan Nomor 1 Tahun 2020
3	Hubungan Antar Dokumen	Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN dan RPJPA Tahun 2025-2045 dan RTRW serta dokumen perencanaan lainnya.	Belum Sesuai	Menyempurnakan kembali narasi hubungan antar dokumen sehingga tidak hanya menjelaskan secara konsep namun memberikan penekanan secara aplikatif serta menambahkan keterkaitan dengan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 dan dokumen perencanaan sektoral lainnya seperti dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
4	Maksud dan Tujuan	Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.	Sesuai	-
5	Sistematika	Memuat dan menjelaskan struktur dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.	Sesuai	-

2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
1	Aspek Geografi dan Demografi	Menjelaskan peran strategis daerah, potensi SDA serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim serta menjelaskan karakteristik demografi daerah.	Belum Sesuai	- Melengkapi data yang tidak konsisten Jumlah, Laju Pertumbuhan, Kepadatan, Persentase dan Sex Ratio Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007-2023 (minimal 10 tahun terakhir);

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
				- Menambahkan data per wilayah untuk laju pertumbuhan penduduk, rasio dan kepadatan penduduk tahun terakhir (2023); - Menambahkan data *depedency ratio* periode 2007-2023 (jika tersedia); - Dalam penyajian berbagai data dan informasi pembangunan secara ideal disajikan secara *time series* dalam 4 (empat) periode waktu yaitu 2005, 2010, 2015 dan 2022/2023, namun dalam proses penyusunannya tidak semua data tersedia sehingga perlu disampaikan beberapa kondisi sebagai berikut (a) data dan informasi awal yang tidak disajikan pada Tahun 2005 agar diberikan keterangan "data awal", (b) data dan informasi akhir yang tidak disajikan pada Tahun 2022/2023 agar diberikan keterangan "data termutakhir", (c) data dan informasi yang hanya didapatkan dari akhir masa periodesasi RPJMD sebelum RPJP ini disusun maka perlu disajikan data dan informasi *time series* periode 2018-2022/2023 atau menyesuaikan dengan ketersediaan data; - Penyajian tabel piramida penduduk agar dapat dicermati kembali berbasis gender.
2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi dan sosial budaya.	Belum Sesuai	- Melengkapi data yang tidak konsisten disajikan pada setiap tabel dan gambar (minimal data *time series* 10 tahun terakhir); - Menambahkan narasi atau penjelasan terkait permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); - Pada narasi terkait Indeks Pembangunan Manusia agar dapat diclaborasi kembali komponen-komponen pembentuk yang masih bisa ditingkatkan sehingga penyajian capaian lebih komprehensif dan konsisten dengan permasalahan dan kebijakan yang akan ditempuh pada bab selanjutnya; - Data terkait capaian pada bidang kesehatan agar dapat disajikan dalam bentuk grafik dan tabel sehingga mudah untuk dilihat dan dianalisis dengan melengkapi narasi yang menjelaskan aspek tersebut.

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
				- Melengkapi data capaian IPM berbasis gender sehingga dapat disesuaikan dengan kebijakan pada bab selanjutnya.
3	Aspek Daya Saing	Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan; menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah; menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur dan kondisi iklim investasi di daerah.	Belum Sesuai	- Melengkapi data yang tidak konsisten disajikan pada setiap tabel dan gambar (minimal data *time series* 10 tahun terakhir); - Penyajian data APS, APM, dan APK agar dapat menyajikan narasi terkait perkembangan dan capaian yang ada, sehingga lebih mendukung terkait kebijakan dan strategi pada bab selanjutnya. - Menyajikan data dayah yang sudah terakreditasi sampai dengan Tahun 2023 dan dilengkapi dengan narasi . - Menambahkan data perikanan tangkap dan perikanan budidaya, Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Petani (NTP) pada aspek daya saing ekonomi daerah; - Menambahkan data Indeks Daya Saing Daerah pada aspek daya saing iklim investasi; - Dalam penyajian berbagai data dan informasi pembangunan secara ideal disajikan secara *time series* dalam 4 (empat) periode waktu yaitu 2005, 2010, 2015 dan 2022/2023, namun dalam proses penyusunannya tidak semua data tersedia sehingga perlu disampaikan beberapa kondisi sebagai berikut (a) data dan informasi awal yang tidak disajikan pada Tahun 2005 agar diberikan keterangan "data awal", (b) data dan informasi akhir yang tidak disajikan pada Tahun 2022/2023 agar diberikan keterangan "data termutakhir", (c) data dan informasi yang hanya didapatkan dari akhir masa periodesasi RPJMD sebelum RPJP ini disusun maka perlu disajikan data dan informasi *time series* periode 2018-2022/2023 atau menyesuaikan dengan ketersediaan data. - Pada pembahasan terkait syariat Islam agar dapat menggunakan survey yang telah dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam dan tidak hanya terbatas pada

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
				pelanggaran syariat Islam. - Menambahkan data capai pada sektor tanaman pangan dan perkebunan yang belum ada. - Narasi sektor perdagangan hanya menceritakan tentang kontribusi sektor perdagangan saja tanpa menjelaskan tentang apa yang menjadi transaksi perdagangan di daerah. - Menambahkan data baik tabel dan narasi terkait pelaku usaha perdagangan, jumlah pasar tradisional, pasar modern dan lainnya yang mendukung. - Menambahkan narasi sektor industri perlu adanya penambahan tentang perkembangan SIKIM (Sentra Industri Kecil Menengah) yang ada di daerah baik tentang perkembangan sekarang maupun pengembangan ke depan. - Menambahkan narasi dan data untuk memperkaya dokumen yaitu jumlah IKM, jumlah industri besar, pertumbuhan industri pengolahan. - Menyesuaikan kembali narasi terkait jalan dimana jika mengacu pada data teknis jalan DD1, kondisi rusak sedang diganti dengan kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat.
4	Aspek Pelayanan Umum	Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan umum.	Belum Sesuai	- Menambahkan data kondisi tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan umum seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan indikator lainnya yang sesuai dengan konteks daerah. - Jika tidak tersedia indikator-indikator sebagaimana dimaksud di atas, dapat digunakan indikator proksi (pengganti) yang relevan atau sesuai dengan kondisi daerah; - Menambahkan narasi terkait pelabuhan sungai dan menyajikan tabel yang diperlukkan; - Dalam penyajian berbagai data dan informasi pembangunan secara ideal disajikan secara *time series* dalam 4 (empat) periode waktu yaitu 2005, 2010, 2015

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
				dan 2022/2023, namun dalam proses penyusunannya tidak semua data tersedia sehingga perlu disampaikan beberapa kondisi sebagai berikut (a) data dan informasi awal yang tidak disajikan pada Tahun 2005 agar diberikan keterangan "data awal", (b) data dan informasi akhir yang tidak disajikan pada Tahun 2022/2023 agar diberikan keterangan "data termutakhir", (c) data dan informasi yang hanya didapatkan dari akhir masa periodesasi RPJMD sebelum RPJP ini disusun maka perlu disajikan data dan informasi *time series* periode 2018-2022/2023 atau menyesuaikan dengan ketersediaan data.
5	Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2025	Menguraikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.	Sesuai	-
6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	Proyeksi kependudukan dan kebutuhan sarana prasarana per lima tahun hingga 2045.	Sesuai	- Menyesuaikan kembali atau disusun juga strategi khusus penanganan masalah yang ada di daerah dengan menyajikan rencana kebutuhan sarana dan sesuai dengan bab selanjutnya.
7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	Menguraikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis.	Sesuai	- Menyajikan arah pengembangan sarana dan prasarana berbasis daerah kawasan pada daerah penanganan .

3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
1	Permasalahan	Menguraikan permasalahan utama yang menghambat pembangunan.	Belum Sesuai	- Menambahkan penyajian sandingan permasalahan daerah, nasional dan kabupaten. - Merumuskan atau memilah kembali permasalahan sehingga syariat Islam dan kearifan budaya lokal serta tata kelola menjadi satu permasalahan tersendiri; - Mencermati kembali semua permasalahan yang disajikan sesuai dengan data capaian pada bab II sebelumnya. - Permasalahan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal dapat disajikan dengan menyajikan berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. - Permasalahan terkait Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal dapat dinarasikan dengan dukungan data yang lebih mendukung

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
				permasalahan.
2	Isu Strategis Daerah	Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah.	Belum Sesuai	- Dalam penyampaian isu agar dapat menyajikan dan menjelaskan isu global terlebih dahulu, kemudian isu nasional seperti perubahan iklim dan dilanjutkan dengan yang ada di daerah. - Terkait capaian dari infrastruktur yang belum optimal pada bab sebelumya agar dapat dimunculkan sehingga konsisten dengan bab sebelumnya. - Narasi terkait kualitas dan daya saing yang masih rendah agar dapat didukung dengan menambah data capaian pada bab sebelumnya. - Menjelaskan secara lengkap dasar perumusan isu untuk masing-masing isu strategis Provinsi Aceh (masih disajikan dalam poin per poin saja).

4. VISI DAN MISI

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
1	Visi Daerah 2025-2045	Kondisi daerah yang diinginkan pada 2045.	Belum Sesuai	- Agar dalam penyajian visi daerah dapat disajikan juga visi Nasional dan Provinsi dan disandingkan dengan daerah. - ~~Menyesuaikan kembali visi Aceh Tahun 2025-2045 menjadi Aceh Islami, Maju dan Berkelanjutan.~~
2	Sasaran Visi Daerah 2025-2045	Indikator dan target sasaran visi yang diinginkan pada 2045.	Belum Sesuai	- Menyesuaikan kembali target sasaran visi dalam upaya mendukung pencapaian target Pemerintah Aceh berdasarkan juga tren pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya.
3	Misi Daerah 2025-2045	Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi daerah.	Sesuai	- Mencermati kembali penyajian narasi pada misi dengan memperhatikan penyajian data-data capaian dan permasalahan pada bab sebelumnya.

5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
1	Arah Kebijakan	Memuat kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.	Belum Sesuai	- Pada tabel 5.1 dapat disesuaikan kembali dengan narasi yang disajikan seseuai dengan tabel yang disampaikan. - Pada pembahasan arah kebijakan agar dapat disandingkan pada misi yang ditetapkan. - Agar pada penyajian menghapus nama OPD dan digantikan

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
				dengan bidang urusan. - Merumuskan arah kebijakan pembangunan per tahapan RPJPD Tahun 2025-2045, per misi per arah pembangunan sebagaimana contoh: A. Arah Kebijakan Tahap 1 (2025-2029); A.1. Transformasi Sosial, menguraikan arah kebijakan transformasi sosial secara umum. A.1.1. Kesehatan Untuk Semua, menguraikan arah kebijakan secara spesifik (dapat merujuk pada arah kebijakan transformasi Buku 2 Lampiran SEB atau dapat disesuaikan dengan kondisi daerah). A.1.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata, menguraikan arah kebijakan secara spesifik (dapat merujuk pada arah kebijakan transformasi Buku 2 Lampiran SEB atau dapat disesuaikan dengan kondisi daerah). A.1.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif, menguraikan arah kebijakan secara spesifik (dapat merujuk pada arah kebijakan transformasi Buku 2 Lampiran SEB atau dapat disesuaikan dengan kondisi daerah). - Dstnya.
2	Sasaran Pokok	Memuat gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi daerah dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.	Belum Sesuai	- Pada tabel 5.2 terkait penentuan target agar dapat memperhatikan kembali trend pemcapaian yang telah ada (contoh: prevalensi *stunting*); - Memperhatikan kembali penentuan target pada permasalahan kecukupan air disesuaikan dengan rasio terhadap panen dan irigasi yang ada di daerah; - Menyesuaikan kembali target akses rumah tangga sanitasi layak yang berkaitan dengan target *stunting;* - Pada tabel 5.30 IE 15 dan disesuaikan kembali antara sanitasi layak dan sanitasi aman; - Menyesuaikan tabel yang disampaikan sesuai dengan

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
				Inmendagri tentang Penyusunan RPJP; - Menambahkan Tabel 5.2 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai dasar dalam perumusan sasaran pokok; - Menyesuaikan kembali penyajian tabel sasaran pokok sesuai dengan Tabel 5.3 Sasaran Pokok dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; - Nomenklatur, jumlah, *baseline* dan target Indikator Utama Pembangunan (IUP) tidak harus sesuai dengan SEB, dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah/proksi.

6. PENUTUP

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi
1	Penutup	Memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.	Belum Sesuai	- Menambahkan analisis manajemen risiko dengan menitikberatkan pada kontekstual dan praktik di daerah sehingga hal tersebut dapat ditindaklanjuti dan dikawal dengan komitmen yang kuat sebagai upaya untuk menjaga pencapaian kondisi transformasi daerah di Tahun 2045. - Menambahkan uraian terkait kaidah pelaksanaan, pendanaan dan pembiayaan pembangunan, kerangka pengendalian dan evaluasi, serta mekanisme perubahan.

GUBERNUR ACEH

MUZAKIR MANAF

BUPATI ACEH JAYA

Calang, 15 April 2025 M
16 Syawal 1446 H

Nomor : 000.7.2.1/392/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : ***Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun RPJP Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045***

Yang Terhormat :
Gubernur Aceh
c/q. Kepala Bappeda Aceh
di-
Tempat

1. Sehubungan dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 000.7/651/2025 Tanggal 27 Februari 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 yang kami terima pada tanggal 9 April 2025;

2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan tindaklanjut hasil evaluasi Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045 sebagaimana terlampir;

3. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Bupati Aceh Jaya

SAFWANDI, S.Sos

Tembusan :
1. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
4. Kepala BPKK Kabupaten Aceh Jaya di Calang; dan
5. Arsip.

Lampiran Surat Bupati Nomor : 000.7.2.1/842/2025
Tanggal 15 April 2025

Matriks Tindak lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 - 2045

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Hal	Keterangan
					Ya	Tidak		
I	Rancanngan Qanun			Konsederan menimbang disempurnakan menjadi bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 13 ayat (2) Undang - undang nomor 25 tahun 2024 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan pasal 264 ayat (1) Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang - undang perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Acwh Jaya Tahun 2025-2045.	V		1	Konsederan Menimbang Poin C
II	Dokumen							
A	Pendahuluan							
1	Latar Belakang	memuat gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJPD Tahun 2025-2045	Sesuai	-		V		Telah Sesuai

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Hal	Keterangan
					Ya	Tidak		
2	Dasar Hukum	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJPD tahun 2025-2045	Belum sesuai	Menambahkan Undang - undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang - Undang nomor 59 tahun 2024 Tentang RPJPN Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Regulasi atau Peraturan Perundang undangan level provinsi (Qanun/Perda) seperti Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok - pokok Stariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68); Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Mintak dan Gas bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 nomor 6) Menambahkan Qanun tentang Perikanan nomor 1 Tahun 2020.	V		Bab I Hal '9-10	telah ditambahakn pada Poin K, L, M, bb, cc dan ee
3	Hubungan antar dokumen	Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN dan RPJPA Tahun 2025-2045 dan RTRW serta Dokumen Perencanaan Lainnya	Belum sesuai	Menyempurnakan kembali narasi hubungan antar dokumen sehingga tidak hanya menjelaskan secara konsep namun memberikan penekanan secara aplikatif serta menambahkan keterkaitan dengan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 dan dokumen perencanaan sektoral lainnya seperti dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	V		Bab I hal '11-13	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
4	maksud dan tujuan	Menjelaskan maksud dan tujuan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045	Sesuai	-				Sesuai
5	Sistematika	Memuat dan Menjelaskan struktur dokumen RPJPD Tahun 2025-2045	Sesuai	-				Sesuai

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Hal	Keterangan
					Ya	Tidak		
B	**Gambaran Umum Kondisi Daerah**							
1	Aspek Geografi dan Demografi	Menjelaskan peran strategis derah , Potensi SDA, serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim serta menjelaskan karakteristik demografi daerah	Belum Sesuai	Melengkapi Data yang tidak konsisten jumlah , Laju Pertumbuhan, Kepadatan, Persentase dan Sex Rasio menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2007-2023 (minimal 10 Tahun terakhir);	V		Bab 2 Hal 32-35	Telah disesuaikan pada beberapa tabel berdasarkan Rekomendasi
				Menambahkan Data Per wilayah untuk laju pertumbuhan penduduk, rasio dan kepadatan penduduk tahun terakhir (2023);	V		Bab 2 Hal 35	Tabel 2.13
				Menambahkan Data depedency ratio periode 2007-2023 (jika tersedia);	V		Bab 2 Hal 36	Gambar 2.6
				Dalam penyajian berbagai Data dan Informasi pembangunan secara ideal disajikan secara time series dalam 4 (empat) periode waktu yaitu 2025, 2010, 2015, dan 2022/2023, namun dalam proses penyusunannya tiddak semua data tersedia sehingga perlu disampaikan beberapa kondisi sebagai berikut (a) data dan informasi awal yang tidak disajikan pada tahun 2005 agar diberikan keterangan "data awal" (b). Data dan informasi akhir yang tidak disajikan pada tahun 2022/2023 agar diberikan keterangan "Data termutakhir" (c). data dan informasi yang hanya didapatkan dari akhir massa periodesasi RPJMD sebelum RPIPD ini disusun maka perlu disajikan data dan informasi time serries periode 2018-2022/2023 atau menyesuaikan dengan ketersediaan data;	V		Bab 2	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Penyajian tabel piramida penduduk agar dapat dicermati kembali berbasis gensder.	V		Bab 2 Hal 37	Gambar 2.7
2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Menjelaskan Karakteristik Kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi dan sosial budaya	Belum Sesuai	Melengkapi data yang tidak konsisten disajikan pada setiap tabel dan gambar (minimal data time series 10 tahun terakhir)	V		Bab 2	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi sesuai dengan data yang tersedia
				Menambahkan narasi atau penjelasan terkait permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	V		Bab 2 Hal 44-45	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Hal	Keterangan
					Ya	Tidak		
				pada narasi terkait indeks Pembangunan Manusia agar dapat dielaborasi komponen - komponen pembentuk yang masih bisa ditingkatkan sehingga penyajian capaian lebih komprehensif dan konsisten dengan permasalahan dan kebiajakan yang akan ditempuh pada Bab selanjtnya.	V		Bab 2 Hal 46	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Data terkait capaian pada Bidang kesehatan agar dapat disajikan dalam bentuk grafik dan tabel sehingga mudah untuk dilihat dan dianalisis dengan melengkapi narasi yang menjelaskan apek tersebut.	V		Bab 2 Hal 49-53	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Melengkapi data capaian IPM berbasis gender sehingga dapat disesuaikan dengan kebijakan pada Bab selanjutnya	V		Bab 2 Hal 46-47	Tabel 2.16
3	Aspek Daya Saing	Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan , menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur dan kondisi iklim investasi di daerah	Belum Sesuai	Melengkapi data yang tidak konsiten disajikan pada setiap tebel dan gambar (minimal data time series 10 tahun terakhir)	V			Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi sesuai dengan data yang tersedia
				Penyajian data APS, APM dan APK agar dapat menyajikan narasi terkait perkembangan dan capaian yang ada sehingga lebih mendukung terkait kebijakan dan strategi pada bab selanjutnya.	V		Bab 2 Hal 65-67	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Menyajikan data dayah yang sudah terakreditasi sampai dengan tahun 2023 dan dilengkapi dengan narasi	V		Bab 2 Hal 82-83	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Menambahkan data perikanan tangkap dan perikanan budidaya , nilai tukar nelayan (NTN), Nilai tukat petani (NTP) pada aspek daya saing daerah	V		Bab 2 Hal 62	Data Produksi telah disesuaikan namun untuk NTP dan NTN tidak tersedia Data (data level Provinsi)
				Menambah data Indeks Daya Saing Daerah pada aspek daya saing iklim investasi	V		Bab 2 Hal 77	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Hal	Keterangan
					Ya	Tidak		
				Dalam penyajian berbagai data dan informasi pembangunan secara ideal disajikan secara time series dalam 4 (empat) periode waktu yaitu 2025, 2010, 2015 dan 2022/2023, namun dalam proses penyusunannya tidak semua data tersedia sehingga perlu disampaikan beberapa kondisi sebagai berikut (a) data dan informasi awal yang tidak disajikan pada tahun 2005 agar diberikan keterangan "data awal" (b). Data dan informasi akhir yang tidak disajikan pada tahun 2022/2023 agar diberikan keterangan "Data termutakhir" (c). data dan informasi yang hanya didapatkan dari akhir massa periodesasi RPJMD sebelum RPJPD ini disusun maka perlu disajikan data dan informasi time serries periode 2018-2022/2023 atau menyesuaikan dengan ketersediaan data;	V		Bab 2	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi sesuai dengan data yang tersedia
				Pada pembahasan terkait Syariat Islam agar dapat menggunakan survei yang telah dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam dan tidak hanya terbatas pada pelanggaran syariat islam	V		Bab 2 Hal 80	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Menambahkan data capaian pada sektor tanaman pangan dan perkebunan yang belum ada	V		Bab 2 Hal 58-60	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Narasi sektor perdagangan hanya menceritakan tentang kontribusi sektor perdagangan saja tanpa menjelaskan tentang apa yang menjadi transaksi perdagangan di daerah	V		Bab 2 Hal 62-63	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Menambahkan data baik tabel dan narasi terkait pelaku usaha perdagangan , jumlah pasar tradisional , pasar modern dan lainnya yang mendukung	V		Bab 2 Hal 63	Tabel 2.26
				Menambahkan narasi sektor industri perlu adanya penambahan tentang perkembangan SIKIM (Sentra Industri Kecil Menengah) yang ada di daerah baik tentang perkembangan sekarang maupun pengembangan ke depan.	V		Bab 2 Hal 64	
				Menambah narasi dan data untuk memperkaya dokumen yaitu jumlah IKM, jumkah idustri besar, pertumbuhan industri pengelohan	V		Bab 2 Hal 64	Gambar .2.27

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Hal	Keterangan
					Ya	Tidak		
				Menyesuaikan kembali narasi terkait jalan dimana jika mengacu pada data teknis jalan DDI, kondisi rusak sedang diganti dengan kondisi baik, sedang ,rusak ringan dan rusak berat.	V		Bab 2 Hal 74-75	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
4	Aspek Pelayanan umum	Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan umum	Belum Sesuai	Menambahkan data kondisi tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan umum seperti Indeks Reformasi Birokrasi , Indeks Pelayanan publik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik dan indikator lainnya yang sesuai dengan konteks daerah	V		Bab 2 Hal 113-114	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Jika tidak tersedia indikator - indikator sebagaimana dimaksud di atas, dapat digunakan indikator proksi (pengganti) yang relevan atau sesuai dengan kondisi daerah	V		Bab 2	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi sesuai dengan data yang tersedia
				Menambahkan narasi terkait pelabuhan sungai dan menyajikan tabel yang diperlukan	V		Bab 2	Tidak ada pelabuhan sungai sehingga tidak tersedia data
				Dalam penyajian berbagai data dan informasi pembangunan secara ideal disajikan secara time series dalam 4 (empat) periode waktu yaitu 2025, 2010, 2015 dan 2022/2023, namun dalam proses penyusunannya tidak semua data tersedia sehingga perlu disampaikan beberapa kondisi sebagai berikut (a) data dan informasi awal yang tidak disajikan pada tahun 2005 agar diberikan keterangan "data awal" (b). Data dan informasi akhir yang tidak disajikan pada tahun 2022/2023 agar diberikan keterangan "Data termutakhir" (c). data dan informasi yang hanya didapatkan dari akhir massa periodesasi RPJMD sebelum RPJPD ini disusun maka perlu disajikan data dan informasi time serries periode 2018-2022/2023 atau menyesuaikan dengan ketersediaan data;	V		Bab 2	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi sesuai dengan data yang tersedia
5	Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2025	Menguraikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi	Sesuai			V		Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Hal	Keterangan
					Ya	Tidak		
6	Tren Demografi dan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Proyeksi kependudukan dan kebutuhan sarana prasarana per lima tahun hingga 2025	Sesuai	Menyesuaikan kembali atau disusun juga strategi khusus penanganan masalah yang ada di saerah dengan menyajikan rencana kebutuhan sarana dan sesuai dengan bab selanjtunya		V		Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	Menguraikan pusat - pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program / proyek strategis	Sesuai	Menyajikan arah pengembangan sarana dan prasarana berbasis daerah kawasan pada daerah penanganan		V		Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
C	**Permasalahan dan Isu Strategis**							
1	Permaslahan	Menguraikan permasalahan utama yang menghambat pembangunan	Belum Sesuai	Menambahkan penyajian sandingan permasalahan daerah, nasional dan kabupaten	V		Bab 3 Hal 212	Tabel 3.1
				Merumuskan atau memilah kembali permasalahan sehingga Syariat Islam dan kearifan budaya lokal serta tata kelola menjadi permasaahan sendiri	V		Bab 3 Hal 224-228	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Mencermati kembali semua permasalahan yang disajikan sesuai dengan data capaian pada BAB II sebelumnya	V		Bab 3	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Permasalahan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal dapat disajikan dengan dengan menyajikan berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanaan dalam mengatasi masalah tersebut	V		Bab 3 Hal 213-217	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Permasalahan terkait tata kelola pemerintahan belum optimal dapat dinarasikan dengan dukungan data yang lebih mendukung permasalahan	V		Bab 3 Hal 224-227	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
2	Isu Strategis Daerah	Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah	Belum Sesuai	Dalam pemyampaian isu agar dapat menyajikan dan menjelaskan isu global terlebih dahulu, kemudian isu nasional seperti perubahn iklim dan dilanjutkan dengan yang ada di daerah	V		Bab 3 Hal 231-250	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Terkait capaian dari infrastruktur yang belum optimal pada Bab sebelumnya agar dapat dimunculkan sehingga konsiusten dengan Bab sebelumnya	V		Bab 3 Hal 248	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Narasi terkait kualitas dan daya saing yang masih rendah agar dapat didukung dengan menambah data capaian pada Bab sebelumnya	V		Bab 3 Hal 249	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Hal	Keterangan
					Ya	Tidak		
				Menjelaskan secara lengkap dasar perumusan isu untuk masing - masing isu strategis Provinsi Aceh (masih disajikan dalam poin per poin saja)	V		Bab 3 Hal 240-245	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
D	**Visi dan Misi**							
1	Visi Daerah 2025 -2045	Kondisi Daserah yang diinginkan pada tahun 2045	Belum Sesuai	Agar dalam penyajian Visi daerah dapat disajikan juga Visi nasional dan Provinsi dan disandingkan dengan Daerah	V		Bab 4 Hal 252	Tabel 4.1
2	Sasaran Visi Daerah 2025-2045	Indikator dan Target Sasaran Visi yang diinginkan pada tahun 20245	Belum Sesuai	Menyesuaikan kembali target sasaran visi dalam upaya mendukung pencapaian target Pemerintah Aceh berdasarkan juga tren pencapaian pada tahun - tahun sebelumnya	V		Bab 4 Hal 253	Tabel 4.2
3	Misi Daerah	Upaya - upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi daerah	Sesuai	Mencermati kembali penyajian narasi pada misi dengan memperhatikan penyajian data - data capaian dan permasalahan pada Bab sebelumnya		V		Telah Sesuai
E	**Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok**							
1	Arah Kebijakan	Memuat kerangka kerja Pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi Daerah	Belum sesuai	Pada Tabel 5.1 dapat disesuaikan kembali dengan narasi yang disajikan sesuai dengan tebel yang disampaikan.	V		Bab 5 Hal 259-270	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Pada pembahasan arah kebijakan agar dapat disandingkan pada misi yang ditetapkan	V		Bab 5 Hal 265-270	Tabel 5.1
				Agar pada penyajian menghapus nama OPD dan digantikan dengan Bidang Urusan	V		Bab 5 Hal 273-300	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Merumuskan arah kebijakan pembangunan per tahapan RPJPD Tahun 2025-2045, per Misi per Arah Pembangunan sebagaimana contoh :	V		BAB 5	Tabel 5.3 dan 5.4
				A. Arah kebijakan Tahap I (2025-2029) :	V		BAB 5	Tabel 5.3 dan 5.4
				A.1. Transformasi Sosial, menguraikan arah kebijakan tranformasi sosial secara umum				
				A.1.1. Kesehatan untuk semua, menguraikan arah kebijakan secara spesifik (dapat merujuk pada arah kebijakan tranformasi Buku 2 Lampiran SEB atau dapat disesuaikan dengan kondisi Daerah)				

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Hal	Keterangan
					Ya	Tidak		
				A.1.2. Pendidikan berkualitas yang merata, menguraikan arah kebijakan secara spesifik, (dapat merujuk pada arah kebijakan tranformasi Buku 2 Lampiran SEB atau dapat disesuaikan dengan kondisi Daerah)				
				A.1.3. Perlindungan Sosial yang adaptif, menguraikan arah kebijakan secara spesifik (dapat merujuk pada arah kebijakan tranformasi Buku 2 Lampiran SEB atau dapat disesuaikan dengan kondisi Daerah)				
				Dst				
2	Sasaran Pokok	Memuat gambaran rangkaian kinerja daerah dan pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi Daerah dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif	Belum sesuai	Pada Tabel 5.2 terkait penentuan target agar dapat memperhatikan kembali trend pencapaian yang telah ada (contoh : prevelensi stunting)	V		Bab 5	Tabel 5.5
				Memperhatikan kembali penentuan target pada permasalahan kecukupan air disesuaikan dengan rasio terhadap panen dan irigasi yang ada di Daerah	V		Bab 5	Tabel 5.5
				Menyesuaikan kembali target akses rumah tangga sanitasi layak yang berkaitan dengan target stunting	V		Bab 5	Tabel 5.5
				Pada tabel 5.30 IE 15 dan disesuaikan kembali antara sanitasi layak dan sanitasi aman	V		Bab 5	Tabel 5.5
				Menyesuaikan tabel yang disampaikan sesuai dengan Inmendagri tentang penyusunan RPJP				
				Menambahkan tabel 5.2 kertas kerja perumusan sasaran pokok sesuai dengan isnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai dasar dalam perumusan sasaran pokok	V		Bab 5	Tabel 5.4
				Menyesuaikan kembali penyajian tabel sasaran pokok sesuai dengan tabel 5.3 sasaran pokok dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045	V		Bab 5	Tabel 5.5

No.	Sistematika	Kriteria	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Hal	Keterangan
					Ya	Tidak		
				Nomenklatur, Jumlah, baseline dan target indikator utama pembangunan (IUP) tidak harus/proksius sesuai dengan SEB, dapat disesuaikan dengan karakteristik Daerah	V		Bab 5	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi sesuai dengan data yang tersedia
F	Penutup							
1	Penutup	Memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari	Belum sesuai	Menambahkan analisis manajemen risiko dengan menitikberatkan pada kontekstual dan praktik di daerah sehingga hal tersebut dapat ditindaklanjuti dan dikawal dengan komitmen yang kuat sebagai upaya untuk menjaga pencapaian kondisi tranformasi daerah di tahun 2045	V		Bab 6 Hal 368-369	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi
				Menambahkan uraian terkait kaidah pelaksanaan, pendanaan dan pembiyaan pembangunan, kerangka pengendalian dan evaluasi, serta mekanisme perubahan	V		Bab 6	Telah disesuaikan berdasarkan Rekomendasi

PLT. KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN ACEH JAYA

TEUKU ZHARULLAH, SE.,M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19720701 1 001

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Banda Aceh, 28 April 2025
29 Syawal 1446

Nomor : 100.3/4805
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Pemberian Nomor Register Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang RPJP Kab Aceh Jaya Tahun 2025-2045**

Yth. Bupati Aceh Jaya
di –
Calang

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 188.342/14/2025 tanggal 24 April 2025 perihal Permohonan Nomor Register Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya dan berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini telah dilakukan register di Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

   NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (1/27/2025)
2. Nomor register tersebut di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah rancangan qanun dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka I huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan apabila telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi Gubernur Aceh.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, agar Saudara menyampaikan qanun dimaksud kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
5. Demikian, dan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH ACEH
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BIRO HUKUM

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
Nip. 19730603 200312 1 003

Tembusan :
1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Jaya.

IGD